

NASKAH AKADEMIK

2023



*REVIU RIPPARKAB
KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2016-2025*



NASKAH AKADEMIK

2023

REVIU RIPPARKAB KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2025

TIM PENYUSUN:

Abadi Raksapati, S.S, M.Sc.

Muhammad Dhaifan Akbar, S.T., M.Sc.

Mustika Ratna Dewi, S.Tr.Par., M.Par.

Prof. Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat Putro, DEA.

Panji Ardiansyah. S.Sos.

Ersalora Lutfianti, S.Par., M.P.Par.

Fithria Khairina Damanik, S.T., M.P.Par.

Intan Nurhayat, S.Par.

(Ahli Pariwisata/Ketua Tim)

(Ahli Perencana Wilayah dan Kota)

(Ahli Kelembagaan Pariwisata)

(Ahli Transportasi)

(Ahli Sosial Budaya)

(Ahli Manajemen Destinasi Pariwisata)

(Ahli Perencanaan Kepariwisataaan)

(Asisten Ahli Pariwisata)



KATA PENGANTAR

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pariwisata bersama dengan Pusat Perencanaan dan Pengembangan Kepariwisata (P-P2Par) Institut Teknologi Bandung melakukan penyusunan Reviu Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) Kutai Kartanegara yang dilengkapi dengan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah Ripparkab Kutai Kartanegara. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan pembangunan kepariwisataan yang dapat menjawab tantangan nasional maupun global untuk menjadikan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara strategis di tingkat nasional.

Dokumen Naskah Akademik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan Ripparkab Kutai Kartanegara yang terdiri dari Laporan Pendahuluan, *Draft* Laporan Akhir, Laporan Akhir, dan Naskah Akademik. Naskah Akademik ini disusun dengan memperhatikan struktur penulisan dan pertimbangan akademik serta mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka dokumen ini terdiri dari enam bab yaitu Pendahuluan; Kajian Teoritis dan Praktik Empiris; Evaluasi Peraturan Perundangan Terkait; Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis; Jangkauan, Muatan, dan Arah Pengaturan Perda Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Ripparkab; serta Penutup.

Dokumen Naskah Akademik ini juga dilengkapi lampiran berupa Draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) Kutai Kartanegara Tahun 2026-2045.

Ucapan terimakasih kami ucapkan kepada berbagai pihak atas kerjasama, bantuan dan kontribusinya pada penyusunan Naskah Akademik ini. Semoga perencanaan yang dibuat dapat memberikan kontribusi pada upaya pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kutai Kartanegara, Oktober 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1-1
1.1 LATAR BELAKANG	1-1
1.2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	1-3
1.3 TUJUAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK	1-4
1.4 METODOLOGI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK	1-5
1.5 STRUKTUR ISI NASKAH AKADEMIK	1-6
BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	2-1
2.1 KAJIAN TEORITIS	2-1
2.1.1 Pemahaman terhadap Kepariwisata.....	2-1
2.1.2 Perencanaan dan Pembangunan Kepariwisata.....	2-7
2.2 KAJIAN TERHADAP ASAS-ASAS KEPARIWISATAAN DAN PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN	2-1
2.2.1 Asas Pembangunan Kepariwisata.....	2-11
2.2.2 Prinsip-Prinsip Pembangunan Kepariwisata.....	2-12
2.3 KAJIAN KONDISI KEPARIWISATAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.....	2-15
2.3.1 Karakteristik Fisik, Sejarah, Sosial Budaya, dan Ekonomi.....	2-11
2.3.2 Nilai Signifikan Sumber Daya Alam dan Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara.....	2-24
2.3.3 Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Destinasi Pariwisata	2-26
2.3.4 Industri Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.....	2-39
2.3.5 Pasar Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara	2-43
2.3.6 Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara	2-50
2.4 KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN PERDA RIPPARKAB.....	2-60
BAB 3 EVALUASI PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT	3-1
3.1 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI TINGKAT NASIONAL YANG TERKAIT DENGAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	3-1
3.1.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025	3-1
3.1.2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.....	3-3

3.1.3	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	3-3
3.1.4	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)	3-6
3.1.5	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025	3-7
3.1.6	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan	3-9
3.1.7	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024	3-14
3.2	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN KEPARIWISATAAN DI TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR YANG TERKAIT DENGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	3-19
3.2.1	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023	3-20
3.2.2	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036	3-21
3.2.3	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Timur	3-28
3.3	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN KEPARIWISATAAN DALAM LINGKUP KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	3-31
3.3.1	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 2013-2033	3-32
3.3.2	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 RPJMD tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	3-39
3.4	KETERKAITAN ANTAR PERATURAN DAERAH RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN PERATURAN PERUNDANGA LAIN	3-41
3.5	DAMPAK PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN LAIN	3-41
BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....		4-1
4.1	LANDASAN FILOSOFIS.....	4-1
4.1.1	Falsafah dan Landasan Pembangunan Kepariwisata	4-1
4.1.2	Asas Pembangunan Kepariwisata.....	4-2
4.1.3	Nilai-Nilai Budaya Kutai Kartanegara	4-3

4.2	LANDASAN SOSIOLOGIS.....	4-6
4.2.1	Masyarakat sebagai Tujuan Pembangunan Kepariwisata.....	4-7
4.2.2	Hak Masyarakat dalam Pariwisata	4-9
4.3	LANDASAN YURIDIS	4-13
4.3.1	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.....	4-13
4.3.2	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	4-14
BAB 5 JANGKAUAN, ARAHAN PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026-2045 5-1		
5.1	JANGKAUAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN (RIPPARKAB) KUTAI KARTANEGARA	5-1
5.2	ARAH PENGATURAN.....	5-2
5.3	RUANG LINGKUP MATERI	5-2
5.3.1	Ketentuan Umum.....	5-3
5.3.2	Muatan Materi Peraturan Daerah	5-5
5.3.3	Ketentuan Penutup	5-33
BAB 6 PENUTUP..... 6-1		
6.1	KESIMPULAN.....	6-1
6.2	SARAN.....	6-2
DAFTAR PUSTAKA.....		vii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tahapan Penyusunan Naskah Akademik Ripparkab Kutai Kartanegara	1-6
Tabel 2.1	Terminologi Wisatawan	2-4
Tabel 2.2	Nama dan Sebaran Daya Tarik Wisata Kabupaten Kutai Kartanegara	2-27
Tabel 2.3	Jenis Usaha Pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023	2-40
Tabel 2.4	Jumlah Tamu Akomodasi di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2022.....	2-44
Tabel 2.5	Sekolah Menengah Kejuruan yang Menyelenggarakan Pendidikan Terkait Pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara	2-51
Tabel 2.6	Daftar Pokdarwis di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2023	2-54
Tabel 3.1	Tabel Indikator dan Target Pembangunan Nasional dalam RPJMN	
Tabel 3.2	Sasaran, Indikator, serta Target Sektor Pariwisata RPJMN 2020-2024	3-17
Tabel 4.1	Hak Masyarakat dalam Pariwisata	4-10
Tabel 5.1	Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara	5-9
Tabel 5.2	KSPK Pariwisata Budaya Masyarakat Adat Tabang – Kembang Janggut dan Sekitarnya.....	5-22
Tabel 5.3	KSPK Ekowisata Danau Melintang-Semayang dan Sekitarnya	5-23
Tabel 5.4	KSPK Pariwisata Sejarah Kerajaan Tertua Muara Kaman dan Sekitarnya.....	5-25
Tabel 5.5	KSPK Pariwisata Sejarah Kerajaan Tenggarong dan Sekitarnya	5-26
Tabel 5.6	KSPK Pariwisata Sejarah Perjuangan Sanga-Sanga – Anggana dan Sekitarnya	5-27
Tabel 5.7	KSPK Ekowisata Bahari Marangkayu – Muara Badak dan Sekitarnya	5-29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Wisata, Pariwisata, dan Kepariwisataaan.....	2-2
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara	2-16
Gambar 2.2	Tonggak Sejarah Kutai Kartanegara	2-16
Gambar 2.3	Peta Sebaran Daya Tarik Wisata dan Sumber Daya Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara	2-26
Gambar 2.4	Diagram Jumlah Tamu Akomodasi di Kabupaten Kutai Kartanegara	2-45
Gambar 2.5	<i>Branding</i> Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara	2-49
Gambar 3.1	Delineasi Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara	3-5
Gambar 3.2	Peta Destinasi Pariwisata Nasional Tenggarong - Balikpapan dan sekitarnya..	3-9
Gambar 3.3	Destinasi Pariwisata Prioritas dalam RPJMN 2020-2024.....	3-19
Gambar 3.4	Peta Pembangunan Perwilayahan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.....	3-31
Gambar 3.5	Hubungan antara Peraturan Daerah tentang Ripparkab Kutai Kartanegara dengan Peraturan Perundangan Lain.....	3-42
Gambar 4.1	Peran Masyarakat dalam mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan	4-8
Gambar 5.3	Peta Struktur Perwilayahan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.....	3-32

BAB 1

PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu kabupaten yang selama ini mendorong pengembangan pariwisata di Kalimantan Timur. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) Kutai Kartanegara disusun saat ini dalam upaya mengantisipasi terhadap berakhirnya dokumen Ripparkab sebelumnya yang perlu dilakukan sedini mungkin agar tidak terjadi kekosongan dokumen kebijakan. Perkembangan geopolitik yang demikian cepat di Kalimantan Timur yaitu dengan ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara Kondisi ini tentu harus direspon dengan cepat dan cerdas oleh Kutai Kartanegara karena merupakan salah satu daerah penyangga Ibu Kota Negara. Dinamika kepariwisataan baik nasional maupun global yang bergerak sangat cepat untuk merespon proses pemulihan pasca Covid-19.

Terjadinya kasus pandemi Covid-19 pada tahun 2020 di Indonesia telah memukul sektor pariwisata demikian hebat. Salah satu dampak yang dapat terlihat adalah dengan menurunnya tingkat kunjungan wisatawan di berbagai daerah tidak terkecuali di Kutai Kartanegara. Data menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan tahun 2020 menurun sebesar 51,17 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meski dampak dari Covid-19 saat ini mulai membaik namun Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut agar kepariwisataan di daerah dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Letak strategis Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu kabupaten yang berada diantara Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan sebagai pusat perekonomian Kalimantan Timur dan Ibu Kota Negara harus mampu dimanfaatkan dengan optimal agar dapat mendatangkan dampak ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu sektor yang dapat didorong agar keuntungan geostrategis tersebut dapat dioptimalkan adalah dengan pengembangan pariwisata. Saat ini Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki beragam daya tarik maupun potensi wisata yang tersebar di berbagai wilayah. Hal ini menjadi modal utama dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Kartanegara ke depan.

Dalam sistem perwilayahan pariwisata nasional sebagaimana disebutkan dalam lampiran 2 Ripparnas, Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi bagian dari Destinasi Pariwisata Nasional Tenggara – Balikpapan dan sekitarnya. Sementara kawasan pariwisata nasional yang

bersinggungan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Tenggarong dan sekitarnya, KPPN Balikpapan-Samboja dan sekitarnya serta Kawasan Strategis Pariwisata nasional (KSPN) Kota Bangun – Tanjung Isuy dan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu destinasi pariwisata yang memiliki peran strategis dalam kepariwisataan nasional yang dibuktikan dengan tiga kawasan pariwisata nasional berada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Saat ini, tengah terjadinya proses politik di tingkat nasional yang akan segera mengganti Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Penggantian ini tentu akan berimbas pada penyesuaian terhadap peraturan dibawahnya termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Ripparnas). Untuk merespon segera berakhirnya masa perencanaan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) Kutai Kartanegara Tahun 2016-2025 ditengah adanya proses perubahan undang-undang kepariwisataan, serta perkembangan dinamika geopolitik dengan adanya pengembangan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur serta perkembangan kepariwisataan baik ditingkat nasional maupun global, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023 menyusun dokumen Ripparkab Kutai Kartanegara yang perlu disahkan agar memiliki kekuatan hukum, serta agar dapat selaras dengan dinamika sosial, politik, maupun pasar wisatawan yang ada saat ini dan masa yang akan datang.

Penyusunan NA ini merupakan landasan bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ripparkab Kutai Kartanegara yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen Naskah Akademik (NA) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyusunan dokumen NA ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota menjelaskan bahwa kelengkapan dokumen Ripparkab untuk proses

penetapan menjadi Peraturan Daerah selain dokumen rencana, harus dilengkapi juga dengan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah. Ketentuan ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

1.2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Maksud Penyusunan Naskah Akademik Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) Kutai Kartanegara adalah menghasilkan kajian akademik yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ripparkab Kutai Kartanegara untuk kurun waktu beberapa tahun kedepan yang mampu memaksimalkan potensi daerah sekaligus mampu mengantisipasi perkembangan dan tantangan kepariwisataan baik di tingkat regional, nasional, dan bahkan global.

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) Kutai Kartanegara bertujuan untuk memasukan berbagai perkembangan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara serta melakukan penyesuaian dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terbaru. Hal ini agar produk Ranperda Ripparkab yang dihasilkan dapat menjadi acuan dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pariwisata merupakan sektor yang memiliki dampak ikutan yang besar sehingga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu pariwisata merupakan instrumen pembangunan yang diharapkan dapat menjadi motor sekaligus simpul pembangunan di daerah. Berkembangnya pariwisata diharapkan dapat mendorong percepatan peningkatan akses baik fisik maupun sosial masyarakat yang ada di berbagai daerah yang selama ini kurang tersentuh proses pembangunan. Namun demikian, pariwisata juga tidak terlepas dari berbagai dampak yang ditimbulkan baik langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan alam, sosial, budaya, ekonomi, hingga keamanan dan politik. Oleh karena itu untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan, maka pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara harus dilakukan dengan perencanaan yang baik dan terintegrasi.

Pelaksanaan pembangunan kepariwisataan yang konsisten dan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara memerlukan komitmen tinggi dari seluruh pemangku kepentingan pariwisata. Komitmen tersebut tertuang dalam bentuk penganggaran yang proporsional guna mendukung pembangunan kepariwisataan, peningkatan sumber daya manusia pariwisata yang berkualitas, serta program pendukung dari sektor lain yang sinergis dengan program pembangunan kepariwisataan.

Penetapan Peraturan Daerah tentang Ripparkab Kutai Kartanegara diharapkan dapat menjadi rujukan serta menjaga konsistensi dan mengikat tanggungjawab seluruh pemangku kepentingan pariwisata dalam melakukan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara kedepan.

1.3 TUJUAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) Kutai Kartanegara bertujuan untuk menghasilkan kajian mengenai pentingnya Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan karakteristik potensi dan permasalahan dalam pembangunan kepariwisataan, serta amanat dan arahan peraturan perundangan dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara. Lebih jauh, Naskah Akademik ini akan menjelaskan posisi Peraturan Daerah tentang Ripparkab Kutai Kartanegara terhadap berbagai peraturan perundang-undangan lain di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, serta manfaatnya untuk pembangunan daerah secara umum.

1.4 METODOLOGI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Metode penyusunan Naskah Akademik Ripparkab Kutai Kartanegara disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode penelitian dengan pendekatan masalah melalui melihat, menelaah, dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis menyangkut asas-asas hukum berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum, dan sistem hukum yang berkaitan disebut dengan metode yuridis normatif. Diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti, serta hubungan antara satu naskah hukum dengan naskah

hukum lainnya yang terkait dengan objek yang diteliti, yang dalam hal ini adalah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten, dengan empat aspek kajian, yaitu destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan merupakan penekanan yang diharapkan dalam pendekatan penelitian ini. Sementara itu, metode penelitian yuridis empiris adalah prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada untuk kemudian melakukan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Penyusunan Naskah Akademik Ripparkab Kutai Kartanegara menggunakan metode yuridis normatif untuk mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundangan yang mengamankan dan mengatur muatan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten, serta mengatur arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode yuridis empiris digunakan untuk menelaah dan menganalisis data sekunder dan data primer untuk mendapatkan gambaran mengenai perkembangan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara, sejauh mana kontribusi kepariwisataan terhadap pembangunan daerah, berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi, dan kecenderungan serta respon yang harus dipersiapkan kepariwisataan di masa yang akan datang.

Tahapan penyusunan Naskah Akademik Ripparkab Kutai Kartanegara terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan dan analisis data dan informasi, serta tahap perumusan dan penulisan rancangan peraturan daerah. Untuk lebih jelasnya mengenai tahapan penyusunan Naskah Akademik Ripparkab Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Tahapan Penyusunan Naskah Akademik Ripparkab Kutai Kartanegara

TAHAPAN	KEGIATAN
TAHAP PERSIAPAN	a. penyamaan persepsi terhadap tujuan, sasaran, metodologi, dan rencana kerja; b. persiapan kajian awal dan pengumpulan data dan informasi.
TAHAP PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA DAN INFORMASI	a. identifikasi dan analisis dinamika perkembangan kepariwisataan lokal, regional, nasional, dan global yang mempengaruhi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara; b. analisis dampak positif dan negatif yang telah ditimbulkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah.
TAHAP PERUMUSAN DAN PENULISAN	a. perumusan dan penulisan naskah Raperda Ripparkab Kutai Kartanegara. b. menuangkan isi dokumen Ripparkab Kutai Kartanegara ke dalam bentuk

TAHAPAN	KEGIATAN
NASKAH	bahasa hukum yang baku.

1.5 STRUKTUR ISI NASKAH AKADEMIK

Naskah Akademik Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) Kutai Kartanegara terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu:

Bab 1 merupakan **Pendahuluan** yang berisikan latar belakang, identifikasi permasalahan, tujuan penyusunan naskah akademik, dan metodologi yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini.

Bab 2 memuat **Kajian Teoritis dan Praktik Empiris** yang mencakup kajian teoritis terkait pembangunan kepariwisataan serta proses perencanaan kepariwisataan daerah. Pada bab ini juga akan dikaji asas-asas kepariwisataan Indonesia, dan diakhiri dengan kajian terhadap kondisi kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara serta kajian terhadap implikasi penerapan Perda Ripparkab Kutai Kartanegara.

Bab 3 berisikan **Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan** yang terkait, yang mencakup peraturan perundangan di pusat, provinsi, dan kabupaten, keterkaitannya dengan Perda Ripparkab Kutai Kartanegara, serta dampak dari Perda Ripparkab Kutai Kartanegara terhadap peraturan perundangan lainnya.

Bab 4 menjelaskan **Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis** yang mendasari pentingnya Perda Ripparkab Kutai Kartanegara.

Bab 5 berisikan **Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi** muatan Peraturan Daerah tentang Ripparkab Kutai Kartanegara, mencakup sasaran yang akan dituju serta objek hukum dari peraturan daerah ini.

Bab 6 sebagai **Penutup** akan berisikan simpulan yang memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, serta saran dan rekomendasi lanjutan.

BAB 2

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS



2.1 KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis ini membahas tentang pemahaman terhadap definisi wisata, pariwisata, hingga kepariwisataan, pemahaman terhadap prinsip-prinsip yang harus dianut dalam pembangunan kepariwisataan, serta asas-asas pembangunan kepariwisataan. Bagian ini juga dilengkapi oleh uraian proses perencanaan pembangunan kepariwisataan sebagai dasar pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

2.1.1 Pemahaman terhadap Kepariwisata

A. Pemahaman tentang wisata, pariwisata, kepariwisataan, dan wisatawan

Wisata (*tourism*) didefinisikan sebagai kegiatan perjalanan ke berbagai tempat dengan berbagai tujuan, kecuali bekerja atau perjalanan rutin lainnya. Perjalanan tersebut dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara sukarela dengan tujuan berlibur atau tujuan lain selain mencari nafkah, perjalanan bersifat sementara, mengunjungi tempat tertentu untuk keperluan pribadi (keluarga, belanja, kesehatan, atau tempat hiburan dan tempat bersantai lainnya).

Sebagai padanan kata *tourism*, **pariwisata** diartikan sebagai perjalanan sementara yang dilakukan seseorang di luar tempat di mana ia biasa tinggal dan bekerja, untuk maksud di luar mencari nafkah tetap. Termasuk dalam pengertian ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan tersebut dan berbagai fasilitas yang digunakan untuk mengakomodasikan kebutuhannya.

Kepariwisata digunakan sebagai padanan kata *tourism* dalam konteks kesisteman yang luas, mencakup keterkaitan antara pasar wisatawan, daerah tujuan wisata, dan upaya-upaya untuk menghubungkan antara wisatawan dengan destinasi, misalnya transportasi dan peran pemasaran dan promosi. Mc. Intosh, Goeldner dan Richie (1995) menyatakan bahwa *tourism* adalah "*the sum of phenomena and relationship arising from the interaction of tourists, business, suppliers, host government and host communities in the process of attracting and hosting those tourists and other visitors*".



Gambar 2.1 Wisata, Pariwisata, dan Kepariwisataan

Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, **wisata** didefinisikan sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. **Pariwisata** didefinisikan sebagai berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. **Kepariwisataan** didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Lebih lanjut, **wisatawan** didefinisikan sebagai orang yang melakukan perjalanan wisata. Definisi lain dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa wisatawan adalah pelaku perjalanan yang mengunjungi objek wisata, tidak tergantung pada jarak dan motivasi perjalanan, atau tidak mengunjungi objek tetapi menginap lebih dari 24 jam.

Pada umumnya, wisatawan dibedakan atas wisatawan nusantara (wisnus) dan wisatawan mancanegara (wisman). Wisnus adalah orang Indonesia yang melakukan perjalanan di wilayah Indonesia, sementara wisman adalah wisatawan asing yang melakukan perjalanan di luar negara tempat tinggalnya. Sedangkan istilah wisatawan domestik mencakup orang Indonesia dan penduduk asing yang melakukan perjalanan di wilayah Indonesia.

Wisatawan dapat juga dilihat berdasarkan karakteristik pelaku (wisatawannya) perjalanan maupun karakteristik perjalanannya. Karakteristik wisatawan membedakan wisatawan berdasarkan karakteristik sosio-eko-demografis, seperti jenis kelamin, kelompok usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan per bulan, pengeluaran rumah tangga per bulan, dan lain-lain. Sementara itu, karakteristik perjalanan membedakan berdasarkan perjalanan yang dilakukan, seperti lama perjalanan, waktu, motivasi, objek yang dikunjungi, moda transportasi yang digunakan, dan lain-lain.

B. Sistem kepariwisataan

Kepariwisataan menjadi fenomena yang sangat kompleks dengan adanya keterlibatan, ketergantungan, dan interaksi dengan sistem lain. Pemahaman kepariwisataan sebagai sebuah sistem membantu untuk memahami secara keseluruhan proses yang berlangsung baik dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Kegiatan pariwisata dapat terjadi karena adanya keberlangsungan suatu proses timbal balik antara sisi permintaan dan sisi penawaran berdasarkan empat elemen utama yaitu elemen manusia (**wisatawan**), elemen geografis (**daerah asal wisatawan, daerah transit, dan daerah tujuan wisata/ destinasi pariwisata**), **industri pariwisata**, dan **lingkungan eksternal** (Leiper, 1979, 2004). Menempatkan kepariwisataan sebagai suatu sistem setidaknya membutuhkan satu wisatawan, satu daerah asal wisatawan, satu daerah transit, satu destinasi pariwisata, industri perjalanan dan pariwisata yang memfasilitasi pergerakan dalam sistem (Weaver dan Lawton, 2014). Di sisi lain, daerah asal wisatawan dalam sistem kepariwisataan diartikan sebagai sisi permintaan yang mencakup motivasi dan segmentasi pasar wisatawan, sementara sisi penawaran terdapat di daerah transit dan destinasi pariwisata dengan didukung berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan serta kebijakan dan pengelolaan terkait kepariwisataan yang dilakukan oleh pemerintah di destinasi pariwisata (Gunn & Var, 2002).

1. Elemen manusia

Wisatawan sebagai elemen manusia memiliki peran dalam menentukan definisi wisata, pendefinisian wisata tergantung dari definisi wisatawan (Weaver & Lawton, 2014). Wisatawan didefinisikan sebagai orang yang melakukan perjalanan wisata (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata). Definisi lain dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa wisatawan adalah pelaku perjalanan yang mengunjungi objek wisata, tidak tergantung pada jarak dan motivasi perjalanan, atau tidak mengunjungi objek tetapi menginap lebih dari 24 jam.

Pada umumnya, wisatawan di Indonesia dibedakan atas wisatawan nusantara (wisnus) dan wisatawan mancanegara (wisman). Wisnus adalah orang Indonesia yang melakukan perjalanan di wilayah Indonesia, sementara wisman adalah wisatawan asing yang melakukan perjalanan di luar negara tempat tinggalnya. Sedangkan istilah wisatawan domestik mencakup orang Indonesia dan penduduk asing yang melakukan perjalanan di wilayah Indonesia. Lebih lanjut, setiap wisatawan harus memenuhi tiga kriteria utama, yaitu komponen spasial, temporal, dan tujuan perjalanan.

Untuk menjadi wisatawan, seseorang harus melakukan perjalanan jauh dari lingkungan asalnya. Terdapat tiga klasifikasi wisatawan berdasarkan komponen spasial mencakup wisatawan nusantara dan wisatawan; wisatawan *outbound* dan *inbound*; dan wisatawan *long-houl* dan *short-houl*. Berdasarkan komponen temporal, wisatawan diklasifikasikan berdasarkan wisatawan menginap (*stayovers*) dan wisatawan tidak menginap (*excursionist*). Komponen terakhir yaitu tujuan perjalanan, klasifikasi wisatawan dibagi berdasarkan tujuannya untuk berlibur dan rekreasi; mengunjungi teman dan kerabat; dan bisnis (MICE).

Tabel 2.1 Terminologi Wisatawan

Weaver dan Lawton	UNWTO	TERMINOLOGI DI INDONESIA
<i>Tourists</i>	<i>Visitors</i>	Wisatawan
<i>Stayover</i>	<i>Tourists</i>	Wisatawan menginap
<i>Excursionists</i>	<i>Same-day visitors</i>	Wisatawan tidak menginap/ ekskursi
<i>Internasional tourist</i>	<i>Visitors</i>	Wisatawan mancanegara
<i>Domestik tourists</i>	<i>Visitors</i>	Wisatawan nusantara

Sumber: Diolah berdasarkan Weaver dan Lawton (2014) dan UNWTO (2010)

Wisatawan dapat juga dilihat berdasarkan karakteristik pelaku (wisatawannya) perjalanan maupun karakteristik perjalanannya. Karakteristik wisatawan membedakan wisatawan berdasarkan karakteristik sosio-eko-demografis, seperti jenis kelamin, kelompok usia, tingkat

pendidikan, pekerjaan, pendapatan per bulan, pengeluaran rumah tangga per bulan, dan lain-lain. Sementara itu, karakteristik perjalanan membedakan berdasarkan perjalanan yang dilakukan, seperti lama perjalanan, waktu, motivasi, objek yang dikunjungi, moda transportasi yang digunakan, dan lain-lain.

2. Elemen geografis

Elemen geografis dalam sistem kepariwisataan mencakup daerah asal wisatawan, daerah/ rute transit, dan daerah tujuan wisata (destinasi pariwisata). **Daerah asal wisatawan** didefinisikan sebagai daerah tempat tinggal wisatawan secara permanen, tempat di mana wisatawan memulai dan mengakhiri perjalanan. Dua faktor utama yang diindikasikan terdapat di daerah asal wisatawan yaitu perilaku wisatawan akan motivasinya melakukan perjalanan (*push factor*) dan pengaruh yang berasal dan ditimbulkan dari destinasi pariwisata dan pengetahuan yang dimiliki wisatawan tentang destinasi pariwisata (*pull factor*). Faktor lain yang mempengaruhi wisatawan melakukan perjalanan wisata, yaitu kebijakan pemerintah daerah asal wisatawan (seperti larangan perjalanan) dan peran promosi yang dilakukan oleh industri pariwisata (seperti potongan harga maskapai penerbangan, hotel, dan daya tarik wisata).

Daerah/Rute Transit adalah jalur yang menghubungkan daerah asal wisatawan dengan destinasi pariwisata yang diikuti oleh perjalanan wisatawan. Daerah/ Rute Transit termasuk tempat-tempat yang memungkinkan wisatawan untuk singgah karena terdapat daya tarik wisata di sepanjang perjalanannya menuju destinasi pariwisata. Sementara destinasi pariwisata didefinisikan sebagai sebuah lokasi yang mampu menarik wisatawan untuk tinggal sementara dan terdiri dari beberapa daya tarik wisata. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisata, **daerah tujuan wisata atau destinasi pariwisata** didefinisikan sebagai kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Indikator utama destinasi pariwisata mencakup atraksi/ daya tarik wisata, aksesibilitas, aminitas, dan aktivitas (Buhalis, 2000). Terdapat dua faktor utama yang mampu mempengaruhi kepariwisataan di destinasi pariwisata, yaitu faktor masyarakat setempat dan kebijakan pemerintah di destinasi pariwisata.

3. Industri Pariwisata

Industri pariwisata didefinisikan sebagai sejumlah kegiatan industri dan komersial yang menghasilkan barang dan jasa secara sebagian atau keseluruhan yang diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Definisi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. UNWTO telah menentukan lingkup usaha dalam industri pariwisata, mencakup; restoran dan sejenisnya; angkutan penumpang kereta api; angkutan penumpang jalan raya; angkutan penumpang air, angkutan penumpang udara; penyewaan peralatan transportasi; jasa perjalanan wisata dan pramuwisata; usaha aktivitas seni dan budaya; usaha olahraga dan rekreasi; dan *meeting, incentive, conference, dan exhibition* (MICE). Sementara dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menetapkan enam belas usaha pariwisata dalam industri pariwisata di Indonesia, mencakup usaha daya tarik wisata; kawasan pariwisata; jasa transportasi wisata; jasa perjalanan wisata; jasa makanan dan minuman; penyediaan akomodasi; penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; jasa informasi pariwisata; jasa konsultan pariwisata; jasa pramuwisata; wisata tirta; dan spa.

4. Lingkungan Eksternal

Sistem kepariwisataan dapat mempengaruhi lingkungan eksternal yang mencakup lima aspek, yaitu:

- a. aspek ekonomi, kepariwisataan dapat memicu dampak positif melalui pendapatan langsung dan tidak langsung, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pembangunan wilayah, selain itu dapat berdampak negatif melalui kebocoran ekonomi akan adanya pelaku/ industri asing dan fluktuasi ekonomi;
- b. sosial-budaya, aspek ini ditinjau berdasarkan manfaat yang didapatkan dari pariwisata, seperti mempromosikan pemahaman lintas budaya, pelestarian warisan budaya, serta mensejahterakan dan stabilitas sosial. Sementara biaya atau dampak negatif adanya kegiatan pariwisata mencakup komodifikasi budaya, timbulnya kriminalitas, dan respon masyarakat setempat yang menolak kegiatan wisata.

- c. politik, pariwisata bergantung pada kebebasan orang untuk melakukan perjalanan internasional dan domestik, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh kebijakan pariwisata di daerah asal wisatawan dan destinasi pariwisata, geopolitik, dan aksesibilitas politik.
- d. fisik, kondisi lingkungan alam dan buatan dapat mempengaruhi kegiatan pariwisata terutama pada unsur ruang dan waktu.
- e. teknologi, perubahan teknologi secara dramatis mempengaruhi karakter sistem kepariwisataan, seperti moda transportasi pesawat terbang dan mobil yang lebih cepat dapat mengurangi jarak dan waktu tempuh yang dibutuhkan pada fase transit wisatawan.

2.1.2 Perencanaan dan Pembangunan Kepariwisata

Pariwisata bukanlah tujuan akhir, tapi merupakan salah satu alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai alat, pembangunan pariwisata haruslah direncanakan secara terarah dan bertahap dengan sasaran-sasaran antara yang jelas menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Perencanaan yang jelas merupakan syarat mutlak bagi pengembangan pariwisata. Tanpa arah pengembangan yang pasti dan disepakati oleh seluruh *stakeholders*, pembangunan yang dilaksanakan dapat kehilangan fokus dan rentan terhadap kemungkinan munculnya dampak negatif yang tidak diinginkan. Selain itu pariwisata sangat multisektoral sehingga dalam perencanaannya perlu diintegrasikan dalam satu rencana wilayah yang komprehensif. Rencana tersebut dalam pelaksanaannya juga membutuhkan komitmen dan dukungan dari semua pihak secara menerus.

Dengan demikian, pengembangan pariwisata suatu daerah perlu direncanakan dengan baik agar dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan secara berkelanjutan. Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah merupakan suatu pedoman atau arahan untuk mengembangkan pariwisata secara terintegrasi dan menyeluruh, yang terpadu dengan rencana pembangunan daerah keseluruhan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

A. Proses Perencanaan Kepariwisata Daerah

Perencanaan adalah fasilitasi, atau advokasi, atau intervensi yang bertujuan mengubah atau mempengaruhi proses yang sudah ada atau sedang berjalan. Perencanaan adalah aktifitas multidimensi yang berusaha untuk memadukan berbagai faktor-faktor sosial, ekonomi, politik

dan psikologi, antropologi, dan teknologi dengan mempertimbangkan masa lalu, kini dan yang akan datang (Rose, 1984:45 dalam Gunn dan Var, 2002).

Tingkatan perencanaan dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu: (1) secara spasial/geografis, dan (2) secara institusi/pranata. Tingkat perencanaan spasial geografis terdiri dari perencanaan tapak, perencanaan kawasan, dan perencanaan regional. Sedangkan tingkat perencanaan institusi/pranata terdiri dari perencanaan "*retail*", perencanaan perusahaan, perencanaan jaringan perusahaan regional, serta perencanaan jaringan perusahaan internasional. Tiap tingkat perencanaan memiliki pendekatan yang berbeda-beda.

Perencanaan pariwisata diperlukan mengingat fenomena pariwisata yang makin kompleks dari yang pernah terpikirkan sebelumnya. Pariwisata juga sangat multi sektoral, membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terkait, termasuk pengambil keputusan. Terlebih lagi pariwisata berdampak tidak hanya positif tetapi juga negatif, yang bisa berakibat buruk pada sumberdaya alam dan budaya. Oleh karena itu diperlukan perencanaan agar pembangunan pariwisata dapat memberikan dampak positif yang optimal dan dampak negatif yang seminimal mungkin.

Pariwisata mempengaruhi semua orang dalam komunitas tertentu. Semua yang terlibat dalam pariwisata perlu berpartisipasi dalam proses perencanaan pariwisata. Pihak-pihak yang harus terlibat dalam proses perencanaan pariwisata termasuk pemerintah pusat dan daerah, komunitas lokal, lembaga swadaya masyarakat, organisasi pariwisata, operator bisnis pariwisata, konsultan. Keterlibatan dan dukungan yang konsisten diperlukan dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi perencanaan.

Beberapa hambatan dalam perencanaan pariwisata diantaranya adalah kurangnya kesepakatan tentang prinsip-prinsip perencanaan pariwisata, biaya pembuatan rencana pengembangan pariwisata yang relatif tinggi, banyaknya pihak yang terlibat dan kompleksitas jaringannya, keragaman bisnis dan produk pariwisata, *seasonality* yang berbeda di tiap destinasi, serta kepemilikan yang sering berubah pada bisnis pariwisata. Hambatan tersebut seringkali mengakibatkan rencana yang disusun menjadi kurang optimal dalam pelaksanaannya, atau bahkan menjadi mubazir.

B. Pendekatan Perencanaan Kepariwisata

Pendekatan perencanaan kepariwisataan berperan dalam menentukan arah pembangunan wilayah sesuai dengan isu dan permasalahan yang terjadi. Terdapat enam pendekatan perencanaan kepariwisataan (Gunn & Var, 2002), mencakup:

- a. Pendekatan secara bertahap dan fleksibel, pendekatan ini diadaptasi dari kebijakan dan perencanaan yang telah ada sebelumnya. Perencanaan pariwisata sebagai proses yang bertahap dan berkelanjutan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dengan tetap mempertahankan kebijakan dan perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- b. Pendekatan sistematis. pariwisata memiliki sistem terintegrasi satu sama lain, sehingga harus direncanakan dan dimanfaatkan dengan baik dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
- c. Pendekatan komprehensif, pendekatan ini memiliki keterkaitan dengan pendekatan sistematis, semua aspek pengembangan pariwisata (kelembagaan dan dampak dari aspek lingkungan, sosial-budaya, dan ekonomi) direncanakan dan dianalisis secara komprehensif.
- d. Pendekatan terintegrasi, terdapat keterkaitan dengan pendekatan sistematis dan komprehensif. Pariwisata direncanakan dan dikembangkan sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dengan pola perencanaan dan pengembangan pada suatu wilayah.
- e. Pendekatan berbasis masyarakat, keterlibatan masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Adanya keterlibatan masyarakat memberikan manfaat sosial dan ekonomi melalui pengelolaan aktivitas wisata.
- f. Pendekatan pembangunan berkelanjutan, pariwisata di rencanakan, dikembangkan, dan dikelola dengan memperhatikan sumber daya alam dan sosial-budaya dengan tujuan dapat dipergunakan untuk generasi yang akan datang.

Tingkat kompleksitas dan multisektoral pada elemen fisik dan kelembagaan pariwisata, menjadikan pariwisata membutuhkan perencanaan yang terintegrasi dan komprehensif dalam mencapai keberhasilan pembangunan berkelanjutan tanpa menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan.

C. Tujuan Perencanaan Pariwisata

Perencanaan pariwisata dilakukan dengan tujuan untuk beradaptasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, yang mungkin terjadi dalam proses pembangunan. Perencanaan juga dimaksudkan untuk tetap mempertahankan keunikan sumber daya wisata yang dimiliki. Dengan perencanaan pariwisata perlu diciptakan hal-hal yang sesuai dengan tujuan dan sasaran pengembangan yang diinginkan, dan menghindari hal-hal atau dampak negatif yang tidak diinginkan.

Seperti perencanaan pada umumnya, perencanaan pariwisata juga memiliki tingkatan dari mulai tapak/lahan/kawasan daya tarik wisata, daerah tujuan wisata, regional/wilayah, nasional dan internasional. Setiap tingkatan yang berbeda juga memiliki pendekatan yang berbeda, serta fokus pada pertimbangan yang berbeda pula. Bila perencanaan dan implementasi yang dilakukan tidak konsisten, maka pengembangan pariwisata justru dapat menghancurkan sumber daya wisata yang dimiliki, dan menjadi tidak berkelanjutan. Pengembangan pariwisata perlu direncanakan dengan baik dan diimplementasikan secara konsisten dengan dukungan seluruh stakeholder, agar dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan secara berkelanjutan. Dengan demikian pengembangan pariwisata perlu direncanakan dengan baik, agar dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah diperlukan untuk mewujudkan fungsi kepariwisataan sebagai salah satu alat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perencanaan kepariwisataan daerah yang baik juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing, mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat yang optimal dan menekan dampak negatif yang mungkin timbul bagi masyarakat dan daerah. Untuk menjawab tuntutan perencanaan kepariwisataan daerah saat ini, maka perencanaan kepariwisataan daerah harus komprehensif, terpadu, fokus, bertahap dan sistematis, kesepakatan, dan komitmen bersama.

2.2 KAJIAN TERHADAP ASAS-ASAS KEPARIWISATAAN DAN PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

2.2.1 Asas Pembangunan Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 2 menjelaskan bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas-asas, sebagai berikut:

- a. **Manfaat** yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat lokal, manfaat bagi daerah, maupun secara nasional;
- b. **Kekeluargaan**, dalam arti hubungan yang harmonis antara pemerintah dan swasta, antara pengusaha besar dan kecil, antara pengusaha dan masyarakat;
- c. **Adil dan merata**, dalam arti setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang sama (nondiskriminatif) dalam mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan, memanfaatkan peluang kerja atau melakukan kegiatan wisata; kepentingan masyarakat luas tidak dikorbankan demi kepentingan wisatawan atau kepentingan sekelompok pengusaha;
- d. **Keseimbangan** antara daya dukung dan daya tampung, antara permintaan dan penawaran; antara usaha besar dan kecil; serta keseimbangan antara aspek-aspek konservasi-edukasi-partisipasi dan ekonomi;
- e. **Kemandirian**, pembangunan yang tidak didikte oleh pihak lain tetapi dirancang untuk kepentingan nasional dan bangsa, serta masyarakat Indonesia;
- f. **Kelestarian**, dalam bentuk perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan pusaka alam dan budaya;
- g. **Partisipasi**, membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan masyarakat;
- h. **Berkelanjutan**, dalam bentuk tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan datang;
- i. **Demokratis**, mendengarkan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan;
- j. **Kesetaraan**, antara masyarakat tuan rumah dengan wisatawan;
- k. **Kesatuan**, langkah dan visi serta tujuan pembangunan untuk kesatuan bangsa Indonesia serta integritas para pelaku: wisatawan, pengusaha, masyarakat dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pariwisata.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Pembangunan Kepariwisata

Kebijakan peraturan perundangan terkait prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 5, yang menyatakan bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat;
- f. Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. Memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, prinsip-prinsip pengembangan yang digunakan dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup pendekatan pembangunan kepariwisataan berkelanjutan (*sustainable tourism development*), pembangunan kepariwisataan berbasis kewilayahan untuk mendorong pemerataan pembangunan, pembangunan kepariwisataan berbasis komunitas/masyarakat, pembangunan kepariwisataan terpadu antarsektor, antarwilayah, dan antarpemangku kepentingan, dan pembangunan kepariwisataan berwawasan global, beridentitas lokal.

A. Pembangunan Kepariwisata Berkelanjutan

Pembangunan kepariwisataan berkelanjutan adalah pembangunan kepariwisataan yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat

diaplikasikan ke semua bentuk aktivitas wisata di semua jenis destinasi pariwisata, termasuk wisata massal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.

B. Pembangunan kepariwisataan berbasis kewilayahan untuk mendorong pemerataan pembangunan

Prinsip pembangunan kepariwisataan berbasis kewilayahan dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan untuk menyebarkan perkembangan pariwisata ke seluruh wilayah kabupaten sebagai upaya mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah. Pembangunan kepariwisataan berbasis kewilayahan di Kabupaten Kutai Kartanegara akan dilakukan dengan pendekatan berbasis sumber daya dan komoditas unggulan serta pendekatan pengembangan wilayah terpadu. Artinya, pembangunan kepariwisataan setiap kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan berdasarkan karakteristik daya tarik wisata dan sumber daya wisata yang dimiliki serta komoditas yang menjadi unggulan kecamatan. Setiap kecamatan harus memiliki produk pariwisata yang khas sesuai karakteristik sumber daya alam dan budaya yang dimilikinya, dan memadukan pembangunannya dengan kecamatan lain yang memiliki tema sumber daya yang saling terkait sehingga pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat tersebar di seluruh wilayah sesuai dengan karakteristik wilayahnya.

C. Pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat

Pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat adalah pembangunan kepariwisataan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kepariwisataan. Masyarakat menjadi pemain kunci dalam pembangunan kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat akan memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat, tidak hanya manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung pembangunan berwawasan lingkungan hidup, pelestarian budaya lokal, pemberdayaan masyarakat, menambah sumber pendapatan masyarakat tanpa menciptakan ketergantungan pada satu usaha saja, serta pemerataan pendapatan di antara masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pada prinsip pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat diutamakan pada terbangunnya kemandirian dan pengambilan keputusan.

Pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat merupakan pembangunan kepariwisataan yang *pro-poor, pro-job, pro-growth, pro environment*. Hal penting yang harus diperhatikan dalam penerapan prinsip pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat adalah:

1. mendorong kepemilikan lokal dalam pariwisata;
2. melibatkan anggota masyarakat dari mulai tahap awal pengembangan;
3. mendorong kebanggaan masyarakat;
4. meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
5. menjamin keberlanjutan lingkungan;
6. melestarikan keunikan karakter dan budaya lokal;
7. mendorong pembelajaran lintas budaya;
8. menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia;
9. mendistribusikan manfaat secara adil kepada masyarakat luas;
10. berkontribusi terhadap program-program kemasyarakatan.

D. Pembangunan kepariwisataan terpadu antarsektor, antarwilayah, dan antarpemangku kepentingan

Kepariwisataan merupakan sektor yang tidak dapat berdiri sendiri, membutuhkan dukungan sektor lain dalam pembangunannya. Keterpaduan dalam pembangunan kepariwisataan, yaitu pembangunan kepariwisataan yang menyelaraskan pembangunan yang dilakukannya dengan pembangunan wilayah, pembangunan lintas sektor, lintas pemerintahan, komponen-komponen pariwisata, dan para pemangku kepentingan, serta sebaliknya, yaitu pembangunan kepariwisataan yang mendapatkan dukungan lintas sektor, lintas wilayah, lintas pemerintahan, komponen-komponen pariwisata, dan para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Empat hal penting yang harus diperhatikan dalam menerapkan prinsip keterpaduan dalam pembangunan kepariwisataan adalah:

1. kepemimpinan yang berpihak pada kepariwisataan;
2. komitmen untuk mencapai tujuan bersama;
3. koordinasi dan komunikasi yang intensif dan efektif;
4. pemantauan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan yang konsisten dan tegas.

E. Pembangunan kepariwisataan berwawasan global, beridentitas lokal

Pembangunan kepariwisataan berwawasan global yaitu pembangunan kepariwisataan yang mampu melakukan perubahan dan inovasi sesuai perkembangan dunia dan permintaan pasar. Pembangunan kepariwisataan berwawasan global juga harus menerapkan standar-standar internasional yang telah ditetapkan, termasuk kompetensi internasional bagi sumber daya manusianya.

Walaupun berwawasan global, pembangunan kepariwisataan harus tetap memiliki identitas kelokalan sebagai upaya untuk memperkuat daya saing global. Pembangunan kepariwisataan beridentitas lokal yaitu pembangunan kepariwisataan yang menerapkan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk norma-norma agama, sosial, dan budaya yang dianut masyarakat. Identitas lokal bagi Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebuah wilayah yang memiliki flora-fauna endemik berupa anggrek hitam, bekantan, dan pesut. Dari sisi sosial budaya, penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu Suku Bangsa Dayak (Melayu Tua) dan Suku Bangsa Melayu/Kutai (Melayu Muda). Kelompok tersebut terbagi menjadi 16 suku yang saling hidup berdampingan berdasarkan sensus BPS tahun 2000, yaitu Suku Dayak Tunjung, Dayak Benuaq, Kutai, Jawa, Dayak Bahau, Banjar, Bugis, Dayak Kenyah, Dayak Bentian, Dayak Bakumpai, Aoheng, Dayak Kayan, Dayak Seputan, Dayak Bukat, Dayak Luangan dan Batak. Masing-masing suku memiliki adat kebiasaan dan budaya yang beragam sehingga menjadikan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai daerah dengan keberagaman budaya yang tinggi.

2.3 KAJIAN KONDISI KEPARIWISATAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2.3.1 Karakteristik Fisik, Sejarah, Sosial Budaya, dan Ekonomi

A. Karakteristik Fisik

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas wilayah 2.529.224 ha (dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat hektar), yang terdiri atas 18 (delapan belas) kecamatan. Sebelumnya terdapat 20 (dua puluh) kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, namun terdapat dua kecamatan yang tidak masuk dalam lingkup wilayah ini adalah Kecamatan Samboja dan Samboja Barat yang merupakan bagian dari wilayah IKN (Ibu Kota Negara).

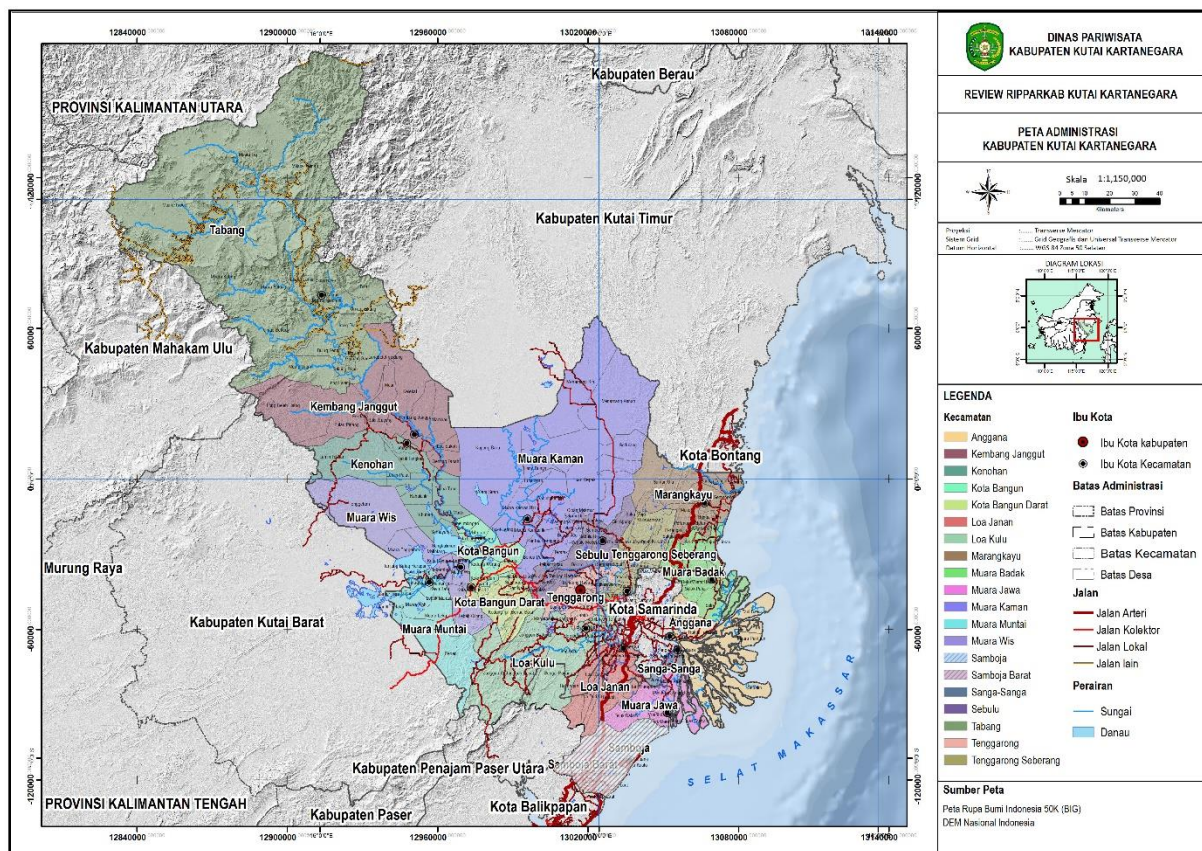
Posisi geografis wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berada di 1°28'21"LU- 1°08'06" LS dan 115°26'28" BT - 117°36'43" BT. Secara administratif, wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berbatasan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Batas administrasi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;

Sebelah Timur : Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang, dan Selat Makassar;

Sebelah Selatan: Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan; dan

Sebelah Barat: Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu.



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara

Topografi wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar bergelombang dan berbukit dengan kelerengan landai sampai curam. Daerah dengan kemiringan datar sampai landai terdapat di beberapa bagian, yaitu wilayah pantai dan daerah aliran sungai Mahakam. Pada wilayah pedalaman dan perbatasan pada umumnya merupakan kawasan pegunungan dengan ketinggian antara 500 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Gunung yang paling tinggi di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Gunung Lengkup dengan ketinggian 485 meter di atas permukaan laut yang terletak di Kecamatan Loa.

Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki jenis-jenis tanah yang tergolong ke dalam tanah yang bereaksi asam. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh kompleks podsolik merah kuning, dan organosol glei humus. Organosol glei humus terdapat di daerah cekungan di sekitar Sungai Mahakam yang tergenang air, yaitu terdapat di Kecamatan Muara Muntai, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong dan Loa Kulu. Tanah podsolik merah kuning di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 8.618,63 Km² atau 27,72% dari luas wilayah. podsolik merah kuning terbentuk dari batuan beku dan endapan pada daerah bukit dengan pegunungan lipatan.

Struktur geologi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sampai saat ini belum seluruhnya diketahui. Hasil survey dan pemetaan geologi yang dimuat dalam buku "Geologi of Indonesia" oleh R.W. Van Bemmelen tahun 1949, menunjukkan bahwa baru sebagian sebelah timur (daerah pantai dan dataran rendah sekitarnya) yang dipetakan, yang membujur dari arah selatan sampai utara. Diduga bahwa struktur geologi Kabupaten Kutai Kartanegara berumur antara Pratertier hingga Kwartir. Formasi geologi ini terbentuk pada zaman Pratertier meliputi areal seluas 667,05 Km² atau 7,55 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Formasi ini terdiri dari; batuan serpih kristalin, phylit, batu sebak, serpih liat, batu liat, napal, batu gamping dan batuan erusif asam sampai basa. Penyebarannya terdapat di Kecamatan Tabang. Pada zaman Tertier terbentuk formasi batuan: Dumaring Beds, Kampung Baru, Balikpapan (Kutai Beds), Paleogen, Pulau Balang Beds, dan Pamaluan Beds (RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara, 2011 - 2031).

Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki iklim tropis dengan dua musim yakni musim penghujan dan musim kemarau. Suhu udara di Kabupaten Kutai Kartanegara relatif cukup tinggi yakni 27,21 °C dengan perbedaan antara suhu minimum dan suhu maksimum mencapai 22,1°C - 34°C. Dari tingkat kelembaban udaranya rata-rata mencapai 83,4% dengan perbedaan antara tingkat kelembaban minimum dan kelembaban maksimum mencapai 49% - 100%. Untuk kecepatan angin rata-rata 1,39 m/detik dengan perbedaan antara tingkat kecepatan angin minimum dan kecepatan angin maksimum antara 0,60 m/detik - 21,5 m/detik. Kemudian untuk tekanan udara rata-rata di 1010,08 mb dengan perbedaan antara tekanan udara minimum dan tekanan udara maksimum mencapai 1.006,4 mb - 1.013,4 mb.

Curah hujan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak merata setiap tahun. Curah hujan tertinggi pada bulan Maret yaitu 317 mm dengan 26 hari hujan. Sedangkan curah hujan terendah terdapat di bulan Juni yaitu 154 mm dengan 24 hari hujan.

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki belasan sungai yang tersebar pada hampir semua kecamatannya dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam dengan panjang sekitar 920 kilometer. Aliran Sungai Mahakam yang lebar dan tenang memberikan pengaruh yang sangat besar terutama bagi kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Sungai Mahakam hingga saat ini dimanfaatkan sebagai air baku bagi penyediaan air minum penduduk di sepanjang wilayah yang dilaluinya, sedangkan lebar dan dalamnya sungai dijadikan sarana esensial bagi kegiatan transportasi air yaitu sebagai transportasi lokal maupun antar wilayah (transportasi regional).

Sungai Mahakam termasuk Wilayah Sungai Strategis Nasional dengan DAS meliputi DAS Mahakam, DAS Semboja, DAS Senipah, dan DAS Semoi. Selain Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sekitar 30 sungai besar dan kecil yang tersebar hampir di setiap kecamatan. Kecamatan yang wilayahnya memiliki banyak sungai adalah Kecamatan Kembang Janggut yang terdiri dari 20 sungai.

Selain memiliki sungai besar dan kecil, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 16 danau yang tersebar di beberapa kecamatan. Danau yang terluas berada di Kecamatan Kenohan yaitu Danau Semayang dengan luasan sekitar 13.000 Ha. Danau terluas kedua terletak di Kecamatan Muara Wis dengan total luasan sekitar 11.000 Ha. Kedua danau ini cukup terkenal, selain menjadi destinasi wisata, juga karena menjadi habitat Pesut Mahakam yang dilindungi dan termasuk spesies terancam punah.

Selain danau, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 2 buah waduk yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Waduk Panji Sukarama di Kecamatan Tenggarong dan Waduk Marangkayu di Kecamatan Marangkayu. Dengan adanya keberadaan waduk tersebut, selain sebagai kawasan konservasi dan sumber air baku, juga digunakan sebagai alat untuk pengendali banjir di Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Karakteristik Sejarah

Kabupaten Kutai Kartanegara selain dikenal dengan sumber daya alamnya yang berlimpah, terutama di sektor migas dan pertambangan batubara, ternyata memiliki warisan sejarah

budaya yang kaya dan beragam karena terbentuk dari periodisasi sejarah yang panjang, mulai dari zaman sejarah kuno/klasik yaitu berdirinya kerajaan besar pertama di Nusantara yang bercorak Hindu-Buddha yaitu Kerajaan Kutai Martadipura, zaman perkembangan dan pertumbuhan kerajaan Islam yang ditandai berubahnya Kerajaan Kutai Kartadipura menjadi kesultanan yang bercorak Islam, hingga zaman Indonesia modern pada masa era penjajahan Belanda dan Jepang. Setiap periodisasi sejarah tersebut masih bisa ditelusuri melalui objek peninggalan sejarah yang tersebar di wilayah Kutai Kartanegara dan menjadi aset yang berharga dalam pembangunan pariwisata.

Keberadaan Kerajaan Kutai Martadipura dengan temuan situs arkeologisnya menjadi salah satu situs cagar budaya yang sangat penting, bukan hanya skala regional Kalimantan Timur saja, tapi juga skala nasional karena menjadi tonggak untuk pertama kalinya Indonesia memasuki zaman sejarah tulisan yang ditandai dengan temuan prasasti yang dinamakan Yupa yang sudah berusia sekitar tahun $\pm$ 400 Masehi. Informasi dalam prasasti tersebut menjadi bukti bahwa di Kabupaten Kutai Kartanegara pernah berdiri kerajaan besar tertua yang terletak di Muara Kaman dan keberadaan kerajaan ini sangat berperan penting bagi sejarah awal peradaban Nusantara. Kemudian dengan adanya rencana pemindahan Ibukota Negara Indonesia di Kalimantan Timur, nilai sejarah dan warisan budaya di Kutai Kartanegara berpotensi akan dikenal di level internasional dan mengembalikan kejayaan kerajaan di Tanah Kutai di masa lampau.

Selain memiliki sejarah kerajaan, Kabupaten Kutai Kartanegara juga memiliki sejarah masa kolonial di bawah pemerintahan Hindia Belanda dan Jepang yang hingga saat ini jejak peninggalannya masih bisa ditemui dan diamati. Berikut ini merupakan sebaran peninggalan sejarah/cagar budaya berdasarkan jenisnya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

- a. Situs Arkeologis (situs makam, arca, prasasti, candi, dll): Masjid Kuno Sri Bangun, Arca Nandi, Situs Benteng Awang Long, Kompleks Makam Kuno Sri Bangun, Makam Al Habib Ali bin Muhammad Bin Yahya, Makam Muso Bin Salim, Makam Syekh Rasyid Subki, Makam Hindu Kuno Muara Kaman, Lesung Batu, Lembu Ngeram di Muara Kaman, Makam Kuno Martadipura, Lesong Batu, area pemakaman Islam Kuno Bukit Brubus, Kelambu Kuning (Kompleks makam Sultan A.M. Alimuddin and Pangeran Noto Igomo), Makam Pangeran Mangkunegoro, Makam Awang Long Senopati, Kompleks Makam Raja-Raja Kutai Kartanegara, Makam Habib Hasyim Bin Musaiyah Bin Yahya (Pangeran Tunggang

Parangan), Kompleks Makam Raja Kutai Kartanegara (Makam Sultan Aji Dilanggar dan Makam Aji Mahkota), Makam Petta Loloncong/Syekh Sayyid Shalahuddin Al Basir, Situs Gunung Selendang, Situs Perian, Makam Al Banjari, Candi Tanjung Serai, Kompleks makam Sebulu Ilir, situs sejarah Batu Belah, situs sejarah Lebak Mantan, Makam raja Kota Bangun, Situs Tepian Tabon, Benteng Tanah Tanjung Uringin, Makam Raja Kota Bangun Seberang, Situs Sedulang, Makam Islam Kahala, Makam Aji Kodo, Situs Sungai Kramat, Situs Sungai Jawi, Situs Barare Sungai Seluang, Situs Bukit Bengkirai dll.

- b. Monumen: Monumen Batu Kedaulatan RIS, Tugu Pembantaian di Sanga-Sanga, Tugu Peringatan Pembantaian Jepang di Loa Kulu, Monumen Lonceng/Jam sisa peninggalan Belanda, Tugu Merah Putih, Monumen Perjuangan Merah Putih, Monumen Pancasila, Tugu Kemerdekaan Samboja, dll
- c. Museum: Museum Mulawarman Ing Martadipura di Muara Kaman, Museum Mulawarman Kota Tenggarong, Museum Kayu "Tuah Himba", Museum Perjuangan di Sanga-Sanga, dll
- d. Bangunan peninggalan masa penjajahan: Masjid Jami Aji Amir Hasanuddin, Masjid Kuno Sri Bangun, Kedaton Kutai Kartanegara, Gedung Dharma Wanita, Rumah Penjara Belanda, Bangunan prasarana perusahaan minyak Belanda di Sanga-Sanga, Gedung Sembako (Situs Gudang Atap Lengkung), Gedung Magazijn, Bangunan prasarana perusahaan batubara Belanda di Loa Kulu, Goa-goa peninggalan masa penjajahan Jepang, Gedung Sandisa, Gunung Benteng, Tiang Telepon Lawas, Rumah Besar Yayasan Sangkon Piatu, Menara Pengeboran Minyak Belanda, Rumah Pertambangan Sungai Seluang, Tiang Bendera Belanda Kembang Janggut, dll.

Berdasarkan paparan di atas, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki warisan sejarah budaya yang kaya dan beragam karena terbentuk dari periodisasi sejarah yang panjang, mulai dari zaman sejarah kuno/klasik yaitu berdirinya kerajaan besar pertama di Nusantara yang bercorak Hindu-Buddha yaitu Kerajaan Kutai Martadipura, zaman perkembangan dan pertumbuhan kerajaan Islam yang ditandai berubahnya Kerajaan Kutai Kartadipura menjadi kesultanan yang bercorak Islam, hingga zaman Indonesia modern pada masa era penjajahan Belanda dan Jepang. Setiap periodisasi sejarah tersebut masih bisa ditelusuri melalui objek peninggalan sejarah yang tersebar di wilayah Kutai Kartanegara dan menjadi aset yang berharga dalam pengembangan destinasi wisata.



Gambar 2.2 Tonggak Sejarah Kutai Kartanegara

C. Karakteristik Sosial Budaya

Berdasarkan data statistik BPS, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki jumlah penduduk sebesar 733.626 jiwa yang terdiri dari 382.209 laki-laki dan 351.417 perempuan. Dari segi tingkat pertumbuhan penduduknya, dalam kurun waktu tahun 2020 – 2021 Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami pertumbuhan penduduk secara alamiah yaitu sebesar 0,58%. Pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Muara Kaman dengan laju

pertumbuhan sebesar 2,04%, sedangkan di Kecamatan Anggana dan Kembang Janggut justru mengalami penurunan yaitu -0,70% dan -0,14%.

Jika melihat persebaran penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara menurut luas wilayahnya, bisa dikatakan tidak merata. Dengan luas wilayah seluas 398,10 Km², Kecamatan Tenggarong berpenduduk sebanyak 106,554 jiwa dengan tingkat kepadatan 268 jiwa/Km². Kondisinya berbeda jika dengan Kecamatan Tabang yang merupakan wilayah terluas di Kutai Kartanegara (7,764 50 Km²) yang dihuni oleh 11.514 jiwa dengan tingkat kepadatan 1 jiwa/Km². Kecenderungan penduduk tinggal di Kecamatan Tenggarong disebabkan kecamatan tersebut merupakan wilayah pusat pemerintahan atau pusat perekonomian (*center activity*) yang lebih lengkap secara infrastruktur dasar dan dianggap lebih mudah dalam mencari penghasilan (*cash income*).

Jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berusia 15 tahun ke atas atau yang termasuk Penduduk Usia Kerja (PUK) sebanyak 580.633 jiwa yang terdiri dari 305.141 laki-laki dan 275.492 perempuan. penduduk yang masuk dalam angkatan kerja sebanyak 359.866 jiwa dan bukan angkatan kerja sebanyak 220.767 jiwa. Dari jumlah tersebut, secara umum tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 61,98% dengan tingkat pengangguran 5,70%.

Mayoritas penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara memeluk agama Islam. Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dengan sejarah wilayah yang menjadi bagian dari kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara. Agama Islam sudah berkembang di wilayah ini sejak abad ke 13 yang bertepatan dengan perubahan kerajaan menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara. Pada masa itu, Kutai Kartanegara menjadi salah satu pusat kekuasaan yang menganut agama Islam. Berdasarkan data BPS, penduduk yang memeluk agama Islam berjumlah 644.254 orang, selanjutnya agama Protestan sebanyak 38.947 orang, Agama Katolik sebanyak 11.720 orang, Agama Hindu sebanyak 2.447 orang, Agama Budha sebanyak 212 orang, dan lainnya hanya 94 orang.

Saat ini Kutai Kartanegara merupakan daerah yang heterogen, suku-suku lain datang dari berbagai daerah di Indonesia berinteraksi dan berakulturasi dengan suku asli sejak zaman kerajaan dan kesultanan sampai sekarang. Suku yang memiliki keterkaitan erat dengan identitas dan kehidupan masyarakat Kutai Kartanegara sejak dahulu adalah Suku Kutai dan Suku Dayak yang sebenarnya berasal dari rumpun yang sama. Pendapat lain mengatakan masyarakat suku asli di Kalimantan Timur terdiri dari 2 golongan ras yaitu, Ras Mongoloid dan

Ras Malayan. Ras Mongoloid (Mongol) terdiri dari suku-suku Dayak besar yang di dalamnya terbagi lagi menjadi banyak sub suku, seperti Dayak Kenyah, Dayak Bahau, Dayak Modang, Dayak Punan dan lain-lain. Secara fisik memiliki kemiripan dengan orang yang berasal dari Cina Daratan dengan ciri-ciri seperti kulit putih, mata sipit karena konon awalnya berasal dari Cina Daratan yang masuk ke Kalimantan Timur melalui Kalimantan Utara (Sabah-Sarawak) dan menetap di hulu-hulu sungai. Sedangkan Ras Malayan (Melayu) terdiri dari suku Kutai (Kab Kutai), suku Paser (Kab Paser), Suku Berau (Kab Berau) dan Suku Bulungan dan Tidung (Kab Bulungan).

Suku - suku di Kalimantan Timur terbagi dalam dua golongan, yaitu Proto Melayu atau Melayu Tua dan Deutro Melayu atau Melayu Muda. Golongan Melayu Tua bermukim di daerah pedalaman dan perbatasan, sedangkan Melayu Muda bertempat tinggal di daerah pantai yang memiliki sungai - sungai besar. Suku Kutai dan Dayak masuk ke dalam golongan Deutro Melayu (Melayu Tua). Namun Suku Kutai kemudian banyak mendapatkan pengaruh dari ras Proto Melayu atau Melayu Muda (Banjar, Bugis, dan Jawa).

Berdasarkan tabel di atas, kearifan lokal masyarakat Kutai Kartanegara yang dikenal luas oleh masyarakat, bahkan oleh wisatawan adalah Upacara Erau. Upacara merupakan salah satu praktik budaya yang berasal dari peninggalan Kerajaan Kutai Kartanegara yang telah ada ratusan tahun yang lalu. Kata "Erau" sendiri berasal dari bahasa Kutai, yaitu eroh yang artinya ramai, riuh, ribut, suasana yang penuh sukacita. Suasana yang ramai bermakna kegiatan sekelompok orang, baik bersifat sakral, ritual, maupun hiburan.

D. Karakteristik Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum dipengaruhi oleh perekonomian global. Hal ini dikarenakan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara sampai saat ini masih sangat bergantung pada sektor pertambangan yang mayoritas diekspor ke pasar global. Secara umum, perekonomian Kutai Kartanegara yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan pada tahun 2022 sebesar Rp. 128.805,43 (juta), mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

Secara umum PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara menduduki peringkat pertama terhadap pembentukan PDRB Kalimantan Timur. Hal ini tentu menjadi dorongan serta tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan perekonomian dengan memaksimalkan potensi

sumber daya yang ada. Tantangan lima tahun ke depan adalah optimalisasi manfaat kegiatan ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat serta memperluas akses masyarakat terhadap pengembangan Ibu Kota Negara.

Perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum dipengaruhi oleh perekonomian global. Hal ini dikarenakan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara sampai saat ini masih sangat bergantung pada sektor pertambangan yang mayoritas diekspor ke pasar global. Secara umum, perekonomian Kutai Kartanegara yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan pada tahun 2022 sebesar Rp. 128.805,43 (juta), mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

Investasi merupakan salah satu variabel pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat investasi juga menjadi salah satu ukuran tingkat daya saing daerah dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan investasi yang kondusif. Berdasarkan data pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, perkembangan investasi Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Penanaman Modal Dalam Negeri cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2020, penanaman modal dalam negeri terjadi di Kutai Kartanegara mengalami kenaikan dari 214 proyek menjadi 466 proyek. Modal yang ditanamkan sebesar 2.284.878 miliar Rupiah yang terinci ke dalam sektor pertambangan batu bara, perkebunan kelapa sawit, industri minyak makan nabati, tenaga listrik, dan jasa penunjang pertambangan umum.

2.3.2 Nilai Signifikan Sumber Daya Alam dan Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara secara Nasional dan Internasional

Kabupaten Kutai Kartanegara selain dikenal dengan sumber daya alamnya yang berlimpah, terutama di sektor migas dan pertambangan batubara, ternyata memiliki kekayaan warisan budaya yang menjadi penopang kehidupan masyarakatnya hingga saat ini, mulai dari situs-situs sejarah, seni budaya hingga tradisi dan adat istiadat yang perlu dilestarikan keberadaannya untuk diwariskan dari generasi ke generasi. Kekayaan warisan budaya tersebut berdasarkan wujud kebudayaannya dapat diklasifikasikan menjadi: 1) warisan budaya berwujud benda yang dapat diraba (*tangible culture heritage*), seperti situs sejarah, candi, prasasti; 2) warisan budaya yang tidak dapat diraba, namun tertangkap oleh panca indera yang lain di luar perabaan (*intangible culture heritage*), seperti: seni musik, sastra, seni pertunjukkan

dan berbagai jenis kuliner; 3) warisan budaya yang lebih abstrak dari warisan budaya di luar perabaan (abstract culture heritage) yang meliputi nilai-nilai budaya (Kumoro, 2021).

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam karena terbentuk dari periodisasi sejarah yang panjang, mulai dari zaman sejarah kuno/klasik yaitu berdirinya kerajaan besar pertama di Nusantara yang bercorak Hindu-Buddha yaitu Kerajaan Kutai Martadipura, zaman perkembangan dan pertumbuhan kerajaan Islam yang ditandai berubahnya Kerajaan Kutai Kartadipura menjadi kesultanan yang bercorak Islam, hingga zaman Indonesia modern pada masa era penjajahan Belanda dan Jepang. Setiap periodisasi sejarah tersebut masih bisa ditelusuri melalui objek peninggalan sejarah yang tersebar di wilayah Kutai Kartanegara dan menjadi aset yang berharga dalam pengembangan destinasi wisata.

Keberadaan Kerajaan Kutai Martadipura dengan temuan situs arkeologisnya menjadi salah satu situs cagar budaya yang sangat penting, bukan hanya skala regional Kalimantan Timur saja, tapi juga skala nasional karena menjadi tonggak untuk pertama kalinya Indonesia memasuki zaman sejarah tulisan yang ditandai dengan temuan tujuh Prasasti Yupa. Selain itu di kawasan tersebut terdapat situs cagar budaya lain, seperti lesung batu, batu menhir, dan beberapa makam kuno. Sayangnya cagar budaya di kawasan Muara Kaman belum diajukan menjadi Warisan Budaya dan Cagar Budaya (WBCB) di tingkat nasional, baru di tingkat kabupaten dan provinsi saja. Padahal cagar budaya di kawasan tersebut memiliki nilai sejarah yang luar biasa dan hasil tinggalan masa lampau sebuah kerajaan tertua di Indonesia. Kemudian dengan adanya rencana pemindahan Ibukota Negara Indonesia di Kalimantan Timur, nilai sejarah dan warisan budaya di Kutai Kartanegara berpotensi akan dikenal di level internasional dan mengembalikan kejayaan kerajaan di Tanah Kutai di masa lampau.

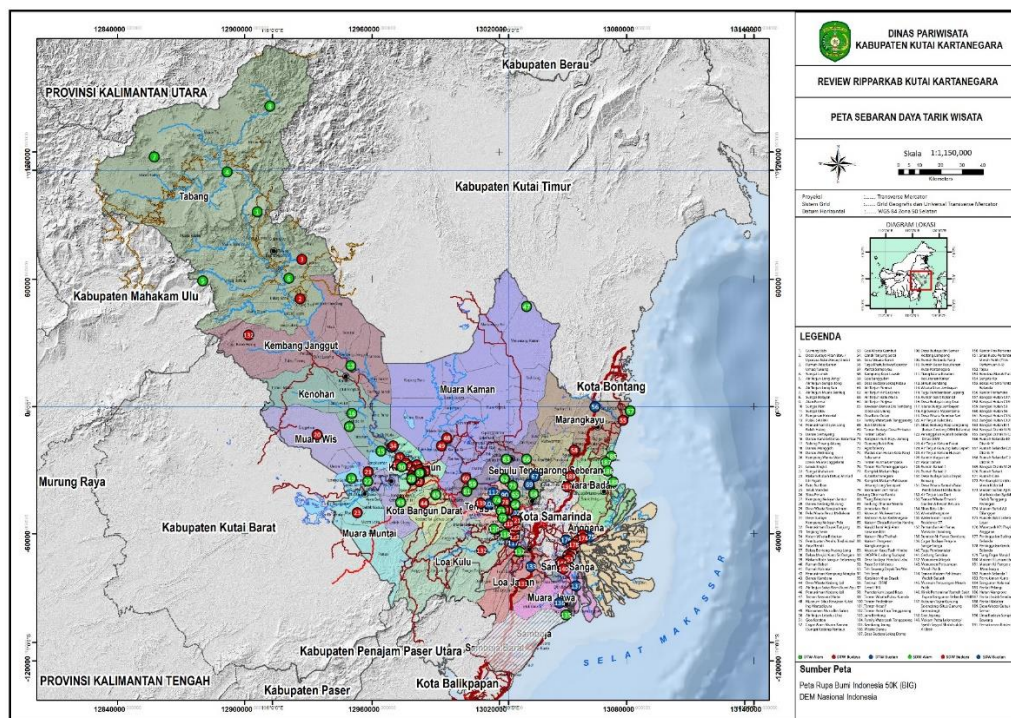
Dengan latar belakang sejarah yang mendalam dan warisan budaya yang kaya serta beragam, sebenarnya Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi untuk menciptakan magnet tersendiri bagi wisatawan. Apalagi kecenderungan saat ini minat wisatawan global semakin tinggi untuk mengunjungi destinasi wisata yang memberikan pengalaman dan pengetahuan terkait warisan budaya masa lalu yang menjadi identitas masyarakat tertentu.

2.3.3 Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Destinasi Pariwisata

A. Daya Tarik Wisata

Destinasi pariwisata memiliki komponen-komponen pembentuknya, seperti daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan fasilitas pendukung, masyarakat, dan lainnya. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Sementara itu, sumber daya wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang potensial dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Suatu lokasi wisata jika sudah dikunjungi wisatawan dapat disebut sebagai daya tarik wisata, sedangkan lokasi wisata yang belum dikunjungi wisatawan disebut sebagai sumber daya wisata.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2011-2025, terdapat pengelompokan daya tarik wisata ke dalam tiga kategori yaitu daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia. Secara total, jumlah daya tarik wisata dan sumber daya wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah 184 buah yang tersebar di 18 kecamatan.



Gambar 2.3 Peta Sebaran Daya Tarik Wisata dan Sumber Daya Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara

Terdapat sekitar 56 daya tarik wisata alam dan sumber daya alam yang tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara, 116 daya tarik wisata budaya dan sumber daya budaya, serta 19 daya tarik wisata buatan dan sumber daya wisata buatan yang tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2.2 Nama dan Sebaran Daya Tarik Wisata Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	DAYA TARIK WISATA	LOKASI	JARAK DARI PUSAT KAB.
KECAMATAN TABANG			
1.	Gunung Babi	Tabang	3 jam Roda 4
2.	Desa Budaya Ritan Baru / Upacara Adat Mecaq Undat	Desa Ritan Baru	82 km dan 6 Jam Long Boat
3.	Rumah Adat Lamin Umaq Tukung	Desa Umaq Tukung	82 km dan 7 Jam Long Boat
4.	Sungai Lunuk	Desa Muara Belinau, Desa Muara Tiq, Desa Muara Tuboq, dan Desa Salung	82 km dan 7 Jam Long Boat
5.	Air Terjun Long Jong/Air Terjun Sungai Jong	Desa Umaq Bekuay	82 km dan 7 Jam long Boat
6.	Air Terjun Long San	Desa Umaq Dian	82 km dan 7 Jam long Boat
7.	Air Terjun Muara Bentuq	Desa Muara Tuboq	82 km dan 7 Jam long Boat
8.	Sungai Belayan	Tabang	82 km dan 7 Jam long Boat
9.	Atan Permai	Desa Sidomulyo	82 km dan 7 jam long boat
10.	Sungai Atan	Desa Sidomulyo	-
11.	Sungai Qiau	-	-
12.	Bangunan Kolonial	Desa Sidomulyo	82 km dan 7 jam long boat
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT			
13.	Pulau SAHRAI	Desa Kembang Janggut	82 km dan 2 Jam Perahu
14.	Pemukiman Dayak Long Beleh Haloq	Desa Long Bleh Alok	82 km dan 2 Jam Long Boat
KECAMATAN KENOHAN			
15.	Danau Semayang	Desa Semayang	82 km dan 1 Jam Perahu
16.	Danau Kahala/Danau Berambai	Desa Kahala Kecamatan Kenohan	82 km dan - 2 Jam Perahu
17.	Solong Pinang Abang	Kecamatan Kenohan	82 km, 2 Jam Perahu dan 2 Jam Jalan Kaki

NO	DAYA TARIK WISATA	LOKASI	JARAK DARI PUSAT KAB.
18.	Danau Monggoh	Desa Teluk Bingkai	82 km, 2 Jam Perahu
KECAMATAN MUARA WIS			
19.	Danau Melintang	Desa Melintang	82 km dan 1.5 Jam Perahu
20.	Kampung Warna-Warni (Desa Muara Enggelam)	Desa Enggelam Kec.Muara Wis	...
21.	Lebak Singkil	Desa Melintang	-
KECAMATAN MUARA MUNTAI			
22.	Sungai Mahakam		
23.	Makam Kubah Datuq Ahmad bin Ngahi		
24.	Batu Bunbun	Desa Muara Muntai Ulu	155 km
25.	Teluk Maridan	Desa Maridan	-
26.	Situs Perian	Desa Perian	82 km dan 2 jam perahu
27.	Kampung Nelayan Jantur	Desa Jantur, Jantur Baru dan Jantur Selatan	82 km dan 2 jam perahu
KECAMATAN KOTA BANGUN			
28.	Danau Kedang Murung	Desa Kedang Murung	82 km dan 30 menit Perahu
29.	Desa Wisata Sangkuliman	Desa Sangkuliman	82 km dan 20 menit perahu
30.	Pela Wisata Pesut Mahakam	Desa Pela	82 km dan 15 menit perahu
31.	Desa Budaya Kampung Nelayan Pela	Desa Pela	82 km 20 menit Perahu
32.	Pemukiman Dayak Tunjung	Desa Rajak	82 km dan 1 Jam Long Boat
33.	Tanjung Serai	Ds.Tanjung Serai RT.03 Kel.Kedang Murung Kec.Kota Bangun	-
34.	Kolam Wisata Bebekan	Desa Sebelimbingan Kec.Kota Bangun	-
35.	Pembuatan Perahu Tradisional	Desa Kota Bangun Seberang	83 km
36.	Arca Nandi	Tanjung Uringin Desa Kota Bangun Ulu	82 km
37.	Bekas Benteng Awang Long	Jalan M, Sidik Desa Kota Bangun Ulu	82 km
38.	Bekas Masjid Kuno Sri Bangun	Jalan M, Sidik Desa Kota Bangun Ulu	82 km
39.	Makam Kota Bangun Seberang	Desa Kota Bangun Seberang	84 km
40.	Rumah Bahari	Desa Kota Bangun Seberang	83 km
41.	Rumah Kolonial	Desa Kota Bangun Ulu	82 km
42.	Pemukiman Kampung Nangka	Desa Kota Bangun Ulu	85 km
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT			
43.	Danau Kumbara	PS.3 Kota Bangun	25 km
44.	Desa Wisata Kedang Ipil	Desa Kedang Ipil	72 km

NO	DAYA TARIK WISATA	LOKASI	JARAK DARI PUSAT KAB.
45.	Air Terjun Suka Alam/Bumi Ayu	Desa Sukabumi	63 km
46.	Pemukiman Kedang Ipil	Desa Kedang Ipil	72 km
KECAMATAN MUARA KAMAN			
47.	Taman Nasional Kutai	Kec.Muara Kaman	-
48.	Museum Situs Kerajaan Kutai Ing Martadipura	Desa Muara Kaman Ulu	89 km Sungai
49.	Monumen Muso Bin Salim	Muara Kaman Ulu	
50.	Air Terjun Lebah Ulaq	Desa Lebah Ulaq	119 km
51.	Goa Keraton	Desa Lebah Ulaq	-
52.	Cagar Alam Muara Kaman (Sungai Kedang Rantau)	Desa Sedulang, Nangka Bonah,Mangkuliding, Liang Buaya, Sedulang	109 km Sungai
53.	Goa Wisata Gambut	Wisata Desa Muara Siran Muara Kaman	-
54.	Candi Tanjung Serai	Desa Muara Kaman Ulu	89 km Sungai
KECAMATAN MARANG KAYU			
55.	Desa Wisata Kersik	Desa Kersik	123/143 km
56.	Tugu Khatulistiwa/Equator	Desa Santan Ulu	109/129 km
57.	Pantai Sampayau	Desa Santan Ilir Kec.Marang Kayu	...
58.	Kampung Kopi Luwak	Jl.Poros SMD – Bontang Desa Perangan Baru KM.60 Kec.Marang Kayu	
KECAMATAN SEBULU			
59.	Goa Sanggulan	Desa Sanggulan	21 km
60.	Desa Budaya Leka Kidau	Desa Leka Kidau	22 km
61.	Air Terjun Permai	Desa Senoni Dusun Puring Sehati RT.2 Kec.Sebulu	71 km
62.	Air Terjun Air Laspiren	Desa Sebulu Modern	42 km
63.	Air Terjun Batu Mulia	Desa Sebulu Ulu	28 km
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG			
64.	Air Terjun Perjiwa	Desa Perjiwa	30 km
65.	Kawasan Danau Eks Tambang Desa Loa Ulung	Kampung Kajang Loa Ulung Kel.Loa Bukit Kec.Tenggarong Seberang Kab.Kukar	29 km
66.	Goa Batu Gelap	Desa Sukamaju	37 km
67.	Family Waterpark Tenggarong	Tenggarong Seberang	33 km
68.	Bukit Mahoni	Desa Bangun Rejo	
69.	Taman Budaya Desa Embalut	Desa Embalut	6,4 km
70.	Taman Leban	-	-
71.	Kerajinan Kulit Kayu Jomoq	Desa Perjiwa	11 km
KECAMATAN TENGGARONG			
72.	Gunung Bukit Biru	Kelurahan Bukit Biru	15 km
73.	Agroforestry	Jl.Pesut No.1 Rt.XI Kel.Timbau Tenggarong	3 km
74.	Waduk dan Hutan Kota Panji Sukarame	Kelurahan Panji dan Sukarame Kecamatan Tenggarong	1.5 km

NO	DAYA TARIK WISATA	LOKASI	JARAK DARI PUSAT KAB.
75.	Taman Kurma Cempaka	Loa Tebu	13 km
76.	Taman Ria Temenggungan	Kelurahan Bukit Biru	10 km
77.	Komplek Makam Raja Kutai Kartanegara	Kelurahan Panji	1 km
78.	Komplek Makam Pahlawan Awang Long Senopati	Teluk Bentangis Kelurahan Sukarame	1.5 km
79.	Monumen Jam Nirun	Jalan Monumen Timur Kelurahan Panji	1 km
80.	Tiang Telephone	Jalan Monumen Timur Kelurahan Panji	1 km
81.	Gedung Dharma Wanita	Jalan Monumen Timur Kelurahan Panji	1 km
82.	Jembatan Besi	Kelurahan Panji	1 km
83.	Museum Mulawarman	Kelurahan Panji	1 km
84.	Kedaton Kutai Kartanegara	Kelurahan Panji	1 km
85.	Makam Diraja Kelambu Kuning	Kelurahan Melayu	2 km
86.	Masjid Jami' Adji Amir Hasanoeddin	Kelurahan Panji	1 km
87.	Makam Abu Thalbah	Gunung Lalang Kelurahan Melayu	2 km
88.	Makam Pangeran Mangkunegoro	Kelurahan Timbau	1 km
89.	Museum Kayu Tuah Himba	Kelurahan Panji	2.5 km
90.	LADAYA (Ladang Budaya)	Jl.H.Bachrin Seman RT.12, Kelurahan Mangkurawang	8 km
91.	Desa Budaya Pondok Labu	Kel. Loa Ipuh Darat	25 km
92.	Pasar Seni Melayu	Kelurahan Panji	1 km
93.	Teh Bawang Dayak Tea Wei	Jalan Silas Bell, Kelurahan Jahab.	9 km
94.	Teh Serai	Jalan Etam, Kelurahan Jahab.	9 km
95.	Kerajinan Khas Dayak	Kelurahan Jahab	10 km
96.	Festival EIFAF	Tenggarong	0 km
97.	Event FKR	Tenggarong	0 km
98.	Planetarium Jagad Raya	Jl. P. Dipenogoro, Kelurahan Panji Tenggarong	1 km
99.	Taman Wisata Pulau Kumala	Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong	0,5 km
100.	Taman Pedestrian	Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong	0 km
101.	Taman Kreatif	Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong	1 km
102.	Taman Kota Raja Tenggarong	Jl. Robert Wolter Mongisidi No.16, Kelurahan Timbau	1 km
103.	Jam Bentong	Jl. Robert Wolter Mongisidi No.16, Kelurahan Timbau	1 km
104.	Family Waterpark Tenggarong	Jl.Enggang Kel.Sukarame Tenggarong	6 km

NO	DAYA TARIK WISATA	LOKASI	JARAK DARI PUSAT KAB.
105.	Kembang Jaong	Dusun Bensamar Kel.Loa Ipuh Darat Kec.Tenggarong	7 km
106.	Wisata Danau	Kelurahan Loa Ipuh Darat	23 km
107.	Desa Budaya Lekaq Dema	Kelurahan Jahab	9 km
108.	Desa Budaya Bin Samar Kedang Lampong	Kelurahan Loa Ipuh	15 km
109.	Rumah Belanda Panji	Jalan Mawar No. 21 Kelurahan Panji	1 km
110.	Rumah Besar Kesultanan Kutai Kartanegara	Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Melayu	4 km
111.	Tiang Istana Keraton Kesultanan Kukar	Kelurahan Panji	1 km
112.	Sirkuit Bendang	Desa Bendang Raya (sebelah kantor desa)	19 km
KECAMATAN LOA KULU			
113.	Wisata Situs Jembayan	Desa Jembayan	18 km
114.	Tugu Pembantaian Jepang	Jalan Mulya Pranoto Desa Loh Sumber	16 km
115.	Rumah Sakit Kolonial	Jalan Mulya Pranoto Desa Loh Sumber	13 km
116.	Desa Budaya Lung Anai	Desa Lung Anai	38 km
117.	Istana Bunga Jembayan	Jl.Deso Jembayan Poros Tenggarong – Samarinda	-
118.	Agrowisata Mapantama	Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu	-
119.	Desa Wisata Sumber Sari	Desa Sumbersari	20 km
120.	Air Terjun Bukit Biru	Loh Sumber	9 km
121.	Situs Gedung Atap Lengkung (bekas Gedung OBM Belanda)	Jalan A Yani Desa Loa Kulu Kota	12 km
122.	Peninggalan Rumah Belanda Dinas OBM	Jalan A Yani Desa Loa Kulu Kota	12 km
123.	Air Terjun Keham Pesut	Desa Jonggon Jaya	35 km
124.	Air Terjun Gunung Batu Lepeh	Kecamatan Loa Kulu	18 km
125.	Air Terjun Keham Huluan	Desa Jonggon	55 km
126.	Kantor Magazium	Jalan A Yani, Desa Loa Kulu Kota	12 km
127.	Pasar Bahari	Jalan Raya Loa Kulu Desa Loa Kulu Kota	13 km
128.	Rumah Bahari 1	Jalan Raya Loa Kulu Desa Loa Kulu Kota	13 km
129.	Rumah Bahari 2	Jalan Raya Loa Kulu Desa Loa Kulu Kota	13 km
130.	Desa Budaya Suku Dayak Benuaq	Desa Jonggon	55 km
KECAMATAN LOA JANAN			
131.	Desa Wisata Batuah/Balai Pembibitan Holtikultura	Jl. Samarinda – Balikpapan Km.40 Desa Batuah	47 km
132.	Air Terjun Loa Duri	Desa Loa Duri Ilir	17 km

NO	DAYA TARIK WISATA	LOKASI	JARAK DARI PUSAT KAB.
133.	Taman Wisata Emastri Garden & Resort Batuan	Desa Batuah	15 km
134.	Situs Batu Ulin	Dusun Marga Mulya RT.15 Kec.Loa Janan	
KECAMATAN MUARA JAWA			
135.	Wisata Mangrove	Handil Baru	108 km
136.	Waterboom Handil Residence 77	Handil Muara Jawa	...
137.	Pemandian Air Panas Mahkota Dondang	Dondang Muara Jawa	...
138.	Sumber Air Panas Dondang	Dondang Muara Jawa	124 km
KECAMATAN SANGA-SANGA			
139.	Cagar Budaya Penjara Sanga-Sanga	Jalan masjid Kelurahan Sanga-Sanga Dalam	53/73 km
140.	Tugu Pembantaian	Kelurahan Jawa	52 km
141.	Gedung Sandisa	Kelurahan Sanga- Sanga Dalam	51/71 km
142.	Monumen Minyak	Kelurahan Sanga- Sanga Dalam	51/71 km
143.	Monumen Perjuangan Merah Putih	Kelurahan Muara Sanga-Sanga	61/81 km
144.	Taman Makam Pahlawan Wadah Batuah	Kelurahan Sanga- Sanga Dalam	53/73 km
145.	Museum Perjuangan Merah Putih	Kelurahan Sanga- Sanga Dalam	51/71 km
146.	Klinik Pertamina/ Rumah Sakit Expan Bangunan Belanda 1898	Jalan Jenderal Sudirman 41 Kelurahan Sanga- Sanga Dalam	52/72 km
147.	Kuburan Tajau Gunung Selendang (Situs Gunung Selendang)	Kelurahan Sanga- Sanga Dalam	52/72 km
148.	Goa Jepang	Kelurahan Sanga-Sanga Muara	71 km
149.	Makam Petta Loloncong/Syekh Sayyid Shalahuddin Al Basir	-	-
150.	Kantor Pos Pertama	Jalan Ampera Kelurahan Sanga-Sanga Dalam	51/71 km
151.	Situs Kubu Pertahanan Merah Putih (Titik Pertemuan 1-9)	Kelurahan Muara Sanga-Sanga sampai dengan Sanga-Sanga Dalam	51/71 km
152.	Tajau	Kelurahan Sanga- Sanga Dalam	51/71 km
153.	Bendera Merah Putih	Kelurahan Sanga- Sanga Dalam	51/71 km
154.	Senjata Api	Kelurahan Sanga- Sanga Dalam	51/71 km
155.	Bekas Asrama Tentara Belanda	Kelurahan Sanga- Sanga Dalam	51/71 km
156.	Kantor Pertamina	Jalan Dr. Soetomo 40 Kelurahan Sanga- Sanga Dalam	51/71 km
157.	Bangsar Hutan C17 51	Jalan A Yani C17 Kelurahan Sanga-Sanga Dalam	51/71 km

NO	DAYA TARIK WISATA	LOKASI	JARAK DARI PUSAT KAB.
158.	Bangsals Hutan C18 52	Jalan A Yani C18 Kelurahan Sanga- Sanga Dalam	51/71 km
159.	Bangsals Hutan 53	Jalan A Yani 53 Kelurahan Sanga- Sanga Dalam	51/71 km
160.	Bangsals Hutan 56	Jalan A Yani 56 Kelurahan Sanga- Sanga Dalam	51/71 km
161.	Bangsals Hutan C132	Jalan A Yani C132 Kelurahan Sanga- Sanga Dalam	51/71 km
162.	Bangsals Hutan C131	Jalan A Yani C131 Kelurahan Sanga- Sanga Dalam	51/71 km
163.	Bangsals Hutan B11	Jalan A Yani B11 Kelurahan Sanga- Sanga Dalam	51/71 km
164.	Bangsals Distrik IV B21	Jalan Jenderal Sudirman B21 Kelurahan Sanga- Sanga Dalam	51/71 km
165.	Bangsals Distrik IV C5	Jalan Jenderal Sudirman C5 Kelurahan Sanga- Sanga Dalam	51/71 km
166.	Rumah Belanda 49 Distrik IV	Jalan Jenderal Sudirman 49 Kelurahan Sanga- Sanga Dalam	51/71 km
167.	Rumah Belanda C23 Distrik IV	Jalan Jenderal Sudirman C23 Kelurahan Sanga- Sanga Dalam	51/71 km
168.	Rumah Belanda C 24 Distrik IV	Jalan Jenderal Sudirman C24 Kelurahan Sanga- Sanga Dalam	51/71 km
169.	Bangsals Distrik VI 29	Jalan Kawasan 29 Kelurahan Jawa	52/72 km
170.	Rumah Bahari	Kelurahan Sanga- Sanga Dalam	52/72 km
171.	Rumah Cina	Kelurahan Sanga- Sanga Dalam	52/72 km
172.	Pembangkit Listrik dan Mesin Kolonial	Kelurahan Muara Sanga-Sanga	61/81 km
KECAMATAN ANGGANA			
173.	Makam Sultan Aji Raja Mahkota dan Syekh Habib Tunggang Parangan	Desa Kutai Lama	53/73 km
174.	Makam Sultai Aji Dilanggar	Desa Kutai Lama	53/73 km
175.	Puncak Bukit Jahetan Layar	Desa Kutai Lama	55/75 km
176.	Waterpark KPJ Playland Anggana	Jl.Poros Samarinda - Anggana	...
177.	Peninggalan Suling Belanda	Jalan Minyak Anggana	48/68 km
178.	Peninggalan Gardu Belanda	Anggana	48/68 km
179.	Tiang Pagar Masjid	Sungai Keramat Desa Kutai Lama	53/73 km
180.	Makam H.Lasuan Bonte	Desa Kutai Lama	...
181.	Makam Aji Pangeran Mandarayu	Desa Kutai Lama	53/73 km
182.	Rumah Belanda 1	Anggana	48/68 km
183.	Pemukiman Kuno	Desa Kutai Lama	53/73 km

NO	DAYA TARIK WISATA	LOKASI	JARAK DARI PUSAT KAB.
184.	Bangunan Kolonial	Desa Sungai Meriam	47/67 km
KECAMATAN MUARA BADAK			
185.	Pantai Pelangi	Desa Tanjung Limau	82/102 km
186.	Hutan Mangrove	Desa Tanjung Limau	
187.	Pantai Indah Sembera	Desa Tanjung Limau	
188.	Pantai Malabar	Desa Tanjung Limau	
189.	Desa Wisata Gubuk Semar	Jl.Poros SMD – Bontang Desa Badak Mekar Kec.Muara Badak	
190.	Desa Budaya Sungai Bawang	Desa Sungai Bawang	31/51 km
191.	Pemakaman Kristen	Desa Sungai Bawang	31.51 km

B. Fasilitas pariwisata

Fasilitas akomodasi adalah sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yang bepergian. Pada umumnya, antara wisatawan satu dengan wisatawan lain membutuhkan akomodasi dengan harga dan fasilitas yang berbeda. Terdapat 101 fasilitas akomodasi yang tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara. Fasilitas akomodasi tersebut secara umum merupakan Hotel Non Bintang seperti Homestay dan Hotel Melati. Selain itu, hanya terdapat 4 (empat) hotel berbintang yaitu Lesong Batu Tenggarong, Grand Elty Singgasana Tenggarong, Grand Fatma, dan Karya Tapin II.

Fasilitas makan dan minum merupakan tempat yang menyediakan pelayanan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya. Fasilitas makan dan minum dapat berupa rumah makan, restoran, bar/rumah minum, café, jasa boga, dan pusat penjualan makanan. Terdapat 363 fasilitas makan dan minum di Kabupaten Kutai Kartanegara yang tersebar di berbagai kecamatan. Berdasarkan data, fasilitas makan dan minum di Kabupaten Kutai Kartanegara berpusat di Kecamatan Tenggarong sebesar 28%.

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki Fasilitas Informasi Pariwisata atau Tourist Information Center (TIC) yang berlokasi di pusat ibukota yaitu di Kecamatan Tenggarong. Fasilitas informasi pariwisata ini terletak di bangunan yang juga berfungsi sebagai daya tarik wisata di Tenggarong yaitu Jam Bentong yang merupakan monumen penunjuk waktu yang menjadi ikon Kota Tenggarong. Berdasarkan Koordinator Jam Bentong di Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, pusat informasi pariwisata ini nantinya akan dipindah ke gedung tepat

berada di depan Jam Bentong, sedangkan Jam Bentong sendiri akan dijadikan museum mini (Dinas Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara, 2022).

Terdapat kurang lebih 8 (delapan) biro perjalanan ataupun *travel agent* yang beroperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun, persebarannya masih berpusat di Kecamatan Tenggarong.

Fasilitas hiburan merupakan tempat yang menyediakan pelayanan berupa seni pertunjukan, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata. Terdapat fasilitas hiburan seperti tempat karaoke dan bar yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlahnya yaitu sekitar 14 tempat karaoke dan 29 bar yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, aksesibilitas pariwisata merupakan semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

Jaringan jalan dan jembatan sebagai akses penghubung utama transportasi darat mempunyai peranan penting dalam peningkatan aksesibilitas dan pengembangan pariwisata. Jaringan jalan dan jembatan memudahkan akses untuk wisatawan menuju kawasan pariwisata. Semakin baik sistem jaringan yang tersedia menuju kawasan pariwisata maka semakin mudah aksesibilitas yang didapat, begitu juga sebaliknya semakin rendah tingkat aksesibilitas yang didapat maka semakin sulit menuju kawasan tersebut. Panjang jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan atas status jalan terbagi atas; jalan negara; jalan provinsi; dan jalan kabupaten, panjang jalan kabupaten sampai tahun 2020 mencapai 2.193,02 Km, Jalan Provinsi.

Aksesibilitas darat menuju Kutai Kartanegara juga turut didorong oleh keberadaan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang memiliki panjang sekitar 97,27 Km. Jalan Tol tersebut merupakan alternative jalan yang menghubungkan Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Jalan tol Balikpapan-Samarinda ini terbagi kedalam 5 (lima) seksi, yaitu:

1. Seksi 1 Ruas Karang Joang - Samboja sepanjang 21,66 Km
2. Seksi 2 Ruas Samboja – Muara Jawa sepanjang 30,98 Km
3. Seksi 3 Ruas Muara Jawa – Palaran sepanjang 17,30 Km

4. Seksi 4 Ruas Palaran – Sp. Mahkota II sepanjang 16,59 Km
5. Seksi 5 Ruas Manggar - Karang Joang sepanjang 10,74 Km

Terdapat dua bandara terdekat dari Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Bandar Udara Internasional Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto yang berada di Kota Samarinda dan Bandar Udara Internasional Sultan Aji Myhammad Sulaiman Sepinggian yang ada di Kota Balikpapan. Wisatawan dapat menempuh jalur darat dengan jarak sekitar 53 km dan waktu tempuh sekitar 1,23 jam jika menggunakan Bandar Udara Internasional APT Pranoto untuk mencapai Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sebagai kawasan yang dilewati Sungai Mahakam, Kabupaten memiliki aksesibilitas laut atau perairan yang dapat dimanfaatkan. Selain terdapat kapal penyebrangan untuk orang dan barang berupa kapal kecil maupun kapal boat, terdapat kapal penyebrangan untuk kendaraan bermotor seperti mobil dan motor.

C. Fasilitas pendukung pariwisata

Fasilitas kesehatan yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pariwisata antara lain 3 rumah sakit, 32 puskesmas, 171 puskesmas pembantu, 44 klinik atau balai kesehatan, 54 polindes, dan 31 apotek.

Fasilitas eribadatan yang tersedia di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari masjid, mushola, gereja protestan, gereja katolik dan pura. Berdasarkan Data Kabupaten Dalam Angka Tahun 2022, sarana ibadah yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh masjid (779 unit) dan mushola (893 unit) dikarenakan sebagian besar penduduknya memeluk Agama Islam. Kemudian disusul tempat peribadatan umat Protestan yaitu sebanyak 221 unit, gereja Katolik sebanyak 36 unit, dan Pura sebanyak 15 unit.

Fasilitas keamanan sebanyak 20 unit berupa kantor polisi tersebar di seluruh kecamatan. Fasilitas keuangan menjadi bagian dari amenities yang merupakan infrastruktur penunjang dalam penyelenggaraan kegiatan wisata yang dibutuhkan oleh wisatawan dalam aktivitasnya di sebuah lokasi wisata. Fasilitas keuangan di Kabupaten Kutai Kartanegara ketersediaannya cukup tersebar. Berdasarkan data Bank Indonesia Cabang Samarinda, jumlah kantor bank konvensional di Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah 75 Bank. Ketersediaan bank tersebut didominasi oleh Bank Umum/Bank Himbara sebanyak 45 Bank dan Bank Umum Pemerintah Daerah yaitu sejumlah 29 Bank.

C. Prasarana umum

Prasarana umum pendukung pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara berupa Jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan jalan dan jembatan, dan jaringan telekomunikasi.

Berdasarkan data pada Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2022, pada tahun 2020 jumlah pelanggan air PDAM mencapai 88.763 pelanggan atau terjadi peningkatan sebesar 5.835 pelanggan jika dibandingkan tahun 2019. Pelanggan terbesar terdapat di Kecamatan Tenggarong mengingat kecamatan tersebut kepadatan penduduknya cukup tinggi yaitu sebanyak 25.378 pelanggan atau 28% dari keseluruhan pelanggan di Kabupaten Kutai Kartanegara. sebanyak 24,615,756 m³ telah tersalurkan kepada 84.622 pelanggan atau 443.185 penduduk. Sebagai alternatif untuk mendapatkan sumber air bersih, biasanya penduduk memanfaatkan air sungai, air tanah (pompa/sumur), mata air dan air hujan.

Jaringan listrik merupakan prasarana dasar pariwisata yang penting untuk menunjang kegiatan wisata. Dengan adanya jaringan listrik di sebuah kawasan pariwisata akan mendorong terbangunnya aktivitas komersial sehingga menciptakan jaringan rantai pasok (supply chain) atau keterkaitan langsung dan tidak langsung dengan berbagai sektor ekonomi lainnya, seperti hotel, restoran, tempat hiburan, toko souvenir, dan lain sebagainya. Berdasarkan data BPS pada tahun 2020, produksi listrik di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 345.308.515 KWh. Produksi listrik tersebut disuplai oleh Unit Layanan Pelanggan (ULP) Tenggarong dan ULP Kota Bangun. jumlah pelanggan listrik di Kutai Kartanegara sejumlah 118.437 pelanggan. Dari tahun 2016 - 2020, jumlah pelanggan listrik relatif mengalami kenaikan setiap tahunnya. Untuk kurun waktu 2019 - 2020, ULP Tenggarong mengalami kenaikan sebanyak 1.787 pelanggan. Sama halnya dengan ULP Kota Bangun yang mengalami kenaikan 4.090 pelanggan. Untuk saat ini, pasokan listrik dari PLN belum mampu memasok jaringan listrik secara merata ke setiap desa, terutama desa yang berada di lokasi terpencil/remote sehingga jauh dari jaringan gardu induk. Sebagai contoh di Kecamatan Kota Bangun yang memiliki 21 desa, ada 4 desa yang belum dapat menikmati listrik PLN.

Jaringan dan pelayanan telekomunikasi saat ini menjadi hal penting bagi masyarakat maupun wisatawan. Jaringan telekomunikasi memudahkan wisatawan dalam berkomunikasi dan mengakses informasi terkait kawasan pariwisata. Berdasarkan data tahun 2020, jumlah BTS yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah 206 BTS. Dengan jumlah BTS tersebut masih belum memberikan jaringan telekomunikasi secara merata, terutama di

daerah-daerah terpencil atau masuk kategori 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Terjadi peningkatan jangkauan sinyal telekomunikasi dari tahun 2020-2021. Di tahun 2021, hanya tersisa 3 desa yang termasuk ke dalam *blank spot area* artinya sama sekali tidak terjangkau sinyal telekomunikasi, baik itu sinyal internet maupun sinyal seluler. Sementara mayoritas desa sudah mendapatkan jaringan telekomunikasi yang didominasi jaringan 4G/LTE sehingga menandakan sebagian besar wilayahnya sudah bisa mengakses sinyal internet.

Kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan sampah sesuai jenis, jumlah, dan/atau sifatnya; pengumpulan sampah ke tempat pengolahan residu; pengangkutan sampah dari tempat pengolahan residu ke TPA; pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Kegiatan pengolahan sampah telah dilakukan baik di TPS3R, TPST, maupun oleh pihak ketiga seperti budidaya *maggot*, komposting, *craft*, dan pembuatan paving.

Tantangan-tantangan Pembangunan destinasi pariwisata Kutai Kartanegara diantaranya sebagai berikut:

- a. Perlunya peningkatan upaya perlindungan terhadap sumber daya pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya sumber daya alam maupun budaya yang memiliki kerentanan tinggi. Sebagai contoh, penyusutan ribuan hektar habitat orangutan karena konversi lahan untuk pemukiman, perkebunan sawit, ladang dan sawah, Hutan Tanaman Industri atau HTI dan tambang;
- b. Belum tersusunnya narasi serta interpretasi yang baik untuk berbagai daya tarik wisata yang ada di Kutai Kartanegara terutama pada daya tarik wisata budaya dan sejarah, sehingga kualitas nilai daya tarik yang ada tidak terkomunikasikan dengan baik kepada wisatawan;
- c. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas fasilitas pariwisata yang mampu memenuhi kebutuhan wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Sejalan dengan peningkatan kualitas fasilitas tersebut juga harus sebanding dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang mengacu pada standar pelayanan minimal di sektor pariwisata;
- d. Perlunya pemerataan sebaran dan peningkatan kualitas fasilitas umum yang dapat menunjang kegiatan pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemerataan sebaran dan peningkatan kualitas fasilitas umum ini penting untuk memberikan jaminan kepada wisatawan mendapatkan pelayanan yang baik saat mengunjungi berbagai daya tarik wisata

- yang tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya yang memiliki daya tarik wisata dan sudah sering dikunjungi wisatawan;
- e. Perlunya peningkatan aksesibilitas khususnya pemanfaatan transportasi air atau sungai sebagai jalur wisata bagi wisatawan. Selain sebagai jalur wisata, Kabupaten Kutai Kartanegara juga perlu memanfaatkan Sungai Mahakam secara maksimal sebagai salah satu pintu masuk ke Kabupaten Kutai Kartanegara bagi wisatawan;
 - f. Perlunya meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat secara aktif dalam setiap upaya pembangunan pariwisata yang dilakukan agar nilai tambah dari kegiatan pariwisata yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat;
 - g. Perlunya sertifikasi pelaku usaha pariwisata yang ada saat ini agar SDM pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki standar kualitas yang sama, sehingga memberikan kenyamanan dan pengalaman berwisata yang positif bagi wisatawan dalam menggunakan jasa usaha pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.3.4 Industri Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata sedangkan industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Dalam peraturan perundangan tersebut juga dijelaskan bahwa terdapat 13 bidang usaha pariwisata, yaitu 1) usaha daya tarik wisata; 2) usaha kawasan pariwisata; 3) usaha jasa transportasi wisata; 4) usaha jasa perjalanan wisata; 5) usaha jasa makanan dan minuman; 6) usaha penyediaan akomodasi; 7) usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; 8) usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; 9) usaha jasa informasi pariwisata; 10) usaha jasa konsultan pariwisata; 11) usaha jasa pramuwisata; 12) usaha wisata tirta; dan 13) usaha spa.

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata memaparkan rincian 13 bidang usaha pariwisata yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.

Adapun usaha pariwisata yang saat ini sudah berkembang di Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai rincian bidang dan jenis usaha tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Jenis Usaha Pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

NO	BIDANG USAHA	JENIS USAHA	ADA	TIDAK ADA
1	Usaha daya tarik wisata	a. Pengelolaan museum	•	
		b. Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala	•	
		c. Pengelolaan pemandian air panas alami	•	
		d. Wisata goa	•	
		e. Wisata agro	•	
		f. Pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat	•	
		g. Pengelolaan objek ziarah	•	
2	Usaha kawasan pariwisata	Kawasan pariwisata	•	
3	Usaha jasa transportasi wisata	a. Angkutan jalan wisata		•
		b. Angkutan wisata dengan kereta api		•
		c. Angkutan laut wisata dalam negeri		•
		d. Angkutan laut internasional wisata		•
		e. Angkutan wisata di sungai dan danau	•	
4	Usaha jasa perjalanan wisata	a. Agen perjalanan wisata	•	
		b. Biro perjalanan wisata	•	
5	Usaha jasa makan dan minuman	c. Restoran	•	
		d. Rumah makan	•	
		e. Jasa boga	•	
		f. Bar/pub	•	
		g. Kafe	•	
6	Usaha penyedia akomodasi	a. Hotel	•	
		b. Pondok wisata	•	
		c. Bumi perkemahan	•	
		d. Persinggahan karavan		•
		e. Vila	•	
		f. Kondominium hotel		•
		g. Apartement servis		•
		h. Rumah wisata	•	
		i. Jasa manajemen hotel		•
		j. Hunian wisata senior/lanjut usia		•
7	Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi	a. Sanggar seni	•	
		b. Jasa impresariat/promotor		•
		c. Galeri seni		•
		d. Gedung pertunjukan seni	•	
		e. Rumah bilyar	•	
		f. Lapangan golf		•
		g. Gelanggang bowling		•
		h. Gelanggang renang	•	
		i. Lapangan sepak bola/futsal	•	
		j. Lapangan tenis		•
		k. Wisata olahraga minat khusus	•	

NO	BIDANG USAHA	JENIS USAHA	ADA	TIDAK ADA
		l. Wisata petualangan alam	•	
		m. Taman bertema	•	
		n. Taman rekreasi	•	
		o. Kelab malam	•	
		p. Diskotik		•
		q. Karaoke	•	
		r. Arena permainan	•	
		s. Panti/rumah pijat	•	
8	Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran	Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran	•	
9	Usaha jasa informasi pariwisata	Jasa informasi pariwisata		•
10	Usaha jasa konsultan pariwisata	Jasa konsultan pariwisata		•
11	Usaha jasa pramuwisata	Jasa pramuwisata	•	
12	Usaha wisata tirta	a. Wisata arum jeram	•	
		b. Wisata selam	•	
		c. Wisata dayung	•	
		d. Wisata selancar		•
		e. Wisata olahraga tirta	•	
		f. Wisata memancing	•	
		g. Dermaga wisata		•
13	Usaha spa	Spa	•	

Sumber: Data diolah, 2023.

Berdasarkan tabel di atas, bidang usaha pariwisata yang sudah berkembang di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai saat ini adalah usaha daya tarik wisata; usaha usaha jasa transportasi wisata; usaha jasa perjalanan wisata; usaha jasa makanan dan minuman; usaha penyediaan akomodasi; usaha jasa penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; usaha jasa pramuwisata; usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran usaha wisata tirta; dan usaha spa. Selain jenis usaha-usaha tersebut, sebetulnya Kabupaten Kutai Kartanegara masih memiliki banyak potensi jenis usaha pariwisata namun belum dikelola dengan baik. Dibutuhkan kerjasama dengan berbagai asosiasi dalam mengembangkan industri pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025 strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antarusaha dilakukan dengan cara: (1) mendorong kemitraan antarusaha pariwisata dengan industri kecil dan menengah serta usaha mikro, kecil dan

menengah, serta (2) meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar. Selain itu, dalam hal pemasaran, keterkaitan antar industri kecil, menengah dengan usaha pariwisata perlu dilakukan dengan cara memperkuat akses dan jejaring industri kecil-menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil, menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global.

Selain Jenis usaha pariwisata, Industri Pariwisata juga sangat dipengaruhi oleh koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bergerak pada usaha-usaha untuk menopang sektor pariwisata. Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri memiliki beberapa jenis produk usaha mikro dan kecil yang cukup dikenal di daerahnya. Namun demikian, tidak semua UMK di Kabupaten Kutai Kartanegara berkaitan secara langsung pada sektor pariwisata. Jumlah UMKM di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 331 unit usaha.

Integrasi antara usaha kecil dan menengah dengan usaha pariwisata dan secara lebih luas terintegrasi dengan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara harus terus didorong dan diperkuat melalui berbagai kebijakan dan program fasilitasi. Pada pembangunan industri pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, antara lain:

- h. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada usaha pariwisata melalui berbagai pelatihan dan memiliki sertifikasi berstandar nasional dan internasional sesuai dengan skala usaha dan produknya.
- i. meningkatkan daya saing industri pariwisata dengan melakukan perbaikan standar pelayanan dan kualitas produk secara bertahap, sehingga pada akhirnya terbentuk sebuah ekosistem yang mampu mengintegrasikan produk-produk UMKM Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi unggulan di tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan tingkat nasional;
- j. memperkuat keterkaitan antarusaha pariwisata dan antara usaha pariwisata dengan usaha pendukungnya;
- k. mengintegrasikan produsen lokal ke dalam rantai nilai industri pariwisata skala regional Provinsi Kalimantan Timur maupun nasional dengan memanfaatkan berbagai saluran digital yang sudah tersedia;

2.3.5 Pasar Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, wisatawan merupakan orang yang melakukan wisata. Pengertian wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kutai Kartanegara yang tercatat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan pada kunjungan ke beberapa daya tarik wisata dan kunjungan tamu hotel di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kunjungan ke daya tarik wisata itu diantaranya adalah Museum Mulawarman Tenggarong, Ladaya (Ladang Budaya) Tenggarong, Waterboom HRD 777 Muara Jawa Ilir, Pulau Kumala Tenggarong, Pantai Tanah Merah Tenggarong, Pantai Pangempang Muara Badak, Pantai Sambera Muara Badak, Pantai Malabar Muara Badak, Planetarium Jagad Raya Tenggarong, Istana Bunga Jembayan, Family Water Park Tenggarong, Museum Kayu Tenggarong, Situs Makam Raja-raja Kutai Tenggarong, Situs Makam Sinopati Aw. Long Tenggarong, Makam Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa Jembayan, Situs Lesung Batu Muara Kaman, Situs Makam Raja Aji Mahkota dan Aji Dilanggar Anggana, Situs Makam Pangeran Mangkunegoro Tenggarong, Kembang Jaong Tenggarong, Tugu Equator Marang Kayu, Wisata Sungai Mahakam, Air Terjun Suka Alam, Desa Wisata Pela Kota Bangun, Desa Wisata Kedang Ipil Kota Bangun, Desa Wisata Kersik Marang Kayu, Desa Wisata Sumber Sari, Taman Gubang Tenggarong Seberang, dan Desa Budaya Leqak Kidau Sebulu.

A. Jumlah dan Perkembangan Kunjungan Wisatawan ke Daya Tarik Wisata

Perkembangan kunjungan pasar wisatawan ke daya tarik wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara bersifat tidak tetap naik dan turunnya. Pada data berikut ini tersedia data dari tahun 2018 hingga 2022. Beberapa daya tarik wisata terdapat data yang tidak lengkap, seperti pada tahun sebelumnya daya tarik wisata tersebut belum ada ataupun pada tahun berikutnya daya tarik tersebut sudah tidak ada. Secara umum, hampir setiap tahunnya daya tarik wisata Ladaya (Ladang Budaya) di Kecamatan Tenggarong mendapatkan jumlah kunjungan terbesar dibandingkan dengan daya tarik wisata lainnya. Yaitu 19,38% dari kunjungan wisatawan tahun 2022.

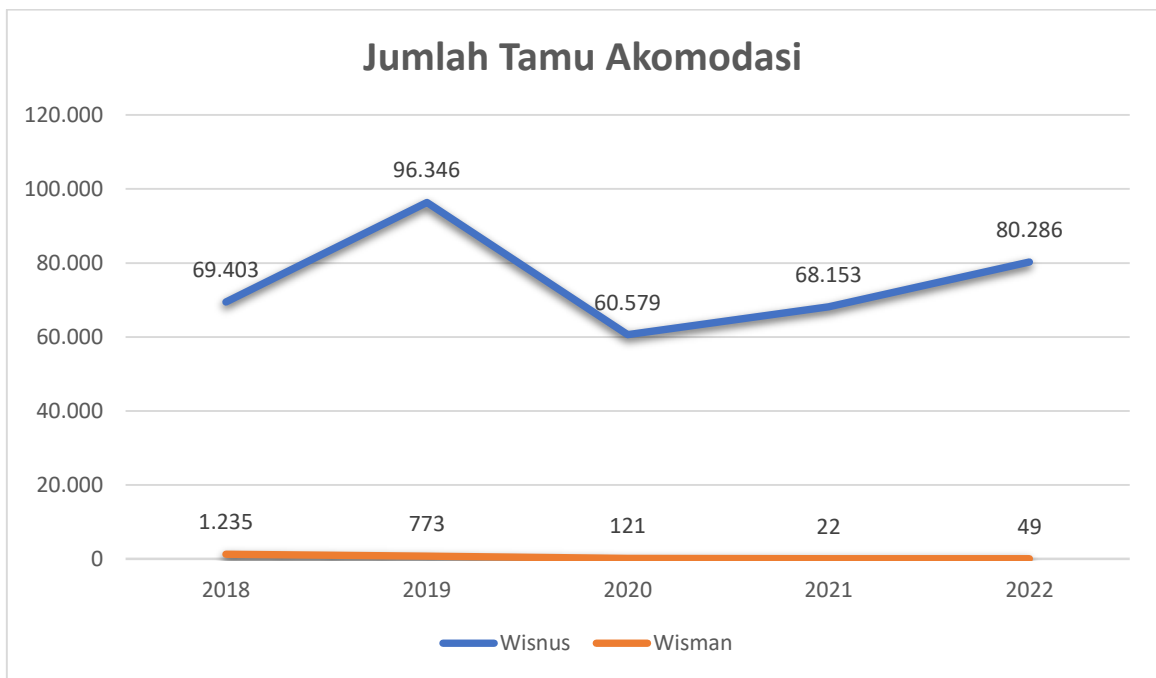
Pulau Kumala di Kecamatan Tenggarong mendapatkan jumlah kunjungan tertinggi dibandingkan daya tarik wisata lainnya pada tahun 2018 (27,02%). Kemudian tahun 2019 Pulau Kumala mulai mengalami penurunan jumlah kunjungan (17,98%), hingga pada tahun 2020 hanya mendapatkan kunjungan wisatawan 7,79%, dan pada tahun 2021 saat masa pandemi Covid-19 Pulau Kumala tidak ada kunjungan wisatawan. Setiap tahunnya Kabupaten Kutai Kartanegara selalu dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dengan daya tarik wisata yang paling diminati ialah Situs Makam Raja-Raja Kutai dan Museum Mulawarman di Kecamatan Tenggarong.

Data jumlah kunjungan wisatawan berdasarkan perkembangan tamu akomodasi ke Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan data dari tahun 2018-2022. Pencatatan jumlah tersebut masih termasuk pada hotel-hotel yang berada di wilayah IKN seperti Kecamatan Samboja. Secara keseluruhan, kunjungan wisatawan yang menginap di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami peningkatan yang cukup tinggi setelah pandemi Covid-19. Pada tahun 2019, jumlah wisatawan yang menginap di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 37,48%. Kemudian pada tahun 2020 saat awal pandemi Covid-19 mengalami penurunan jumlah kunjungan wisatawan cukup besar yaitu penurunannya hingga mencapai -59,99%. Kemudian perlahan pada tahun 2021 mengalami peningkatan 12,31% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 80.335 kunjungan wisatawan yang menginap di Kabupaten Kutai Kartanegara (17,84%). Lebih jelas jumlah kunjungan wisatawan yang menginap berdasarkan data jumlah kunjungan tamu akomodasi dapat dilihat dalam tabel dan diagram berikut ini.

Tabel 2.4 Jumlah Tamu Akomodasi di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2022

TAHUN	JENIS WISATAWAN		JUMLAH
	WISATAWAN NUSANTARA	WISATAWAN MANCANEGARA	
2018	69.403	1.2335	70.638
2019	96.346	773	97.119
2020	60.579	121	60.700
2021	68.153	22	68.175
2022	80.286	49	80.335

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, 2018-2022



Gambar 2.4 Diagram Jumlah Tamu Akomodasi di Kabupaten Kutai Kartanegara

B. Profil Wisatawan

Karakteristik segmen wisatawan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan pada survei primer yang dilakukan pada tahun 2023. Survei ini melibatkan penyebaran kuesioner kepada wisatawan secara daring dan penyebaran di beberapa hotel yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebanyak 65 responden berpartisipasi dalam pengisian kuesioner ini, dengan rincian 61 responden daring dan 4 responden tamu hotel. Hasil dari kuesioner ini digunakan untuk menganalisis profil wisatawan, karakteristik perjalanan, pandangan, serta preferensi wisatawan terhadap produk pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara. Keseluruhan responden yang diperoleh merupakan wisatawan nusantara.

Berdasarkan hasil responden dari kuesioner, dapat dianalisis beberapa profil wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kutai Kartanegara. Profil wisatawan mencakup informasi mengenai jenis kelamin, usia wisatawan, daerah asal, tingkat pendidikan, pekerjaan, serta pendapatan wisatawan.

Dari total 65 responden, mayoritas wisatawan yang mengunjungi Kabupaten Kutai Kartanegara adalah laki-laki, sebanyak 70,80%, sementara sisanya sebanyak 29,20% adalah perempuan. Berdasarkan pada kelompok umur, sebagian besar wisatawan sebanyak 76,48% merupakan wisatawan yang berada pada kelompok umur produktif (15-46 tahun) yang artinya beberapa

diantaranya telah memasuki kematangan sosial dan ekonomi. Sementara 24,62% lainnya merupakan kelompok umur lebih dari 47 tahun.

Responden wisatawan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan wisatawan dengan tingkat pendidikan yang bervariasi, sekitar 58,50% tingkat pendidikan didominasi oleh sarjana, diikuti dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 32,30%. Kegiatan wisata yang dilakukan oleh segmen wisatawan ini tidak hanya untuk bersenang senang, tetapi juga mengunjungi sanak saudara, melakukan perjalanan bisnis dan mengunjungi situs sejarah.

Rentang usia wisatawan yang datang berkunjung ke Kutai Kartanegara sendiri paling banyak masuk ke dalam kategori dewasa yakni berumur 26-45 tahun sebanyak 53,85% dan lansia berusia lebih dari 45 tahun sebanyak 35,38%. Status pekerjaan yang disoroti dalam survei menunjukkan bahwa mayoritas wisatawan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan mereka yang telah memiliki status pekerjaan tetap. Sebagian besar dari mereka yang memiliki pekerjaan tetap bekerja sebagai pegawai negeri (50,77%) dan sebagian besar kedua berstatus sebagai pegawai swasta (24,62%).

Kemampuan ekonomi responden wisatawan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat dari pendapatan per bulannya. Sebagian besar pendapatan wisatawan di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah cukup tinggi yaitu lebih dari Rp.8.000.000,- (32,31%), dan yang berkisar Rp 4.000.001 – Rp 6.000.000 sebanyak 21,54% responden. Responden yang memiliki pendapatan $\leq$ Rp 2.000.000 hanya sebanyak 16,92%.

Berdasarkan daerah tempat tinggalnya, mayoritas responden merupakan wisatawan lokal yang masih berasal dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 66,15%, yaitu Kabupaten/Kotanya sebagian besar berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 32,31% dan Kota Samarinda sebanyak 7,69%. Hanya sedikit jumlah wisatawan yang berasal dari Kalimantan Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan lain-lain.

Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kutai Kartanegara segmennya masih terbatas pada wisatawan domestik yang berasal dari Provinsi Kalimantan Timur, tetapi memiliki potensi mobilitas yang tinggi karena wisatawan yang berkunjung secara ekonomi telah memiliki pendapatan yang tetap dengan sebagian besar pekerjaan mereka sebagai pegawai negeri.

Kabupaten Kutai Kartanegara yang kaya akan potensi daya tarik wisata seharusnya mampu menangkap pasar yang lebih luas lagi dari sumber-sumber pasar wisatawan domestik, bahkan

mancanegara. Tantangannya adalah mengembangkan produk pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing karena wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan mereka yang memiliki pendidikan menengah atas dan tinggi yang tujuan perjalanan wisatanya tidak hanya bersenang-senang, tetapi juga untuk mengunjungi keluarga/saudara dan kepentingan bisnis.

C. Karakteristik perjalanan wisatawan

Karakteristik perjalanan wisatawan mencakup gambaran seperti tujuan berwisata, seberapa sering wisatawan mengunjungi, berapa lama wisatawan tinggal, tempat penginapan yang dipilih, cara transportasi yang digunakan, teman perjalanan, jumlah teman yang ikut serta, pengatur perjalanan, sumber informasi yang digunakan, opsi makanan dan minuman, serta pengeluaran selama perjalanan.

Menurut hasil survei, mayoritas wisatawan yang datang ke Kabupaten Kutai Kartanegara sebelumnya sudah pernah mengunjungi Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan proporsi sebesar 95,38% dari 65 responden. Sebagian dari responden, sekitar 24,62%, biasanya mengunjungi Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 5-10 kali. Wisatawan datang ke Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tujuan utama untuk liburan atau rekreasi (56,90%), diikuti oleh kunjungan untuk bertemu keluarga atau teman (13,80%).

Daya tarik wisata yang paling populer dalam arti paling banyak dikunjungi di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Pulau Kumala (35,38%), Ladaya (27,69%), dan Museum Mulawarman (21,54%). Responden wisatawan di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan wisatawan dengan lama tinggal cukup tinggi. Sebanyak 40,00% persen berkunjung dengan lama tinggal lebih dari 3 hari, diikuti 23,10% 2-3 hari, dan 20,00% selama sehari penuh dan menginap. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas wisatawan di Kabupaten Kutai Kartanegara cenderung menghabiskan waktu yang lebih lama di sana, yang bisa menjadi indikasi bahwa daerah tersebut memiliki daya tarik wisata yang cukup kuat atau menawarkan berbagai aktivitas yang menarik bagi para wisatawan.

Terkait dengan pilihan akomodasi yang digunakan wisatawan selama berwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebanyak 36,90% responden wisatawan lebih banyak yang menginap di rumah keluarga/teman, dan 20,00% responden wisatawan memilih untuk menginap di homestay. Adapun terkait makan minum, responden wisatawan sebagian besar memilih rumah makan (75,40%), rumah keluarga/teman (12,30%), dan restoran (9,20%).

Pengeluaran wisatawan selama berkunjung ke Kabupaten Kutai Kartanegara mengindikasikan bahwa sebagian besar dari mereka (41,54%) pengeluaran selama berwisata dalam kisaran biaya Rp. 100.000 hingga Rp. 500.000. Sebagai tambahan, sekitar 16,92% dari responden wisatawan menghabiskan uang sekitar Rp. 500.000 hingga Rp. 1.000.000. Faktor pengeluaran yang rendah ini juga berkaitan dengan asal para wisatawan, sebagian besar dari mereka berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini, mayoritas wisatawan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk akomodasi menginap.

D. Persepsi wisatawan

Persepsi wisatawan mencakup evaluasi mengenai citra atau pengetahuan yang diperoleh sebelum pergi dan setelahnya, kesan yang dialami selama perjalanan, aspek-aspek yang dirasa kurang memuaskan, area yang dianggap perlu perbaikan, dan motivasi wisatawan untuk kembali mengunjungi destinasi tersebut.

Berdasarkan hasil survey, citra atau hal yang didengar oleh wisatawan sebelum berkunjung ke Kabupaten Kutai Kartanegara adalah mengenai sejarah Kerajaan Kutai sebagai kerajaan tertua (30,77%), Selain itu, Kabupaten Kutai Kartanegara juga dikenal akan keberagaman daya tarik wisatanya (13,85%) dan juga memiliki citra wisata budaya (10,77%). Adapun kesan yang dimiliki oleh wisatawan selama berwisata adalah 55,38% wisatawan merasa puas selama di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kesan lainnya adalah 15,38% wisatawan merasa tenang dan nyaman selama berwisata dan kesan bahwa 12,31% Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki karakteristik masyarakat yang ramah ketika bertemu dengan wisatawan.

Beberapa hal yang tidak disukai oleh wisatawan diantaranya adalah aksesibilitas menuju tempat wisata (20,00%) seperti dikarenakan kondisi jalan dan petunjuk arah yang kurang memadai. Wisatawan juga mengeluhkan kurang terawatnya fasilitas di daya tarik wisata (12,31%). Selain itu aspek kurangnya papan informasi (7,69%) juga menjadi salah satu hal yang tidak disukai wisatawan karena ketersediaannya yang terbatas. Secara keseluruhan, sekitar 46,15% wisatawan merasa bahwa perbaikan aksesibilitas adalah aspek utama yang perlu ditingkatkan. Di samping itu, peningkatan fasilitas, seperti paket wisata, pelayanan pemandu wisata, dan informasi wisata yang lebih lengkap sebesar 23,08% merasa perlu ditingkatkan. Kebersihan dengan presentase sekitar 7,69%, merupakan urutan ketiga terbesar dalam hal yang perlu ditingkatkan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan hasil survei, 95,38% responden wisatawan memiliki keinginan untuk kembali berkunjung. Faktor utama yang mendorong responden wisatawan untuk merencanakan kunjungan kembali adalah variasi daya tarik wisata yang tersedia, yang mencapai 18,46%. Faktor *event* budaya juga memiliki peran penting, dengan 6,15% wisatawan menyatakan bahwa ini menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan mereka untuk kembali berkunjung. Spot bersantai yang tersedia (6,15%) juga menjadi salah satu faktor yang mendorong wisatawan untuk menjelajahi berbagai daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, kedekatan lokasi wisata dengan daerah asal atau tempat tinggal wisatawan mencapai 4,62% dalam mempengaruhi keputusan mereka untuk kembali.

E. Upaya pemasaran pariwisata Kutai Kartanegara

Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya. Upaya pemasaran Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilakukan guna dapat dikenal lebih luas bahwa kabupaten ini memiliki kekayaan dan keberagaman potensi wisatanya.

Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memperkenalkan identitas diri pariwisatanya pada tahun 2021 meluncurkan *branding* dan logo “Kukar Asia Wonders” yang merupakan milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Logo “Kukar Asia Wonders” ini telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI yang disertai dengan *jingle* iklan. Identitas ini relevan dengan sumber daya yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengikat antara sejarah, budaya, kesenian, serta kehidupan masyarakat yang multikultural.



Gambar 2.5 Branding Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara

Teknologi informasi dan komunikasi menjadi hal yang sangat penting sebagai media komunikasi untuk menginformasikan kepada wisatawan dan wisatawan terhadap kegiatan-kegiatan dan produk wisata yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada era digital, efektivitas komunikasi pariwisata dilakukan melalui media komunikasi secara daring melalui halaman situs web.visitingkutaikartanegara.com, serta beberapa media sosial yang aktif dalam mengembangkan pemasaran pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara diantaranya adalah Facebook, Instagram, dan Youtube. Kabupaten Kutai Kartanegara rutin melaksanakan even tahunan yang dirancang dalam Calendar of Event pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Kalendar pariwisata ini biasanya dikeluarkan untuk satu tahun pelaksanaan dengan biasanya terjadwal tidak akan jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Even di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak hanya berskala lokal, tetapi juga ada yang beberapa berskala nasional.

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pasar dan pemasaran pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan untuk menginap di fasilitas akomodasi yang tersedia di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. perlu menjaring sumber pasar wisatawan yang lebih besar dari luar daerah agar dapat menggerakkan pariwisata dan perekonomian masyarakat; dan
3. peningkatan kualitas promosi dari sisi materi, media, serta teknik promosi yang dilakukan.

2.3.6 Kelembagaan Kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara

Kelembagaan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan kepariwisataan. Kelembagaan Kepariwisataan memiliki arti sebagai kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisir, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.

A. SDM Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, sumber daya manusia (SDM) pariwisata merupakan tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan bidang pariwisata. Maka dari itu, selama tenaga kerja tersebut bersentuhan

dengan sektor pariwisata maka dapat dikategorikan sebagai sumber daya manusia pariwisata. Jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara sangat memengaruhi ketersediaan sumber daya manusia dari segi kuantitas untuk pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023, angkatan kerja yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah 372.271 jiwa yang terdiri dari 260.434 jiwa angkatan kerja laki-laki dan 111.837 jiwa angkatan kerja perempuan.

Tingkat pengangguran masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 4,14 persen atau lebih rendah dari tingkat pengangguran nasional yang mencapai 5,83 persen. Walaupun lebih rendah dibandingkan tingkat pengangguran nasional, namun pemerintah harus tetap mendorong masyarakat dalam menekan tingkat pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara. Diharapkan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat pada sektor pariwisata sehingga masyarakat dapat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata sekaligus menekan tingkat pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pada fasilitas pendidikan formal, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki beberapa lembaga pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas Kejuruan yang membantu mempersiapkan SDM Pariwisata. Setidaknya terdapat 10 (sepuluh) SMK dengan status Negeri dan Swasta. Kesepuluh SMK tersebut memiliki jurusan keahlian yang dapat menunjang pengembangan sumber daya manusia pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut lebih jelasnya di bawah ini merupakan daftar SMK dengan jurusan keahlian terkait pariwisata.

Tabel 2.5 Sekolah Menengah Kejuruan yang Menyelenggarakan Pendidikan Terkait Pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JURUSAN KEAHLIAN TERKAIT PARIWISATA
1	SMK Negeri 1 Tenggarong	Jl. Kh. Ahmad Dahlan No. 49 Baru, Kec. Tenggarong	1. Tata Boga
2	SMK Muhammadiyah Sanga-Sanga	Syahril Dhlan D IV, Kec. Sanga-Sanga	1. Multimedia
3	SMK Bhakti Loa Janan	A JL. Gerbang Dayaku, Loa Janan Ulu, Kec. Loa Janan	1. Multimedia
4	SMK Negeri 1 Loa Janan	B JL. Soekarno-Hatta KM17, Batuah, Kec. Loa Janan	1. Multimedia 2. Agribisnis Tanaman Perkebunan

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JURUSAN KEAHLIAN TERKAIT PARIWISATA
5	SMK Purwajaya Loa Janan	C JL. Pembangunan, Purwajaya, Kec. Loa Janan	1. Multimedia
6	SMK Negeri 1 Muara Muntai	D JL. Dewi Sartika RT. 01, Kayu Batu, Kec. Muara Muntai	1. Multimedia
7	SMK Negeri 2 Tenggarong	E JL. KH. Ahmad Dahlan No. 50, Baru, Kec. Tenggarong	1. Multimedia 2. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 3. Kriya Kreatif Batik dan Tekstil 4. Kriya Kreatif Keramik 5. Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan 6. Kriya Kreatif Kayu dan Rotan 7. Seni Musik Populer
8	SMK Negeri 3 Tenggarong	F JL. Ring Road KM. 6, Jahab, Kec. Tenggarong	1. Multimedia 2. Agribisnis Tanaman Perkebunan 3. Agribisnis Ternak Ruminansia 4. Agribisnis Perikanan Air Tawar
9	SMK YPM Diponegoro Tenggarong Seberang	G JL. Flamboyan L.II/D, Manunggal Jaya, Kec. Tenggarong Seberang	1. Multimedia
10	SMK Negeri 1 Muara Badak	H JL. Poros Muara Badak-Samarinda, Badak Baru, Kec. Muara Badak	1. Multimedia

Sumber: <https://annibuku.com/>

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa selain jurusan tata boga yang merupakan turunan dari jurusan perhotelan, terdapat beberapa SMK dengan jurusan keahlian lainnya yang dapat menunjang SDM pariwisata di Kabupaten Kartanegara seperti jurusan keahlian multimedia, kriya kreatif, seni musik, serta agribisnis tanaman perkebunan, peternakan, serta perikanan air tawar. Seluruh kompetensi keahlian ini secara tidak langsung akan menjadi pendukung bagi perkembangan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Keberadaan SMK juga didukung oleh keberadaan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menjadi tempat ditempanya angkatan kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara agar memiliki kompetensi dan mampu bersaing di dunia kerja khususnya di sektor pariwisata. Berdasarkan Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Angka 2023, SMA di Kabupaten Kutai Kartanegara

tercatat berjumlah 52 unit. Selain pendidikan formal, pemerintah juga harus mendorong pendidikan atau pelatihan secara informal kepada masyarakat demi peningkatan kualitas SDM pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. OPD Terkait Pariwisata

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengurus dan bertanggungjawab dalam bidang kepariwisataan adalah Dinas Pariwisata. Di dalam menjalankan fungsi dan tugas utamanya, Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara didukung oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung pada proses pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kutai Kartanegara lainnya yang terlibat dalam pembangunan kepariwisataan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Komunikasi dan Informatika
6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9. Dinas Pekerjaan Umum
10. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
11. Dinas Perhubungan Perhubungan
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
15. Dinas Pertanian dan Peternakan
16. Dinas Kelautan dan Perikanan
17. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
18. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
20. Dinas Sosial

21. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
22. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
23. Satuan Polisi Pamong Praja
24. Sekretariat Daerah
25. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
26. Inspektorat

Di dalam pembangunan suatu daerah, tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah disesuaikan dengan kewenangannya. Selain itu, OPD Kabupaten Kutai Kartanegara juga didukung oleh perangkat lainnya diantaranya adalah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara, BKSDA Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pengelola KCB Provinsi Kalimantan Timur dan lainnya.

C. Kelompok Sadar Wisata

Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis merupakan suatu lembaga di masyarakat yang memiliki beberapa anggota, terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang harus memiliki sifat bertanggungjawab dan empati serta memiliki peran sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan kembangnya kepariwisataan dan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Berdasarkan tinjauan dari data Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, sampai pada tahun 2023 terdapat 55 Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut tabel di bawah ini merupakan daftar Pokdarwis yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2013-2023.

Tabel 2.6 Daftar Pokdarwis di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2023

NO	NAMA POKDARWIS	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	NO.SK POKDARWIS	KETERANGAN
1.	ASFERATA	Bukit Biru	Kec. Tenggarong	556-238/P.I/IV/2013	Tidak Aktif
2.	PANTAI BIRU	Desa Kersik , Jl. Pantai Biru Rt. 03 D. Empang	Kec. Marang Kayu	556-367.1/P.I/IV/2013	Aktif
3.	PULAU HARAPAN	Desa Sangkuliman	Kec. Kota Bangun	556-1364/P.I/XII/2013	Tidak Aktif
4.	DEWI ARUM	Desa Sumber Sari	Kec. Loa Kulu	556-1365/P.I/XII/2013	Aktif
5.	DEWI KARYA	Desa Kedang Ipil	Kec. Kota Bangun	556-472.1/P.I/V/2013	Aktif

NO	NAMA POKDARWIS	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	NO.SK POKDARWIS	KETERANGAN
6.	JAHITAN LAYAR	Desa Kutai Lama Rt. 02	Kec. Anggana	556- 472.1/P.I/IX/2014	Aktif
7.	TEPIAN BATU	Desa Muara Kaman Ulu	Kec. Muara Kaman	556- 1364/P.I/IX/2014	Tidak Aktif
8.	MERAH PUTIH 99	Kel. Sanga- Sanga Dalam	Kec. Sanga- Sanga	556- 286/P.I/IV/2015	Aktif
9.	SUWI TUMENGANG	Desa Lung Anai	Kec. Loa Kulu	556- 291/P.I/IV/2015	Tidak Aktif
10.	PESONA PANGEMPANG	Desa Tanjung Limau Rt. 07. Desa Tanjung Limau	Kec. Muara Badak	556- 170/P.I/III/2017	Aktif
11.	KERATON ETAM	Desa Lebaho Ulaq	Kec. Muara Kaman	556- 171/P.I/III/2017	Tidak Aktif
12.	AJI BAIDURI	Desa Loa Duri Ilir	Kec. Loa Janan	556- 420/P.I/VII/2017	Aktif
13.	RINDU KAMPUNG TUHA	Desa Jembayan	Kec. Loa Kulu	556- 441/P.I/VIII/2017	Tidak Aktif
14.	BEKAYUH BEUMBAI BEBUDAYA	Desa Pela	Kec. Kota Bangun	556- 454/P.I/IX/2017	Aktif
15.	MERAH PUTIH 99	Kel. Sanga- Sanga Dalam	Kec. Sanga- Sanga	556- 562/P.I/X/2017	Aktif
16.	BAWAQ MEJUNG UDIP	Desa Tukung Ritan	Kec. Tabang	556- 330/PDP.III/V/201 8	Tidak Aktif
17.	PETANGEN MUDIP	Desa Ritan Baru	Kec. Tabang	556- 331/PDP.III/V/201 8	Tidak Aktif
18.	KAMPUNG TUHA KUTAI BENSAMAR	Kel. Loa Ipuh Darat	Kec. Tenggarong	556- 440/PDP.III/VIII/20 18	Tidak Aktif
19.	MARANGAN HARAPAN UTAMA	Desa Loh Sumber	Kec. Loa Kulu	556- 450/PDP.III/IX/201 8	Kurang Aktif
20.	PESONA ALAM MASAMPING	Dusun Masamping Desa Loa Duri	Kec. Loa Janan	556- 560/PDP.III/XII/20 18	Tidak Aktif
21.	TERAT BUDAYA	Dusun Putak Desa Loa Duri Ilir	Kec. Loa Janan	556- 355/PDP.III/VIII/20 19	Aktif
22.	SUKA ALAM SAMPAL BELITAN	Desa Suka Bumi	Kec. Kota Bangun	556- 48/PDP.III/III/2020	Aktif
23.	SAKA ROTO	Desa Sebulu Ilir	Kec. Sebulu	556- 61/PDP.III/III/2020	Aktif
24.	PERJIWA JAYA	Desa Perjiwa	Kec. Tenggarong Seberang	556- 71/PDP.III/VII/202 0	Tidak Aktif

NO	NAMA POKDARWIS	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	NO.SK POKDARWIS	KETERANGAN
25.	KUMBARA	Desa Kota Bangun III	Kec. Kota Bangun	556-080/PDP.III/VIII/2020	Aktif
26.	SO LONG PINANG HABANG	Desa Kahala Dan Kahala Ilir	Kec. Kenohan	556-76/DISPAR/VIII/2020	Kurang Aktif
27.	PERJIWA RAYA	Desa Perjiwa	Kec. Tenggarong Seberang	556-71/PDP.III/VII/2020	Tidak Aktif
28.	CAHAYA ULUNG	Desa Long Ulung	Kec. Tenggarong Seberang	556-104/DISPAR/X/2020	Tidak Aktif
29.	WISATA PATOK BELANDA	Desa Mulawarman	Kec. Tenggarong Seberang	556-118/DISPAR/X/2020	Kurang Aktif
30.	DANAU SIRAN	Desa Muara Siran	Kec. Muara Kaman	556-117/DISPAR/X/2020	Kurang Aktif
31.	DIKMA LESTARI	Desa Semayang	Kec. Kenohan	556-144/DISPAR/X/2020	Perubahan Pengurus
32.	SERAONG DJT	Desa Jembayan Tengah	Kec. Loa Kulu	556-143/DISPAR/XI/2020	Aktif
33.	BERSINAR DESAKU	Desa Muara Anggelam	Kec. Muara Wis	556-173/DISPAR/XI/2020	Aktif
34.	DEWI ARUM	Desa Sumber Sari	Kec. Loa Kulu	556-201/DISPAR/XII/2020	Perubahan Pengurus
35.	BAWANG BANGEN	Desa Sungai Bawang	Kec. Muara Badak	556-202/DISPAR/XII/2020	Kurang Aktif
36.	WISATA PULO JOPANG	Desa Salo Palai	Kec. Muara Badak	P.556-117/DISPAR/SK/PDP.III/SK/01/2021	Baru dibentuk
37.	GUSUNG PARI MANU	Desa Tani Baru	Kec. Anggana	P.556-116/DISPAR/SK/PDP.III/SK/06/2021	Baru dibentuk
38.	KAMPOENG WISATA SAWAH	Desa Manunggal Jaya	Kec. Tenggarong Seberang	P.556-92/DISPAR/SK/PDP.III/SK/05/2021	Baru dibentuk
39.	LEMBAH SWARGO TANI	Desa Tani Bhakti	Kec. Loa Janan	P.556-122/DISPAR/SK/PDP.III/SK/07/2021	Baru dibentuk
40.	LAMIN 1001 MANDAU	Desa Margasari Dalam	Kec. Loa Kulu	P.556-155/DISPAR/SK/PDP.III/SK/09/2021	Baru dibentuk
41.	BANGUN PERSAMA	Desa Melintang	Kec. Muara Wis	P.556-34/DISPAR/PDP.III/01/2022	Baru dibentuk

NO	NAMA POKDARWIS	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	NO.SK POKDARWIS	KETERANGAN
42.	DEWI KARYA	Desa Kedang Ipil	Kec. Kota Bangun	P.556-35/DISPAR/PDP.III/01/2022	Perubahan Pengurus
43.	DIKMA LESTARI	Desa Semayang	Kec. Kenohan	P.556-36/DISPAR/PDP.III/01/2022	Perubahan Pengurus
44.	MAHAKAM KUTAI	Desa Muara Muntai Ulu	Kec. Muara Muntai	P.556-37/DISPAR/PDP.III/01/2022	Baru dibentuk
45.	MENTARI BANGUN REJO	Desa Bangun Rejo	Kec. Tenggarong Seberang	P.556-38/DISPAR/PDP.III/01/2022	Baru dibentuk
46.	SPONTAN MADU LESTARI	Desa Spontan Kelurahan Mangkurawang	Kec. Tenggarong	P.556-39/DISPAR/PDP.III/01/2022	Baru dibentuk
47.	DEMONG SORA	Desa Panca Jaya dan Cipari Makmur	Kec. Muara Kaman	P.556-65/DISPAR/PDP.III/SK/03/2022	Baru dibentuk
48.	BHUANA JAYA AGROEKOWISATA	Desa Bhuana Jaya	Kec. Tenggarong Seberang	P.73/DISPAR/PDP.III/500.13.2.4/02/2023	Baru dibentuk
49.	DEWI ARUM	Desa Sumber Sari	Kec. Loa Kulu	P.74/DISPAR/PDP.III/500.13.2.4/02/2023	Perubahan Pengurus
50.	PULUHAN NUSA	Desa Muara Wis	Kec. Muara Wis	P.75/DISPAR/PDP.III/500.13.2.4/02/2023	Baru dibentuk
51.	TAMAN GUNUNG KELAPIS PERMAI	Desa Jembayan	Kec. Loa Kulu	P.85/DISPAR/PDP.III/500.13.2.4/02/2023	Baru dibentuk
52.	WISATA BATU AMPAR	Desa Loa Raya	Kec. Tenggarong Seberang	P.86/DISPAR/PDP.III/500.13.2.4/02/2023	Baru dibentuk
53.	JAHITAN LAYAR	Desa Kutai Lama Rt. 02	Kec. Anggana	P.104/DISPAR/PDP.III/500.13.2.4/03/2023	Perubahan pengurus
54.	MENTARI BANGUN REJO	Desa Bangun Rejo	Kec. Tenggarong Seberang	P.120/DISPAR/PDP.III/500.13.2.4/04/2023	Perubahan pengurus
55.	BERTATA MENATA TERTATA (BMT)	Desa Sangkuliman	Kec. Kota Bangun	P.121/DISPAR/PDP.III/500.13.2.4/04/2023	Baru dibentuk

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, 2023.

Selain untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, pembentukan Pokdarwis juga merupakan salah satu syarat ditetapkannya desa wisata. Namun berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa kelompok sadar wisata yang tidak aktif dalam

pengelolaan desa wisata. Dibutuhkan peran aktif dari kelompok sadar wisata untuk mewujudkan pengelolaan desa wisata maupun daya tarik wisata yang dimiliki secara terpadu.

D. Asosiasi Usaha dan Profesi Pariwisata

Asosiasi usaha dan profesi pariwisata memiliki peran penting dalam membangun kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh sebab itu, kolaborasi dan pelibatan asosiasi usaha dan profesi pariwisata terkait dibutuhkan dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Di dalam mewujudkan kolaborasi antar pihak terkait, Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara telah berupaya memfasilitasi forum komunikasi dengan asosiasi usaha dan profesi pariwisata bersama pihak terkait dalam membangun kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pada forum komunikasi tersebut terdapat beberapa asosiasi usaha dan asosiasi profesi pariwisata yang dilibatkan seperti *Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies* (ASITA), Perhimpunan Hotel dan Rstoran Indonesia (PHRI), Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI), Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga (PPJI), Asosiasi duta wisata Indonesia (Adwindo). Dan juga Marketing Association (IMA), dan Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI). Selain Walaupun Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melibatkan asosiasi usaha dan profesi pariwisata dalam membangun kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara, namun masih terdapat terdapat asosiasi pariwisata yang belum terdapat di tingkat kabupaten sehingga masih menginduk ke pusat. Oleh sebab itu, berbagai lembaga dan asosiasi pariwisata tersebut harus dibentuk pada tingkat di Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat lebih dekat dan aktif mendorong peningkatan kualitas lembaga dan profesi pariwisata untuk selanjutnya dapat meningkatkan kualitas kelembagaan dalam membangun kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

E. Organisasi Pendukung Pariwisata

Beberapa organisasi lainnya yang mendukung kegiatan pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

1. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) terutama pada desa-desa di pesisir laut Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2014 tentang Kelompok Masyarakat Pengawas Kelautan dan Perikanan, Kelompok

Masyarakat Pengawas merupakan sekelompok orang yang melakukan kegiatan pengawasan terhadap sumber daya ikan.

2. Borneo Orangutan Survival (BOS) merupakan organisasi non pemerintah atau yayasan yang didirikan untuk konservasi orang utan kalimantan (*Pongo pygmaeus*) yang terancam punah. Yayasan BOS ini telah didirikan sejak tahun 1991 yang memiliki program penyelamatan, rehabilitasi, dan reintroduksi orangutan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Di dalam kegiatannya, yayasan BOS juga melibatkan masyarakat setempat. Tercatat per Juli 2021 terdapat 400 orangutan yang dirawat serta lebih dari 440 orang yang dipekerjakan di 10 lokasi di Kalimantan. Walaupun proyek dari yayasan BOS ada di Kalimantan namun yayasan ini memiliki kantor pusat di Pulau Jawa yaitu di Bogor, Jawa Barat.
3. Organisasi Jejak Pulang merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial dan kebudayaan serta lingkungan dan sumber daya. Berdasarkan bidang yang dimiliki, organisasi Jejak Pulang dapat menjadi organisasi pendukung pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini karena bidang yang dimiliki organisasi tersebut merupakan sumber daya tarik wisata yang dapat dikembangkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Yayasan Konservasi Alam nusantara merupakan organisasi yang ikut berperan aktif dalam pelestarian alam di Kabupaten Kutai Kartanegara. Salah satu kontribusi Yayasan Konservasi Alam Nusantara di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah restorasi mangrove yang bekerjasama dengan nelayan tambak dalam menghijaukan Delta Mahakam, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Terdapat tiga kampung nelayan di Delta Mahakam berkomitmen mengembalikan hutan mangrove yang terbuka. Ketiganya adalah Kampung Muara Ulu, Muara Pegah, dan Muara Kembang yang berada di Kelurahan Muara Kembang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Daya dukung restorasi mangrove di Delta Mahakam tengah diperjuangkan dari berbagai program di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terutama melalui skema Perhutanan Sosial, dengan tetap melibatkan peran masyarakat. Berdasarkan Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Delta Mahakam seluas 150 ribu hektar menyimpan kekayaan hayati dan non-hayati melimpah, termasuk tutupan mangrove dan nipah. Namun, terjadi kerusakan mangrove sebesar 60.220 ha [54,97%] disebabkan alih fungsi lahan menjadi tambak dan pembangunan pipa gas. Pada kegiatan restorasi mangrove tersebut, YKAN juga menggandeng Yayasan Biosfer Manusia (Bioma) dalam

implementasi di sejumlah desa di tepian kawasan mangrove Delta Mahakam. Yayasan Bioma sendiri memiliki lokus kerja di Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa.

5. Terdapat beberapa lembaga pendukung pelestarian budaya dan budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara seperti Lembaga Budaya dan Adat Kutai; Lembaga Seni Budaya dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara; Lembaga Adat Kesultanan Kutai Kartanegara; dan Lembaga Adat Dayak Kalimantan Timur. Selain lembaga budaya terdapat beberapa yayasan atau organisasi non pemerintah yang memiliki kepedulian dalam pelestarian budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara seperti Yayasan Lajong Kutai Kartanegara dan Yayasan Gubang Kutai Kartanegara.

Tantangan terkait aspek kelembagaan yang dihadapi Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pembangunan kepariwisataan, antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata melalui pelatihan dan pendampingan.
- b. Penguatan koordinasi antar OPD di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat dalam integrasi/keterpaduan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya dalam pembangunan kepariwisataan.
- c. Koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi pentahelik pemangku kepentingan di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional (akademisi, bisnis, pemerintah, masyarakat, media) dalam pembangunan kepariwisataan.
- d. Penguatan kelembagaan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) melalui pelatihan dan pendampingan dalam mengelola desa wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- e. Penguatan peran dan fungsi asosiasi pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- f. Pengembangan regulasi untuk mendorong penguatan organisasi kepariwisataan dan pengelolaan pariwisata berkelanjutan sesuai dengan norma-norma yang berlaku (norma agama, sosial, budaya).

2.4 KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN PERDA RIPPARKAB

Implikasi penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) akan berdampak terhadap pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya terhadap masyarakat lokal maupun pengusaha pariwisata dan *stakeholders* terkait lainnya. Jika penerapan Perda Ripparkab Kutai

Kartanegara benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik, maka pembangunan kepariwisataan dapat berjalan sesuai arah dan tujuan perencanaan, dan diharapkan memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat. Pembangunan daya tarik wisata sesuai dengan perwilayahan dan peruntukannya, dengan skala pengembangan yang sesuai dengan kapasitas dan potensinya, sehingga dapat meminimasi konflik maupun dampak-dampak negatif lainnya.

Penerapan Perda Ripparkab diantaranya dapat menghasilkan implikasi atau dampak sebagai berikut:

1) Terhadap ekonomi dan investasi

- a) Mendorong peningkatan jumlah investasi dalam industri pariwisata, terkait dengan kenaikan jumlah industri pariwisata (akomodasi, restoran, toko souvenir, *tour operator*, dan lain-lain) yang dimiliki oleh masyarakat lokal, tingginya *rate of turnover* bagi usaha pariwisata;
- b) Mendorong peningkatan pendapatan daerah dari pariwisata, didapat dari kenaikan PDRB subsektor pariwisata, kenaikan nilai pajak dari ijin usaha pariwisata, pajak *airport*, dan lain-lain;
- c) Mendukung peningkatan kualitas pelayanan investasi dengan penyederhanaan prosedur investasi pariwisata, misalnya adanya pengembangan/aplikasi pelayanan OSS (*One stop service*) untuk perijinan usaha pariwisata, serta optimalisasi peran PD kepariwisataan dan peningkatan koordinasi dengan stakeholder lain dalam perijinan usaha pariwisata;
- d) Mendorong peningkatan lapangan pekerjaan (*employment*) bagi masyarakat, misalnya kenaikan jumlah masyarakat yang terlibat dalam industri pariwisata, kenaikan pendapatan/*income* pegawai yang terlibat dalam industri pariwisata;
- e) Mendukung peningkatan dukungan permodalan bagi masyarakat, diantaranya dengan perlindungan pemerintah bagi usaha UMKM baik berupa kebijakan/peraturan, dan lainnya;
- f) Mendorong penurunan *economic leakage*, misalnya mempergunakan bahan baku makanan dan bahan baku souvenir yang didapat atau dibuat secara lokal;

- g) Secara tidak langsung berdampak terhadap peningkatan *cost of living*, dari mulai meningkatnya harga tanah dan bangunan sampai pengeluaran rumah tangga (bahan baku, transportasi, liburan, dan lain-lain).

2) Terhadap pembiayaan

- a) Sebagai masukan dalam meningkatkan alokasi pembiayaan yang berkaitan dengan penelitian dan formulasi kebijakan pariwisata, rencana pembiayaan bagi kegiatan konsultasi dan partisipasi masyarakat, serta alokasi pembiayaan SDM/staf dinas kepariwisataan;
- b) Mendukung peningkatan alokasi pembiayaan terhadap implementasi program kepariwisataan kabupaten, misalnya program pemasaran dan promosi, program pembangunan infrastruktur, dan lain-lain.

3) Terhadap hukum dan perizinan

Mendorong adanya *law enforcement* sehingga terdapat kenaikan jumlah usaha pariwisata yang telah mengantongi izin usaha.

4) Terhadap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan

- a) Sebagai masukan dalam menghasilkan rencana guna lahan yang mengalokasikan zona-zona pengembangan pariwisata serta pengadaan *guidelines* pengembangan fisik kawasan wisata (intensitas pemanfaatan lahan, desain bangunan, dan lain-lain);
- b) Mendorong terciptanya efektivitas dalam proses monitoring dan kontrol pengembangan pariwisata.

5) Terhadap pengembangan destinasi pariwisata

- a) Mendukung terciptanya kualitas produk pariwisata yang makin meningkat, berkaitan dengan peningkatan kualitas daya tarik wisata dan fasilitas pendukungnya, peningkatan jumlah kepuasan wisatawan (*tourist satisfaction*), peningkatan jumlah wisatawan yang kembali berkunjung (*repeater tourist*);
- b) Mendorong peningkatan pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana pariwisata;
- c) Meningkatkan upaya pelestarian dan perlindungan aset lingkungan alam dan lingkungan bersejarah agar tetap bernilai ekonomi;

- d) Meningkatnya kajian terhadap dampak yang ditimbulkan pariwisata, misalnya terkait dengan dampak lingkungan, dampak sosial dan budaya yang diakibatkan oleh pengembangan pariwisata;
- e) Mendorong perkuatan citra pariwisata, diantaranya dengan penetapan *brand image* Kabupaten Kutai Kartanegara melalui slogan dan logo, penataan kawasan wisata unggulan, perencanaan dan pembangunan *landmark* Kabupaten Kutai Kartanegara;
- f) Mendorong terdistribusikannya kunjungan wisatawan ke wilayah/daya tarik wisata lainnya/non unggulan dengan pengembangan pengembangan moda transportasi umum ke kawasan wisata non unggulan.

6) Terhadap industri pariwisata

- a) Mendorong industri pariwisata (hotel, restoran, dan lain-lain) agar lebih meningkatkan kualitas, pelayanannya serta keragaman jenisnya;
- b) Mendorong peningkatan jumlah industri pariwisata yang mengadopsi prosedur *environmental management*, misalnya dengan menerapkan efisiensi energi dalam pengelolaan hotel, 3R, *responsible marketing*, dan lain-lain.

7) Terhadap aspek SDM dan kelembagaan

- a) Mendorong kemitraan antara pemerintah, industri pariwisata, dan masyarakat;
- b) Mendorong peningkatan kualitas SDM industri pariwisata, dengan pemetaan kebutuhan SDM pariwisata, pengadaan program pelatihan, peningkatan skill SDM industri pariwisata, penerapan sertifikasi profesi dengan standar internasional;
- c) Mendorong pengembangan dan peningkatan kerjasama antara insititusi pendidikan dengan usaha/industri pariwisata, antara lain dengan pengadaan lembaga-lembaga pendidikan pariwisata yang berkualitas, pembentukan pusat kajian pengembangan kepariwisataan, kerjasama dengan pusat kajian/penelitian pariwisata lainnya;
- d) Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata, melalui pemetaan potensi dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan pariwisata destinasi, dan pelibatan masyarakat lokal dalam semua tahapan rencana pengembangan pariwisata;
- e) Mendorong penguatan kelembagaan masyarakat, termasuk peningkatan kapasitas organisasi masyarakat.

BAB 3

EVALUASI PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT



3.1 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI TINGKAT NASIONAL YANG TERKAIT DENGAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kebijakan pembangunan di tingkat nasional yang harus menjadi acuan dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan.

Uraian atas peraturan perundang-undangan yang dirujuk dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara diuraikan sebagai berikut.

3.1.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Rencana pembangunan jangka panjang memuat arahan kebijakan terkait pembangunan sektoral yang termasuk didalamnya sektor pariwisata untuk kurun waktu 20 tahun. Arah kebijakan pembangunan kepariwisataan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) diwujudkan dalam periode tahun 2005-2025, visi pembangunan Indonesia yang ditetapkan melalui RPJN 2005 – 2025 adalah *Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur*. Terdapat delapan misi pembangunan nasional yang ditempuh untuk mewujudkan visi di atas, yaitu:

- Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
- Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
- Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
- Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
- Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
- Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, dan
- Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

Arahan pembangunan kepariwisataan dalam jangka panjang nasional termasuk dalam perwujudan misi *Mewujudkan bangsa yang berdaya saing*. Misi tersebut dapat dicapai dengan mengarahkan pembangunan untuk *membangun sumber daya manusia yang berkualitas; memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global; penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; sarana dan prasarana yang memadai dan maju; serta reformasi hukum dan birokrasi*. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang menjadi fokus pengembangan untuk peningkatan daya saing perekonomian Indonesia.

Arahan pembangunan kepariwisataan yang ditetapkan dalam RPJPN Tahun 2005-2025 mengatur bahwa kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. RPJPN juga mengarahkan bahwa pengembangan kepariwisataan dilakukan dengan memanfaatkan potensi dari keragaman dan keindahan alam serta potensi perairan nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan. Pembangunan kepariwisataan juga diarahkan untuk mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.

Arahan pembangunan kepariwisataan diatas merupakan rujukan bagi usaha pembangunan kepariwisataan di daerah termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Ripparkab Kutai Kartanegara harus mengadopsi arahan pembangunan kepariwisataan dalam RPJN 2005–2025 dengan penyesuaian terhadap kondisi dan situasi di daerah.

3.1.2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang – Undang No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan mengatur garis besar pelaksanaan dan pembangunan kepariwisataan di Indonesia. Undang – undang ini menjadi rujukan utama sebagai tata cara pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di seluruh tingkatan pemerintahan. Undang – Undang kepariwisataan memuat azas, fungsi, tujuan dan prinsip – prinsip yang harus diikuti dalam pembangunan kepariwisataan di Indonesia. Undang – undang ini juga memuat tata cara penyusunan dan muatan dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata baik ditingkat nasional (Ripparnas), Provinsi (Ripparprov), dan Kabupaten/Kota (Ripparkab/Rpparkot). Lebih lanjut, Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menjabarkan para pemangku kepentingan pariwisata beserta hak dan kewajibannya. Undang – undang kepariwisataan ini juga menjadi rujukan utama dalam penyebutan dan pemaknaan istilah–istilah yang digunakan dalam pembangunan kepariwisataan.

Penyusunan Ripparkab Kutai Kartanegara harus memperhatikan kaidah – kaidah perencanaan dan pembangunan kepariwisataan yang tertuang dalam Undang – undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Proses penyusunan Ripparkab sendiri harus memenuhi arahan muatan maupun tata cara penyusunan yang sudah diatur dalam undang- undang kepariwisataan.

3.1.3 Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Selama kurun waktu tujuh puluh tujuh tahun merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia menempatkan Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian negara. Selama kurun waktu tersebut pula Ibu Kota Negara Republik Indonesia secara *de facto* hanya pernah berkedudukan di tiga kota, yaitu Jakarta, Yogyakarta dan Bukittinggi¹. Meski demikian sebagian besar dari usia Republik Indonesia menempatkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.

Kehadiran Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang kemudian disingkat menjadi UU IKN memberikan cara pandang baru mengenai lokasi pusat pemerintahan dalam kontek Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Bentangan pulau-pulau

¹ <http://bukittinggikota.go.id/profil/sejarah>; <https://news.detik.com/berita/d-5911838/jejak-ibu-kota-negara-jakarta-yogyakarta-bukittinggi-nusantara> diakses 3 Juli 2022

yang tersebar di Negara Kesatuan Republik Indonesia tentu perlu secara simbolik ditampilkan keterwakilannya baik secara geografis maupun secara filosofis.

Secara geografis letak Ibu Kota Negara yang terdapat di tengah-tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan memudahkan pergerakan seluruh komponen masyarakat untuk mengakses Ibu Kota Negara dengan jarak yang relatif sama dan tidak ada yang merasa terlalu jauh untuk menjangkaunya. Selain itu, secara filosofis letak Ibu Kota Negara juga mencerminkan keterwakilan seluruh komponen bangsa tanpa terkecuali sehingga makna Bhineka Tunggal Ika tercermin di Ibu Kota Negara.

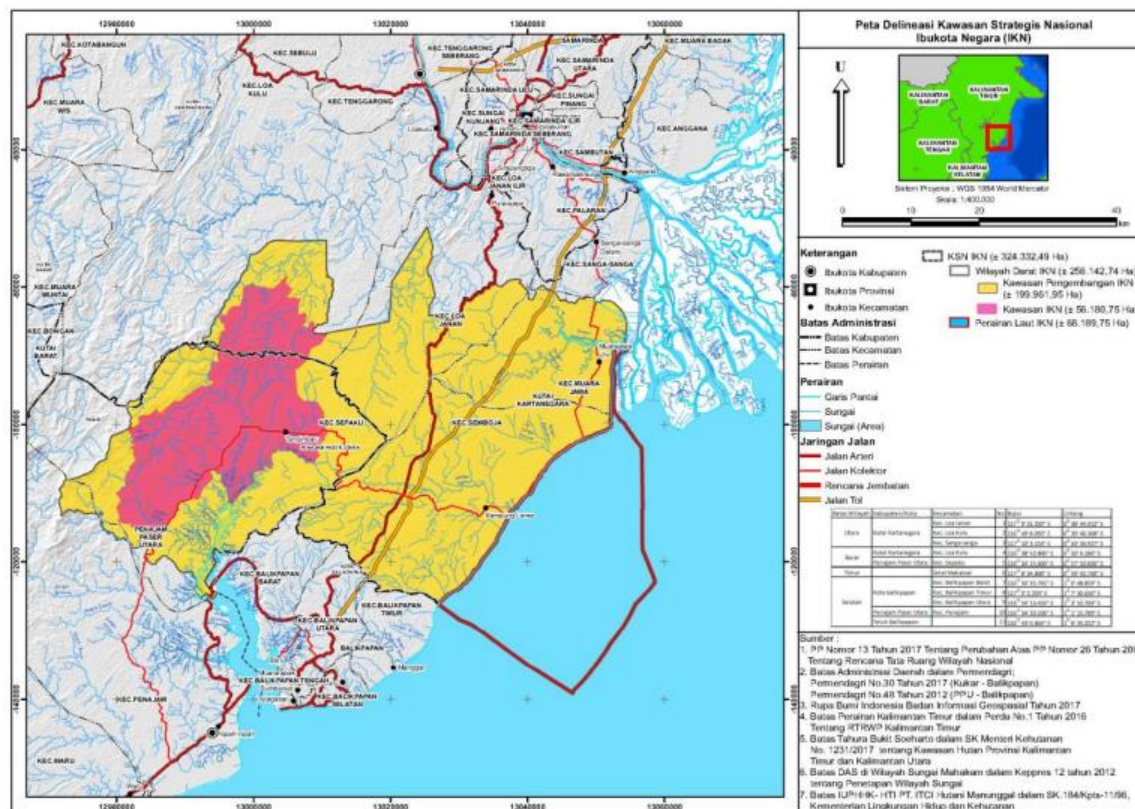
Ada beberapa tujuan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke kawasan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, diantaranya adalah agar Ibu Kota Negara yang dibangun nantinya:

- a. menjadi kota berkelanjutan di dunia;
- b. sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan
- c. menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Luas Ibu Kota Negara baru yang sesuai dengan UU IKN dinamakan sebagai Ibu Kota Nusantara meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 ha (dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua hektare) yang terdiri dari kawasan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 56.180 ha (lima puluh enam ribu seratus delapan puluh hektare) dan kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 199.962 ha (seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua hektare). Sementara wilayah perairan laut yang termasuk IKN seluas kurang lebih 68.189 ha (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan hektare). Batas-batas wilayah IKN adalah:

- a. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- b. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara; dan

d. sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar.



Gambar 3.1 Delienasi Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara

Dengan visi menjadi kota dunia yang aman, modern, berkelanjutan serta berketahanan menjadikan Ibu Kota Negara memerlukan dukungan tidak saja dari dalam kawasan namun juga dari luar kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi penopang keberadaan IKN dimasa depan. Salah satu kota yang sangat dekat dengan keberadaan IKN adalah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan jarak dari Sendawar menuju kawasan IKN kurang lebih seratus kilometer maka posisi Kutai Kartanegara sangat strategis guna menjadi penopang keberadaan IKN baik secara fisik maupun non fisik sebagai penyuplai sumber daya manusia dan juga sumber daya pertanian untuk memenuhi kebutuhan IKN dimasa depan.

Dalam konteks kepariwisataan, dengan jarak yang relatif dekat dengan kawasan IKN maka Kutai Kartanegara harus dapat mempersiapkan berbagai infrastruktur pariwisata guna memenuhi kebutuhan rekreasi para penghuni IKN. Dengan demikian pembangunan kepariwisataan di Kutai Kartanegara harus berorientasi pada pengembangan pariwisata yang tidak saja berskala lokal namun juga skala internasional. Dengan berkembangnya IKN tentu akan meningkat pula jumlah penduduk yang tinggal di dalamnya termasuk berbagai perwakilan negara-negara dan

organisasi dunia. Oleh karena itu, standar dan kualitas kepariwisataan di Kutai Kartanegara harus berstandar internasional agar dapat memenuhi preferensi wisatawan yang berasal dari kawasan IKN di masa depan. Beberapa prinsip pembangunan kawasan IKN yang harus menjadi acuan dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat sejalan dalam pembangunannya yaitu pembangunan yang mengedepankan konsep hijau melalui Kota Hutan (*Forest City*), yang mengedepankan kualitas keberlanjutan sumber daya air melalui Kota Spons (*Sponge City*) dan kawasan yang dapat menopang perkembangan masa depan melalui Kota Cerdas (*Smart City*). Dengan mengacu pada tiga prinsip ini maka kita dapat membayangkan kualitas manusia seperti apa yang nanti akan menghuni IKN sehingga preferensi berwisatanyapun harus dapat diantisipasi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun pembangunan kepariwisataan.

3.1.4 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN) merupakan arahan pembangunan ruang untuk lingkup negara yang harus diikuti dan diadopsi oleh RTRW regional baik provinsi, kabupaten ataupun kota. Rencana tata ruang wilayah nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2017, Ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan bagian sistem perkotaan Kawasan Perkotaan Balikpapan – Tenggarong - Samarinda – Bontang, yang direncanakan menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN). PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan – Tenggarong - Samarinda – Bontang masih direncanakan untuk pengembangan tahap II yang berfokus pada peningkatan fungsi sebagai PKN. Berdasarkan rencana pola ruang RTRWN, Kota Tenggarong juga menjadi bagian kawasan andalan, Bontang – Samarinda – Tenggarong - Balikpapan - Penajam dan sekitarnya (Bonsamtebajam), yang salah satu fokus pengembangannya adalah sektor Pariwisata.

Kedudukan Kabupaten Kutai Kartanegara terutama Kota Tenggarong dalam pembangunan nasional berdasarkan RTRWN memiliki kedudukan yang cukup menguntungkan sebagai PKN dan Kawasan Andalan tertuma terkait pengembangan sektor pariwisata.

3.1.5 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 disusun sebagai pedoman pembangunan kepariwisataan nasional dan menjadi rujukan bagi pembangunan kepariwisataan regional. Ripparnas menjabarkan visi pembangunan kepariwisataan, yaitu *“terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat”*. Untuk mendukung visi pembangunan kepariwisataan ini disusunlah empat misi pembangunan kepariwisataan nasional, sebagai berikut:

- Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
- Pemasaran Pariwisata yang sinergis unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
- Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- Organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan

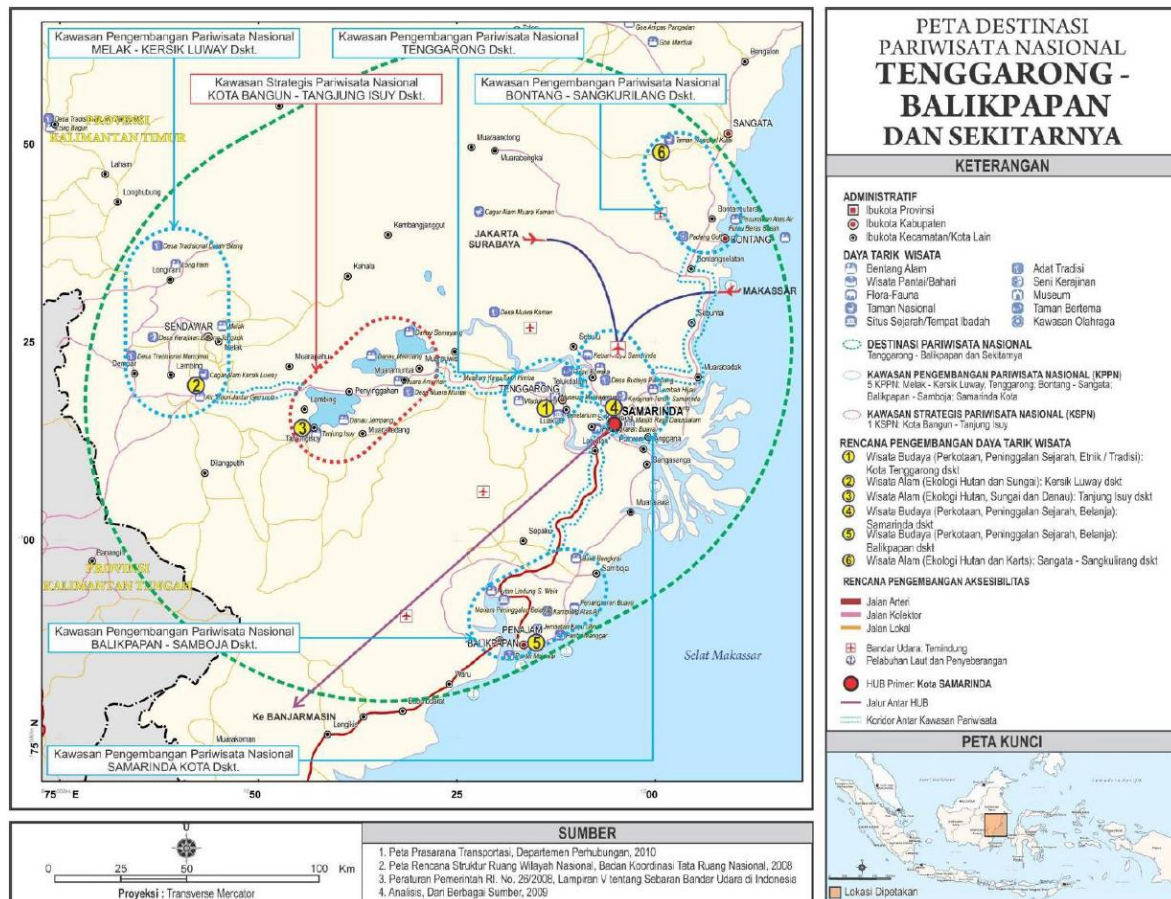
Sedangkan arah pembangunan kepariwisataan nasional dilaksanakan dengan:

- Berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan berkelanjutan,
- Orientasi pada peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan,
- Dengan tata kelola yang baik,
- Secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku, serta
- Mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Adapun sasaran atau indikator keberhasilan pembangunan kepariwisataan nasional adalah jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, jumlah pergerakan wisatawan nusantara, jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara, jumlah pengeluaran wisatawan nusantara, dan produk domestik bruto di bidang Kepariwisata.

Ripparnas memuat rencana pembangunan perwilayahan kepariwisataan nasional dengan merencanakan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yang secara lebih rinci diarahkan pada pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas dengan strategi yang dilakukan adalah mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait. Pembangunan DPN meliputi (1) *perwilayahan pembangunan DPN yang terdiri dari kawasan pengembangan pariwisata nasional (KPPN), dan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN)*, (2) *pembangunan daya tarik wisata*, (3) *pembangunan aksesibilitas pariwisata*, (4) *pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata*, (5) *pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan*, dan (6) *pengembangan investasi di bidang pariwisata*. Ripparnas ini telah menetapkan 50 DPN, 222 KPPN, dan 88 KSPN di Indonesia.

Dalam Rencana Perwilayahan Pembangunan Kepariwisata yang tertuang dalam Ripparnas 2010 – 2025, wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi bagian dari DPN Tenggara – Balikpapan dan sekitarnya. Wilayah Kutai Kartanegara juga menjadi bagian dari KSPN Kota Bangun – Tanjung Isuy dan sekitarnya, KPPN Tenggara dan sekitarnya, serta KPPN Balikpapan - Samboja dan sekitarnya. DPN Tenggara – Balikpapan dan sekitarnya dikembangkan dengan tema pengembangan pariwisata *Journey to Heart of Borneo*. Adanya tiga Kawasan pariwisata nasional yang beririsan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan nilai penting Kawasan ini dalam pengembangan pariwisata di Indonesia pada umumnya dan Kalimantan pada khususnya bila merujuk kepada peran yang dimandatkan oleh Ripparnas untuk pembangunan kepariwisataan. Kedepan nilai penting pariwisata Kawasan Kabupaten Kutai Kartanegara harus dapat dioptimalkan agar mampu mendorong pembangunan kabupaten secara umum dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat.



Sumber: Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011.

Gambar 3.2 Peta Destinasi Pariwisata Nasional Tenggara - Balikpapan dan sekitarnya

3.1.6 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan

Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Kalimantan yang diteapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2012 merupakan perangkat operasional dari RTRW Nasional (RTRWN) serta menjadi alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan wilayah Pulau Kalimantan. Berbeda dengan RTRWN dan RTRW Kabupaten/Kota, RTR Pulau Kalimantan tidak dapat digunakan menjadi dasar perizinan dalam pemanfaatan ruang di Pulau Kalimantan. Dalam penyusunan Ripparkab Kabupate Kutai Kartanegara, RTR Kalimantan berperan dalam memberikan referensi mengenai arahan operasional pembangunan serta sinergitas pembangunan di Pulau Kalimantan.

Berdasarkan ketetapan PP No. 3 Tahun 2012, tujuan penataan ruang Pulau Kalimantan adalah untuk mewujudkan Pulau Kalimantan yang sebagai berikut:

- Kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45% (empat puluh lima persen) dari luas Pulau Kalimantan sebagai Paru-paru Dunia;
- Kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk ketenaga listrik;
- Pusat pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi di Pulau Kalimantan;
- Pusat perkebunan kelapa sawit, karet, dan hasil hutan secara berkelanjutan;
- Kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara Malaysia dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup;
- Pusat pengembangan kawasan perkotaan nasional yang berbasis pada air;
- Kawasan ekowisata berbasis hutan tropis basah dan wisata budaya Kalimantan;
- Jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah; dan
- swasembada pangan dan lumbung pangan nasional.

Tujuan penataan ruang yang memiliki keterkaitan secara langsung dalam pembangunan kepariwisataan di Pulau Kalimantan dan secara khusus di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk mewujudkan "*Kawasan Ekowisata berbasis hutan tropis basah dan wisata budaya Kalimantan*". Tujuan tersebut diturunkan menjadi kebijakan dan strategi pembangunan sebagai berikut:

- Pengembangan kawasan ekowisata berbasis ekosistem kehidupan orang utan, bekantan, meranti, anggrek, serta satwa dan tumbuhan endemik kawasan lainnya;
 - 1.1 Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan ekowisata pada zona pemanfaatan di kawasan konservasi dengan prinsip-prinsip berkelanjutan;
 - 1.2 Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan antara kawasan ekowisata dan obyek wisata lainnya dan antara kawasan ekowisata dan kawasan perkotaan nasional.
- Pengembangan kawasan wisata berbasis budaya Kalimantan.
 - 1.3 Melestarikan kawasan permukiman berbasis budaya Kalimantan

1.4 Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan antara kawasan wisata budaya dan kawasan perkotaan nasional.

Kebijakan dan strategi diatas menjadi arahan dalam penyusunan program pembangunan kepariwisataan di Pulau Kalimantan yang termasuk di dalamnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang harus diadopsi oleh Ripparkab Kutai Kartanegara. Tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan tata ruang pulau Kalimantan akan berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sehingga penting untuk menjadikan RTR Pulau Kalimantan terutama dalam menyusun dan melaksanakan program – program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Salah satu muatan utama dari RTR Pulau Kalimantan adalah strategi operasional dari struktur ruang Pulau Kalimantan yang terdiri dari strategi operasional pembangunan kawasan perkotaan dan sarana prasarana. Berdasarkan RTRWN Kabupaten Kutai Kartanegara terutama Kota Tenggarong memiliki posisi penting sebagai salah satu PKN. Selanjutnya, RTR Pulau Kalimantan menjelaskan strategi perasional pembangunan PKN yang ada di Pulau Kalimantan yang termasuk didalamnya Kota Tenggarong. Salah satu arahan strategi operasional pembangunan sistem perkotaan dalam RTR Pulau Kalimantan yang terkait erat dengan pembangunan kepariwisataan di perkotaan yang ada di Pulau Kalimantan termasuk Kota Tenggarong yaitu: *Mengembangkan dan/atau meningkatkan fungsi PKN, PKW, dan PKSN sebagai pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya.* PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan – Tenggarong – Samarinda - Bontang – dan sekitarnya merupakan salah satu PKN yang diarahakan peningkatan fungsinya sebagai pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya.

Strategi operasional pembangunan sarana prasarana yang meliputi sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional, dan sistem jaringan sumber daya air. Strategi operasional pembangunan jaringan transportasi nasional, terutama jaringan transportasi darat merupakan bagian penting dari pembangunan kepariwisataan di Pulau Kalimantan termasuk Kutai Kartanegara. Salah satu keunikan alam Pulau Kalimantan merupakan sungai – sungai besar dan panjang yang posisi geografisnya lintas wilayah administrasi. Sebagian besar sungai – sungai di Pulau Kalimantan juga merupakan sarana transportasi yang tidak banyak ditemukan di wilayah lain di Indonesia yang

dapat dijadikan salah satu pengalaman unik bagi wisatawan. Strategi – strategi operasional pembangunan jaringan transportasi sungai yang ditetapkan oleh RTR Pulau Kalimantan adalah:

- Mengembangkan jaringan transportasi sungai untuk melayani PKN, PKW, dan kawasan permukiman pada bagian hulu sungai;
- Mengembangkan jaringan transportasi sungai yang terpadu dengan jaringan transportasi darat lainnya;
- Mengembangkan jaringan transportasi sungai untuk melayani pengangkutan batubara, hasil hutan, dan komoditas unggulan lainnya;
- Meningkatkan fungsi terusan yang menghubungkan antaralur pelayaran sungai; dan
- Mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah pulau-pulau kecil terluar, meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Kalimantan dengan provinsi di luar Pulau Kalimantan, dan antarnegara.

Muatan penting lain dari RTR Pulau Kalimantan merupakan strategi operasional perwujudan pola ruang. Salah satu bagian dari rencana pola ruang merupakan rencana kawasan lindung. Dari beberapa kawasan lindung yang dapat secara langsung digunakan sebagai kawasan dan sumber daya wisata merupakan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya. Strategi operasional untuk pembangunan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya di Pulau Kalimantan dan Kabupaten Kartanegara adalah sebagai berikut:

- Mempertahankan dan merehabilitasi luasan suaka margasatwa, cagar alam, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;
- Melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan pada suaka margasatwa, cagar alam, dan taman nasional;
- Mengembangkan pengelolaan terhadap kawasan suaka alam laut, cagar alam laut, dan taman wisata alam laut;
- Melestarikan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
- Mempertahankan kawasan pantai berhutan bakau di wilayah pesisir untuk perlindungan pantai dan kelestarian biota laut.

Wilayah – wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan kawasan – kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya anataralain, Cagar Alam Muara Kaman Sedulang, Taman Nasional Kutai, Taman Hutan Raya Bukit Suharto, dan Keraton Kutai Kartanegara.

Wilayah – wilayah Kabupaten yang termasuk menjadi kawasan lindung nasional merupakan sumber daya pariwisata yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Selain kawasan lindung, pembangunan polar uang juga merencanakan pembangunan kawasan budidaya. Salah satu kawasan budidaya yang diatur adalah kawasan peruntukan pariwisata. Strategi operasional pembangunan kawasan peruntukan pariwisata yang ditetapkan RTR Pulau Kalimantan adalah sebagai berikut:

- Mengembangkan kawasan ekowisata berbasis ekosistem kehidupan orang utan, bekantan, meranti, anggrek, serta satwa dan tumbuhan endemik kawasan lainnya;
- Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan ekowisata pada zona pemanfaatan di kawasan konservasi dengan prinsip-prinsip berkelanjutan;
- Melestarikan kawasan permukiman berbasis budaya Kalimantan;
- Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan antara kawasan ekowisata, wisata budaya, obyek wisata lainnya, dan kawasan perkotaan; dan
- Mengembangkan pusat jasa pariwisata di kawasan perkotaan.

Selain kawasan peruntukan pariwisata, wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara juga merupakan bagian dari kawasan andalan strategis nasional yang salah satu fungsinya adalah mengunggulkan sektor pariwisata. RTR Pulau Kalimantan juga mengatur strategi operasional untuk pembangunan kawasan andalan strategis nasional dengan sektor unggulan pariwisata, yaitu:

- Mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pariwisata, termasuk kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana; dan
- Meningkatkan keterkaitan antarpusat kegiatan pariwisata serta antara pusat kegiatan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan dengan sektor unggulan pariwisata, yang terlayani terutama oleh pelabuhan dan/atau bandar udara.

Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan bagian dari kawasan andalan nasional Bontang – Samarinda – Tenggarong – Balikpapan - Penajam (Bonsamtebajam) dan Sekitarnya yang merupakan salah satu kawasan andalan yang memiliki sektor unggulan pariwisata.

Tujuan, kebijakan dan strategi operasional pengaturan ruang yang ditetapkan dalam RTR Kalimantan menjadi referensi dana arahan dalam penyusunan Ripparkab Kutai Kartanegara

yang holistic dan sinergi dengan kebijakan perencanaan lain yang terkait dengan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara baik rencana keruangan maupun sektoral.

3.1.7 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Tahun 2020–2024 merupakan tahap terakhir dari pembangunan jangka panjang nasional. Target-target yang telah ditetapkan pada awal pembangunan jangka panjang harus dapat dicapai pada periode akhir ini. Pemerintah telah menyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 sebagai konsep pelaksanaan pembangunan jangka menengah nasional. Selain itu RPJMN juga merupakan representasi dari visi pembangunan pemerintahan yang terpilih pada masa tersebut. Visi Misi Pemerintah 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode keempat ini memiliki visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selanjutnya, RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan empat pilar RPJMN IV tahun 2020-2024, yaitu: kelembagaan politik dan hukum yang mantap; kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; serta terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan, yaitu

- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
- Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

- Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
- Memperkuat stabilitas polhuhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari tujuh agenda pembangunan Indonesia diatas, pembangunan kepariwisataan terkait langsung dengan hal berikut:

A. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, **pariwisata**, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

B. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

RPJPN 2005-2025 menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dengan didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antarwilayah dengan sasaran antara lain: (i) meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBI-KTI, Jawa-luar Jawa); (ii) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah; (iii) meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; (iv) meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, pendekatan pengembangan wilayah tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan

ke seluruh wilayah dan masyarakat. Pada 2020-2024, pengembangan wilayah dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan, sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah pulau.

Pendekatan melalui koridor pertumbuhan mengutamakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang dapat mendorong peningkatan nilai tambah, peningkatan penerimaan devisa dan atau penghematan devisa, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi secara nyata dalam lima tahun mendatang. Pusat-pusat pertumbuhan wilayah antara lain adalah kawasan pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan sebagai pusat produksi; kawasan strategis prioritas seperti kawasan industri (KI) dan kawasan ekonomi khusus (KEK) sebagai pusat pengolahan sumber daya alam; kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas (KPBPB) sebagai pusat perdagangan dan industri kepelabuhanan; kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) dan destinasi pariwisata prioritas (DPP) **sebagai pusat pengembangan jasa pariwisata**; serta kawasan perkotaan termasuk metropolitan, kota-kota baru dan kota-kota sedang dan kecil sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan.

C. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Perhatian pemerintah di bidang infrastruktur pada beberapa tahun terakhir telah berdampak pada peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur di Indonesia. Namun demikian, daya saing infrastruktur Indonesia masih perlu terus ditingkatkan. *The Global Competitiveness Report* tahun 2018 menempatkan posisi daya saing infrastruktur Indonesia di posisi 71 dari 140 negara, masih tertinggal jika dibandingkan negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Beberapa hal yang masih memerlukan percepatan antara lain pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia, dan pembangunan infrastruktur untuk menopang perkembangan berbagai kota seiring dengan urbanisasi di Indonesia. Untuk itu pada periode 2020-2024, pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan. Fokus utama tersebut akan ditopang oleh pembangunan energi dan ketenagalistrikan, serta

pelaksanaan transformasi digital. Selain itu, pembangunan infrastruktur 2020-2024 juga akan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa pengarusutamaan seperti tujuan pembangunan berkelanjutan, transformasi digital serta modal sosial dan budaya. Pembangunan infrastruktur ekonomi terkait kepariwisataan adalah **(1) konektivitas jalan (2) konektivitas udara (3) konektivitas darat (4) infrastruktur digital**.

RPJMN telah menetapkan target-target pembangunan tahun 2020-2024. Target-target pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Error! No text of specified style in document..1. Tabel Indikator dan Target Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024

INDIKATOR PEMBANGUNAN WILAYAH	TARGET PEMBANGUNAN WILAYAH
PERTUMBUHAN EKONOMI (PERSEN)	5,4 – 6,0
TINGKAT KEMISKINAN (PERSEN)	6,5 – 7,0
GINI RASIO (INDEKS)	0,370 – 0,374
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (PERSEN)	4,0 – 4,6
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (NILAI)	75,54

Sumber: Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Bappenas, 2019.

Pembangunan kepariwisataan menjadi bagian dari agenda pembangunan ke-1, melalui akselerasi peningkatan nilai tambah pariwisata, dengan target pembangunan kepariwisataan yang telah ditetapkan. Sasaran, indikator, serta target RPJMN 2020-2024 terkait pembangunan kepariwisataan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

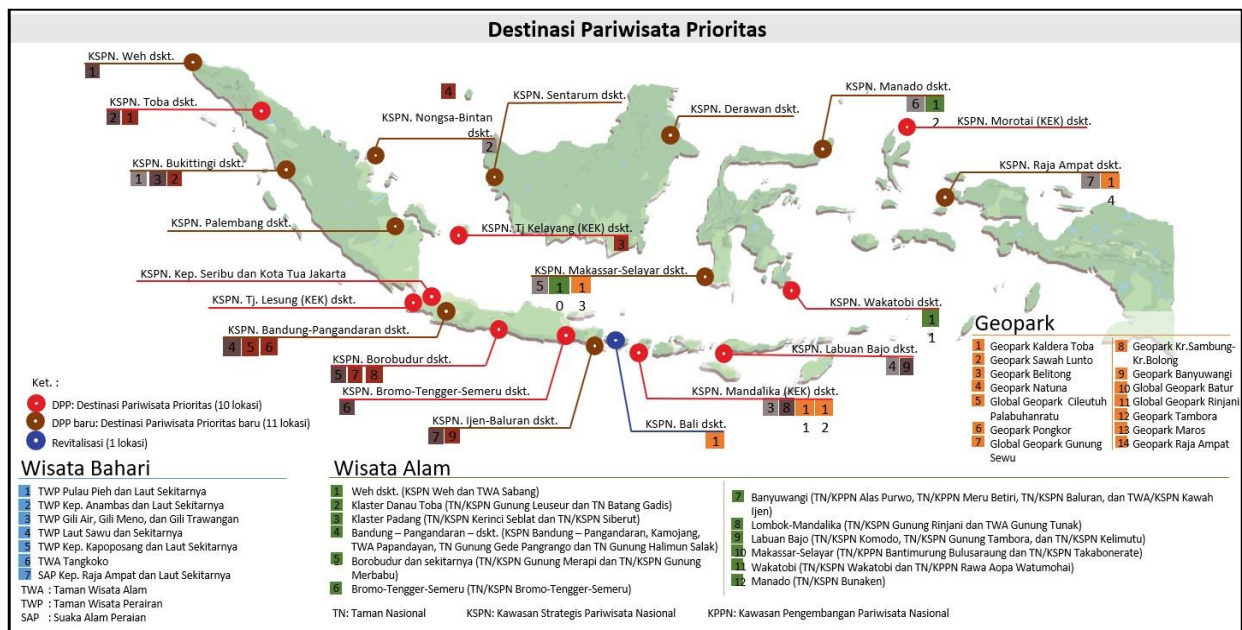
Tabel Error! No text of specified style in document..2 Sasaran, Indikator, serta Target Sektor Pariwisata RPJMN 2020-2024

SASARAN	INDIKATOR PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN	TARGET 2020	TARGET 2024
Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing perekonomian			
a. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan industrialisasi	a) Kontribusi PDB pariwisata	4,8%	5,5%
	b) Destinasi pariwisata prioritas	10 destinasi	10 destinasi
	c) Revitalisasi destinasi	0 destinasi	1 destinasi
	d) Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis taman nasional	12 klaster	12 klaster

SASARAN	INDIKATOR PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN	TARGET 2020	TARGET 2024
	e) Destinasi pariwisata bahari	8 destinasi	8 destinasi
b. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja	Jumlah tenaga kerja pariwisata	13 juta orang	15 juta orang
c. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Nilai devisa pariwisata	19 - 21 USD miliar	28 - 34 USD miliar
	Jumlah wisatawan mancanegara	18,5 juta orang	25 – 28 juta orang
	Jumlah wisatawan nusantara	310 juta perjalanan	350 – 400 juta perjalanan
	Jumlah promosi Tourism, Trade and Investment (TTI) terintegrasi	8 promosi terintegrasi	8 promosi terintegrasi
	Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	70 Negara	78 negara
d. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	Ketersediaan daya statistik pariwisata	3 database	3 database

Sumber: Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Bappenas, 2019.

RPJMN 2020 – 2024 juga telah menetapkan lokasi-lokasi prioritas pembangunan kepariwisataan, selain 10 destinasi pariwisata prioritas tahun 2015-2019, telah ditetapkan 11 destinasi pariwisata prioritas baru, dan satu destinasi pariwisata untuk revitalisasi, yaitu Bali. Lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024, Bappenas, 2019.

Gambar 3.3 Destinasi Pariwisata Prioritas dalam RPJMN 2020–2024

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembangunan Kutai Kartanegara termasuk didalamnya pembangunan kepariwisataan harus merujuk kepada arahan pembangunan nasional yang salah satunya ditetapkan oleh RPJMN. Pembangunan kepariwisataan di Kutai Kartanegara harus mendukung arahan pembangunan terkait kepariwisataan yang di susun di dalam RPJMN 2020–2024 serta berkontribusi terhadap pencapaiannya.

3.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN KEPARIWISATAAN DI TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR YANG TERKAIT DENGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kebijakan pembangunan dan kepariwisataan Provinsi Kalimantan Timur yang harus menjadi acuan dalam menyusun Ripparkab Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036; dan

3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Timur.

3.2.1 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur (perubahan) 2019 – 2023 merupakan pernyataan visi pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur yang mengatur rencana pembangunan sektoral termasuk sektor pariwisata. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023 merupakan bagian dari tahapan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur yang menekankan pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Visi pembangunan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023 yang ditetapkan melalui RPJMD perubahan 2019 – 2023 adalah *"Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat"*. Kata *Berani* dalam visi tersebut memiliki makna bahwa pemerintahan yang memimpin pembangunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki keberanian, tekad, serta komitmen yang kuat untuk menggunakan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundangan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Sedangkan frasa *Kalimantan Timur yang Berdaulat* menggambarkan pembangunan yang menciptakan Provinsi Kalimantan Timur yang; memiliki kemantapan dalam pemerintahan hukum dan pelayanan public; mampu mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar; mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, ditetapkan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang yaitu:

- Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
- Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
- Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
- Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; dan
- Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Misi “Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan” dalam penjabarannya terkait erat dengan pembangun sektor pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi yang diprioritaskan untuk dikembangkan. Keterkaitan sektor pariwisata pada tersebut dapat dilihat pada tujuan pembangunan “*Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan sasaran Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah* sebagai penjabarannya”. Sedangkan strategi pembangunan yang disusun untuk mencapai sasaran *Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi* adalah *Pengembangan Produk Wisata Kalimantan Timur dan Pengembangan ekonomi kreatif*. Sedangkan indikator pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat dilihat dari kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur.

Melalui misi pembangun Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023 dan penjabarannya, posisi sektor pariwisata dalam pembangunan Provinsi Kalimantan timur memiliki keterkaitan yang cukup erat mengingat perannya sebagai salah satu sektor ekonomi yang menjadi prioritas untuk dikembangkan.

3.2.2 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur mengatur pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang di dalamnya termasuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. RTRW Provinsi Kalimantan Timur menjadi referensi untuk pemanfaatan ruang di

Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk dalam merencanakan pembangunan perwilayahan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan penataan ruang Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2016 – 2036 adalah untuk mewujudkan ruang wilayah provinsi yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau yang berkadiliran dan berkelanjutan berbasis agroindustri dan energi ramah lingkungan. Berdasarkan tujuan penataan ruang Provinsi Kalimantan Timur, pengembangan dan pembangunan pariwisata di Provinsi Kalimantan Timur secara tidak langsung berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi hijau. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.

Tujuan penataan ruang yang tercantum dalam RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2016-2036 dapat dicapai dengan melaksanakan lima kebijakan penataan ruang, yaitu:

- Pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan batubara yang bernilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan menjadi sector unggulan provinsi untuk memacu pertumbuhan ekonomi serta pemanfaatannya bagi segenap masyarakat:
- Pengembangan sektor unggulan untuk mengantisipasi berkurangnya sumber daya migas dan batubara yang tidak dapat diperbaharui melalui pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi yang dapat diperbaharui, sebagai bagian upaya meningkatkan ketahanan pangan dan energi wilayah dan nasional,
- Perwujudan ruang yang bersinergi dengan pertumbuhan ekonomihijau,
- Perwujudan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat dengan memberikan kesempatan pada seluruh bagian wilayah untuk berkembang sesuai potensi, dan
- Perwujudan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, investasi, sosial dengan mempertimbangkan daya dukung dan kelestarian lingkungan serta menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan.

Sektor pariwisata menjadi bagian penting dalam salah satu kebijakan dari lima kebijakan penataan ruang di atas denganditetapkan sebagai sektor yang berpotensi dikembangkan untuk menggantikan sector migas. Sektor pariwisata juga menjadi sector yang diarahkan dalam strategi penataan ruang yang merupakan penjabaran dari kebijakan *"Pengembangan sektor unggulan untuk mengantisipasi berkurangnya sumber daya migas dan batubara yang tidak dapat diperbaharui melalui pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi yang*

dapat diperbaharui, sebagai bagian upaya meningkatkan ketahanan pangan dan energi wilayah dan nasional,"; strategi – strategi perencanaan wilayah dari kebijakan tersebut adalah:

- Perwujudan struktur ruang yang mampu mendorong pertumbuhan sektor pertanian untuk lebih berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi wilayah;
- Perwujudan pola ruang yang mampu mendukung pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian dan pariwisata, sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan wilayah dan nasional, serta mendukung transformasi ekonomi;
- Pengembangan kawasan strategis agroindustri sebagai pusat pertumbuhan baru untuk mendorong pemerataan pertumbuhan antar wilayah; dan
- Pengembangan sumber dan teknologi pemanfaatan energi terbarukan sebagai upaya meningkatkan ketahanan energi wilayah dan nasional.

Meskipun sektor pariwisata hanya terkait langsung dengan satu kebijakan penataan ruang Kalimantan Timur dan strategi pengembangannya; pada dasarnya sektor pariwisata secara tidak langsung berkaitan dengan kebijakan – kebijakan lainnya terutama yang terkait dengan usaha konservasi dan ekonomi hijau.

Rencana struktur ruang merupakan sebuah rencana yang mengatur hierarki pemanfaatan ruang. Salah satu yang diatur dalam rencana struktur ruang adalah sistem perkotaan yang menjadi simpul-simpul pusat kegiatan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Sistem perkotaan yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Adapun pembagian perwilayahan dari sistem perkotaan di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- PKN, meliputi: Kawasan Perkotaan Balikpapan - Tenggarong - Samarinda - Bontang;
- PKW, meliputi: Tana Paser, Sendawar, Kota Sangatta, Tanjung Redeb;
- PKWp, meliputi: Penajam dan Ujoh Bilang,
- PKL, meliputi: Long Ikis, Kuaro, Muara Komam, Batu Kajang, Long Kali (Kabupaten Paser), Long Hubung, Tiong Ohang (Kabupaten Mahakam Ulu), Long Iram Kota, Muara Lawa, Mook Manaar Bulatn (Kabupaten Kutai Barat), Muara Badak, Muara Jawa, Kota Bangun, Kembang Janggut, Loa Janan, Tenggarong Seberang, Sebulu, Loa Kulu, Samboja, Sanga-sanga, Anggana, Marangkayu (Kabupaten Kutai Kartanegara), Muara Bengkal, Muara

Wahau, Sangkulirang (Kabupaten Kutai Timur), Merancang, Tepian Buah, Tanjung Batu, Talisayan, Mangkajang, Labanan, Sido Bangen (Kabupaten Berau), Petung, Sepaku (Kabupaten Penajam Paser Utara), dan

- PKSN, yaitu Long Pahangai dan Long Apari (Kabupaten Mahakam Ulu).

Beberapa perkotaan di atas berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, kota - kota tersebut adalah Tenggarong yang merupakan bagian Kawasan Perkotaan Balikpapan - Tenggarong - Samarinda – Bontang sebagai PKN, Muara Badak, Muara Jawa, Kota Bangun, Kembang Janggut, Loa Janan, Tenggarong Seberang, Sebulu, Loa Kulu, Samboja, Sanga-sanga, Anggana, dan Marangkayu.

Selain mengatur rencana struktur ruang, RTRW Provinsi Kalimantan Timur juga mengatur rencana pola ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Rencana pola ruang wilayah terbagi menjadi dua bagian, yaitu rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung merupakan kawasan yang memiliki fungsi untuk melindungi sumber daya alam dan sumber daya buatan yang ada di area tersebut. RTRW Kalimantan Timur 2016 – 2036 mengatur enam jenis kawasan lindung yaitu:

- Kawasan hutan lindung
- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya,
- Kawasan perlindungan setempat,
- Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya,
- Kawasan rawan bencana alam: dan
- Kawasan lindung geologi.

Dari keenam kawasan lindung diatas, hanya kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, yang dapat pemanfaatannya dapat dilakukan untuk mengakomodasi kegiatan pariwisata. Adapun pembagian dari kawasan lindung suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya adalah sebagai berikut:

- Suaka margasatwa Pulau Semama, terletak di Kabupaten Berau,
- Cagar alam, meliputi:
 - 1) Cagar Alam Muara Kaman Sedulang, terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur,
 - 2) Cagar Alam Teluk Adang, terletak di Kabupaten Paser,

- 3) Cagar Alam Teluk Apar, terletak di Kabupaten Paser, dan
 - 4) Cagar Alam Padang Luwai/Kersik Luway, terletak di Kabupaten Kutai Barat.
- Kawasan pantai berhutan bakau.
 - Taman nasional, meliputi Taman Nasional Kutai, terdapat di Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Bontang.
 - Taman hutan raya, meliputi:
 - 1) Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara,
 - 2) Taman Hutan Raya Lati Petangis, terdapat di Kabupaten Paser.
 - Taman wisata alam dan taman wisata alam laut, meliputi:
 - 1) Taman Wisata Alam Laut Berau, di Kabupaten Berau, dan
 - 2) Taman Wisata Alam Laut Pulau Sangalaki, di Kabupaten Berau.
 - Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi:
 - 1) Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Penelitian Samboja, di Kabupaten Kutai Kartanegara,
 - 2) Hutan Lindung Sungai Wain, di Kota Balikpapan,
 - 3) Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Pendidikan dan Latihan BLK/SKMA Samarinda di Kabupaten Kutai Kartanegara,
 - 4) Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Pusat Penelitian Hutan Tropis Lembab (PPHT) Universitas Mulawarman, di Kota Samarinda,
 - 5) Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, di Kota Samarinda:
 - 6) Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Sebulu, di Kabupaten Kutai Kartanegara:
 - 7) Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Labanan, di Kabupaten Berau,
 - 8) Hutan Pendidikan dan Penelitian Muara Kaeli, di Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - 9) Hutan Lindung Sungai Manggar, di Kutai Kartanegara dan Balikpapan, dan

10) Kebun Raya Balikpapan, di Kota Balikpapan.

Dari kawasan lindung suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya diatas, beberapa kawasan terdapat atau menjadi bagian dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain kawasan lindung suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan – kawasan lindung lainnya sering kali menjadi fitur geografis maupun budaya yang dapat menjadi daya tarik wisata untuk Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya maupun Kabupaten Kutai Kartanegara secara khusus.

Rencana pola ruang wilayah juga mengatur rencana kawasan budidaya. Kawasan budidaya merupakan kawasan yang dikembangkan atau dibudidayakan sesuai dengan kondisi dan sumber daya alamnya. Salah satu rencana dari kawasan budidaya yang ditetapkan oleh RTRW Provinsi Kalimantan Timur adalah kawasan pariwisata (97.443 Ha). Pembagian kawasan peruntukan pariwisata adalah sebagai berikut:

- Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) meliputi Kecamatan Long Apari dan sekitarnya, Kecamatan Kota Bangun - Tanjung Issuy dan sekitarnya, Tenggarong dan sekitarnya, Kota Samarinda dan sekitarnya, Kota Bontang — Sangatta dan sekitarnya, Kota Balikpapan — Samboja dan sekitarnya, Tanjung Redeb dan sekitarnya, serta Derawan - Sangalaki dan sekitarnya;
- Kawasan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) meliputi Kecamatan Long Bangun - Melak dan sekitarnya, Tenggarong — Balikpapan dan sekitarnya, Kepulauan Derawan — Kayan Mentarang dan sekitarnya; dan
- Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Provinsi meliputi KPP 1, Kawasan Perkotaan; KPP 2 Kawasan Hulu Sungai Mahakam; KPP 3, Kawasan Pesisir Kepulauan; KPP 4, Kawasan Sedang Berkembang; KPP 5, Kawasan Pesisir; KPP 6, Kawasan Perbatasan Provinsi; dan KPP 7 Kawasan Perbatasan Negara.

Gambaran KPPN dan DPN dapat dilihat pada sub bab terkait penjelasan mengenai Ripparnas. Meskipun wilayah – wilayah yang dipruntukkan bagi pembangunan pariwisata sudah ditentukan, kegiatan pariwisata dapat juga terjadi di kawasan budidaya lainnya.

RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2016 – 2036 menetapkan kawasan startegis baik Kawasan Andalan Nasional, Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang merujuk pada RTRW Nasional, dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Gambaran mengenai Kawasan Andalan Nasional dan KSN

dapat dilihat dalam sub-bab terkait dengan RTRW Nasional. Sedangkan pembagian KSP dapat adalah sebagai berikut:

- Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi meliputi:
 - 1) Kawasan Industri Manufaktur Kariangau dan Buluminung di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara,
 - 2) Kawasan Industri Perdagangan dan Jasa di Kota Samarinda,
 - 3) Kawasan Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat di Kota Bontang - Marangkayu Kutai Kartanegara
 - 4) Kawasan Industri Oleochemical Maloy di Kabupaten Kutai Timur,
 - 5) Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara,
 - 6) Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat
 - 7) Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Mahakam Ulu, dan
 - 8) Kawasan Agropolitan Regional di Kabupaten Kutai Timur.
- Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya di dalam wilayah provinsi, meliputi:
 - 1) Museum Mulawarman di Kabupaten Kutai Kartanegara:
 - 2) Museum Kerajaan Paser Sadurengas di Kabupaten Paser:
 - 3) Museum Kerajaan Gunung Tabur dan Sambaliung di Kabupaten Berau,
 - 4) Desa Budaya Pampang di Kota Samarinda: dan
 - 5) Kawasan Koridor Sungai Mahakam.
- Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di dalam wilayah provinsi meliputi:
 - 1) Kawasan 3 (tiga) danau (Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang dan sekitarnya)
 - 2) Kawasan Teluk Balikpapan (Sepaku - Penajam - Balikpapan):
 - 3) Kawasan Delta Mahakam
 - 4) Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan dan sekitarnya:
 - 5) Kawasan Ekosistem Karst Sangkulirang Mangkalihat, dan

6) Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Balabalagan.

- Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah provinsi meliputi Kawasan Perbatasan Long Pahangai dan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu.

Berdasarkan daftar KSP Kalimantan Timur di atas, beberapa kawasan strategis berlokasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu, Kawasan Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat di Kota Bontang - Marangkayu Kutai Kartanegara, Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat, Museum Mulawarman di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kawasan 3 (tiga) danau (Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang dan sekitarnya). Kawasan – kawasan ini dapat menjadi fitur wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat menciptakan kegiatan pariwisata.

3.2.3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi (Ripparprov) Kalimantan Timur yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Timur ditujukan untuk menetapkan destinasi pariwisata, kawasan strategis dan kawasan pengembangan pariwisata di Provinsi Kalimantan Timur, menjadi pedoman bagi perencanaan detail pembangunan pariwisata di Provinsi Kalimantan Timur dan menjadi pedoman penyusunan semua rencana induk pembangunan kepariwisataan di kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur, termasuk didalamnya Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sesuai dengan tujuan penyusunan Ripparprov Kalimantan Timur, penyusunan visi dari pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara harus sesuai dan mendukung visi pembangunan kepariwisataan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2022, visi pembangunan kepariwisataan di Provinsi Kalimantan Timur adalah, *"terwujudnya destinasi ekowisata berkelas dunia yang berdaya saing, menyejahterakan masyarakat, dan berkelanjutan."*. Rencana pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara harus memperhatikan pembangunan prinsip-prinsip pembangunan yang tersirat dalam visi pembangunan kepariwisataan Provinsi Kalimantan Timur yang antara lain, bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan.

Kabupaten Kutai Kartanegara yang secara administrasi dan geografis merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, rencana pembangunan yang disusun sebaiknya mendukung sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, termasuk didalamnya pembangunan kepariwisataan. Sasaran dari pembangunan kepariwisataan Provinsi Kalimantan Timur termaktub dalam Perda No. 50 Tahun 2022. Adapun sasaran pembangunan kepariwisataan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- Peningkatan minat wisatawan nusantara dan mancanegara untuk berwisata ke Daerah dengan peningkatan jumlah kunjungan dan durasi tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara;
- Pengembangan destinasi pariwisata utama sebagai daya tarik wisata unggulan Daerah yang diperkaya oleh kesenian, tradisi, dan budaya masyarakat setempat;
- Pengembangan Destinasi Pariwisata alam dan budaya lain sebagai penunjang Destinasi Pariwisata utama;
- Peningkatan jumlah penerimaan dari sektor kegiatan Kepariwisata;
- Keseimbangan pembangunan Kepariwisata dan pembangunan sector pendukung lain di wilayah Daerah.

Sasaran di atas dapat diukur keberhasilannya menggunakan beberapa indikator yaitu jumlah kunjungan and pergerakan wisatawan di Provinsi Kalimantan Timur dan kontribusi beberapa sektor terkait pariwisata dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Timur.

Salah satu yang diatur dalam Ripparprov Provinsi Kalimantan Timur adalah rencana pembangunan perwilayahan pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu bagian dari rencana perwilayahan pariwisata adalah penentuan struktur perwilayahan pariwisata. Perencanaan struktur perwilayahan pariwisata meliputi penentuan pusat pelayanan pariwisata, baik primer dan sekunder. Berdasarkan Ripparprov Kalimantan Timur, Pusat Pelayanan Pariwisata Primer adalah:

- Balikpapan
- Tenggarong
- Samarinda, dan

- Bontang

Sedangkan Pusat Pelayanan Pariwisata Sekunder adalah

- Maratua Teluk Harapan
- Sangatta Kutai Timur, dan
- Tanjung Redep

Tenggarong sebagai ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Pariwisata Primer perwilayahan pariwisata Provinsisi Kutai Kartanegara, sehingga dalam perencanaan kedepannya harus memperhatikan fungsinya sebagai Pusat Pelayanan Pariwisata Primer.

Pada kelanjutannya, Ripparprov Kalimantan Timur juga menentukan Kawasan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP), Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP), dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) sebagai bagian dari perencanaan pembangunan perwilayahan kepariwisataan di Provinsi Kalimantan Timur. Ripparrov Kalimantan Timur menentukan dua DPP yaitu:

- DPP I Tanjung Redeb - Bontang dan sekitarnya; dan
- DPP II Samarinda - Tanah Grogot dan sekitarnya.

Dalam pembagian perwilayahan DPP Kalimantan Timur, wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi bagian dari DPP II Samarinda – Tanah Grogot dan sekitarnya.

Rpparprov Kalimantan Timur menentukan tiga kawasan yang ditetapkan menjadi KSPP Kalimantan Timur, yaitu:

- KSPP 1 Derawan - Biduk-Biduk dan sekitarnya;
- KSPP 2 Sangkulirang - Mangkalihat dan sekitarnya (Kutai Timur dan Berau); dan
- KSPP 3 Samarinda - Tenggarong - Tanjung Isuy dan sekitarnya.

Dalam pembagian perwilayahan KSPP diatas sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi bagian dari KSP 3 Samarinda – Tenggarong – Tanjung Isuy dan sekitarnya.

Berdasarkan ketetapan Ripparprov Kalimantan Timur, di dalam wilayah Provinsi Kutai Timur ditentukan tiga KPPP, yaitu:

- KPPP1 Sangatta - Bontang dan sekitarnya;
- KPPP 2 Samboja - Balikpapan - Penajam - Tanah Grogot dan sekitarnya; dan
- KPPP 3 Ujoh Bilang - Long Bagun - Long Pahangai dan sekitarnya.

Dalam pembagian KPPP Kalimantan Timur sebagian kecil wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi bagian kecil KPPP 2 Samboja – Balikpapan – Penajam – Tanah Grogot dan sekitarnya.

Pemetaan dari rencana pembangunan perwilayahan pariwisata dapat dilihat pada Gambar 5.4 di bawah:



Sumber: Ripparprov Kalimantan Timur, 2022.

Gambar 3.4 Peta Pembangunan Perwilayahan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

3.3 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN KEPARIWISATAAN DALAM LINGKUP KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dokumen peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam pembentukan peraturan daerah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (Ripparkab) Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 2013 – 2033; dan

2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 RPJMD tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Arahan pembangunan terkait kepariwisataan yang termuat dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut diuraikan berikut ini.

3.3.1 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 2013–2033

Pembangunan kepariwisataan di sebuah daerah tidak erat hubungannya dengan situasi geografis. Oleh sebab itu rencana pembangunan kepariwisataan perlu memperhatikan kondisi ruang dari sebuah daerah yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penyusunan Ripparkab Kutai Kartanegara perlu selaras dengan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan melalui Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 2013 – 2033.

Dalam RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara, penataan ruang Kabupaten Kutai Kartanegara ditujukan untuk mencapai

"Kabupaten sebagai pusat pertumbuhan dan Kawasan andalan dengan menata pemanfaatan potensi pertambangan dan migas serta mengembangkan sektor unggulan pertanian dan pariwisata menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri dan Sejahtera."

Dalam tujuan penataan ruang di atas, ada tiga sektor yang menjadi potensi unggulan yang akan dikembangkan untuk pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor selain sektor tambang dan migas serta pertanian yang diunggulkan sebagai alat penggerak pembangunan di Kutai Kartanegara.

Tujuan penataan ruang yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian dijabarkan dalam kebijakan pembangunan sebelum dijabarkan Kembali menjadi strategi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kebijakan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah ditetapkan melalui RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara 2013-2033 adalah sebagai berikut:

- Pemantapan fungsi dan kedudukan Kabupaten dalam kawasan andalan;

- Pengembangan pemanfaatan potensi tambang dan migas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- Pengembangan dan optimalisasi Kawasan peruntukan pertanian;
- Pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan;
- Pengembangan kegiatan perikanan;
- Pengembangan pusat kegiatan yang terkendali dan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- Peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
- Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam;
- Pengembangan dan optimalisasi kawasan strategis sesuai penetapannya, dan
- Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Di antara 10 kebijakan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara di atas, sektor pariwisata terkait langsung dengan dua tujuan pembangunan, baik terkait secara langsung disebutkan dalam kebijakan maupun dalam strategi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kebijakan beserta strategi pembangunan yang dimaksud adalah:

- Pemantapan fungsi dan kedudukan Kabupaten dalam kawasan andalan; dengan strategi pengembangan:
 - 1) Memantapkan kedudukan Kabupaten sebagai kawasan andalan;
 - 2) Memantapkan fungsi Kabupaten sebagai pusat pengembangan pertanian, dan pariwisata;
 - 3) Menetapkan lokasi pusat pengembangan kegiatan;
 - 4) Meningkatkan sarana dan prasarana jaringan jalan dari produsen ke daerah pemasaran, perkotaan ke perdesaan serta antar kota dan antar desa; dan
 - 5) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kegiatan.
- Pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan;
 - 1) Mengembangkan dan meningkatkan daya tarik wisata sesuai potensinya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
 - 2) Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata;
 - 3) Mengendalikan pengembangan lahan terbangun pada kawasan pariwisata; dan
 - 4) Mengembangkan pariwisata dengan keterlibatan masyarakat.

Meskipun sektor pariwisata secara langsung disebutkan dalam dua kebijakan diatas, namun secara tidak langsung sektor pariwisata dapat dikaitkan dalam kebijakan-kebijakan lain.

Salah satu materi utama yang diatur dalam RTRW Kabupaten adalah rencana struktur ruang. Rencana struktur ruang dibagi menjadi dua bagian penting yaitu, sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana sistem kegiatan penting untuk menjadi rujukan bagi perencanaan perwilayah pariwisata di dalam Ripparkab Kutai Kartanegara. Di dalam RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara, sistem pusat kegiatan dibagi dua menjadi sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Sistem perkotaan yang sudah ditetapkan oleh RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi dua yaitu PKN, PKL dan PPL. PKN yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan – Tenggarong – Samarinda – Bontang dengan fungsi pelayanan sebagai berikut:

- pusat pengolahan migas;
- pusat pengolahan batubara;
- pusat pemerintahan kabupaten;
- pusat perdagangan regional;
- pusat koleksi dan distribusi barang regional; dan
- pusat pengembangan perkebunan sawit dan pengolahan hasil sawit.

Sementara itu PKL yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara adalah

- Perkotaan Kota Bangun;
- Perkotaan Muara Badak;
- Perkotaan Muara Jawa;
- Perkotaan Kembang Janggut;
- Perkotaan Samboja; dan
- Perkotaan Tenggarong Seberang.

Di antara enam PKL di atas, PKL Samboja dan PKL Tenggarong Seberang direncanakan untuk memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan pariwisata. Adapun fungsi dari PKL Samboja dan PKL Tenggarong Seberang adalah:

- PKL Samboja
 - 1) Pusat pelayanan perkotaan;
 - 2) Pusat transportasi regional dan lokal;
 - 3) Pusat pengembangan pertanian;

- 4) Pusat pelayanan pariwisata; dan
 - 5) Pusat pelayanan industri dan jasa perdagangan terbatas.
- PKL Tenggarong Seberang
 - 1) Pusat pelayanan perkotaan;
 - 2) Pusat transportasi regional dan lokal;
 - 3) Pusat pengembangan pertanian;
 - 4) Pusat pelayanan pariwisata; dan
 - 5) Pusat pelayanan industri dan jasa perdagangan terbatas.

PPK yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

- Perkotaan Sanga — Sanga;
- Perkotaan Loa Janan;
- Perkotaan Loa Kulu;
- Perkotaan Muara Muntai;
- Perkotaan Muara Wis;
- Perkotaan Sebulu;
- Perkotaan Anggana;
- Perkotaan Marang Kayu;
- Perkotaan Muara Kaman;
- Perkotaan Kenohan; dan
- Perkotaan Tabang.

Fungsi pelayanan PPK di atas adalah sebagai berikut:

- Pusat pelayanan perkotaan;
- Pusat transportasi antar kecamatan dan/atau loka kecamatan;
- Pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian;
- Pusat kegiatan perikanan;
- Pusat pengembangan industry; dan
- Pusat pelayanan jasa dan perdagangan lokal.

Selain sistem perkotaan, RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara juga menetapkan sistem pedesaan. Sistem pedesaan dibagi menjadi dua bagian yaitu Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dan kawasan minapolitan. Pembagian PPL dan kawasan minapolitan adalah sebagai berikut:

PPL Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

- Kecamatan Kota Bangun berada di Desa Kota Bangun Ulu.
- Kecamatan Muara Badak berada di Desa Badak Baru.
- Kecamatan Kembang Janggut meliputi:
 - 1) Desa Hambau; dan
 - 2) Desa Long Beleh Halog.
- Kecamatan Samboja meliputi:
 - 1) Desa Bringin Agung; dan
 - 2) Desa Bukit Raya.
- Kecamatan Tenggarong Seberang berada di Desa Bangun Rejo,
- Kecamatan Loa Janan meliputi:
 - 1) Desa Loa Janan Ulu; dan
 - 2) Desa Loa Duri Ilir.
- Kecamatan Loa Kulu meliputi:
 - 1) Desa Loa Kulu Kota;
 - 2) Desa Loh Sumber; dan
 - 3) Desa Jembayan.
- Kecamatan Muara Muntai meliputi:
 - 1) Desa Perian;
 - 2) Desa Muara Muntai Ulu; dan
 - 3) Desa Jantur Selatan.
- Kecamatan Muara Wis meliputi:
 - 1) Desa Muara Wis; dan
 - 2) Desa Melintang.
- Kecamatan Sebulu meliputi:
 - 1) Desa Sumber Sari;
 - 2) Desa Sebulu Ulu; dan
 - 3) Desa Manunggal Daya.
- Kecamatan Anggana berada di Desa Sungai Meriam.
- Kecamatan Marang Kayu meliputi:
 - 1) Desa Sebuntal; dan
 - 2) Desa Santan Ulu.

- Kecamatan Muara Kaman meliputi:
 - 1) Desa Sidomukti;
 - 2) Desa Bunga Jadi; dan
 - 3) Desa Panca Jaya.
- Kecamatan Kenohan meliputi:
 - 1) Desa Tuana Tuha; dan
 - 2) Desa Kahala.
- Kecamatan Tabang berada di Desa Sidomulyo.

Sedangkan kawasan minapolitan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

- Kecamatan Marang Kayu;
- Kecamatan Anggana;
- Kecamatan Muara Badak;
- Kecamatan Samboja; dan
- Kecamatan Loa Kulu.

Berdasarkan RTRW Kabupten Kutai Kartanegara 2013 – 2033 fungsi sistem perdesaan adalah:

- Pusat pelayanan perkotaan;
- Pusat transportasi antar kecamatan dan/atau local kecamatan;
- Pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian;
- Pusat kegiatan perikanan;
- Pusat pengembangan industry; dan
- Pusat pelayanan jasa dan perdagangan lokal.

Salah satu materi penting dalam RTRW adalah rencana pola ruang wilayah. Rencana pola ruang mengatur pemanfaatan ruang yang ada di daerah. Pada umumnya rencana pola ruang terdiri dari rencana kawasan lindung dan rencana kawasan budidaya. Berdasarkan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara, kawasan lindung yang terdapat di dalam Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- Kawasan perlindungan setempat;
- Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- Kawasan rawan bencana alam; dan
- Kawasan lindung geologi.

Pada umumnya Kawasan lindung banyak menjadi daya tarik wisata karena fitur geografis, sosiologi dan budaya yang unik. Namun bila dilihat berdasarkan peruntukan lahannya hanya bagian dari kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya yang diperuntukkan bagi kegiatan wisata; salah satu bagian kawasan tersebut yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan wisata adalah Taman Hutan Raya Bukit Soeharto (53.909 Ha) yang meliputi Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Muara Jawa dan Kecamatan Samboja. Selain Taman Hutan Raya, Sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara masuk ke dalam Kawasan Taman Nasional Kutai terutama di Kecamatan Muara Kaman.

Kawasan budidaya merupakan wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan untuk dibudidayakan atas dasar kondisi alam dan potensi sumber dayanya. Salah satu tipe dari Kawasan budidaya adalah kawasan pariwisata. Kawasan pariwisata dibagi menjadi kawasan pariwisata alam, budaya dan ilmu pengetahuan dan buatan. Pembagian kawasan – kawasan tersebut adalah sebagai berikut:

Kawasan Pariwisata Alam:

- Danau Semayang dan Danau Melintang berada di Kecamatan Kenohan, Kotabangun, dan Muara Wis;
- Wisata Hutan Raya Bukit Soeharto berada di Kecamatan Samboja;
- Kawasan Wisata Bukit Bengkirai berada di Kecamatan Samboja;
- Pantai Tanah Merah berada di Kecamatan Samboja;
- Taman Agrowisata Batuah berada di Kecamatan Loa Janan;
- Air Terjun Sungai Lunuk di Kecamatan Tabang;
- Air Terjun Bukit Biru di Kecamatan Loa Kulu;
- Pemandian Air Panas Sungai Dondang di Kecamatan Muara Jawa;
- Taman Anggrek Pinang Habang berada di Kecamatan Kenohan; dan
- Pariwisata Sungai Mahakam.

Kawasan Pariwisata Budaya dan Ilmu Pengetahuan:

- Keraton Kutai Kartanegara berada di Kecamatan Tenggarong;
- Masjid Jami Adji Amir Hasanoeddin Tenggarong berada di Kecamatan Tenggarong;
- Peninggalan sejarah Muara Kaman berada di Kecamatan Muara Kaman;
- Museum Mulawarman berada di Kecamatan Tenggarong;
- Peninggalan sejarah Sanga - Sanga berada di Kecamatan Sanga – Sanga;

- Borneo Orangutan Survival (BOS) berada di Kecamatan Samboja;
- Museum Kayu Tuah Himba berada di Kawasan Waduk Panji Sukarama Kecamatan Tenggarong;
- Planetarium Jagat Raya berada di Kecamatan Tenggarong;
- Taman Anggrek Sendawar berada di Kawasan Waduk Panji Sukarama Kecamatan Tenggarong, Rumah Lamin Ritan Baru berada di Kecamatan Tabang;
- Budaya Dayak berada di Desa Lekag Kidau Kecamatan Sebulu; dan
- Kawasan makam-makam religius.

Kawasan Pariwisata Buatan:

- Taman Jam Bentong berada di Kecamatan Tenggarong;
- Taman pemancingan Loa Kulu di Kecamatan Loa Kulu;
- Kawasan tambak di Kecamatan Muara Badak;
- Taman Wisata Pulau Kumala berada di Kecamatan Tenggarong; dan
- Waduk Panji Sukarama berada di Kecamatan Tenggarong.

3.3.2 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 RPJMD tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2021 merupakan rencana pembangunan sektoral yang sekaligus menggambarkan visi pembangunan dari pemerintah terpilih. Visi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 - 2026 adalah *"Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"*. Untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, ditetapkan lima misi pembangunan yang harus di laksanakan. Misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 meliputi:

- Memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani;
- Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya;
- Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah;

- Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

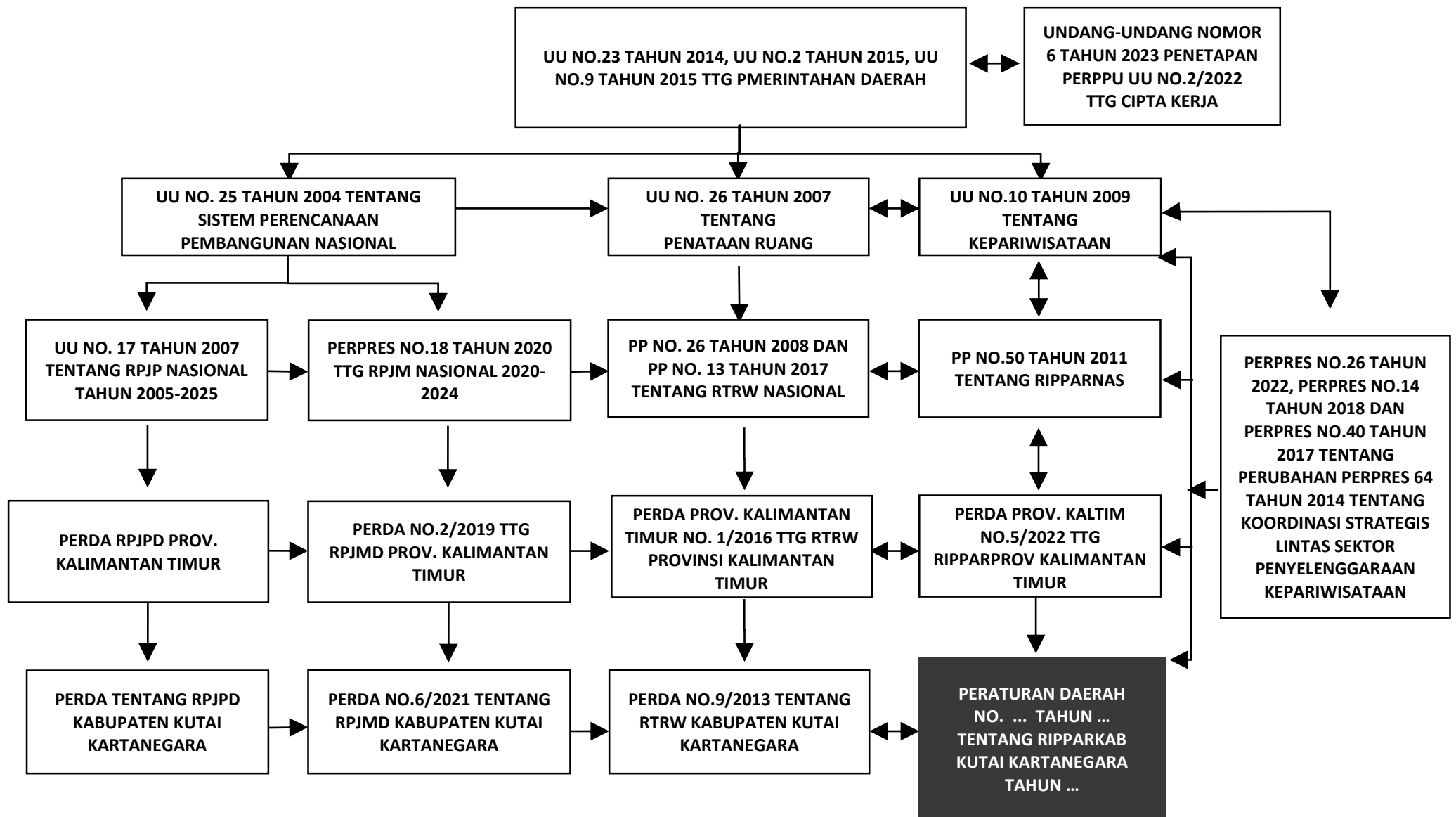
Misi "*Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif*" merupakan misi yang terkait langsung dengan pembangunan kepariwisataan; Misi tersebut mengindikasikan bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu sektor prioritas dalam pembangunan lima tahun ke depan bersama dengan sektor pertanian dan ekonomi kreatif. Misi terkait kemudian diturunkan menjadi tujuan pembangunan "*Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan*" dengan strategi "*Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai Tambah dan Berkelanjutan*". Tujuan dan sasaran terkait pembangunan sektor pariwisata tersebut dapat dievaluasi setelah lima tahun dengan sasaran dan indikator sebagai berikut:

- Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 7,5% pada tahun 2026.
- Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata sebesar 4,23% pada tahun 2026.
- Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif sebesar 7,56% pada tahun 2026.
- Meningkatnya daya saing investasi daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Tingkat Pertumbuhan Investasi sebesar 1,79% pada tahun 2026.

Meskipun sektor pariwisata hanya terkait langsung dengan salah satu misi pembangunan pariwisata, tetapi sesuai dengan prinsip perencanaan yang holistik, dan sifat dari sektor pariwisata yang pembangunannya melibatkan banyak sektor (*Multisector*), misi, tujuan ataupun strategi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara lainnya dapat secara tidak langsung mempengaruhi pembangunan kepariwisataan.

3.4 KETERKAITAN ANTAR PERATURAN DAERAH RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN LAIN

Pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Pasal 8 dan 9 diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Ripparkab Kutai Kartanegara juga harus saling bersinergi dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi (Ripparprov) Kalimantan Timur dan juga Ripparnas. Keterkaitan antara Peraturan Daerah tentang Ripparkab Kutai Kartanegara dengan peraturan perundangan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.5 Hubungan antara Peraturan Daerah tentang Ripparkab Kutai Kartanegara dengan Peraturan Perundangan Lain

3.5 DAMPAK PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN LAIN

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) Kutai Kartanegara merupakan:

1. Tindak lanjut implementasi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
2. Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara harus ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan yang dapat memperkuat posisi Peraturan Daerah. Peraturan perundangan tersebut antara lain:

1. Peraturan perundangan tentang penetapan daya tarik wisata Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Peraturan perundangan tentang rencana pengembangan kawasan strategis pariwisata dan kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Peraturan perundangan tentang pemantauan dan evaluasi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS



4.1 LANDASAN FILOSOFIS

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan filosofis menjadi pondasi dalam perumusan kebijakan untuk memperkuat pemenuhan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang menjadi bagian integral dalam struktur pemerintah pusat dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dengan membentuk sistem pemerintahan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas pilihan yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya dalam sektor kepariwisataan, yang mengacu pada prinsip pengembangan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4.1.1 Falsafah dan Landasan Pembangunan Kepariwisata

Landasan filosofis pariwisata merupakan landasan yang berkaitan dengan makna dan hakekat pariwisata, yang berusaha menelaah masalah pokok pentingnya pariwisata dalam kehidupan bermasyarakat. Landasan tersebut mengacu kepada falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu terwujudnya keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan manusia, serta antara manusia dengan lingkungan alam. Falsafah tersebut berasal dari nilai luhur agama atau tradisi yang bernilai universal sehingga lazim diekspresikan dalam bahasa dan bentuk yang berbeda. Maka hal itu menjadi acuan bagi pembangunan kepariwisataan nasional yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam dengan tidak mengabaikan kebutuhan masa yang akan datang, serta diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang membawa manfaat pada kesejahteraan masyarakat.

Falsafah yang menjadi landasan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah selayaknya memiliki pedoman seperti berikut¹:

- a. Pembangunan kepariwisataan yang berlandaskan nilai agama, norma sosial dan budaya, menjaga keseimbangan ekologis/lingkungan, serta menghargai hak asasi manusia;
- b. Memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia dalam bidang Ipoleksosbudhankam;
- c. Apresiasi terhadap nilai dan norma kehidupan berbangsa dan bernegara dan jatidiri sebagai bangsa Indonesia;
- d. Menjaga keanekaragaman alam dan memelihara keragaman budaya sebagai ciri khas pembangunan Indonesia dan menjadi modal dasar identitas lokal.
- e. Menjunjung tinggi wawasan nusantara dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.1.2 Asas Pembangunan Kepariwisata

Pelaksanaan pembangunan kepariwisataan nasional mengacu kepada asas-asas pembangunan kepariwisataan yang harus terimplementasikan dalam berbagai kebijakan yang dihasilkan di tingkat nasional maupun daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Maka dari itu, asas pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa pembangunan kepariwisataan harus mengacu pada asas-asas sebagai berikut:

- a. **Manfaat** yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat lokal, manfaat bagi daerah, maupun secara nasional;
- b. **Kekeluargaan**, dalam arti hubungan yang harmonis antara pemerintah dan swasta, antara pengusaha besar dan kecil, antara pengusaha dan masyarakat
- c. **Adil dan merata**, dalam arti setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang sama (non diskriminatif) dalam mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan, memanfaatkan peluang kerja atau melakukan kegiatan wisata;

¹ Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 Pasal 5 mengenai prinsip penyelenggaraan kepariwisataan nasional

- kepentingan masyarakat luas tidak dikorbankan demi kepentingan wisatawan atau kepentingan sekelompok pengusaha;
- d. **Keseimbangan** antara daya dukung dan daya tampung, antara permintaan dan penawaran; antara usaha besar dan kecil; serta keseimbangan antara aspek-aspek konservasi-edukasi-partisipasi dan ekonomi;
 - e. **Kemandirian**, pembangunan yang tidak didikte oleh pihak lain tetapi dirancang untuk kepentingan nasional dan bangsa, serta masyarakat Indonesia;
 - f. **Kelestarian**, dalam bentuk perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan pusaka alam dan budaya;
 - g. **Partisipasi**, membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan masyarakat;
 - h. **Berkelanjutan**, dalam bentuk tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan datang;
 - i. **Demokratis**, mendengarkan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan;
 - j. **Kesetaraan**, antara masyarakat tuan rumah dengan wisatawan;
 - k. **Kesatuan**, langkah dan visi serta tujuan pembangunan untuk kesatuan bangsa Indonesia serta integritas para pelaku: wisatawan, pengusaha, masyarakat dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pariwisata.

4.1.3 Nilai-Nilai Budaya Kutai Kartanegara

Nilai budaya Kutai Kartanegara merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Seperti yang diketahui, hubungan antara masyarakat dan kebudayaan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan karena kebudayaan lahir, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Sebaliknya tidak ada suatu masyarakat yang tidak didukung oleh kebudayaan. Kebudayaan dapat menggambarkan wujudnya melalui nilai-nilai budaya yang menjadi bagian dari identitas masyarakatnya. Merujuk Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pemajuan Kebudayaan dan Identitas Daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara kaya akan wujud kebudayaan daerah yang terdiri atas Kebudayaan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Melayu Kutai dan Kebudayaan Dayak, yakni:

- a. Kebudayaan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2016.

- b. Kebudayaan etnis Melayu Kutai yang ada di Daerah meliputi Puak Kutai Melanti, Kutai Punang, Kutai Pantun; dan
- c. Kebudayaan etnis Dayak yang ada kampungnya di Daerah , meliputi sub-etnis Dayak Modang, Dayak Kenyah, Dayak Punan, Dayak Tunjung, Dayak Benuaq, dan Dayak Basap.

Sejalan dengan pernyataan Idris (dalam Mubarak 2017: 91) yang mengatakan bahwa masyarakat Kutai terbagi menjadi tiga sub kultur, yakni: Dayak, Kutai Pesisir dan Kutai Keraton. Suku Kutai Pesisir dan Kutai Keraton sama-sama memeluk agama Islam, perbedaannya terletak pada kehidupan sosial budayanya serta bentuk keseniannya. Suku Kutai Pesisir adalah penduduk yang mendiami sepanjang pantai dan sungai Mahakam. Mereka umumnya pendatang baru dari berbagai daerah di luar pulau Kalimantan untuk mencari kehidupan baru. Suku Pesisir yang ada sekarang sebagai satu himpunan suku yang baru tetapi merupakan suku-suku yang mendiami daerah Kutai. Selain suku pendatang, Suku Kutai Pesisir juga terdapat suku Kutai asli yang diduga keturunan Melayu (Sumatera Timur) yang kemudian menetap dan berketurunan dengan penduduk asli Kalimantan di bagian Timur (daerah Kutai). Dengan beragam pengelompokan sosial masyarakat Kutai mempengaruhi corak kebudayaannya yang kaya dan khas. Corak kebudayaan Kutai yang dipengaruhi oleh adat Melayu, adat Dayak dengan kehidupan pedalaman dan corak kebudayaan dari masyarakat pesisir membentuk keunikan dan kekayaan nilai budaya dan identitas yang membentuk masyarakat Kutai Kartanegara.

Dengan kekayaan nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat Kutai Kartanegara memberikan ragam warna dan membentuk kekayaan budaya yang khas sehingga menciptakan kearifan lokal, tradisi, dan praktik budaya yang memadukan unsur-unsur budaya Islam, budaya Dayak dan budaya Melayu. Kearifan lokal ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, termasuk di dalamnya adalah upacara adat, kesenian (tarian/musik), dan praktik kehidupan sehari-hari. Kearifan lokal ini menjadi bagian penting bagi masyarakat Kutai Kartanegara, baik sebagai ekspresi budaya maupun sebagai sarana hiburan yang memiliki potensi kepariwisataan.

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki beragam bentuk upacara/ritual adat yang sudah menjadi praktik sosial budaya masyarakatnya sejak dahulu. Pada masyarakat Kutai Kartanegara, khususnya Suku Kutai dan Suku Dayak masih memakai beberapa tradisi dan

adat istiadat yang masih ada dipertahankan dan dilestarikan hingga saat ini, seperti: Reservasi tempat budidaya ikan dan hewan, denda adat menebang Pohon Bengeris dan Telihan, Pantangan atau Tuhing (menebang pohon di pinggir sungai), anting pada Dayak Kenyah, Bahau, dan Modang, Tatto Suku Dayak, Upacara Adat Erau, Upacara Adat Perkawinan Suku Kutai, Upacara Adat Kelahiran atau Tasmiyah dan Naik Ayun, Upacara Adat Kematian, Upacara Adat Tepong Tawar, Kaseh Selamat, Membersihkan Pusaka, Mengarak Tambak Pulut, Belenggang, Naik Ayun, Tijk Tanah, Pelas Uling (Pelas Bidan), Ngowong, Empus Laing Belaum, Penhos (pembersihan membuang sial), Adat Pele (adat padi), dan Hudoq.

Bahkan sejak tahun 2015 - 2023, tercatat ada 19 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang sudah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Bahkan beberapa diantaranya mendapatkan pengakuan menjadi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh Kemendikbudristek sebanyak 19 WBTB. Sebelumnya di tahun 2022 ada 5 tradisi/kearifan lokal yang sudah mendapatkan pengakuan sebagai WBTB yaitu Nutuk Baham, Tarsul Kutai, Muang Kutai Adat Lawas, Naik Ayun dan Begasing. Di tahun 2023, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara mengajukan 3 WBTB kepada Kemendikbudristek yaitu Jatung Utang (alat musik tradisional), Mecaq Undat (panen raya) dan Kuda Gepang (seni pertunjukan).

Kearifan lokal masyarakat Kutai Kartanegara yang dikenal luas oleh masyarakat, bahkan oleh wisatawan adalah Upacara Erau. Upacara merupakan salah satu praktik budaya yang berasal dari peninggalan Kerajaan Kutai Kartanegara yang telah ada ratusan tahun yang lalu. tradisi Erau tetap dipelihara dan dilestarikan sebagai pesta rakyat dan festival budaya yang menjadi agenda rutin pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka memperingati hari jadi Kota Tenggarong. Sejak tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura telah bekerja sama melaksanakan Upacara Erau yang dipadukan dengan *Tenggarong International Folk Art Festival (Tifaf)* sehingga ragam seni yang dipertunjukkan tidak selalu dikaitkan dengan seni budaya Keraton Kutai Kartanegara, tetapi lebih bersifat umum dengan berbagai penampilan ragam seni dan budaya yang ada dan berkembang di seluruh wilayah Kutai Kartanegara, bahkan mempertunjukan seni budaya dari negara-negara lain yang tergabung dalam anggota organisasi CIOFF (*International Council of Organizations of*

Folklore Festivals and Folk Arts). Meski begitu, pelaksanaan upacara-upacara adat yang menjadi bagian dari Kerajaan Kutai Kartanegara tetap dipertahankan dan dipertunjukkan sebagai bagian dari ritual adat sekaligus menjadi hiburan bagi pengunjung.

Selain tradisi dan ritual, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kekayaan makanan tradisional yang ini mencerminkan cita rasa dan budaya kuliner masyarakat Kutai Kartanegara. Makanan tradisional dalam hal ini menjadi sebuah ide dan gagasan dari masyarakat yang dikembangkan secara terus menerus, dan diwariskan lintas generasi. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki beberapa Kuliner Tradisional, sebagai berikut: Gence Ruan, Sate Payau, Gangan Sayur Prede, Gangan Sayur Rojak, Gangan Sayur Kladi, Gangan Sayur Asam Kutai, Jerok Tegaron, Nasi Bekepor, Temu Kunci, Jalo, Elat Sapi, Keminting, Serabai, Jukut Salai, Sambel Raja, Tok Bunggoy, Beyout, Piadong, Wajik, Tumpi, Tuang, Tinting. Dengan kekayaan makanan tradisional ini memiliki potensi menjadi atraksi kuliner untuk menarik lebih banyak wisatawan.

4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dan perlindungan terhadap masyarakat. Landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat. Landasan ini menjadi panduan pelaksanaan pembangunan, dalam hal ini pembangunan kepariwisataan. Dukungan para pemangku kepentingan atau yang disebut sebagai masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan kepariwisataan. Oleh karena itu, pembangunan kepariwisataan harus pula mencakup kajian sosiologis, selain kajian ekonomi dan ekologis.

Tujuan-tujuan pembangunan kepariwisataan selalu menempatkan masyarakat sebagai subjek dari pengembangan kepariwisataan dan objek dari dampak yang ditimbulkan oleh pariwisata. Pembangunan kepariwisataan juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat untuk dapat mengakses dan menikmati sumber daya pariwisata di lingkungannya secara berkelanjutan. Sebaliknya, masyarakat pula yang menjadi faktor penentu keberlanjutan pariwisata, kemajuan industri pariwisata, dan pengembangan komunitas lokal. Masyarakat berperan penting dalam pembangunan kepariwisataan, menciptakan kondisi lingkungan yang baik bagi wisatawan maupun usaha pariwisata.

Keterlibatan masyarakat lokal memberikan kualitas pengalaman yang lebih tinggi dan otentik kepada wisatawan karena keunikan sumber daya alam dan kekhasan budaya, pelibatan ekonomi kreatif, serta menggerakkan perekonomian daerah.

4.2.1 Masyarakat sebagai Tujuan Pembangunan Kepariwisata

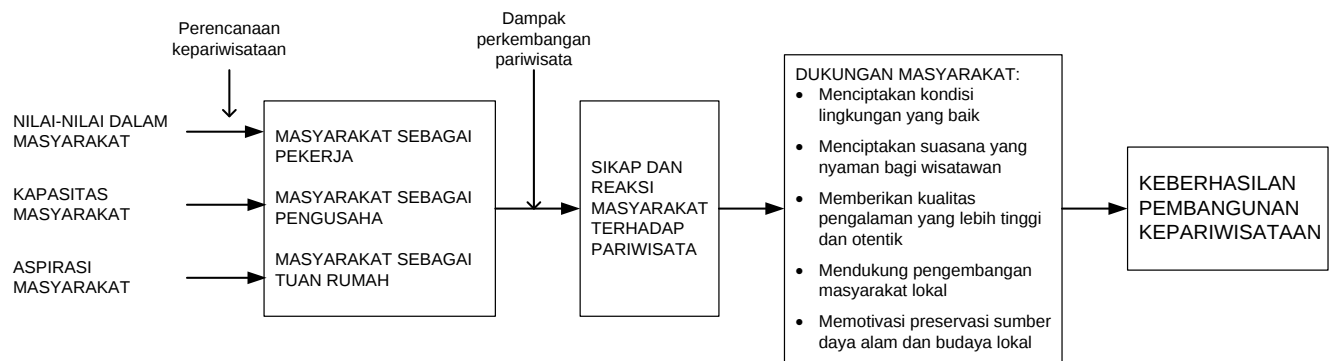
Menurut Zhang (2010:13), masyarakat adalah faktor penting yang menentukan keberlanjutan dua hal utama dalam pariwisata, yaitu kemajuan industri pariwisata dan pengembangan komunitas lokal. Dalam menentukan keberhasilan pengembangan industri pariwisata, keterlibatan masyarakat lokal menjadi hal yang penting dalam memberikan kualitas pengalaman yang lebih tinggi dan otentik kepada wisatawan karena keunikan sumber daya alam dan budaya asli menjadi alasan utama sebagian besar wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi. Masyarakat lokal juga merupakan elemen dasar dan penting dalam pengembangan kepariwisataan modern (Aref dkk, 2010:155; Godfrey dan Clarke, 2000: 71).

Sementara itu, dalam pengembangan masyarakat lokal, peran masyarakat adalah: 1) mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat lokal dengan menunjukkan persoalan-persoalan dan fokus pembangunan masyarakat yang harus dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan dan rencana pengembangan kepariwisataan; 2) memotivasi preservasi lingkungan alam dan budaya lokal dengan melibatkan mereka selama proses perencanaan dan memberikan kewenangan untuk melindungi sumber daya lokal sehingga mereka memiliki tanggung jawab yang lebih dalam pelestarian lingkungannya (Zhang, 2010: 13-16). Lebih jauh lagi, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan dapat meningkatkan dukungan politis dari berbagai pihak (Godfrey dan Clarke, 2000: 54).

Mason (2010) menegaskan bahwa perencanaan kepariwisataan harus mencerminkan nilai-nilai dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya, dan norma-norma yang ada di masyarakat adalah salah satu nilai yang terpenting dalam perencanaan kepariwisataan. Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik dari nilai-nilai agama maupun adat istiadat. Secara umum dapat dikatakan karakteristik masyarakat Kutai Kartanegara memiliki sifat yang ramah, jujur dan memiliki semangat gotong-royong yang tinggi.

Masyarakatnya pun sangat religius dan memiliki rasa toleransi antar umat beragama yang tinggi. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari aspek sosiologis masyarakatnya yang banyak bersinggungan dengan pengaruh dari luar sehingga masyarakatnya sangat terbuka dengan perbedaan. Sejak dari dulu, masyarakat Kutai Kartanegara sudah terbiasa menerima pengaruh budaya asing melalui proses inkulturasi yang pada akhirnya membentuk budaya dan identitas masyarakatnya hingga saat ini. Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah kerajaan yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara yang membentuk corak budaya Hindu - Buddha dan Islam. Dengan pengaruh budaya Hindu - Buddha dan Islam di tanah Kutai, hal ini yang kemudian secara kultural memisahkan Suku Kutai dan Suku Dayak karena perbedaan sosio-religius padahal berasal dari satu kelompok ras yang sama, yaitu Deutro Melayu. Suku Kutai sendiri banyak mengalami perubahan-perubahan sosio-religius akibat adanya pengaruh kebudayaan ras Proto Melayu (Banjar, Bugis, dan Jawa). Suku Banjar dan Suku Bugis banyak mempengaruhi Suku Kutai dengan asimilasi budaya melayunya yang kental dengan unsur budaya Islam. Bermukimnya suku Banjar di wilayah Kutai dikarenakan Kesultanan Kutai Kartanegara pernah menjadi wilayah taklukan Kesultanan Banjar.

Keterbukaan masyarakat Kutai Kartanegara terhadap segala perbedaan karena sejak dulu masyarakatnya sudah terbiasa berinteraksi dengan pengaruh budaya dari luar. Keberagaman etnis dan agama di Kutai Kartanegara menciptakan suasana toleransi yang kuat. Saat ini etnis yang terdapat di Kutai Kartanegara tidak hanya didominasi oleh Suku Kutai dan Suku Dayak saja, tetapi juga etnis Melayu, tetapi juga suku lain seperti suku Banjar, Jawa, Bugis, Tidung, dan suku-suku lainnya yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Maka pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara harus memperhatikan nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat sekitar, sehingga pariwisata yang berkembang akan diterima dan didukung oleh masyarakat, dimana hal ini menentukan keberhasilan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Kartanegara. Berbagai peran masyarakat yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa masyarakat memegang peranan penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan kepariwisataan. Dukungan masyarakat merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam pembangunan kepariwisataan. Peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan secara diagramatis digambarkan oleh Adriani (2012) seperti pada gambar berikut ini.



Sumber: Adriani, 2012

Gambar 4.1 Peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan

4.2.2 Hak Masyarakat dalam Pariwisata

Pernyataan mengenai hak masyarakat dalam berwisata sudah dimuat dalam beberapa dokumen dunia maupun nasional, yaitu:

1. *Universal Declaration of Human Rights* yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948;
2. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* yang dikeluarkan oleh PBB pada tanggal 16 Desember 1966, dan sudah dibuat pula peraturan perundangannya di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) yang disahkan tanggal 28 Oktober 2005;
3. *Manila Declaration on World Tourism* yang disepakati oleh 107 negara peserta dan 91 negara pengamat *World Tourism Conference* yang diselenggarakan oleh United Nations World Tourism Organization (UNWTO) pada tanggal 10 Oktober 1980 di Manila, Filipina;
4. *Tourism Bill of Right and Tourist Code* yang kelahirannya dimotori oleh UNWTO pada tanggal 26 September 1985. *Tourism Bill of Right and Tourist Code* memuat 14 artikel tentang hak-hak dan kewajiban dalam berwisata;
5. *Global Code of Ethics for Tourism* pada Sidang Umum UNWTO pada tanggal 1 Oktober 1999 di Santiago, Chili, yang memuat sepuluh prinsip etika dalam pariwisata. Dari kesepuluh prinsip tersebut, terdapat juga butir-butir yang menekankan hak-hak masyarakat dalam pariwisata;

6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 19 yang ditetapkan tanggal 16 Januari 2009.

Isi dari dokumen-dokumen tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Hak Masyarakat dalam Pariwisata

DEKLARASI/ DOKUMEN	HAK MASYARAKAT		
	TERLIBAT DALAM KEGIATAN PARIWISATA		MENDAPATKAN MANFAAT EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DARI PARIWISATA
	Sebagai tuan rumah	Sebagai wisatawan	
Universal Declaration of Human Rights, 1948	–	– hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang	–
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966 Undang-Undang no. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i> (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)	–	– Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang	–
Manila Declaration on World Tourism, 1980	– Hak untuk terlibat dalam berbagai kegiatan pengembangan kepariwisataan melalui lembaga-lembaga sukarela – Hak mendapatkan pendidikan dan pelatihan agar lebih siap terlibat dalam pengembangan kepariwisataan	– Hak mendapatkan akses ke kegiatan beristirahat dan liburan yang kreatif, paling baik, efektif, dan tidak diskriminatif – Hak mendapatkan peluang untuk lebih mengenal lingkungannya sendiri, mendalami identitas bangsanya, meningkatkan solidaritas terhadap sesama anggota masyarakat, meningkatkan rasa memiliki terhadap	–

DEKLARASI/ DOKUMEN	HAK MASYARAKAT		
	TERLIBAT DALAM KEGIATAN PARIWISATA		MENDAPATKAN MANFAAT EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DARI PARIWISATA
	Sebagai tuan rumah	Sebagai wisatawan	
		budaya dan masyarakat dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam berwisata	
Tourism Bill of Rights and Tourist Code, 1985	– Mendapatkan perlindungan pemerintah dari penggunaan narkoba secara illegal. – Mendapatkan penghargaan dari wisatawan terhadap adat-istiadat, agama, dan elemen budaya lainnya yang merupakan bagian dari warisan budaya manusia.	– Hak masyarakat untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang dengan memperhatikan batas-batas hukum tertentu yang berlaku secara universal. – Para pemuda, lanjut usia, dan masyarakat berkebutuhan khusus mendapat perhatian khusus dalam penyediaan akses untuk memanfaatkan waktu luang dengan berwisata – Mendapatkan akses yang bebas ke sumber daya pariwisata yang dimilikinya, juga mendorong munculnya penghargaan terhadap lingkungan alam dan budaya	–
Global Code of Ethics for Tourism, 1999	– Hak untuk mendapatkan penghargaan dari wisatawan dan para pemangku kepentingan terhadap agama, kepercayaan, serta tradisi sosial dan budaya yang dimilikinya. – Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan agar dapat lebih siap menerima wisatawan	– Hak untuk mengenal dan menikmati seluruh kekayaan bumi bagi seluruh penduduk di dunia, termasuk keluarga, pemuda, lanjut usia, dan mereka yang berkebutuhan khusus sebagai konsekuensi logis dari hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.	– Hak untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata dan menikmati keuntungan ekonomi, sosial, dan budaya dari pariwisata

DEKLARASI/ DOKUMEN	HAK MASYARAKAT		
	TERLIBAT DALAM KEGIATAN PARIWISATA		MENDAPATKAN MANFAAT EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DARI PARIWISATA
	Sebagai tuan rumah	Sebagai wisatawan	
Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan	– Melakukan usaha pariwisata – Menjadi pekerja/buruh pariwisata – Berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan – Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas menjadi pekerja/buruh, konsinyasi; dan/atau pengelolaan	– Memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata	–

Sumber: Adriani, 2012.

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan, masyarakat bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya memiliki hak dan kewajiban dalam pembangunan kepariwisataan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa hak dari pemerintah atau pemerintah daerah adalah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Sementara itu, pengusaha pariwisata memiliki hak untuk (1) mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan, (2) membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan, (3) mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha, dan (4) mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Lebih lanjut, undang-undang tentang kepariwisataan pun menguraikan bahwa wisatawan berhak untuk memperoleh informasi yang akurat, memperoleh pelayanan yang sesuai dengan standar, memperoleh perlindungan hukum dan keamanan, mendapatkan pelayanan, perlindungan hak pribadi, perlindungan asuransi, serta wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini memberikan pengertian bahwa peraturan daerah penyelenggaraan kepariwisataan ini harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pariwisata.

4.3 LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten termuat dalam beberapa peraturan perundangan di tingkat pusat, khususnya pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Sementara itu, landasan yuridis penyusunan Peraturan Daerah adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

4.3.1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan merupakan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota”. Lebih lanjut pada ayat (2) dinyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan tersebut merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional/ provinsi/ kabupaten/kota.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) merupakan pedoman utama dalam pembangunan kepariwisataan kabupaten yang menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam membangun kepariwisataan sesuai dengan konsep pembangunan kepariwisataan yang dirumuskan dan disepakati bersama, mencakup visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Kekuatan hukum Ripparkab juga telah diatur pada pasal 9 ayat (3) Undang-Undang tersebut, yang menegaskan bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten. Selanjutnya, pada Pasal 9 ayat (4) dinyatakan bahwa penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan tersebut dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Muatan dalam Ripparkab diatur pada pasal 9 ayat (5) yang menyebutkan bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

4.3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati. Lebih lanjut pada Pasal 39 dijelaskan bahwa Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dilakukan dalam Prolegda (Program Legislasi Daerah) Kabupaten.

Pasal 6 Undang-undang ini menyebutkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman, b. kemanusiaan, c. kebangsaan, d. kekeluargaan, e. kenusantaraan, f. Bhinneka Tunggal Ika, g. keadilan, h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, i. ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selain mencerminkan asas tersebut, Peraturan Perundang-undangan tertentu, termasuk Peraturan Daerah, dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Terkait dengan peraturan di bidang kepariwisataan, maka asas-asas seperti yang tercantum dalam pembahasan di subbab 4.1 juga perlu menjadi pertimbangan.

Dalam penyusunan peraturan daerah juga perlu menguatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga prasyarat; yaitu pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

BAB 5

JANGKAUAN, ARAHAN PENGATURAN,
DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2026-2045



5.1 JANGKAUAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN (RIPPARKAB) KUTAI KARTANEGARA

Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026-2045 akan menjangkau seluruh pemangku kepentingan di bidang kepariwisataan, meliputi:

1. **Pemerintah Daerah** Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya Perangkat Daerah yang mengurus tentang pariwisata, dan yang terkait dengan sektor pariwisata;
2. **Usaha pariwisata** yang berusaha di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, mencakup 13 jenis usaha yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang telah diatur pula dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yaitu (1) usaha daya tarik wisata; (2) usaha kawasan pariwisata; (3) usaha jasa transportasi wisata; (4) usaha jasa perjalanan wisata; (5) usaha jasa makanan dan minuman; (6) usaha penyediaan akomodasi; (7) usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; (8) usaha penyelenggaraan pertemuan; perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; (9) usaha jasa informasi pariwisata; (10) usaha jasa konsultan pariwisata; (11) usaha jasa pramuwisata; (12) usaha wisata tirta; dan (13) usaha spa; beserta seluruh subusaha di bawahnya.
3. **Asosiasi usaha pariwisata** Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. **Sumber daya manusia** yang bekerja di usaha pariwisata yang beroperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. **Lembaga pendidikan** terkait kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk akademisi didalamnya;
6. **Kelompok masyarakat** yang bergerak di bidang kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. **Organisasi masyarakat** lain yang terkait dan mendukung pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

5.2 ARAH PENGATURAN

Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk mendorong terlaksananya pembangunan kepariwisataan yang didasarkan pada perencanaan pembangunan wilayah keseluruhan, terintegrasi antarsektor dan antarpemangku kepentingan, menempatkan masyarakat sebagai subjek atau ujung tombak, serta pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Arah pengaturan ini termuat dalam prinsip, visi, misi, tujuan, sasaran pembangunan kepariwisataan, kebijakan, strategi, dan program yang merupakan muatan materi dari Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

5.3 RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup materi Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari ketentuan umum, muatan materi Ripparkab yang diatur dalam Peraturan Daerah, serta ketentuan penutup.

BATANG TUBUH	PENGATURAN	PASAL
BAB I	KETENTUAN UMUM	Pasal 1
BAB II	KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP	
Bagian Kesatu	Kedudukan	Pasal 2
Bagian Kedua	Ruang Lingkup	Pasal 3-4
BAB III	PRINSIP, VISI, MISI	
Bagian Kesatu	Prinsip Pembangunan	Pasal 5
Bagian Kedua	Visi	Pasal 6
Bagian Ketiga	Misi	Pasal 7
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
Bagian Kesatu	Tujuan	Pasal 8
Bagian Kedua	Sasaran	Pasal 9
BAB V	PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA	
Bagian Kesatu	Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata	Pasal 10
Bagian Kedua	Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata	Pasal 11
BAB VI	PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA	
Bagian Kesatu	Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata	Pasal 12
Bagian Kedua	Strategi Pembangunan Industri Pariwisata	Pasal 13
BAB VII	PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA	
Bagian Kesatu	Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata	Pasal 14
Bagian Kedua	Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata	Pasal 15
BAB VIII	PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN	
Bagian Kesatu	Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata	Pasal 16
Bagian Kedua	Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata	Pasal 17
BAB IX	PERWILAYAHAN PARIWISATA DAERAH	Pasal 18
Bagian Kesatu	Struktur Perwilayahan Pariwisata	Pasal 19

BATANG TUBUH	PENGATURAN	PASAL
Bagian Kedua	KSPK (Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten)	Pasal 20
Bagian Ketiga	KPPK (Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten)	Pasal 21
Bagian Keempat	Peta Perwilayahan Pariwisata	Pasal 22
BAB X	PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN	
Bagian Kesatu	Pelaksanaan	Pasal 23
Bagian Kedua	Pengendalian	Pasal 24
BAB XI	PEMBIAYAAN	Pasal 25-27
BAB XII	KETENTUAN PENUTUP	Pasal 28-29
PENJELASAN		
LAMPIRAN		
LAMPIRAN I	INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN	
LAMPIRAN II	PETA PERWILAYAHAN PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	
LAMPIRAN III	INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN	

Masing-masing muatan ruang lingkup tersebut dijelaskan berikut ini.

5.3.1 Ketentuan Umum

Ketentuan umum memuat rumusan akademik tentang pengertian istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah. Istilah yang digunakan adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2036, yang selanjutnya disingkat Ripparkab adalah pedoman utama bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten, berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun, berisi kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan kepariwisataan yang ditentukan, mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk pariwisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
13. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
14. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
16. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata

maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

17. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
18. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
19. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
20. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut KSPK, adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
21. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disebut KPPK, adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai kekhasan dan keunggulan kabupaten.

5.3.2 Muatan Materi Peraturan Daerah

Ripparkab Kutai Kartanegara merupakan pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan, kebijakan, serta strategi dan indikasi program yang mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Muatan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026–2045 mencakup hal-hal berikut ini:

A. Prinsip Pembangunan Kepariwisata

Prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah ideologi yang dianut dalam merumuskan arah pembangunan kepariwisataan daerah. Prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

1. **pembangunan pariwisata yang terintegrasi**; merupakan perencanaan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan wilayah keseluruhan, antarsektor dan antarpemangku kepentingan;
2. **pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat**; merupakan pembangunan pariwisata yang menempatkan masyarakat sebagai subjek/ujung tombak: pelaku, pengelola, pengawas pembangunan kepariwisataan; dan
3. **pembangunan kepariwisataan berkelanjutan**; merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan dari generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka yang mencoba mempertemukan aspek pembangunan ekonomi, sosial dengan konservasi lingkungan.

B. Visi Pembangunan Kepariwisata

Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah rumusan mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode perencanaan tahun 2026-2045.

Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah **“Kutai Kartanegara sebagai Destinasi Pariwisata Sejarah dan Alam Berkualitas, Mitra Utama IKN untuk Kesejahteraan Masyarakat”**.

- **Destinasi pariwisata sejarah** adalah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk mengoptimalkan nilai-nilai dan tinggalan sejarah budaya yang dimiliki terutama terkait dengan sejarah kerajaan Kutai sebagai kerajaan tertua di Nusantara. Mengangkat sejarah Kutai sejatinya mengangkat sejarah keberadaan Bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa kepulauan yang memiliki karagaman tinggi. Sehingga, nilai sejarah yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menjadi magnet bagi pariwisata Kutai Kartanegara sebagai destinasi sejarah berskala nasional maupun internasional;
- **Destinasi pariwisata alam** maksudnya adalah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk mewujudkan peningkatan upaya konservasi lingkungan melalui pariwisata. Sebagai daerah yang dilalui Sungai Mahakam, dimana terdapat dua danau utama yaitu Danau Semayang dan Danau Melintang dengan keanekaragaman hayati yang tinggi serta tutupan hutan baik Taman Nasional Kutai, Hutan Penelitian Samboja maupun Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang dapat didorong

untuk dioptimalkan sebagai daya tarik wisata yang bernilai ekologi tinggi. Lebih lanjut, pembangunan kepariwisataan Kutai kartanegara adalah pembangunan yang menjunjung tinggi prinsip pelestarian lingkungan;

- **Destinasi pariwisata berkualitas** maksudnya adalah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan tidak hanya bertujuan untuk mengejar nilai ekonomi akan tetapi juga bagaimana pariwisata dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya pelestarian lingkungan, peningkatan kualitas sosial masyarakat serta upaya konservasi budaya masyarakat. menciptakan pariwisata berkualitas adalah menciptakan daerah tujuan wisata yang bertandar nasional atau internasional, berkelanjutan, dan muaranya menciptakan kondisi wisatawan maupun masyarakat lokal merasa nyaman dan bahagia;
- **Mitra utama IKN**, Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan selain untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, juga untuk memberikan dukungan penuh terhadap kebutuhan pariwisata masyarakat yang berasal dari IKN. Selain itu, pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara harus terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan yang dilakukan di IKN dalam pengembangan pariwisata khususnya ekowisata;
- **Kesejahteraan masyarakat**, tujuan utama pembangunan kepariwisataan di Kabuapten Kutai Kartanegara adalah untuk sebesar-besarnya meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. tidak saja dari aspek ekonomi akan tetapi yang jauh lebih penting adalah aspek sosial dan budaya. Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk mampu mengangkat kualitas budaya Kutai sebagai salah satu budaya unggul nasional.

C. Misi Pembangunan Kepariwisata

Misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pernyataan mengenai komitmen untuk mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan. Berdasarkan visi tersebut, maka misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan daya tarik wisata yang berkelanjutan berbasis budaya, sejarah, dan alam dengan menciptakan konektifitas antar daya tarik wisata dan daya tarik wisata ke IKN guna memberikan nilai lebih pengalaman berwisata;
2. Pengembangan industri pariwisata berstandar internasional melalui sertifikasi industri, kemitraan antar industri pariwisata besar, menengah dan kecil, tanggungjawab lingkungan dan sosial budaya;
3. Mewujudkan pemasaran pariwisata yang efektif, efisien dan berkesinambungan berbasis keunggulan pariwisata daerah; dan
4. Membangun sumber daya manusia pariwisata dan penguatan kebijakan pembangunan kepariwisataan yang terinternalisasi di seluruh pemangku kepentingan pariwisata guna menciptakan kelembagaan yang kuat dan efektif.

D. Tujuan Pembangunan Kepariwisata

Tujuan pembangunan kepariwisataan merupakan kondisi yang harus dicapai kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara pada akhir masa perencanaan, yaitu di tahun 2045. Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan konektifitas antara seluruh daya tarik wisata Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kawasan IKN dan Kabupaten/Kota sekitar;
2. Mewujudkan daya tarik wisata sejarah kerajaan dan ekowisata sebagai unggulan daerah;
3. Mewujudkan keterpaduan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan kemudahan berusaha;
4. Mewujudkan masyarakat sadar wisata yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Kutai sebagai pelaku utama pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif bagi peningkatan investasi pariwisata skala nasional dan internasional yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan ramah lingkungan;
6. Mewujudkan rantai nilai industri pariwisata yang kokoh untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan;
7. Mewujudkan industri pariwisata yang berkeadilan tinggi melalui penerapan standar nasional dan internasional;
8. Mewujudkan pembentukan citra destinasi pariwisata sejarah kerajaan dan ekowisata berkualitas dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara kreatif;

9. Mewujudkan pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien dalam menjangkau pasar wisatawan yang lebih luas dan berkualitas;
10. Mewujudkan sumber daya manusia berkompeten yang mampu mendorong kreativitas dan inovasi dalam membangun kepariwisataan berkualitas; dan
11. Mewujudkan regulasi, mekanisme operasional, serta organisasi kepariwisataan yang andal dan berjejaring sebagai penggerak keterpaduan pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat.

E. Sasaran Pembangunan Kepariwisata

Sasaran pembangunan kepariwisataan suatu daerah merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dengan pembangunan kepariwisataan yang dilakukan. Sasaran harus spesifik dan terukur karena menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan kepariwisataan.

Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

1. peningkatan kontribusi terhadap PDRB;
2. peningkatan jumlah daya tarik wisata berstandar nasional;
3. peningkatan jumlah daya tarik wisata berstandar internasional;
4. peningkatan kunjungan wisatawan;
5. peningkatan lama tinggal wisatawan;
6. peningkatan pengeluaran wisatawan; dan
7. peningkatan penyerapan tenaga kerja.

F. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisata

Kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan menjabarkan visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan ke dalam arah tindakan yang akan dilakukan untuk empat pilar pembangunan kepariwisataan, yaitu pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. Kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk setiap pilar pembangunan kepariwisataan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara

PILAR	KEBIJAKAN	STRATEGI
DESTINASI PARIWISATA	1. Pembangunan perwilayahan pariwisata Kabupaten Kutai	1.1 Membangun Kawasan Danau Semayang dan Danau Melintang dan sekitarnya

PILAR	KEBIJAKAN	STRATEGI
	Kartanegara yang berbasis sungai, danau, hutan, geologi, flora dan fauna khas Kalimantan, serta budaya yang mendorong penguatan keunggulan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, memadukan pengembangan daya tarik wisata berbasis tema, serta menyebarkan perkembangan pariwisata ke seluruh wilayah;	sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap ekosistem danau, daerah aliran sungai (DAS), dan budaya masyarakat pesisir danau dan sungai melalui pengembangan pariwisata berbasis konservasi. 1.2 Membangun Kawasan Marang Kayu, Muara Badak dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) untuk meningkatkan perlindungan terhadap kawasan ekosistem laut dan pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara. 1.3 Membangun Kawasan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Muara Wis dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) untuk meningkatkan perlindungan terhadap budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan. 1.4 Membangun Kawasan Muara Kaman – Sebulu dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap warisan sejarah kerajaan tertua di Indonesia dan ekosistem hutan hujan tropis Kalimantan. 1.5 Membangun Kawasan Tenggarong, Tenggarong Seberang dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) yang berfungsi sebagai etalase sejarah Kerajaan Kutai Kartanegara dan Indonesia. 1.6 Membangun Kawasan Sanga-sanga, Anggana, Muara Jawa dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) untuk meningkatkan perlindungan terhadap sejarah perjuangan kemerdekaan dan pertambangan awal di Kalimantan. 1.7 Membangun keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan KSPK dengan Kawasan Ibu Kota Negara (IKN), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Taman Nasional Kutai dan sekitarnya, serta Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP), dan kawasan lainnya.
	2. Pembangunan keterpaduan fungsi pusat-pusat kegiatan	2.1 Mengembangkan pusat pelayanan primer pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara,

PILAR	KEBIJAKAN	STRATEGI
	dengan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Kabupaten kutai Kartanegara.	yaitu Kecamatan Tenggarong yang berfungsi sebagai pusat penyediaan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum berstandar internasional, serta pusat penyebaran kegiatan wisata ke seluruh wilayah kabupaten. 2.2 Mengembangkan pusat pelayanan sekunder pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Kelurahan Sanga-sanga Dalam di Kecamatan Sanga-sanga dan Desa Kota Bangun Ulu di Kecamatan Kota Bangun yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan pariwisata di KSPK.
	3. Peningkatan aksesibilitas jaringan transportasi yang menghubungkan daya tarik wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan IKN, Kabupaten/Kota sekitar dan destinasi pariwisata nasional.	3.1 Meningkatkan aksesibilitas dari Kota Balikpapan, Kota Samarinda, IKN dan kabupaten/kota sekitarnya sebagai sumber pasar utama. 3.2 Mengembangkan angkutan wisata dari Bandara Sepinggian Balikpapan dan Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda menuju Kutai Kartanegara. 3.3 Meningkatkan ketersediaan informasi pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara di ruas jalan tol bebas hambatan Balikpapan-Samarinda (Balsam), ruas jalan IKN-Tenggarong dan ruas jalan utama lainnya.
	4. Peningkatan konektivitas antara pintu-pintu masuk (bandar udara, pelabuhan, pintu keluar jalan bebas hambatan) dengan daya tarik wisata dan pusat-pusat kegiatan wisata di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.	4.1 Meningkatkan kualitas pelayanan jalan, angkutan umum, dan papan petunjuk arah yang menghubungkan Bandara Sepinggian Balikpapan, Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda, pintu keluar tol Balikpapan-Samarinda, Jalan Menuju IKN, dan jalan utama menuju Samarinda dengan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, serta daya tarik wisata unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara. 4.2 Mengembangkan angkutan wisata yang menghubungkan pusat pelayanan primer dengan pusat pelayanan sekunder dan seluruh daya tarik wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara. 4.3 Meningkatkan kualitas pelayanan jalan menuju pusat pelayanan pariwisata dan daya tarik wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara.
	5. Pengembangan daya tarik wisata berbasis sungai, danau, hutan, geologi, dan	5.1 Meningkatkan upaya penelitian dalam rangka menggali nilai penting, danau, sungai, keanekaragaman hayati, dan

PILAR	KEBIJAKAN	STRATEGI
	flora fauna khas Kalimantan Timur yang berstandar nasional dan internasional.	keragaman geologi sebagai keunggulan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka meningkatkan daya saing produk pariwisata. 5.2 Meningkatkan upaya perlindungan terhadap sumber daya alam yang menjadi keunggulan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. 5.3 Mengembangkan daya tarik wisata unggulan berbasis danau, sungai, keragaman geologi, serta flora dan fauna khas Kalimantan menjadi daya tarik wisata berstandar nasional dan internasional. 5.4 Mengembangkan desa dan kampung wisata bertema sejarah, budaya, kuliner, kriya dan konservasi untuk meningkatkan kualitas dan keragaman pengalaman berwisata.
	6. Pengembangan daya tarik wisata berbasis sejarah Kerajaan Kutai yang terintegrasi untuk meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan pengalaman berwisata.	6.1 Mengembangkan penelitian dalam rangka menggali nilai penting sejarah Kerajaan Kutai untuk meningkatkan nilai dan daya saing produk pariwisata. 6.2 Mengintegrasikan seluruh daya tarik wisata bertema sejarah Kerajaan Kutai sebagai satu produk pariwisata unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara. 6.3 Mengembangkan jalur wisata bertema sejarah Kerajaan Kutai yang terintegrasi untuk meningkatkan pengalaman berwisata.
	7. Pengembangan keterpaduan daya tarik wisata unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan daya tarik wisata di daerah lain dan IKN yang memiliki keterkaitan tema pengembangan produk.	7.1 Mengembangkan jalur wisata bertema sejarah, budaya, dan konservasi untuk meningkatkan keterkaitan daya tarik wisata sekaligus menguatkan keunggulan pariwisata Kutai Kartanegara. 7.2 Mengembangkan jalur wisata bertema budaya, ekowisata, geowisata, wisata petualangan dan wisata sejarah yang mengaitkan daya tarik wisata unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan daya tarik wisata di kabupaten/kota sekitar dan IKN.
	8. Pengembangan kegiatan wisata kreatif dan edukatif pada daya tarik wisata yang dikembangkan di Kabupaten Kutai Kartanegara	8.1 Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengelola daya tarik wisata terhadap konsep pariwisata kreatif dan edukatif serta prinsip-prinsip pariwisata berkualitas dalam pengembangan produk pariwisata. 8.2 Mengembangkan pembinaan dalam pengelolaan kegiatan wisata kreatif dan

PILAR	KEBIJAKAN	STRATEGI
		edukatif pada daya tarik wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara. 8.3 Mengembangkan even nasional dan internasional sesuai dengan keunggulan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. 8.4 Mengembangkan kegiatan wisata olahraga dan wisata petualangan yang edukatif untuk meningkatkan keragaman daya tarik wisata Kabupaten Kutai Kartanegara. 8.5 Mengembangkan interpretasi pariwisata untuk meningkatkan pengalaman berkualitas kepada wisatawan sesuai dengan keunggulan pariwisata, kekhasan daya tarik wisata, dan segmen pasar wisatawan.
	9. Peningkatan kualitas penyediaan prasarana umum terpadu dan ramah lingkungan, khususnya di pusat-pusat pelayanan pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan desa/kampung wisata	9.1 Mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu, ramah lingkungan, dan berbasis masyarakat, khususnya di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan kampung wisata. 9.2 Meningkatkan penyediaan dan kualitas air bersih agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, wisatawan, dan usaha pariwisata, khususnya di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan kampung wisata. 9.3 Meningkatkan penyediaan dan kapasitas energi listrik dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan di seluruh wilayah kabupaten agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, wisatawan, dan usaha pariwisata. 9.4 Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan limbah sesuai standar dan ramah lingkungan, khususnya di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan kampung wisata. 9.5 Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan jaringan telekomunikasi berbasis internet, khususnya di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan desa/kampung wisata.
	10. Pengembangan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum serta pelayanan bercirikan budaya khas Kutai	10.1 Mengembangkan penggunaan ornamen khas Kutai di seluruh daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, fasilitas umum, prasarana umum.

PILAR	KEBIJAKAN	STRATEGI
	dan berstandar internasional dengan menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan.	10.2 Mengembangkan pusat informasi pariwisata di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. 10.3 Mengembangkan fasilitas hotel berstandar nasional dan internasional di pusat pelayanan primer dan sekunder Kutai Kartanegara, serta <i>homestay</i>/pondok wisata di desa/kampung wisata. 10.4 Mengembangkan fasilitas makan dan minum berstandar nasional dan internasional di pusat pelayanan primer dan sekunder Kutai Kartanegara, serta fasilitas makan dan minum berbasis kuliner lokal berstandar nasional di seluruh kecamatan. 10.5 Meningkatkan ketersediaan dan fasilitas informasi dan interpretasi di daya tarik wisata, jalur wisata tematik, dan desa/kampung wisata. 10.6 Mengembangkan fasilitas dan pelayanan sanitasi, khususnya toilet umum berstandar internasional dan ramah lingkungan di daya tarik wisata dan desa/kampung wisata. 10.7 Meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan berstandar internasional untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi wisatawan. 10.8 Mengembangkan fasilitas dan pengelolaan parkir terpadu di pusat pelayanan primer dan sekunder, serta desa/kampung wisata. 10.9 Meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan keuangan, khususnya yang terintegrasi dengan sistem keuangan internasional untuk memudahkan wisatawan dalam melakukan transaksi keuangan selama berwisata di Kutai Kartanegara. 10.10 Mengembangkan fasilitas dan pelayanan keamanan dan keselamatan berstandar nasional dan internasional di pusat pelayanan primer dan sekunder, daya tarik wisata, dan desa/kampung wisata. 10.11 Mengembangkan fasilitas dan sistem pengelolaan mitigasi bencana pada pusat pelayanan primer dan sekunder, daya tarik wisata, desa/kampung wisata, dan

PILAR	KEBIJAKAN	STRATEGI
		fasilitas pariwisata. 10.12 Mengembangkan fasilitas bagi wisatawan berkebutuhan khusus berstandar nasional/ internasional di desa/kampung wisata, daya tarik wisata, dan fasilitas pariwisata. 10.13 Menerapkan standar halal pada produk dan pelayanan pariwisata di daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas umum.
	11. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata yang berkualitas.	11.1 Mengembangkan pembinaan sadar wisata dan pariwisata berkualitas yang berkesinambungan kepada masyarakat. 11.2 Mengembangkan pembinaan dan pendampingan masyarakat untuk menggali potensi pariwisata berdaya saing yang dimiliki masyarakat.
	12. Pengembangan pembinaan yang berkesinambungan untuk menyiapkan masyarakat yang berakhlak berbudaya, kreatif, dan inovatif sebagai agen perubahan dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara.	12.1 Mengembangkan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pengelola dalam memberikan pelayanan pariwisata yang prima dan berlandaskan budaya Kutai. 12.2 Mengembangkan pelatihan, pendampingan, dan pemagangan yang berkesinambungan bagi masyarakat pengelola untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan. 12.3 Mengembangkan mekanisme pembiayaan bagi program inovatif dan kreatif masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. 12.4 Mengembangkan pemberian penghargaan secara reguler kepada masyarakat yang telah melakukan inovasi dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. 12.5 Memperkuat koordinasi lintas sektor serta kerja sama dengan dunia usaha dan akademisi dalam pengembangan masyarakat sebagai agen perubahan dalam pembangunan kepariwisataan Kutai Kartanegara.
	13. Pengembangan mekanisme investasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efektif dan efisien	13.1 Mengembangkan media informasi, komunikasi, dan pelayanan investasi pariwisata berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 13.2 Mengembangkan promosi investasi terpadu untuk meningkatkan iklim dan daya saing pariwisata kabupaten Kutai

PILAR	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Kartanegara.
	14. Pengembangan komunikasi dan koordinasi dengan dunia usaha dan IKN untuk meningkatkan investasi pariwisata di Kabupaten Kutai kartanegara	14.1 Memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengembangkan mekanisme pelayanan investasi pariwisata terpadu, efektif dan efisien bagi investor dalam mengembangkan usahanya di Kutai Kartanegara. 14.2 Mengembangkan pemberian penghargaan, untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan investor dalam menerapkan standar internasional dan nilai budaya masyarakat Kutai Kartanegara pada pengelolaan investasi yang dilakukan.
INDUSTRI PARWISATA	1. Pengembangan industri pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang menerapkan prinsip kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, berwawasan lingkungan, dan menerapkan nilai-nilai budaya Kutai.	1.1 Membangun kesadaran industri pariwisata mengenai pentingnya membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah pariwisata, berwawasan lingkungan, dan menerapkan nilai-nilai budaya Kutai. 1.2 Mengembangkan penghargaan terhadap industri pariwisata yang menerapkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah pariwisata, berwawasan lingkungan, dan menerapkan nilai-nilai budaya Kutai. 1.3 Membangun mekanisme komunikasi antar industri pariwisata dengan usaha mikro, kecil dan menengah pariwisata untuk meningkatkan saling kesepahaman dalam membangun iklim kondusif usaha pariwisata di Kutai kartanegara.
	2. Pembinaan bagi usaha pariwisata dalam menerapkan standar nasional dan internasional di bidang kepariwisataan.	2.1 Membangun kesadaran kolektif pelaku usaha pariwisata terhadap pentingnya penerapan standar di bidang kepariwisataan, kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan, baik standar nasional maupun standar internasional. 2.2 Mengembangkan pelatihan dan pendampingan bagi penerapan standar internasional pada usaha pariwisata di Kutai Kartanegara. 2.3 Memfasilitasi sertifikasi usaha dan sertifikasi terkait lainnya pada usaha pariwisata di Kutai Kartanegara.
	3. Pengembangan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial industri pariwisata terhadap lingkungan alam, sosial, dan	3.1 Membangun forum komunikasi dan kerjasama usaha pariwisata dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya. 3.2 Mengembangkan regulasi untuk

PILAR	KEBIJAKAN	STRATEGI
	budaya.	mendorong tanggung jawab industri pariwisata terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya, termasuk penerapan nilai budaya masyarakat Kutai Kartanegara. 3.3 Mengembangkan mekanisme penghargaan bagi usaha pariwisata yang kontribusi tinggi terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya.
	4. Pengembangan tata kelola industri pariwisata terstruktur dan berkeadilan untuk membangun rantai nilai industri pariwisata yang kuat dan berkelanjutan	4.1 Memperkuat basis data dan informasi industri pariwisata Kutai Kartanegara yang kredibel untuk mendukung pembangunan kepariwisataan Kutai Kartanegara. 4.2 Mengembangkan industri pariwisata yang kuat dengan melakukan pembinaan dan pendampingan. 4.3 Mengembangkan sistem informasi industri pariwisata berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai media komunikasi dan koordinasi dalam pembangunan industri pariwisata.
	5. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang kepariwisataan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan industri	5.1 Membangun koordinasi lintas sektor antara sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka meningkatkan kualitas usaha, produk, dan pemasaran industri mikro, kecil, dan menengah agar dapat memenuhi kebutuhan industri pariwisata dan wisatawan. 5.2 Meningkatkan pembinaan terhadap industri mikro, kecil, dan menengah dalam rangka memberikan nilai tambah terhadap produk dan usaha yang dijalankan.
	6. Pengembangan kemitraan antara usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang kepariwisataan, ekonomi kreatif, dan sektor lain untuk memperkuat struktur industri pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.	6.1 Mengembangkan dan melaksanakan model kemitraan berbasis pembinaan antara usaha pariwisata skala besar dan menengah dengan usaha mikro, kecil, dan menengah pada sektor ekonomi kreatif dan sektor lain yang potensial. 6.2 Mengembangkan mekanisme pemberian penghargaan bagi usaha pariwisata skala besar dan menengah yang berhasil melakukan kemitraan berbasis pembinaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah.
	7. Pengembangan jejaring dengan industri pariwisata nasional dan internasional	7.1 Mengembangkan forum dan media komunikasi antara industri pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dengan

PILAR	KEBIJAKAN	STRATEGI
	dalam pengembangan serta pemasaran produk dan pelayanan industri pariwisata	industri pariwisata nasional dan internasional secara berkesinambungan; 7.2 Mendorong kemitraan antara industri pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dengan industri pariwisata nasional dan internasional melalui program fasilitasi dan pembinaan kemitraan.
PEMASARAN PARIWISATA	1. Penguatan citra pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai destinasi pariwisata sejarah Kerajaan dan ekowisata berkelas dunia	1.1 Mengembangkan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai simpul pemasaran destinasi pariwisata sejarah kerajaan di Indonesia. 1.2 Mengembangkan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai simpul pemasaran destinasi ekowisata berkelas dunia di Indonesia. 1.3 Mengembangkan kemitraan dengan destinasi pariwisata sejarah kerajaan dan ekowisata di seluruh dunia. 1.4 Membangun citra pemasaran pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengangkat sejarah Kerajaan dan ekowisata sebagai ciri utama.
	2. Pembangunan sinergi promosi pariwisata dengan para pelaku usaha pariwisata, kabupaten/kota sekitar, IKN, Provinsi Kalimantan Timur dan nasional	2.1 Mengembangkan mekanisme komunikasi dan koordinasi pemasaran pariwisata antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, IKN dan Pemerintah Pusat untuk membangun sinergi program pemasaran pariwisata. 2.2 Mengembangkan even promosi pariwisata untuk mengenalkan keunggulan internasional dan nasional Kutai Kartanegara kepada wisatawan nusantara dan mancanegara.
	3. Pengembangan pasar wisatawan yang lebih luas dan berkualitas berdasarkan kajian pasar yang berkesinambungan.	3.1 Mengembangkan pasar wisatawan nusantara keluarga, pelajar/mahasiswa sebagai pasar utama wisatawan nusantara. 3.2 Mengembangkan pasar wisatawan mancanegara segmen minat khusus sejarah kerajaan dan budaya dari China, India, Asia Tenggara berdasarkan penelitian pasar yang berkesinambungan. 3.3 Mengembangkan pasar wisatawan mancanegara segmen minat khusus ekowisata sebagai pasar utama wisatawan mancanegara dari Asia Tenggara, Asia Timur, Amerika, Australia, serta negara-negara Eropa berdasarkan penelitian pasar yang berkesinambungan.

PILAR	KEBIJAKAN	STRATEGI
		3.4 Mengembangkan kemitraan pemasaran dengan daerah dan negara sumber pasar wisatawan
	4. Pengembangan pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang berkualitas untuk meningkatkan pelayanan kepada wisatawan.	4.1 Mengembangkan kemitraan dengan pengelola media dan aplikasi digital dalam melakukan promosi pariwisata Kutai Kartanegara. 4.2 Mengembangkan sistem informasi pariwisata berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mudah diakses untuk meningkatkan pelayanan kepada wisatawan. 4.3 Mengembangkan pemasaran pariwisata Kutai kartanegara yang terpadu dan mengangkat nilai-nilai budaya khas Kutai Kartanegara. 4.4 Mengembangkan jejaring pemasaran yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak untuk mempromosikan pariwisata Kutai kartanegara di dalam maupun luar negeri.
	5. Penguatan basis data kunjungan wisatawan dan mekanisme evaluasi pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kualitas pemasaran yang efektif dan berkualitas.	5.1 Mengembangkan basis data dan informasi kunjungan wisatawan ke Kutai Kartanegara berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mudah diakses oleh pelaku usaha dan masyarakat. 5.2 Mengembangkan sistem evaluasi pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi untuk mengomunikasikan dan mengevaluasi keberhasilan pemasaran pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Kutai Kartanegara dan para pelaku usaha pariwisata.
	1. Pengembangan sumber daya manusia pariwisata yang berkualitas melalui peningkatan kompetensi nasional dan internasional secara berkesinambungan.	1.1 Mengembangkan sistem sertifikasi untuk kompetensi nasional dan internasional yang berkesinambungan bagi sumber daya manusia pariwisata. 1.2 Mengembangkan mekanisme insentif untuk meningkatkan sertifikasi kompetensi berskala nasional dan internasional bagi sumber daya manusia pariwisata.
	2. Pembinaan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan dan pelaku usaha pariwisata melalui pendidikan berkualitas internasional.	2.1 Mengembangkan kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah, masyarakat dan usaha pariwisata. 2.2 Mengembangkan pembinaan dan pelatihan yang berkesinambungan di bidang perencanaan dan pengelolaan
KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN		

PILAR	KEBIJAKAN	STRATEGI
		kepariwisataan berstandar internasional bagi sumber daya manusia di lingkungan pemerintah dan industri pariwisata.
	3. Pengembangan regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara.	3.1 Meningkatkan kualitas berbasis kompetensi dan kinerja pada organisasi di lingkungan Pemerintah Kutai Kartanegara yang terkait dengan penyelenggaraan urusan kepariwisataan. 3.2 Mendorong penguatan dan pengembangan organisasi usaha dan profesi pariwisata Kutai Kartanegara sebagai mitra utama dalam melakukan percepatan pembangunan kepariwisataan. 3.3 Mengembangkan program kolaboratif untuk percepatan pembangunan kepariwisataan Kutai Kartanegara yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media.
	4. Pengembangan mekanisme komunikasi dan koordinasi antar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, IKN, masyarakat, industri pariwisata, media, dan akademisi untuk mendorong keterpaduan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara.	4.1 Mengembangkan forum komunikasi dan koordinasi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media dalam rangka membangun keterpaduan program perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan. 4.2 Mengembangkan mekanisme komunikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mengkomunikasikan pembangunan kepariwisataan daerah kepada masyarakat.
	5. Penguatan regulasi yang menetapkan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai destinasi pariwisata Sejarah Kerajaan dan ekowisata.	5.1 Mengembangkan basis data kepariwisataan terpadu dari desa sampai tingkat kabupaten yang lengkap, akurat, dan mutakhir berbasis teknologi informasi, serta mudah diakses oleh masyarakat luas. 5.2 Mengembangkan regulasi bagi penguatan tata kelola kepariwisataan dalam membangun sinergi program bersama antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media untuk mempercepat pembangunan kepariwisataan Kutai Kartanegara. 5.3 Mengembangkan mekanisme operasional bagi pengembangan dan pengelolaan produk pariwisata, pengelolaan pengunjung, lingkungan, dan dampak pariwisata sesuai dengan pedoman pembangunan destinasi pariwisata

PILAR	KEBIJAKAN	STRATEGI
		berkelanjutan.
	6. Pembangunan sistem pengelolaan krisis kepariwisataan akibat bencana alam, sosial, politik, dan bahaya kesehatan, terintegrasi dengan sistem pengelolaan krisis kepariwisataan di tingkat provinsi dan nasional.	6.1 Mengembangkan regulasi bagi pengelolaan krisis kepariwisataan dan peningkatan ketahanan pariwisata Kutai Kartanegara. 6.2 Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi terpadu pengelolaan krisis kepariwisataan sebagai upaya memitigasi bencana alam, sosial, politik, dan bahaya kesehatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 6.3 Mengembangkan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, IKN, dan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan krisis kepariwisataan.

G. Rencana Pembangunan Perwilayahan Pariwisata

Rencana pembangunan perwilayahan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi:

1. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten atau disebut dengan KSPK; dan
2. Struktur perwilayahan pariwisata.

1) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK)

Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KPSK) adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kota yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

KSPK Kutai Kartanegara ditentukan dengan mengacu pada kriteria berikut ini:

1. merupakan kawasan yang memiliki peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara dan wilayah sekitarnya;
2. merupakan kawasan yang memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan terhadap warisan budaya Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. pengembangannya akan memperkuat identitas dan daya saing pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

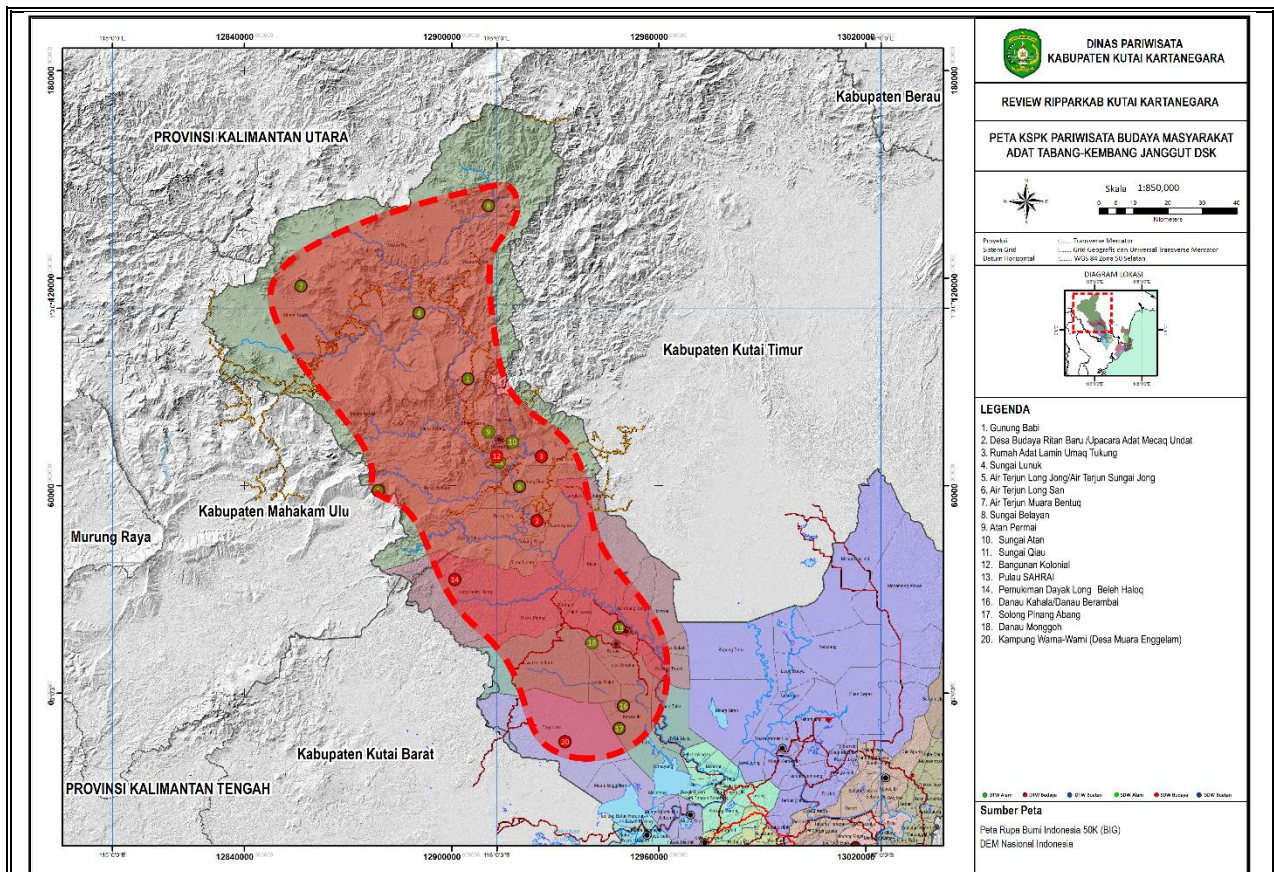
Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 6 (enam) KSPK Kutai Kartanegara yang memiliki peran strategi Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu:

1. KSPK Pariwisata Budaya Masyarakat Adat Tabang-Kembang Janggut dan sekitarnya;
2. KSPK Ekowisata Danau Melintang – Semayang dan sekitarnya;
3. KSPK Pariwisata Sejarah Kerajaan Tertua Muara Kaman dan sekitarnya;
4. KSPK Pariwisata Sejarah Kerajaan Tenggaraong dan sekitarnya;
5. KSPK Pariwisata Sejarah Perjuangan Sanga-Sanga – Anggana dan sekitarnya; dan
6. KSPK Ekowisata Bahari Marangkayu – Muara Jawa dan sekitarnya.

2) Arahan Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK)

Arahan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

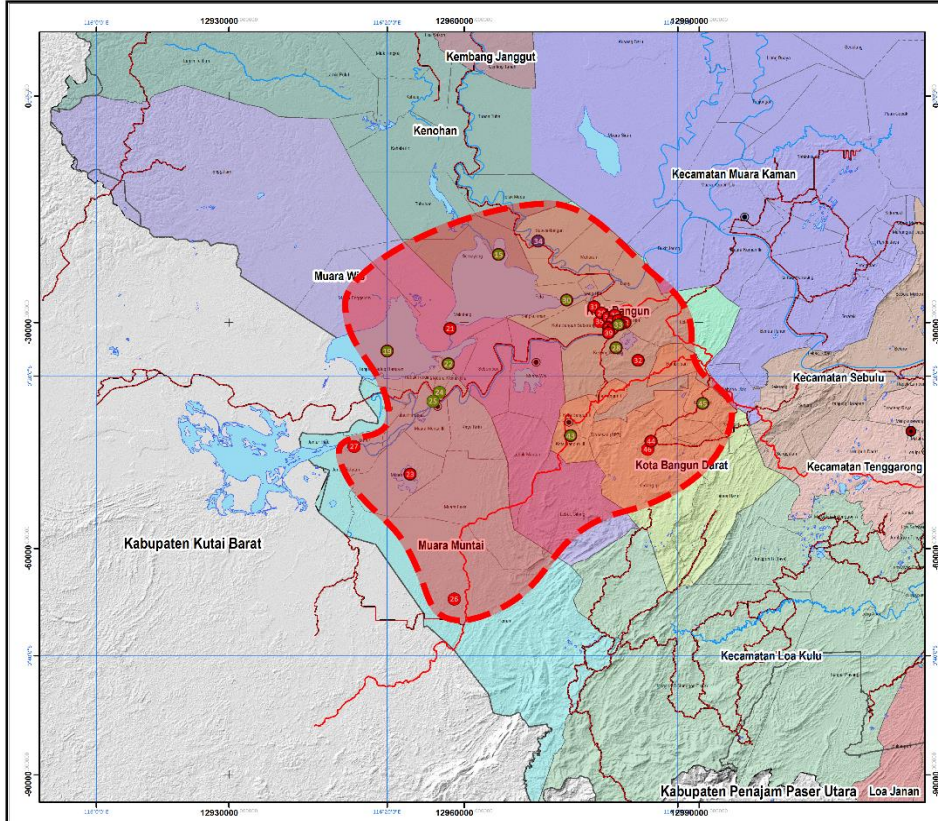
Tabel 5.2 KSPK Pariwisata Budaya Masyarakat Adat Tabang – Kembang Janggut dan Sekitarnya



TEMA PENGEMBANGAN PRODUK	Tema Utama: Pariwisata Budaya Masyarakat Adat Tema Pendukung: Pariwisata Petualangan Alam
CAKUPAN WILAYAH	Kecamatan Tabang, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Kenohan, dan sebagian desa di Kecamatan Muara Wis
PUSAT KSPK	Kecamatan Kembang Janggut
SASARAN PENGEMBANGAN KAWASAN	Menjaga nilai-nilai penting budaya adat dan perlindungan lingkungan alam
JENIS WISATA UNGGULAN	Wisata budaya masyarakat adat dan wisata petualangan alam

JENIS WISATA PENDUKUNG	Wisata edukatif
DAYA TARIK WISATA UTAMA	- Pemukiman Dayak Long Beleh Haloq - Desa Budaya Ritan Baru - Air Terjun Long Jong - Air Terjun Long San
TARGET PASAR WISATAWAN	- Wisatawan nusantara: Segmen pelajar, mahasiswa; segmen minat khusus ekowisata, wisata petualangan - Wisatawan mancanegara: Segmen minat khusus budaya; segmen minat khusus ekowisata dan wisata petualangan
SISTEM KETERKAITAN DENGAN SEKITAR	Jalur wisata lokal: Jalur wisata budaya, Jalur wisata regional: jalur ekowisata, jalur wisata petualangan
PRIORITAS PENGEMBANGAN	1. Penelitian untuk menggali nilai penting budaya adat masyarakat. 2. Pengembangan Desa Wisata adat. 3. Pengembangan kuliner dan souvenir khas. 4. Penguatan kelompok sadar wisata. 5. Peningkatan aksesibilitas menuju kawasan maupun di dalam kawasan. 6. Peningkatan ketersediaan rambu wisata. 7. Pengembangan homestay tematik budaya dayak. 8. Perencanaan interpretasi warisan budaya dan ekowisata. 9. Pengembangan toilet umum berstandar internasional. 10. Fasilitas penyusunan paket wisata dan famtrip. 11. Kerjasama promosi dengan biro perjalanan wisata, media dan komunitas.

Tabel 5.3 KSPK Ekowisata Danau Melintang-Semayang dan Sekitarnya

	
TEMA PENGEMBANGAN PRODUK	Tema Utama: Ekowisata Danau Tema Pendukung: Pariwisata Perdesaan
CAKUPAN WILAYAH	Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Kota Bangun Darat, sebagian desa di Kecamatan Muara Wis dan Kecamatan Muara Muntai
PUSAT KSPK	Kecamatan Kota Bangun

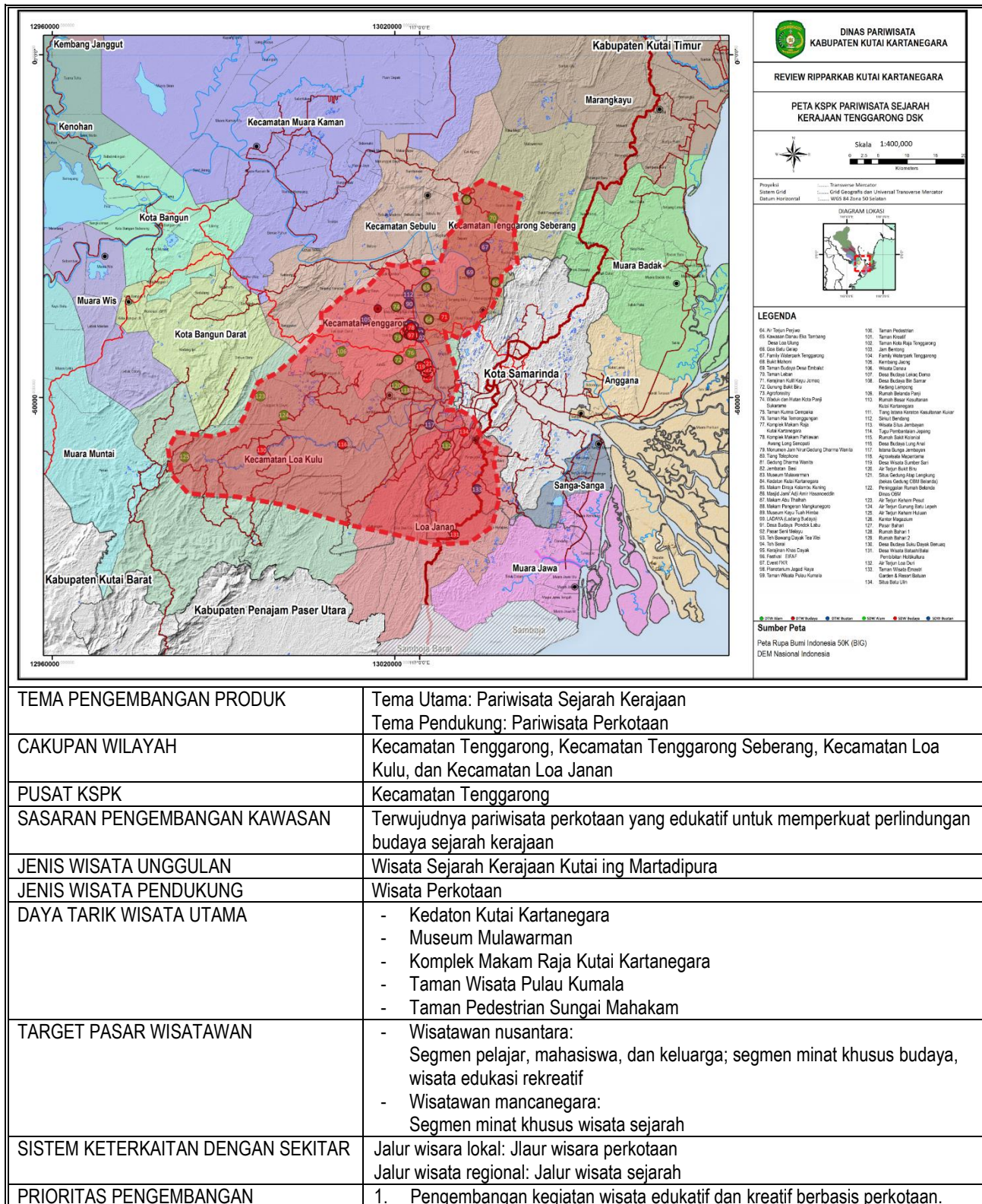
SASARAN PENGEMBANGAN KAWASAN	Terwujudnya pariwisata tirta (danau) yang mengangkat identitas kawasan sebagai lokasi bernilai budaya masyarakat
JENIS WISATA UNGGULAN	Ekowisata danau
JENIS WISATA PENDUKUNG	Wisata budaya perdesaan
DAYA TARIK WISATA UTAMA	- Danau Melintang - Danau Semayang - Desa Wisata Pela, Desa Muara Gelam, Desa Semayang. Desa Muara Muntai - Sungai Mahakam
TARGET PASAR WISATAWAN	- Wisatawan nusantara: Segmen pelajar, mahasiswa dan keluarga; segmen minat khusus budaya, wisata edukasi pesut, sungai dan danau. - Wisatawan mancanegara: Segmen minat khusus ekowisata dan segmen minat khusus budaya
SISTEM KETERKAITAN DENGAN SEKITAR	Jalur wisata lokal: Jalur wisata danau jalur wisata regional: Jalur ekowisata, jalur wisata budaya
PRIORITAS PENGEMBANGAN	1. Penelitian mengenai nilai penting danau Melintang dan Danau Semayang. 2. Pengembangan wisata edukatif berbasis keanekaragaman hayati danau sungai serta kehidupan masyarakat pesisir sungai dan danau. 3. Peningkatan kapasitas desa wisata pesisir danau dan sungai. 4. Pengembangan wisata edukonservasi Pesut Mahakam. 5. Pengembangan festival Danau Melintang dan Semayang serta Festival Sungai Mahakam. 6. Pengembangan wisata susur danau dan susur sungai. 7. Pengembangan kapasitas pemanduan interpretatif. 8. Pengembangan angkutan wisata danau dan sungai. 9. Pengembangan homestay tepi danau dan sungai di desa wisata. 10. Pengembangan kuliner khas dan souvenir. 11. Penguatan kelompok sadar wisata. 12. Peningkatan aspek keamanan dan keselamatan berkendara di danau dan sungai. 13. Fasilitasi penyusunan paket wisata susur danau dan sungai. 14. Pengembangan kerjasama dengan biro perjalanan wisata, media dan komunitas.

Tabel 5.4 KSPK Pariwisata Sejarah Kerajaan Tertua Muara Kaman dan Sekitarnya

TEMA PENGEMBANGAN PRODUK	Tema Utama: Pariwisata Sejarah Kerajaan Tertua Tema Pendukung: Pariwisata Perdesaan (Pesisir Sungai)
CAKUPAN WILAYAH	Kecamatan Muara Kaman dan Kecamatan Sebulu
PUSAT KSPK	Kecamatan Muara Kaman
SASARAN PENGEMBANGAN KAWASAN	Terwujudnya pariwisata yang memadukan produk wisata edukasi sejarah kerajaan kuno dengan budaya masyarakat
JENIS WISATA UNGGULAN	Wisata sejarah kerajaan tertua
JENIS WISATA PENDUKUNG	Wisata budaya perdesaan (masyarakat peissir sungai)
DAYA TARIK WISATA UTAMA	- Museum Situs Kerajaan Kutai Ing Martadipura - Desa Budaya Leka Kidau - Tahura Muara Siran/ Goa Wisata Gambut
TARGET PASAR WISATAWAN	- Wisatawan nusantara: Segmen pelajar, mahasiswa, dan keluarga; segmen minat khusus budaya, wisata edukasi rekreatif - Wisatawan mancanegara: Segmen minat khusus budaya
SISTEM KETERKAITAN DENGAN SEKITAR	Jalurwisata lokal: Jalur wisata budaya, jalur wisata susur sungai Jalur wisata regional: Jalur wisata sejarah. Jalur ekowisata
PRIORITAS PENGEMBANGAN	1. Pengembangan wisata edukatif berbasis alam dan sejarah. 2. Pengembangan kelompok sadar wisata dan desa wisata berbasis budaya. 3. Pengembangan homestay tematik tepi sungai. 4. Perencanaan interpretasi situs sejarah Muara Kaman. 5. Pengembangan interpretasi Taman Hutan Raya Muara Siran. 6. Pengembangan kuliner dan souvenir khas. 7. Pengembangan aksesibilitas menuju kawasan dari pusat pelayanan pariwisata primer dan sekunder. 8. Peningkatan angkutan wisata di dalam kawasan berbasis masyarakat. 9. Peningkatan ketersediaan papan petunjuk arah dan papan interpretasi. 10. Peningkatan kapasitas pemanduan interpretif.

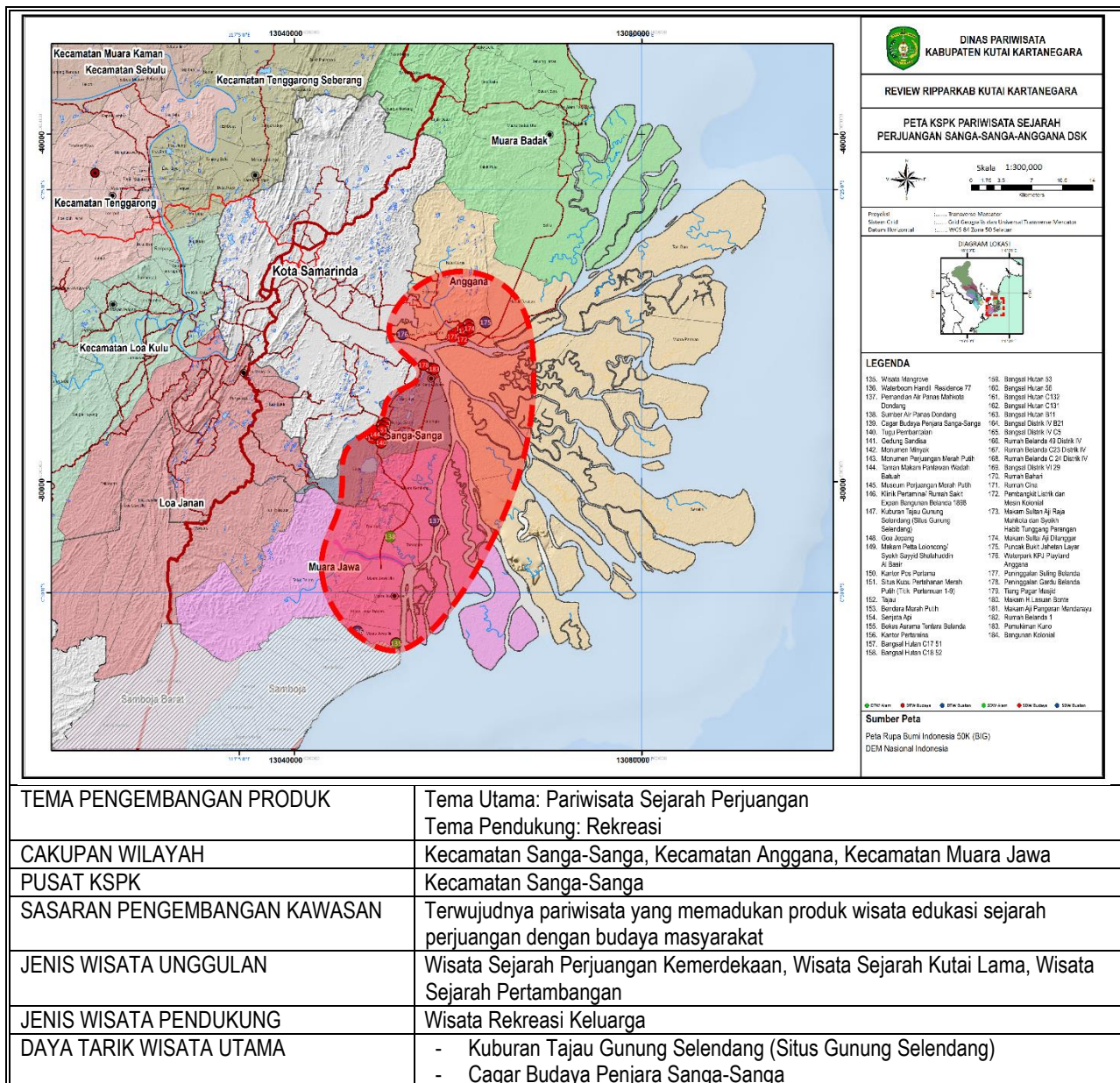
11. Pengembangan toilet umum berstandar internasional.
12. pengembangan kantung parkir kawasan.
13. Fasilitas penyusunan paket wisata dan famtrip.
14. Pengembangan kerjasama dengan biro perjalanan wisata, media dan komunitas.

Tabel 5.5 KSPK Pariwisata Sejarah Kerajaan Tenggara dan Sekitarnya



2. Pengembangan wisata sejarah/heritage.
3. Pengembangan wisata edu-rekreatif Pulau Kumala.
4. Pengembangan even rutin terkait budaya, sejarah, ekowisata dan potensi pariwisata lainnya.
5. Pengembangan angkutan wisata perkotaan.
6. Peningkatan ketersediaan petunjuk arah dan papan interpretasi.
7. Pengembangan interpretasi kawasan.
8. Pengembangan kampung wisata berbasis budaya perkotaan.
9. Pengembangan desa wisata berbasis Buah Lay.
10. Penguatan kolompok sadar wisata di kampung-kampung wisata.
11. Pengembangan pusat kuliner dan souvenir khas.
12. Pengembangan kantung parkir terpadu.
13. Pengembangan fasilitas toilet umum berstandar internasional.
14. Fasilitasi penyusunan paket wisata dan famtrip.
15. Pengembangan kerjasama dengan biro perjalanan wisata, media dan komunitas.

Tabel 5.6 KSPK Pariwisata Sejarah Perjuangan Sanga-Sanga – Anggana dan Sekitarnya



	- Makam Sultan Aji Raja Mahkota dan Syekh Habib Tunggang Parangan - Makam Sultan Aji Dilanggar - Puncak Bukit Jahetan Layar
TARGET PASAR WISATAWAN	- Wisatawan nusantara: Segmen pelajar, mahasiswa, dan keluarga; segmen minat khusus sejarah, wisata edukatif rekreatif - Wisatawan mancanegara: Segmen minat khusus wisata sejarah
SISTEM KETERKAITAN DENGAN SEKITAR	Jalur wisata lokal: Jalur wisata perjuangan kemerdekaan Jalur wisata regional: Jalur wisata sejarah pertambangan, jalur wisata sejarah Kerajaan Kutai
PRIORITAS PENGEMBANGAN	1. Penelitian mengenai sejarah perjuangan dan pertambangan timah untuk memperkaya nilai penting kawasan. 2. Pengembangan wisata edukatif berbasis sejarah Kerajaan Kutai, pertambangan, Sejarah Perjuangan Kemerdekaan, dan Sejarah Budaya masyarakat jaman dulu.. 3. Pengembangan desa/kampung wisata berbasis sejarah. 4. Penguatan kelompok sadar wisata di desa/kampung wisata. 5. Perencanaan interpretasi sejarah Kerajaan Kutai, perjuangan kemerdekaan, pertambangan dan sejarah tinggalan budaya. 6. Peningkatan kapasitas pemanduan wisata interpretif. 7. Pengembangan souvenir dan kuliner khas. 8. Pengembangan aksesibilitas kawasan berbasis angkutan masyarakat. 9. Peningkatan papan petunjuk wisata dan papan interpretasi. 10. Pengembangan kantong parkir kawasan. 11. Pengembangan even terkait sejarah kawasan secara regular. 12. Pengembangan fasilitas toilet berstandar internasional. 13. Fasilitasi penyusunan paket wisata dan famtrip. 14. Pengembangan kerkjasama dengan biro perjalanan wisata, media dan komunitas.

Tabel 5.7 KSPK Ekowisata Bahari Marangkayu – Muara Badak dan Sekitarnya

TEMA PENGEMBANGAN PRODUK	Tema Utama: Ekowisata Bahari Tema Pendukung: Edu Rekreasi
CAKUPAN WILAYAH	Kecamatan Marangkayu dan Kecamatan Muara Badak
PUSAT KSPK	Kecamatan Marangkayu
SASARAN PENGEMBANGAN KAWASAN	Terwujudnya pariwisata yang memadukan produk ekowisata bahari dengan budaya bahari masyarakat
JENIS WISATA UNGGULAN	Ekowisata Menyelam dan Ekowisata Mangrove
JENIS WISATA PENDUKUNG	Wisata Rekreatif
DAYA TARIK WISATA UTAMA	- Desa Wisata Kersik - Pantai Sampayau - Pantai Indah Sembera
TARGET PASAR WISATAWAN	- Wisatawan nusantara: Segmen pelajar, mahasiswa, dan keluarga; segmen wisata edukasi rekreatif - Wisatawan mancanegara: Segmen wisata edukasi rekreatif
SISTEM KETERKAITAN DENGAN SEKITAR	Jalur wisata lokal: Jalur wisata rekreatif Jalur wisata regional: jalur wisata ekowisata
PRIORITAS PENGEMBANGAN	1. Penelitian mengenai keanekaragaman hayati kawasan pantai dan pesisir untuk meningkatkan nilai penting kawasan. 2. Pengembangan wisata edukatif dan kreatif berbasis budaya pesisir dan keanekaragaman hayati,, kuliner dan souvenir. 3. Pengembangan desa wisata. 4. Penguatan kelompok sadar wisata di desa wisata. 5. Peningkatan aksesibilitas menuju dan di dalam kawasan. 6. Pengembangan homestay tematik berbasis budaya pesisir. 7. Pengembangan kuliner dan souvenir khas. 8. Pengembangan fasilitas toilet umum berstandar internasional.

	9. Fasilitasi penyusunan paket wisata dan famtrip. 10. Pengembangan kerjasama dengan biro perjalanan wisata, media dan komunitas.
--	--

3) Struktur Perwilayahan Pariwisata

Struktur perwilayahan pariwisata dikembangkan untuk menumbuhkan simpul-simpul pelayanan dan pertumbuhan pariwisata agar dapat menyebarkan perkembangan ke seluruh wilayah destinasi pariwisata. Struktur perwilayahan pariwisata akan menggambarkan pusat-pusat pelayanan pariwisata yang berhierarki satu sama lain, memiliki fungsi sesuai dengan karakteristik wilayahnya, dan dihubungkan dengan jaringan transportasi sebagai elemen pengikat. Struktur perwilayahan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas pusat pelayanan pariwisata primer dan pusat pelayanan pariwisata sekunder.

Pusat pelayanan primer berfungsi sebagai:

- a. pusat pertumbuhan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. pusat penyediaan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum skala nasional dan internasional; dan
- c. pusat penyebaran kegiatan wisata dan wisatawan ke seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

Strategi pembangunan destinasi pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara telah menentukan pusat pelayanan primer pariwisata di Kecamatan Tenggarong. Pusat pelayanan primer ditentukan berdasarkan pertimbangan berikut:

- a. merupakan Ibu Kota kecamatan dengan jumlah fasilitas pariwisata dan fasilitas umum terbanyak di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. merupakan pusat kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur.
- c. merupakan pusat pelayanan pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.

Sementara itu, pusat pelayanan sekunder Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki fungsi sebagai:

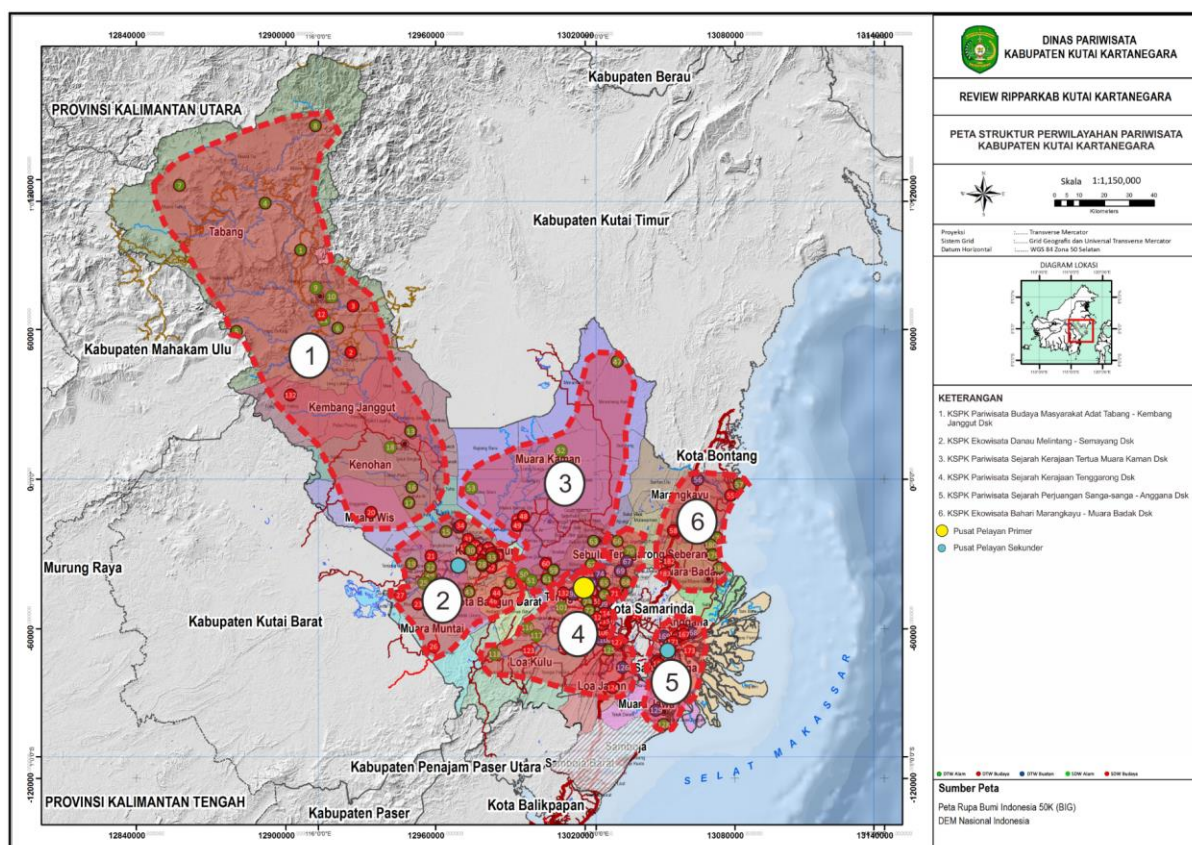
- a. pusat pertumbuhan pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK);

- b. pusat penyediaan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum skala nasional dan internasional yang berciri khas lokal dan sesuai dengan karakteristik pariwisata kawasannya;
- c. pusat penyebaran kegiatan wisata dan wisatawan di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

Strategi pembangunan destinasi pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara telah menentukan dua pusat pelayanan sekunder di Kelurahan Sanga-Sanga Dalam, Kecamatan Sanga-Sanga dan Desa Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota Bangun. Pusat pelayanan sekunder ditentukan berdasarkan pertimbangan berikut:

- a. merupakan ibu kota kecamatan yang telah memiliki fasilitas pariwisata dan fasilitas umum yang cukup memadai dari kualitas dan jumlahnya;
- b. merupakan pusat Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK);
- c. merupakan pusat pelayanan kawasan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Lebih Jelas struktur perwilayahan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat dalam peta sebagai berikut:



Gambar 5.3 Peta Struktur Perwilayahan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara

H. Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026-2045 diwujudkan melalui indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan kabupaten, baik berupa program dan kegiatan Pemerintah Daerah, pihak swasta, maupun masyarakat yang mencakup empat pilar pembangunan kepariwisataan, yaitu pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, serta kelembagaan kepariwisataan.

Indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan daerah memuat:

1. judul program pembangunan kepariwisataan, yang mendukung implementasi strategi pengembangan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. waktu pelaksanaan program pembangunan kepariwisataan, dalam periode pembangunan selama masa perencanaan 20 tahun;
3. pemangku kepentingan yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan program;

4. pemangku kepentingan yang bertindak sebagai pendukung pelaksanaan program.

5.3.3 Ketentuan Penutup

Bagian Ketentuan Penutup memuat kondisi yang menimbulkan kebutuhan untuk peninjauan kembali dan pernyataan masa efektif berlakunya peraturan yang akan diberlakukan berdasarkan analisis kemampuan/kesiapan dari berbagai aspek.

BAB 6

PENUTUP



6.1 KESIMPULAN

Penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) Kutai Kartanegara dimaksudkan sebagai naskah hasil penelitian dan pengkajian hukum terkait hal yang perlu dipahami sebagai dasar dalam penyusunan Perda tentang Ripparkab Kutai Kartanegara. Perda ini nantinya akan menjadi sebuah regulasi berkekuatan hukum yang diperlukan untuk mengatur pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara agar lebih terarah, fokus, mengoptimalkan manfaat positif dan meminimalisir dampak negatif yang dihasilkan dari kegiatan pariwisata.

Dalam menyusun Ranperda Ripparkab Kutai Kartanegara ini muatan aturan Ranperda perlu disesuaikan dan disinkronkan dengan berbagai peraturan perundangan yang berlaku baik di tingkat pusat, Provinsi, maupun di tingkat Kabupaten. Sinkronisasi dimaksudkan agar peraturan yang disusun dapat saling menguatkan dan tidak bertentangan satu sama lain, sehingga pembangunan kepariwisataan dapat lebih bersinergi dengan pembangunan sektor lainnya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ranperda tentang Ripparkab Kutai Kartanegara juga memperhatikan dan mempertimbangkan landasan filosofis pembangunan kepariwisataan Kutai Kartanegara memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Kutai Kartanegara selama ini. Landasan sosiologis memperhatikan kebutuhan dan pentingnya pembangunan kepariwisataan bagi masyarakat secara umum dan landasan hukum memperhatikan undang-undang kepariwisataan sebagai dasar pembentukan peraturan daerah ini, serta landasan yuridis yang menegaskan lingkup substansi yang diatur dalam Ranperda ini, sesuai dengan kebutuhan dan tidak tumpang tindih dengan peraturan lainnya yang berlaku.

Muatan materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Ripparkab Kutai Kartanegara ini meliputi: (a) ketentuan umum, (b) muatan materi Ripparkab yang meliputi kedudukan, ruang lingkup, jangka waktu perencanaan, prinsip, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, perwilayahan pariwisata, dan program dan indikasi kegiatan pembangunan kepariwisataan yang memuat pembangunan aspek destinasi pariwisata,

industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan, dan (c) ketentuan penutup

6.2 SARAN

Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026-2045 merupakan salah satu regulasi yang secara substansi sangat diperlukan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memacu pembangunan daerah. Pembahasan mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026-2045 perlu mendapatkan prioritas mengingat pentingnya regulasi di sektor pariwisata sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Selain itu, perkembangan regional dan nasional yang menempatkan kawasan Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan di masa depan tentu memerlukan antisipasi yang cepat dari seluruh pemangku kepentingan pariwisata di Kutai Kartanegara.

Selanjutnya untuk menyempurnakan Naskah Akademik Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, diperlukan beberapa kegiatan pendukung antara lain:

1. Konsultasi dan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan harmonisasi substansi Ripparkab agar sejalan dengan visi dan arah pembangunan kepariwisataan tingkat Provinsi Kalimantan Timur;
2. Sosialisasi muatan Ripparkab Kutai Kartanegara kepada pemangku kepentingan yang lebih luas, diantaranya di tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara, tingkat Kecamatan, serta di tingkat Kelurahan dan desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU DAN ARTIKEL

- Airey, D., dan Nightingale, M. 1981. *Tourism Occupations, Career Profiles dan Knowledge. Annals of Tourism Research.*
- Barambae, Y. E., Egam, P. P., & Siregar, F. O. P. (2019). Perencanaan Kawasan Pariwisata Di Kecamatan Tomohon Selatan. *Spasial*, 6(3), 609–618.
- Biro Adpim, (2017). *Museum Mulawarman Negeri Provinsi Kalimantan Timur*. Diakses melalui <https://www.kaltimprov.go.id/berita/museum-mulawarman-negeri-propinsi-kalimantan-timur>.
- BOSF. (2023). *Borneo Orangutan Survival Foundation*. Diakses melalui <https://www.orangutan.or.id/>.
- Bpcbaltim. (2019). *Masjid Jami Adji Amir Hasanoeddin, Tenggarong, Kutai Kartanegara*. Diakses melalui <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbaltim/masjid-jami-adji-amir-hasanoeddin-tenggarong-kutai-kartanegara/>.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. (2014). *Erau Adat Kutai International Folk Arts Festival (EIFAF)*. Diakses melalui <https://eifaf.visitingkutaikartanegara.com/kegiatan-eifaf>.
- Elviana, Eva dan Diyan. (2017). Pelestarian Bangunan dan Objek Peninggalan di Kutai Kartanegara sebagai Pembentuk Identitas Kota. Diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/328258883_Pelestarian_Bangunan_dan_Objek_Peninggalan_di_Kutai_Kartanegara_sebagai_Pembentuk_Identitas_Kota.
- Gartner, W. (1996). *Tourism Development. Principles, processes and policies*. New York, John Wiley.
- Goeldner, C. R dan Ritchie, J. R. (2009). *Tourism Principles, Practices, Philosophies*. United States of America. John Wiley & Sons, Inc.
- Gunn, C. A. (2002) *Tourism Planning: Basics, Concept, Cases*. Routledge.
- Indonesia Kaya. (2022). *Era Baru Kesultanan Kutai Kartanegara*. Diakses melalui <https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/era-baru-kesultanan-kutai-kartanegara/>.

- Indonesia Kaya. (2022). *Planetarium Jagad Raya Tenggara: Jendela Alam Semesta Ketiga di Indonesia*. Diakses melalui <https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/planetarium-jagad-raya-tenggara-jendela-alam-semesta-ketiga-di-indonesia/>.
- Inskeep, E. 1991. *Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach*. Wiley Publisher.
- Leiper, N., 1990. Tourist Attraction Systems. *Annals of Tourism Research*.
- Kemenparekraf. (2022). *Danau Semayang dan Melintang*. Diakses melalui <https://direktoriwisata.id/unit/4311>.
- Kurniawan, Muhammad Budi. (2023). *Menegok Museum Tuah Himba yang Menyimpan 125 Koleksi Kayu Khas Kalimantan*. Diakses melalui <https://www.detik.com/sulsel/wisata/d-6552749/menegok-museum-tuah-himba-yang-menyimpan-125-koleksi-kayu-khas-kalimantan/amp>.
- Kutakartanegara.com. (N.D). *Asal Mula Erau*. Diakses melalui http://erau.kutakartanegara.com/index.php?menu=Asal_Mula_Erau.
- Ma'arif, Samsul. (2022). *Bukit Bangkirai*. Diakses melalui <https://www.nativeindonesia.com/bukit-bangkirai/>.
- Ma'arif, Samsul. (2022). *Danau Semayang*. Diakses melalui <https://www.nativeindonesia.com/danau-semayang/>.
- Ma'arif, Samsul. (2022). *Pulau Kumala*. Diakses melalui <https://www.nativeindonesia.com/pulau-kumala/>.
- Masrur, dkk. (2022). *Mosaik Ritus Tradisi Kabupaten Kutai Kartanegara*. Surabaya. Cipta Media Nusantara.
- Mason, P. (2003). *Tourism Impacts, Planning and Management*. Butterworth-Henemann.
- Matausaha. (2022). *Agrowisata Buah*. Diakses melalui <https://matausaha.org/agrowisata-batuah-11931959682478252577/>.
- Mendra, Dara. (2022). *Pantai Tanah Merah, Samboja*. Diakses melalui <https://www.celebes.co/borneo/pantai-tanah-merah-samboja>.
- Mill, R.C. & Morrison, A.M. (1992). *The Tourism System*. Englewood Cliffs.
- Muthalib, Abd. (2022). *Tempat Wisata Kutai Kartanegara*. Diakses melalui <https://www.celebes.co/borneo/tempat-wisata-kutai-kartanegara>.
- Nurullah, Bangkit dan Prasetyo, F. A. (2022). *Kedaton Kutai Kartanegara*. Diakses melalui <https://www.tribunnewswiki.com/amp/2022/10/20/kedaton-kutai-kartanegara>.
- Plog, S. (1972). *Why Destination Rise and Fall in Popularity*. Los Angeles: Southern California Chapter. Travel Research Association.

- Rudy, M. (2023). *Nikmati Keindahan Alam Sungai Mahakam dan Jajanan Khas Hulu Mahakam Hanya di Kapal Wisata Susur Sungai Muara Muntai*. Diakses melalui <https://pktivkaltim.com/nikmati-keindahan-alam-sungai-mahakam-dan-jajanan-khas-hulu-mahakam-hanya-di-kapal-wisata-susur-sungai-muara-muntai/?amp=1>.
- Smith, S., dan French, C. 1994. *Learning to Live with Tourism*. Melbourne: Pitman.
- Stekom. (2016). *Jembatan Kutai Kartanegara*. Diakses melalui https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Jembatan_Kutai_Kartanegara.
- Surahman, dkk. (2022). *Warisan Sejarah dan Budaya Kutai, Kajian Multidisiplin Ilmu*. Malang. Literasi Nusantara.
- Suhamihardja, Agraha Suhandi. (2004). *Pola Hidup Masyarakat Indonesia*. Bandung. Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran
- Swarbrooke, J., dan Horner, S. 2007. *Consumer behaviour in tourism*.
- Taufiqurokhman. (2008). *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- UNWTO. *Pengertian pariwisata*. Diakses melalui www.world-tourism.org.
- Wrihatnolo, dan Dwidjowijoto, R. (2006). *Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar dan Panduan*. Elex Media Komputindo.
- Yovanda. (2020). *Ditetapkan Kawasan Konservasi Pesut Mahakam Seluas 43 Hektar di Kutai Kartanegara*. Diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2020/04/01/ditetapkan-kawasan-konservasi-pesut-mahakam-seluas-43-hektar-di-kutai-kartanegara/>.

B. KEBIJAKAN DAN DOKUMEN PEMERINTAH

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. (2022). Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Angka 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. (2023). Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Angka 2023.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. (2022). Kecamatan Kenohan dalam Angka 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. (2022). Kecamatan Tabang dalam Angka 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. (2022). Kecamatan Muara Kaman dalam Angka 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. (2022). Kecamatan Samboja dalam Angka 2022.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. (2022). Kecamatan Muara Jawa dalam Angka 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. (2022). Kecamatan Tenggarong Seberang dalam Angka 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. (2022). Kecamatan Muara Wis dalam Angka 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. (2022). Kecamatan Muara Badak dalam Angka 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. (2022). Kecamatan Muara Muntai dalam Angka 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. (2022). Kecamatan Loa Kulu dalam Angka 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. (2022). Kecamatan Kembang Janggut dalam Angka 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. (2022). Kecamatan Sebulu dalam Angka 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. (2022). Kecamatan Marang Kayu dalam Angka 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. (2022). Kecamatan Tenggarong dalam Angka 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. (2022). Kecamatan Kota Bangun dalam Angka 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. (2022). Kecamatan Sanga-Sanga dalam Angka 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. (2022). Kecamatan Anggana dalam Angka 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. (2022). Kecamatan Loa Janan dalam Angka 2022.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2023). Kalimantan Timur dalam Angka 2023.
- Bappenas. (2019). Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuta Kartanegara. (2008). Status Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara 2008.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuta Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara 2013 – 2033.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2025.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2037.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

LAMPIRAN



DRAFT

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 8 ayat (1), yaitu pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan, dan Pasal 9 ayat (3) bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kutai Kartanegara Tahun 2026-2045.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);

7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KUTAI KARTAENGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KUTAI KARTAENGARA TAHUN 2026-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026-2045,

yang selanjutnya disingkat Ripparkab adalah pedoman utama bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kota, berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun, berisi kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan kepariwisataan yang ditentukan, mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang

berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

11. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk pariwisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
13. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
14. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung

penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.

16. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
17. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
18. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
19. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
20. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disebut KSPK, adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kota yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
21. Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut IKN adalah

Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Ripparkab.
- (2) Kedudukan Ripparkab:
 - a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
 - b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Pariwisata dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurus bidang kepariwisataan; serta
 - c. sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Ripparkab meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan destinasi pariwisata di sekitarnya, Provinsi Kalimantan Timur dan Ibu Kota Negara.

Pasal 4

- (1) Ripparkab mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:
- a. destinasi pariwisata;
 - b. industri pariwisata;
 - c. pemasaran pariwisata; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. prinsip;
 - b. visi;
 - c. misi;
 - d. tujuan;
 - e. sasaran;
 - f. kebijakan; dan
 - g. strategi.

BAB III

PRINSIP, VISI, MISI

Bagian Kesatu

Prinsip Pembangunan

Pasal 5

Prinsip pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. kepariwisataan yang menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya;

- b. kepariwisataan yang memberdayakan masyarakat setempat untuk mencapai kesejahteraan;
- c. kepariwisataan yang memberikan perlindungan terhadap kelestarian alam dan budaya;
- d. kepariwisataan yang terpadu dan sinergis;
- e. kepariwisataan yang menjadi mitra pembangunan kepariwisataan kawasan IKN;

Bagian Kedua

Visi

Pasal 6

Visi Pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) huruf b adalah Kutai Kartanegara Sebagai Destinasi Pariwisata Sejarah dan Alam Berkualitas, Mitra Utama IKN untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Bagian Ketiga

Misi

Pasal 7

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pembangunan daya tarik wisata yang berkelanjutan berbasis budaya, sejarah, dan alam dengan menciptakan konektivitas antar daya tarik wisata dan daya tarik wisata ke IKN guna memberikan nilai lebih pengalaman berwisata.

- b. pengembangan industri pariwisata berstandar internasional melalui sertifikasi industri, kemitraan antar industri pariwisata besar dan kecil, tanggungjawab lingkungan dan sosial budaya;
- c. mewujudkan pemasaran pariwisata yang efektif, efisien dan berkesinambungan berbasis keunggulan pariwisata daerah;
- d. membangun sumber daya manusia pariwisata dan penguatan kebijakan pembangunan kepariwisataan yang terinternalisasi di seluruh pemangku kepentingan pariwisata guna menciptakan kelembagaan yang kuat dan efektif.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 8

Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) huruf d meliputi:

- a. mewujudkan konektifitas antara seluruh daya tarik wisata Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kawasan IKN dan Kabupaten/Kota sekitar;
- b. mewujudkan daya tarik wisata sejarah kerajaan kutai dan ekowisata sebagai unggulan daerah;
- c. mewujudkan keterpaduan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas pariwisata untuk

meningkatkan kunjungan wisatawan dan kemudahan berusaha.

- d. mewujudkan masyarakat sadar wisata yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Kutai sebagai pelaku utama pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- e. mewujudkan iklim investasi yang kondusif bagi peningkatan investasi pariwisata skala nasional dan internasional yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan ramah lingkungan.
- f. mewujudkan rantai nilai industri pariwisata yang kokoh untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan;
- g. mewujudkan industri pariwisata yang kredibilitas tinggi melalui penerapan standar nasional dan internasional;
- h. mewujudkan pembentukan citra destinasi pariwisata sejarah kerajaan kutai dan ekowisata berkualitas;
- i. mewujudkan pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien dalam menjaring pasar wisatawan yang lebih luas dan berkualitas dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara kreatif;
- j. mewujudkan sumber daya manusia berkompeten yang mampu mendorong kreativitas dan inovasi dalam membangun kepariwisataan berkualitas;
- k. mewujudkan regulasi, mekanisme operasional, serta organisasi kepariwisataan yang andal dan berjejaring sebagai penggerak keterpaduan pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 9

- (1) Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e adalah:
 - a. peningkatan kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
 - b. peningkatan jumlah daya tarik wisata berstandar internasional;
 - c. peningkatan jumlah daya tarik wisata berstandar internasional;
 - d. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - e. peningkatan lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - f. peningkatan pengeluaran wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - g. peningkatan penyerapan tenaga kerja di bidang kepariwisataan.
- (2) Indikator sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 10

Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata, meliputi:

- a. Pembangunan perwilayahan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbasis sungai, danau, hutan, geologi, flora dan fauna khas Kalimantan, serta budaya yang mendorong penguatan keunggulan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, memadukan pengembangan daya tarik wisata berbasis tema, serta menyebarkan perkembangan pariwisata ke seluruh wilayah.
- b. Pembangunan keterpaduan fungsi pusat-pusat kegiatan dengan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c. Peningkatan aksesibilitas jaringan transportasi yang menghubungkan daya tarik wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan IKN, Kabupaten/Kota sekitar dan destinasi pariwisata nasional.
- d. Peningkatan konektivitas antara pintu-pintu masuk (bandar udara, pelabuhan, pintu keluar jalan bebas hambatan) dengan daya tarik wisata dan pusat-pusat kegiatan wisata di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- e. Pengembangan daya tarik wisata berbasis sungai, danau, hutan, geologi, dan flora fauna khas

Kalimantan Timur yang berstandar nasional dan internasional;

- f. Pengembangan daya tarik wisata berbasis sejarah kerajaan yang terintegrasi untuk meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan pengalaman berwisata.
- g. Pengembangan keterpaduan daya tarik wisata unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan daya tarik wisata di daerah lain dan IKN yang memiliki keterkaitan tema pengembangan produk.
- h. Pengembangan kegiatan wisata kreatif dan edukatif pada daya tarik wisata yang dikembangkan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- i. Peningkatan kualitas penyediaan prasarana umum terpadu dan ramah lingkungan, khususnya di pusat-pusat pelayanan pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan desa/kampung wisata.
- j. Pengembangan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum serta pelayanan bercirikan budaya khas Kutai dan berstandar internasional dengan menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan.
- k. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata berkualitas.
- l. Pembinaan yang berkesinambungan untuk menyiapkan masyarakat yang berbudaya, sadar lingkungan, kreatif dan inovatif sebagai agen perubahan dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara.

- m. Pengembangan mekanisme investasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efektif dan efisien.
- n. Pengembangan komunikasi dan koordinasi dengan dunia usaha dan IKN untuk meningkatkan investasi pariwisata di Kabupaten Kutai kartanegara.

Bagian Kedua

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 11

- (1) Strategi untuk pembangunan perwilayahan pariwisata Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
 - a. Membangun Kawasan Danau Semayang dan Danau Melintang dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap ekosistem danau, daerah aliran sungai (DAS), dan budaya masyarakat pesisir danau dan sungai melalui pengembangan pariwisata berbasis konservasi.
 - b. Membangun Kawasan Marang Kayu, Muara Badak dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) untuk meningkatkan perlindungan terhadap kawasan ekosistem laut dan pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - c. Membangun Kawasan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Muara Wis dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK)

untuk meningkatkan perlindungan terhadap budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan.

- d. Membangun Kawasan Muara Kaman – Sebulu dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap warisan sejarah kerajaan tertua di Indonesia dan ekosistem hutan hujan tropis Kalimantan.
 - e. Membangun Kawasan Tenggarong, Tenggarong Seberang dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) yang berfungsi sebagai etalase sejarah Kerajaan Kutai Kartanegara dan Indonesia.
 - f. Membangun Kawasan Sanga-sanga, Anggana, Muara Jawa dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) untuk meningkatkan perlindungan terhadap sejarah perjuangan kemerdekaan dan pertambangan awal di Kalimantan.
 - g. Membangun keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan KSPK dengan Kawasan Ibu Kota Negara (IKN), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Taman Nasional Kutai dan sekitarnya, serta Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP), dan kawasan lainnya.
- (2) Strategi untuk pembangunan keterpaduan fungsi pusat-pusat kegiatan dengan pusat pelayanan pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. Mengembangkan pusat pelayanan primer pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Kecamatan Tenggarong yang berfungsi sebagai pusat penyediaan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum berstandar internasional, serta pusat penyebaran kegiatan wisata ke seluruh wilayah kabupaten.
 - b. Mengembangkan pusat pelayanan sekunder pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Kelurahan Sanga-sanga Dalam di Kecamatan Sanga-sanga dan Desa Kota Bangun Ulu di Kecamatan Kota Bangun yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan pariwisata di KSPK.
- (3) Strategi untuk pembangunan aksesibilitas pariwisata berstandar internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
- a. Meningkatkan aksesibilitas dari Kota Balikpapan, Kota Samarinda, IKN dan kabupaten/kota sekitarnya sebagai sumber pasar utama.
 - b. Mengembangkan angkutan wisata dari Bandara Sepinggan Balikpapan dan Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda menuju Kutai Kartanegara.
 - c. Meningkatkan ketersediaan informasi pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara di ruas jalan tol bebas hambatan Balikpapan-Samarinda (Balsam), ruas jalan IKN-Tenggarong dan ruas jalan utama lainnya.

- (4) Strategi untuk peningkatan konektivitas antara pintu masuk kota dengan daya tarik wisata dan pusat kegiatan wisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:
- a. Meningkatkan kualitas pelayanan jalan, angkutan umum, dan papan petunjuk arah yang menghubungkan Bandara Sepinggan Balikpapan, Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda, pintu keluar tol Balikpapan-Samarinda, Jalan Menuju IKN, dan jalan utama menuju Samarinda dengan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, serta daya tarik wisata unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - b. Mengembangkan angkutan wisata yang menghubungkan pusat pelayanan primer dengan pusat pelayanan sekunder dan seluruh daya tarik wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan jalan menuju pusat pelayanan pariwisata dan daya tarik wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (5) Strategi untuk pengembangan daya tarik wisata berbasis sungai, danau, hutan, geologi, dan flora fauna khas Kalimantan Timur yang berstandar nasional dan internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:
- a. Meningkatkan upaya penelitian dalam rangka menggali nilai penting, danau, sungai, keanekaragaman hayati, dan keragaman geologi sebagai keunggulan pariwisata Kabupaten Kutai

Kartanegara dalam rangka meningkatkan daya saing produk pariwisata.

- b. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap sumber daya alam yang menjadi keunggulan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - c. Mengembangkan daya tarik wisata unggulan berbasis danau, sungai, keragaman geologi, serta flora dan fauna khas Kalimantan menjadi daya tarik wisata berstandar nasional dan internasional.
 - d. Mengembangkan desa dan kampung wisata bertema sejarah, budaya, kuliner, kriya dan konservasi untuk meningkatkan kualitas dan keragaman pengalaman berwisata..
- (6) Strategi untuk pengembangan keterpaduan daya tarik berbasis sejarah Kerajaan Kutai yang terintegrasi untuk meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan pengalaman berwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, meliputi:
- a. Mengembangkan penelitian dalam rangka menggali nilai penting sejarah Kerajaan Kutai untuk meningkatkan nilai dan daya saing produk pariwisata.
 - b. Mengintegrasikan seluruh daya tarik wisata bertema sejarah Kerajaan Kutai sebagai satu produk pariwisata unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - c. Mengembangkan jalur wisata bertema sejarah Kerajaan Kutai yang terintegrasi untuk meningkatkan pengalaman berwisata.

- (7) Strategi untuk pengembangan keterpaduan daya tarik wisata unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan daya tarik wisata di daerah lain dan IKN yang memiliki keterkaitan tema pengembangan produk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, meliputi:
- a. Mengembangkan jalur wisata bertema sejarah, budaya, dan konservasi untuk meningkatkan keterkaitan daya tarik wisata sekaligus menguatkan keunggulan pariwisata Kutai Kartanegara.
 - b. Mengembangkan jalur wisata bertema budaya, ekowisata, geowisata, wisata petualangan dan wisata sejarah yang mengaitkan daya tarik wisata unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan daya tarik wisata di kabupaten/kota sekitar dan IKN;
- (8) Strategi untuk pengembangan kegiatan wisata kreatif dan edukatif pada daya tarik wisata yang dikembangkan di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, meliputi:
- a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengelola daya tarik wisata terhadap konsep pariwisata kreatif dan edukatif serta prinsip-prinsip pariwisata berkualitas dalam pengembangan produk pariwisata.
 - b. Mengembangkan pembinaan dalam pengelolaan kegiatan wisata kreatif dan edukatif pada daya tarik wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara.

- c. Mengembangkan even nasional dan internasional sesuai dengan keunggulan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - d. Mengembangkan kegiatan wisata olahraga dan wisata petualangan yang edukatif untuk meningkatkan keragaman daya tarik wisata Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - e. Mengembangkan interpretasi pariwisata untuk meningkatkan pengalaman berkualitas kepada wisatawan sesuai dengan keunggulan pariwisata, kekhasan daya tarik wisata, dan segmen pasar wisatawan.
- (9) Strategi untuk peningkatan kualitas penyediaan prasarana umum terpadu dan ramah lingkungan, khususnya di pusat-pusat pelayanan pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan desa/kampung wisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, meliputi:
- a. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu, ramah lingkungan, dan berbasis masyarakat, khususnya di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan kampung wisata.
 - b. Meningkatkan penyediaan dan kualitas air bersih agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, wisatawan, dan usaha pariwisata, khususnya di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan kampung wisata.
 - c. Meningkatkan penyediaan dan kapasitas energi listrik dengan memanfaatkan sumber energi

terbarukan di seluruh wilayah kabupaten agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, wisatawan, dan usaha pariwisata.

d. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan limbah sesuai standar dan ramah lingkungan, khususnya di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan kampung wisata.

e. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan jaringan telekomunikasi berbasis internet, khususnya di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan desa/kampung wisata.

(10) Strategi untuk pengembangan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum serta pelayanan bercirikan budaya khas Kutai dan berstandar internasional dengan menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j, meliputi:

- a. Mengembangkan penggunaan ornamen khas Kutai di seluruh daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, fasilitas umum, prasarana umum.
- b. Mengembangkan pusat informasi pariwisata di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c. Mengembangkan fasilitas hotel berstandar nasional dan internasional di pusat pelayanan primer dan sekunder Kutai Kartanegara, serta *homestay*/pondok wisata di desa/kampung wisata.

- d. Mengembangkan fasilitas makan dan minum berstandar nasional dan internasional di pusat pelayanan primer dan sekunder Kutai Kartanegara, serta fasilitas makan dan minum berbasis kuliner lokal berstandar nasional di seluruh kecamatan.
- e. Meningkatkan ketersediaan dan fasilitas informasi dan interpretasi di daya tarik wisata, jalur wisata tematik, dan desa/kampung wisata.
- f. Mengembangkan fasilitas dan pelayanan sanitasi, khususnya toilet umum berstandar internasional dan ramah lingkungan di daya tarik wisata dan desa/kampung wisata.
- g. Meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan berstandar internasional untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi wisatawan.
- h. Mengembangkan fasilitas dan pengelolaan parkir terpadu di pusat pelayanan primer dan sekunder, serta desa/kampung wisata.
- i. Meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan keuangan, khususnya yang terintegrasi dengan sistem keuangan internasional untuk memudahkan wisatawan dalam melakukan transaksi keuangan selama berwisata di Kutai Kartanegara.
- j. Mengembangkan fasilitas dan pelayanan keamanan dan keselamatan berstandar nasional dan internasional di pusat pelayanan primer dan

sekunder, daya tarik wisata, dan desa/kampung wisata.

- k. Mengembangkan fasilitas dan sistem pengelolaan mitigasi bencana pada pusat pelayanan primer dan sekunder, daya tarik wisata, desa/kampung wisata, dan fasilitas pariwisata.
- l. Mengembangkan fasilitas bagi wisatawan berkebutuhan khusus berstandar nasional/internasional di desa/kampung wisata, daya tarik wisata, dan fasilitas pariwisata.
- m. Menerapkan standar halal pada produk dan pelayanan pariwisata di daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas umum.

(11) Strategi untuk peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata yang berkualitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k, meliputi:

- a. Mengembangkan pembinaan sadar wisata dan pariwisata berkualitas yang berkesinambungan kepada masyarakat.
- b. Mengembangkan pembinaan dan pendampingan masyarakat untuk menggali potensi pariwisata berdaya saing yang dimiliki masyarakat;

(12) Strategi untuk pengembangan pembinaan yang berkesinambungan untuk menyiapkan masyarakat yang berakhlak berbudaya, kreatif, dan inovatif sebagai agen perubahan dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf l, meliputi:

- a. Mengembangkan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pengelola dalam memberikan pelayanan pariwisata yang prima dan berlandaskan budaya Kutai.
- b. Mengembangkan pelatihan, pendampingan, dan pemagangan yang berkesinambungan bagi masyarakat pengelola untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan.
- c. Mengembangkan mekanisme pembiayaan bagi program inovatif dan kreatif masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat.
- d. Mengembangkan pemberian penghargaan secara reguler kepada masyarakat yang telah melakukan inovasi dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat.
- e. Memperkuat koordinasi lintas sektor serta kerja sama dengan dunia usaha dan akademisi dalam pengembangan masyarakat sebagai agen perubahan dalam pembangunan kepariwisataan Kutai Kartanegara.pariwisata berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (13) Strategi untuk pengembangan mekanisme investasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efektif dan efisien, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf m, meliputi:

- a. Mengembangkan media informasi, komunikasi, dan pelayanan investasi pariwisata berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
 - b. Mengembangkan promosi investasi terpadu untuk meningkatkan iklim dan daya saing pariwisata kabupaten Kutai Kartanegara.
- (14) Strategi untuk pengembangan komunikasi dan koordinasi dengan dunia usaha dan IKN untuk meningkatkan investasi pariwisata di Kabupaten Kutai kartanegara, efektif dan efisien, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf n, meliputi:
- a. Memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengembangkan mekanisme pelayanan investasi pariwisata terpadu, efektif dan efisien bagi investor dalam mengembangkan usahanya di Kutai Kartanegara.
 - b. Mengembangkan pemberian penghargaan, untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan investor dalam menerapkan standar internasional dan nilai budaya masyarakat Kutai Kartanegara pada pengelolaan investasi yang dilakukan.

BAB VI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 12

Kebijakan pembangunan industri pariwisata, meliputi:

- a. Pengembangan industri pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang menerapkan prinsip kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, berwawasan lingkungan, dan menerapkan nilai-nilai budaya Kutai.
- b. Pembinaan bagi usaha pariwisata dalam menerapkan standar nasional dan internasional di bidang kepariwisataan.
- c. Pengembangan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial industri pariwisata terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya.
- d. Pengembangan tata kelola industri pariwisata terstruktur dan berkeadilan untuk membangun rantai nilai industri pariwisata yang kuat dan berkelanjutan.
- e. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang kepariwisataan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan industri.
- f. Pengembangan kemitraan antara usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang kepariwisataan, ekonomi kreatif, dan sektor lain untuk

memperkuat struktur industri pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

- g. Pengembangan jejaring dengan industri pariwisata nasional dan internasional dalam pengembangan serta pemasaran produk dan pelayanan industri pariwisata

Bagian Kedua

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 13

- (1) Strategi untuk pengembangan industri pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang menerapkan prinsip kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, berwawasan lingkungan, dan menerapkan nilai-nilai budaya Kutai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
 - a. Membangun kesadaran industri pariwisata mengenai pentingnya membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah pariwisata, berwawasan lingkungan, dan menerapkan nilai-nilai budaya Kutai.
 - b. Mengembangkan penghargaan terhadap industri pariwisata yang menerapkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah pariwisata, berwawasan lingkungan, dan menerapkan nilai-nilai budaya Kutai.
 - c. Membangun mekanisme komunikasi antar industri pariwisata dengan usaha mikro, kecil dan menengah pariwisata untuk meningkatkan saling

kesepahaman dalam membangun iklim kondusif usaha pariwisata di Kutai kartanegara.

(2) Strategi untuk pembinaan bagi usaha pariwisata dalam menerapkan standar nasional dan internasional di bidang kepariwisataan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

- a. Membangun kesadaran kolektif pelaku usaha pariwisata terhadap pentingnya penerapan standar di bidang kepariwisataan, kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan, baik standar nasional maupun standar internasional.
- b. Mengembangkan pelatihan dan pendampingan bagi penerapan standar internasional pada usaha pariwisata di Kutai Kartanegara.
- c. Memfasilitasi sertifikasi usaha dan sertifikasi terkait lainnya pada usaha pariwisata di Kutai Kartanegara.

(3) Strategi untuk pengembangan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial industri pariwisata terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:

- a. Membangun forum komunikasi dan kerjasama usaha pariwisata dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya.
- b. Mengembangkan regulasi untuk mendorong tanggung jawab industri pariwisata terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya, termasuk penerapan nilai budaya masyarakat Kutai Kartanegara.

- c. Mengembangkan mekanisme penghargaan bagi usaha pariwisata yang kontribusi tinggi terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya.
- (4) Strategi untuk pengembangan tata kelola industri pariwisata terstruktur dan berkeadilan untuk membangun rantai nilai industri pariwisata yang kuat dan berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi:
- a. Memperkuat basis data dan informasi industri pariwisata Kutai Kartanegara yang kredibel untuk mendukung pembangunan kepariwisataan Kutai Kartanegara.
 - b. Mengembangkan industri pariwisata yang kuat dengan melakukan pembinaan dan pendampingan.
 - c. Mengembangkan sistem informasi industri pariwisata berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai media komunikasi dan koordinasi dalam pembangunan industri pariwisata.
- (5) Strategi untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang kepariwisataan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan industri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, meliputi:
- a. Membangun koordinasi lintas sektor antara sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka meningkatkan kualitas usaha, produk, dan pemasaran industri mikro, kecil, dan

menengah agar dapat memenuhi kebutuhan industri pariwisata dan wisatawan.

- b. Meningkatkan pembinaan terhadap industri mikro, kecil, dan menengah dalam rangka memberikan nilai tambah terhadap produk dan usaha yang dijalankan.

(6) Strategi untuk pengembangan kemitraan antara usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang kepariwisataan, ekonomi kreatif, dan sektor lain untuk memperkuat struktur industri pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, meliputi:

- a. Mengembangkan dan melaksanakan model kemitraan berbasis pembinaan antara usaha pariwisata skala besar dan menengah dengan usaha mikro, kecil, dan menengah pada sektor ekonomi kreatif dan sektor lain yang potensial.
- b. Mengembangkan mekanisme pemberian penghargaan bagi usaha pariwisata skala besar dan menengah yang berhasil melakukan kemitraan berbasis pembinaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah.

(7) Strategi untuk pengembangan jejaring dengan industri pariwisata nasional dan internasional dalam pengembangan serta pemasaran produk dan pelayanan industri pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, meliputi:

- a. Mengembangkan forum dan media komunikasi antara industri pariwisata Kabupaten Kutai

Kartanegara dengan industri pariwisata nasional dan internasional secara berkesinambungan;

- b. Mendorong kemitraan antara industri pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dengan industri pariwisata nasional dan internasional melalui program fasilitasi dan pembinaan kemitraan.

BAB VII

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 14

Kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata, meliputi:

- a. Penguatan citra pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai destinasi pariwisata sejarah Kerajaan dan ekowisata berkelas dunia;
- b. Pembangunan sinergi promosi pariwisata dengan para pelaku usaha pariwisata, kabupaten/kota sekitar, IKN, Provinsi Kalimantan Timur dan nasional;
- c. Pengembangan pasar wisatawan yang lebih luas dan berkualitas berdasarkan kajian pasar yang berkesinambungan;
- d. Pengembangan pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang berkualitas untuk meningkatkan pelayanan kepada wisatawan;
- e. Penguatan basis data kunjungan wisatawan dan mekanisme evaluasi pemasaran pariwisata untuk

meningkatkan kualitas pemasaran yang efektif dan berkualitas.

Bagian Kedua Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 15

- (1) Strategi untuk penguatan citra pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai destinasi pariwisata sejarah Kerajaan dan ekowisata berkelas dunia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
 - a. Mengembangkan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai simpul pemasaran destinasi pariwisata sejarah kerajaan di Indonesia.
 - b. Mengembangkan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai simpul pemasaran destinasi ekowisata berkelas dunia di Indonesia.
 - c. Mengembangkan kemitraan dengan destinasi pariwisata sejarah kerajaan dan ekowisata di seluruh dunia.
 - d. Membangun citra pemasaran pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengangkat sejarah Kerajaan dan ekowisata sebagai ciri utama.
- (2) Strategi untuk pembangunan sinergi promosi pariwisata dengan para pelaku usaha pariwisata, kabupaten/kota sekitar, IKN, Provinsi Kalimantan Timur dan nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
 - a. Mengembangkan mekanisme komunikasi dan koordinasi pemasaran pariwisata antara Kabupaten

Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, IKN dan Pemerintah Pusat untuk membangun sinergi program pemasaran pariwisata.

- b. Mengembangkan even promosi pariwisata untuk mengenalkan keunggulan internasional dan nasional Kutai Kartanegara kepada wisatawan nusantara dan mancanegara.

(3) Strategi untuk pengembangan pasar wisatawan yang lebih luas dan berkualitas berdasarkan kajian pasar yang berkesinambungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:

- a. Mengembangkan pasar wisatawan nusantara keluarga, pelajar/mahasiswa sebagai pasar utama wisatawan nusantara.
- b. Mengembangkan pasar wisatawan mancanegara segmen minat khusus sejarah kerajaan dan budaya dari China, India, Asia Tenggara berdasarkan penelitian pasar yang berkesinambungan.
- c. Mengembangkan pasar wisatawan mancanegara segmen minat khusus ekowisata sebagai pasar utama wisatawan mancanegara dari Asia Tenggara, Asia Timur, Amerika, Australia, serta negara-negara Eropa berdasarkan penelitian pasar yang berkesinambungan.
- d. Mengembangkan kemitraan pemasaran dengan daerah dan negara sumber pasar wisatawan.

(4) Strategi untuk pengembangan pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang

berkualitas untuk meningkatkan pelayanan kepada wisatawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi:

- a. Mengembangkan kemitraan dengan pengelola media dan aplikasi digital dalam melakukan promosi pariwisata Kutai Kartanegara.
- b. Mengembangkan sistem informasi pariwisata berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mudah diakses untuk meningkatkan pelayanan kepada wisatawan.
- c. Mengembangkan pemasaran pariwisata Kutai kartanegara yang terpadu dan mengangkat nilai-nilai budaya khas Kutai Kartanegara.
- d. Mengembangkan jejaring pemasaran yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak untuk mempromosikan pariwisata Kutai kartanegara di dalam maupun luar negeri.

(5) Strategi untuk penguatan basis data kunjungan wisatawan dan mekanisme evaluasi pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kualitas pemasaran yang efektif dan berkualitas., sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, meliputi:

- a. Mengembangkan basis data dan informasi kunjungan wisatawan ke Kutai Kartanegara berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mudah diakses oleh pelaku usaha dan masyarakat.
- b. Mengembangkan sistem evaluasi pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi untuk mengomunikasikan dan mengevaluasi keberhasilan pemasaran pariwisata yang dilakukan oleh

Pemerintah Kutai Kartanegara dan para pelaku usaha pariwisata.

BAB VIII

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 16

Kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan, meliputi:

- a. Pengembangan sumber daya manusia pariwisata yang berkualitas melalui peningkatan kompetensi nasional dan internasional secara berkesinambungan.
- b. Pembinaan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan dan pelaku usaha pariwisata melalui pendidikan berkualitas internasional.
- c. Pengembangan regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pariwisata di Kabupaten Kutai kartanegara.
- d. Pengembangan mekanisme komunikasi dan koordinasi antar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, IKN, masyarakat, industri pariwisata, media, dan akademisi untuk mendorong keterpaduan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara.

- e. Pembangunan sistem pengelolaan krisis kepariwisataan akibat bencana alam, sosial, politik, dan bahaya kesehatan, terintegrasi dengan sistem pengelolaan krisis kepariwisataan di tingkat provinsi dan nasional

Bagian Kedua

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 17

- (1) Strategi untuk pengembangan sumber daya manusia pariwisata yang berkualitas melalui peningkatan kompetensi nasional dan internasional secara berkesinambungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:
 - a. Mengembangkan sistem sertifikasi untuk kompetensi nasional dan internasional yang berkesinambungan bagi sumber daya manusia pariwisata.
 - b. Mengembangkan mekanisme insentif untuk meningkatkan sertifikasi kompetensi berskala nasional dan internasional bagi sumber daya manusia pariwisata.
- (2) Strategi untuk pembinaan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan dan pelaku usaha pariwisata melalui pendidikan berkualitas internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:
 - a. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di

lingkungan pemerintah, masyarakat dan usaha pariwisata.

- b. Mengembangkan pembinaan dan pelatihan yang berkesinambungan di bidang perencanaan dan pengelolaan kepariwisataan berstandar internasional bagi sumber daya manusia di lingkungan pemerintah dan industri pariwisata.

(3) Strategi untuk pengembangan regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pariwisata di Kabupaten Kutai kartanegara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas berbasis kompetensi dan kinerja pada organisasi di lingkungan Pemerintah Kutai Kartanegara yang terkait dengan penyelenggaraan urusan kepariwisataan.
- b. Mendorong penguatan dan pengembangan organisasi usaha dan profesi pariwisata Kutai Kartanegara sebagai mitra utama dalam melakukan percepatan pembangunan kepariwisataan.
- c. Mengembangkan program kolaboratif untuk percepatan pembangunan kepariwisataan Kutai Kartanegara yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media.

(4) Strategi untuk pengembangan mekanisme komunikasi dan koordinasi antar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, IKN, masyarakat, industri pariwisata, media, dan akademisi untuk mendorong keterpaduan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai

Kartanegara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi:

- a. Mengembangkan forum komunikasi dan koordinasi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media dalam rangka membangun keterpaduan program perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan.
- b. Mengembangkan mekanisme komunikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mengkomunikasikan pembangunan kepariwisataan daerah kepada masyarakat.

(5) Strategi untuk penguatan regulasi yang menetapkan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai destinasi pariwisata Sejarah Kerajaan dan ekowisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, meliputi:

- a. Mengembangkan basis data kepariwisataan terpadu dari desa sampai tingkat kabupaten yang lengkap, akurat, dan mutakhir berbasis teknologi informasi, serta mudah diakses oleh masyarakat luas.
- b. Mengembangkan regulasi bagi penguatan tata kelola kepariwisataan dalam membangun sinergi program bersama antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media untuk mempercepat pembangunan kepariwisataan Kutai Kartanegara.
- c. Mengembangkan mekanisme operasional bagi pengembangan dan pengelolaan produk pariwisata, pengelolaan pengunjung,

lingkungan, dan dampak pariwisata sesuai dengan pedoman pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan.

(6) Strategi untuk pembangunan sistem pengelolaan krisis kepariwisataan akibat bencana alam, sosial, politik, dan bahaya kesehatan, terintegrasi dengan sistem pengelolaan krisis kepariwisataan di tingkat provinsi dan nasional., sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, meliputi:

- a. Mengembangkan regulasi bagi pengelolaan krisis kepariwisataan dan peningkatan ketahanan pariwisata Kutai Kartanegara.
- b. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi terpadu pengelolaan krisis kepariwisataan sebagai upaya memitigasi bencana alam, sosial, politik, dan bahaya kesehatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- c. Mengembangkan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, IKN, dan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan krisis kepariwisataan.

BAB IX

PERWILAYAHAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 18

Perwilayahan pariwisata Daerah meliputi:

- a. struktur perwilayahan pariwisata;
- b. KSPK.

Bagian Kesatu
Struktur Perwilayahan Pariwisata

Pasal 19

- (1) Struktur perwilayahan pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 18 huruf a, meliputi:
 - a. pusat pelayanan primer pariwisata adalah Kecamatan Tenggarong;
 - b. pusat pelayanan sekunder adalah Kelurahan Sanga-sanga Dalam di Kecamatan Sanga-sanga, dan Desa Kota Bangun Ulu di Kecamatan Kota Bangun.
- (2) Fungsi pusat pelayanan primer pariwisata, sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) huruf a, adalah:
 - a. pusat pertumbuhan pariwisata Daerah;
 - b. pusat penyediaan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum skala nasional dan internasional; dan
 - c. pusat penyebaran kegiatan wisata dan wisatawan ke seluruh wilayah Daerah.
- (3) Fungsi pusat pelayanan sekunder pariwisata, sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) huruf b, adalah:
 - a. pusat pertumbuhan pariwisata di KSPK dan KPPK;
 - b. pusat penyediaan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum skala nasional dan internasional yang berciri khas lokal dan sesuai dengan karakteristik pariwisata kawasannya; dan
 - c. pusat penyebaran kegiatan wisata dan wisatawan di KSPK.

Bagian Kedua

KSPK

Pasal 20

- (1) Kriteria KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi:
 - a. Merupakan lokasi keberadaan potensi pariwisata yang merupakan keunggulan dan kekhasan Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu daya tarik wisata berbasis budaya, sejarah, alam, dan bahari;
 - b. Beberapa daya tarik wisata sudah menjadi tujuan kunjungan wisatawan nusantara dari luar Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. Merupakan kawasan yang memiliki peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara dan wilayah sekitarnya;
 - d. Pengembangannya akan menggerakkan perekonomian lokal, memperkuat identitas dan daya saing pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) KSPK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. KSPK Pariwisata Budaya Masyarakat Adat Tabang-Kembang Janggut dan sekitarnya;
 - b. KSPK Ekowisata Danau Melintang – Semayang dan sekitarnya;
 - c. KSPK Pariwisata Sejarah Kerajaan Tertua Muara Kaman dan sekitarnya;

- d. KSPK Pariwisata Sejarah Kerajaan Tenggaraong dan sekitarnya;
- e. KSPK Pariwisata Sejarah Perjuangan Sanga-Sanga – Anggana-Muara Jawa dan sekitarnya; dan
- f. KSPK Ekowisata Bahari Marangkayu – Muara Badak dan sekitarnya.

Pasal 21

- (1) Arahana pembangunan Pariwisata Budaya Masyarakat Adat Tabang-Kembang Janggut dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. tema pengembangan produk adalah pariwisata budaya masyarakat adat;
 - b. mencakup wilayah Kecamatan Tabang, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Kenohan, dan sebagian desa di Kecamatan Muara Wis;
 - c. fungsi strategis kawasan adalah memberikan perlindungan terhadap warisan budaya masyarakat adat dayak;
 - d. sasaran pengembangan kawasan adalah terjaganya nilai-nilai penting budaya adat dan perlindungan lingkungan alam melalui kegiatan pariwisata yang bertanggungjawab;
 - e. jenis wisata budaya masyarakat adat dan wisata petualangan;
 - f. jenis wisata pendukung adalah wisata edukatif.

- (2) Arahan pembangunan KPSK Ekowisata Danau Melintang – Semayang dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. tema pengembangan produk adalah ekowisata danau;
 - b. mencakup wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Kota Bangun Darat, sebagian desa di Kecamatan Muara Wis dan Kecamatan Muara Muntai;
 - c. fungsi strategis kawasan adalah perlindungan terhadap kawasan danau Semayang dan Melintang;
 - d. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya pariwisata tirta (danau) yang mengangkat identitas kawasan sebagai lokasi bernilai budaya masyarakat;
 - e. jenis wisata unggulan adalah ekowisata danau;
 - f. jenis wisata pendukung adalah wisata budaya perdesaan.
- (3) Arahan pembangunan KPSK Pariwisata Sejarah Kerajaan Tertua Muara Kaman dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. tema pengembangan produk adalah pariwisata sejarah kerajaan tertua;
 - b. mencakup wilayah Kecamatan Muara Kaman dan Kecamatan Sebulu;
 - c. fungsi strategis kawasan adalah perlindungan terhadap kawasan peninggalan kerajaan tertua di Indonesia;

- d. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya pariwisata yang memadukan produk wisata edukasi sejarah kerajaan kuno dengan budaya masyarakat;
 - e. jenis wisata unggulan adalah wisata sejarah kerajaan tertua;
 - f. jenis wisata pendukung adalah wisata budaya perdesaan masyarakat pesisir sungai.
- (4) Arahan pembangunan KPSK Pariwisata Sejarah Kerajaan Tenggara dan Sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Ayat (2) huruf d, meliputi:
- g. tema pengembangan produk adalah pariwisata sejarah kerajaan;
 - h. mencakup wilayah Kecamatan Tenggara, Kecamatan Tenggara Seberang, Kecamatan Loa Kulu, dan Kecamatan Loa Janan;
 - i. fungsi strategis kawasan adalah perlindungan terhadap peninggalan kerajaan di Kutai Kartanegara;
 - j. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya pariwisata perkotaan yang edukatif untuk memperkuat perlindungan budaya sejarah kerajaan;
 - k. jenis wisata unggulan adalah wisata sejarah kerajaan Kutai Ing Martadipura;
 - l. jenis wisata pendukung adalah wisata perkotaan.
- (5) Arahan pembangunan KPSK Pariwisata Sejarah Perjuangan Sanga-Sanga – Anggana dan Sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 20

Ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. tema pengembangan produk adalah pariwisata sejarah perjuangan;
 - b. mencakup wilayah Kecamatan Sanga-Sanga, Kecamatan Anggana, Kecamatan Muara Jawa;
 - c. fungsi strategis kawasan adalah perlindungan terhadap peninggalan sejarah perjuangan dan pertambangan di Kutai Kartanegara;
 - d. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya pariwisata yang memadukan produk wisata edukasi sejarah perjuangan dengan budaya masyarakat;
 - e. jenis wisata unggulan adalah wisata Sejarah Perjuangan Kemerdekaan, Wisata Sejarah Kutai Lama, Wisata Sejarah Pertambangan;
 - f. jenis wisata pendukung adalah wisata rekreasi keluarga.
- (6) Arahan pembangunan KPSK Ekowisata Bahari Marangkayu – Muara Badak dan Sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. tema pengembangan produk adalah ekowisata bahari;
 - b. mencakup wilayah Kecamatan Marangkayu dan Kecamatan Muara Badak;
 - c. fungsi strategis kawasan adalah perlindungan terhadap kawasan pesisir dan laut di Kutai Kartanegara;
 - d. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya pariwisata yang memadukan

produk ekowisata bahari dengan budaya bahari masyarakat;

e. jenis wisata unggulan adalah Ekowisata Menyelam dan Ekowisata Mangrove;

f. jenis wisata pendukung adalah wisata rekreasi.

(7) Rencana Pengembangan KSPK ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Peta Kawasan Pariwisata

Pasal 22

Peta kawasan pariwisata tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 23

(1) Pelaksanaan Ripparkab diwujudkan melalui indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan kota, baik berupa program dan kegiatan Pemerintah Daerah, pihak swasta, maupun masyarakat.

(2) Rincian indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai tahapan perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 24

- (1) Pengendalian pelaksanaan Ripparkab diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Anggaran pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian Ripparkab bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 26

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 27

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan kepariwisataan untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Ripparkab dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah maka Ripparkab dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil peninjauan kembali Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
 - a. Ripparkab tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. Ripparkab perlu dilakukan perubahan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
NOMOR

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR TAHUN 2026
T E N T A N G
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026-2045

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengamanatkan kepada daerah yang memiliki potensi untuk membangun kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan ditujukan agar pemerataan pembangunan melalui kesempatan berusaha serta mendapatkan manfaat yang besar dari potensi yang ada oleh masyarakat dapat terwujud. Oleh karena itu pembangunan kepariwisataan harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, serta kelestarian dan kualitas lingkungan hidup.

Dalam implementasinya maka diperlukan sebuah dokumen perencanaan yang dapat menjadi acuan bagi pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 6, secara jelas menyebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Lebih lanjut, Pasal 8 dari Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan

kabupaten (Ripparkab), yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata. Dalam konteks pembangunan kepariwisataan Nasional, Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kota Bangun – Tanjung Isuy dan sekitarnya, KPPN Tenggarong dan sekitarnya, serta KPPN Balikpapan - Samboja dan sekitarnya. Selain itu Kabupaten Kutai Kartanegara juga merupakan daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN). Posisi ini tentu saja sangat strategis dan harus dapat dimanfaatkan secara maksimal agar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan daerah.

Dari sisi lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki keunggulan karena merupakan lokasi keberadaan Danau Kaskade Mahakam yaitu danau Semayang dan Danau Melintang yang menjadi danau prioritas nasional untuk direvitalisasi. Selain itu keberadaan Taman Nasional Kutai serta Kawasan Konseervasi Samboja menempatkan Kutai Kartanegara sebagai daerah yang sangat penting dari sisi lingkungan khususnya upaya konservasi kawasan hutan hujan tropis Kalimantan. Sementara itu dari sisi sejarah dan budaya, Kutai Kartanegara menjadi pangkal sejarah nasional dimana disinilah lokasi kerajaan tertua di nusantara berada dimana jejaknya masih bisa kita saksikan. Selain itu sejarah perjuangan serta sejarah pertambangan di Kalimantan juga menjadi keunggulan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai destinasi pariwisata.

Untuk memberikan arahan serta payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan Ripparkab di kabuapten Kutai Kartanegara, maka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengamanatkan agar Ripparkab diatur dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf b

Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf c

Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Masyarakat Kutai Kartanegara adalah masyarakat yang sangat religius dan berpegang pada norma budaya. Oleh karena itu pembangunan kepariwisataan yang dilakukan di Kutai kartanegara senantiasa bersandar pada norma agama dan budaya. Dengan dipegang teguhnya norma agama dan budaya dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai

Kartanegara diharapkan dampak negative dari pariwisata dapat ditekan sehingga kehidupan masyarakat Kutai Kartanegara yang berakhlak mulia, senantiasa menjaga nilai budaya tetap terjaga.

Huruf b

Masyarakat sebagai ujung tombak pembangunan kepariwisataan harus dilibatkan secara aktif dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pelibatan masyarakat dilakukan mulai dari proses perencanaan, pembangunan hingga pengelolaan destinasi pariwisata. Pengelolaan destinasi pariwisata inilah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Dengan pelibatan ini juga diharapkan tidak ada masyarakat yang hanya menjadi penonton dalam pengelolaan destinasi pariwisata yang ada di daerahnya masing-masing.

Pelibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan dilakukan dengan:

- a. pemantauan terhadap kontribusi ekonomi sektor pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. peluang kerja untuk masyarakat lokal, termasuk perempuan, pemuda, penyandang cacat, dan kelompok minoritas;
- c. partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan;
- d. opini masyarakat lokal yang dijaring melalui sistem pengumpulan data, pemantauan, dan pelaporan terkait dengan aspirasi publik terhadap pengelolaan destinasi pariwisata;

- e. akses bagi masyarakat lokal ke situs alam, budaya, sejarah, arkeologi, agama, dan spiritual di destinasi pariwisata;
- f. fungsi edukasi sadar wisata melalui program Sapta Pesona yang dilaksanakan secara reguler bagi masyarakat lokal;
- g. pencegahan eksploitasi melalui praktik, program, dan peraturan perundang-undangan untuk mencegah komersialisasi dan eksploitasi, pelecehan seksual, atau bentuk pelanggaran lainnya terhadap anak-anak, remaja, perempuan, dan kelompok minoritas;
- h. dukungan perusahaan dan pengunjung untuk inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat;
- i. mendukung pengusaha lokal dan perdagangan yang adil melalui sistem dan program yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah pada rantai nilai pariwisata agar dapat mempromosikan dan mengembangkan produk lokal yang berkelanjutan dengan prinsip perdagangan yang adil.

Huruf c

Kepariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara menyandarkan basis pengembangannya terhadap potensi alam dan budaya. Oleh karena itu perlindungan terhadap lingkungan menjadi keniscayaan untuk keberlangsungan daya tarik wisata yang ada. Selain itu, dengan terjaganya lingkungan maka seluruh ekosistem yang terkait dapat turut terjaga. Disini pariwisata dapat menjadi triger dalam perlindungan terhadap ekologi, alih-alih mejadi perusak lingkungan yang selama ini seringkali terjadi. Selain itu, melestarikan budaya juga menjadi prinsip yang harus dipegang teguh karena budaya merupakan salah satu kekuatan utama pariwisata Kutai Kartanegara.

Pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung, mencakup:

- a. perlindungan atraksi budaya melalui kebijakan dan sistem evaluasi, rehabilitasi, dan pelestarian situs alam dan budaya;
 - b. pengelolaan pengunjung, termasuk langkah-langkah untuk melestarikan, melindungi, serta meningkatkan aset alam dan budaya;
 - c. panduan perilaku pengunjung yang sesuai dengan karakteristik destinasi pariwisata, dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap destinasi pariwisata, sekaligus memperkuat perilaku positif pengunjung selama berdaya di destinasi pariwisata;
 - d. perlindungan warisan budaya melalui hukum yang mengatur penjualan, perdagangan, pameran, atau pemberian artefak bersejarah dan/atau bernilai arkeologi kepada pihak lain;
 - e. interpretasi daya tarik wisata alam dan budaya yang akurat;
 - f. perlindungan terhadap kekayaan intelektual melalui hukum dan sistem yang jelas dalam perlindungan dan pelestarian kekayaan intelektual masyarakat dan individu.
- Sementara itu pelestarian lingkungan dilakukan dengan:
- a. pencegahan dan penanggulangan risiko lingkungan melalui kebijakan atau kearifan lokal yang mampu mengurangi potensi terjadinya hal-hal negatif yang dapat merusak lingkungan;
 - b. perlindungan terhadap lingkungan sensitif dengan memonitor dampak pariwisata terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati;
 - c. perlindungan alam liar melalui pengembangan sistem untuk memastikan kepatuhan destinasi terhadap hukum

- dan standar kegiatan memanen, penangkapan, pameran, dan penjualan tumbuhan dan satwa liar;
- d. mendorong perusahaan untuk mengukur, memantau, meminimalkan, dan melaporkan kepada publik dan mengurangi kegiatan yang meningkatkan emisi gas rumah kaca;
 - e. konservasi energi sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil;
 - f. pengelolaan air;
 - g. keamanan air untuk memastikan bahwa sumber daya air selalu tersedia bagi masyarakat setempat maupun untuk penggunaan lainnya;
 - h. kualitas air yang sesuai standar;
 - i. sistem pembuangan limbah cair yang tidak memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - j. mengurangi limbah padat untuk memastikan keberlanjutan lingkungan;
 - k. panduan yang mendorong berbagai pihak untuk meminimalkan kegiatan operasional yang dapat menyebabkan gangguan cahaya dan suara terhadap lingkungan;
 - l. transportasi ramah lingkungan.

Huruf d

Kepariwisata yang bersifat multisektor tidak dapat tidak dibangun tanpa dukungan sektor lain. Keterpaduan dalam pembangunan kepariwisataan diselaraskan dengan pembangunan wilayah, pembangunan lintas sektor, komponen-komponen kepariwisataan (destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataa), para pemangku kepentingan, serta dengan wilayah

sekitar dan wilayah yang lebih luas menjadi kunci keberhasilan pembangunan kepariwisataan. Di lain sisi, pembangunan kepariwisataan juga harus mendapatkan dukungan dari lintas sektor, lintas wilayah, dan dari seluruh para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif, yang memperhatikan sektor dan faktor-faktor yang lebih luas, sangat diperlukan dalam pembangunan kepariwisataan agar keterpaduan pembangunan dapat terwujud.

Keterpaduan pembangunan kepariwisataan harus dilakukan untuk mewujudkan sinergi pembangunan, artinya pembangunan kepariwisataan tidak hanya didukung oleh pembangunan lintas sektor dan dukungan para pemangku kepentingan, tetapi pembangunan kepariwisataan juga harus berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan sektor lain dan juga dapat memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Pembangunan kepariwisataan harus bersinergi dengan pembangunan sektor lain untuk mencapai satu tujuan bersama.

Empat hal penting yang harus diperhatikan dalam menerapkan prinsip keterpaduan dan sinergi dalam pembangunan kepariwisataan adalah:

- a. kepemimpinan yang berpihak pada kepariwisataan;
- b. komitmen untuk mencapai tujuan bersama;
- c. koordinasi dan komunikasi yang intensif dan efektif;
- d. pemantauan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan yang konsisten dan tegas.

Huruf e

Penetapan kawasan Kalimantan Timur khususnya sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian dari Ibu Kota Negara (IKN) memerlukan respon yang cepat dan tepat khususnya dalam sektor pariwisata. Penetapan delienasi IKN yang menempatkan Kecamatan Samboja dan Samboja Barat sebagai bagian dari IKN dan secara otomatis kedepan bukan merupakan bagian dari Kabupaten Kutai Kartanegara harus diantisipasi sedini mungkin, karena kawasan ini merupakan salah satu kawasan andalan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dimana terdapat banyak daya tarik wisata yang sebagian dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, perkembangan IKN kedepan yang akan dihuni oleh masyarakat dunia dengan berbagai kebutuhannya termasuk kebutuhan untuk berwisata. Oleh karena itu, Kabupaten Kutai Kartanegara harus mengantisipasinya dengan mengembangkan beragam produk pariwisata berkelas dunia. Sehingga pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menjadi mitra yang baik dalam pengembangan kepariwisataan kawasan.

Pasal 6

Penjabaran dari visi sebagai berikut:

1. Destinasi pariwisata sejarah

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk mengoptimalkan nilai-nilai dan tinggalan sejarah budaya yang dimiliki terutama terkait dengan sejarah kerajaan Kutai sebagai kerajaan tertua di Nusantara. Mengangkat sejarah Kutai sejatinya mengangkat sejarah keberadaan Bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa kepulauan yang memiliki karagaman tinggi. Sehingga, nilai

sejarah yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menjadi magnet bagi pariwisata Kutai Kartanegara sebagai destinasi sejarah berskala nasional maupun internasional.

2. Destinasi pariwisata alam

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk mewujudkan peningkatan upaya konservasi lingkungan melalui pariwisata. Sebagai daerah yang dilalui Sungai Mahakam, dimana terdapat dua danau utama yaitu Danau Semayang dan Danau Melintang dengan keanekaragaman hayati yang tinggi serta tutupan hutan baik Taman Nasional Kutai, Hutan Penelitian Samboja maupun Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang dapat didorong untuk dioptimalkan sebagai daya tarik wisata yang bernilai ekologi tinggi. Lebih lanjut, pembangunan kepariwisataan Kutai Kartanegara adalah pembangunan yang menjunjung tinggi prinsip pelestarian lingkungan.

3. Destinasi pariwisata berkualitas

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan tidak hanya bertujuan untuk mengejar nilai ekonomi akan tetapi juga bagaimana pariwisata dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya pelestarian lingkungan, peningkatan kualitas sosial masyarakat serta upaya konservasi budaya masyarakat. menciptakan pariwisata berkualitas adalah menciptakan daerah tujuan wisata yang bertandar nasional atau internasional, berkelanjutan, dan muaranya menciptakan kondisi wisatawan maupun masyarakat lokal merasa nyaman dan bahagia.

4. Mitra utama IKN

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan selain untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan

masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, juga untuk memberikan dukungan penuh terhadap kebutuhan pariwisata masyarakat yang berasal dari IKN. Selain itu, pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara harus terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan yang dilakukan di IKN dalam pengembangan pariwisata khususnya ekowisata.

5. Kesejahteraan masyarakat

Tujuan utama pembangunan kepariwisataan di Kabuapten Kutai Kartanegara adalah untuk sebesar-besarnya meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. tidak saja dari aspek ekonomi akan tetapi yang jauh lebih penting adalah aspek sosial dan budaya. Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk mampu mengangkat kualitas budaya Kutai sebagai salah satu budaya unggul nasional.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata Daerah harus memperhatikan kelestarian dan perlindungan terhadap lingkungan diwujudkan dengan menggunakan bahan dan melakukan pengelolaan yang ramah lingkungan. Pmbangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata juga harus bercirikan budaya khas Daerah, diwujudkan melalui penyediaan prasarana dan fasilitas

yang menggunakan nilai-nilai pengelolaan dan pelayanan yang khas sesuai budaya Daerah, gaya arsitektur khas Daerah, ataupun ornamen khas Daerah, dan sebagainya untuk melestarikan kearifan lokal dan mengangkat identitas lokal. Selain itu, juga harus mampu memenuhi standar yang berlaku secara internasional, baik dari aspek kualitas bangunan, pengelolaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan, serta aspek pelayanan.

Huruf d

Masyarakat sebagai agen perubahan yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat yang mampu melakukan perubahan dan membuat orang-orang di lingkungannya berperilaku, bertindak, dan mengambil keputusan sesuai dengan arah yang dikehendakinya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Rantai nilai industri pariwisata yang kokoh adalah rangkaian kegiatan usaha pariwisata yang saling terhubung, dilakukan untuk merancang, memproduksi, memasarkan, menyajikan, dan mendukung pengembangan produk pariwisata yang memiliki ketahanan tinggi terhadap berbagai kondisi krisis yang terjadi. Rantai nilai terdiri dari sekumpulan kegiatan utama dan pendukung. Kegiatan utama terdiri dari logistik masuk, operasi, logistik keluar, pemasaran, penjualan, dan pelayanan. Kegiatan pendukung terdiri dari infrastruktur

perusahaan, pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan teknologi dan usaha.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pusat kegiatan yang dimaksud dalam hal ini adalah pusat kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, seperti Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Sub-PPK, dan Pusat Lingkungan (PL).

Pusat pelayanan primer pariwisata adalah lokasi konsentrasi usaha pariwisata skala nasional dan internasional yang berfungsi sebagai pusat pelayanan utama dan titik simpul awal penyebaran wisatawan ke seluruh wilayah di Daerah.

Pusat pelayanan sekunder pariwisata adalah lokasi konsentrasi usaha pariwisata skala nasional dan lokal sesuai dengan karakteristik wilayahnya yang berfungsi sebagai pusat

pelayanan pariwisata untuk wilayah tertentu di Daerah dan menjadi pusat pertumbuhan wilayahnya.

Huruf c

Sebagai penyangga Ibu Kota Negara maka peningkatan aksesibilitas dari dan menuju IKN harus ditingkatkan agar pergerakan wisatawan dapat lancar dan mudah.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Sejarah kerajaan Kutai Tua, Kerajaan Kutai In Martadipura serta Kerajaan Kutai Kartenagara harus mampu diintegrasikan sebagai daya tarik wisata yang memberikan edukasi terhadap wisatawan.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Kegiatan wisata kreatif adalah kegiatan wisata yang memberikan pengalaman dan peluang kepada wisatawan untuk mengembangkan potensi kreatifnya. Potensi kreatif wisatawan tersebut dimunculkan melalui partisipasi aktif dalam program dan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik destinasi yang dikunjungi.

Kegiatan wisata pendidikan adalah kegiatan wisata yang memberikan informasi dan pengalaman berbasis ilmu

pengetahuan dan teknologi kepada wisatawan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan keanekaragaman daya tarik wisata.

Huruf i

Prasarana umum ramah lingkungan adalah pengelolaan prasarana yang memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan, sanitasi, dan higienitas.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Membangun forum komunikasi dengan otorita IKN serta dunia usaha untuk meningkatkan investasi agar dapat berperan maksimal sebagai daerah penyangga IKN khususnya dalam pariwisata.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Desa atau kampung wisata adalah suatu kawasan geografis di perkotaan yang mengintegrasikan atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam bentuk struktur kehidupan masyarakat sehingga memberikan kesempatan kepada wisatawan dan/atau sekelompok wisatawan untuk dapat tinggal di lingkungan masyarakat dan belajar mengenai kehidupan masyarakatnya.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Jalur wisata adalah jalur yang menghubungkan beberapa daya tarik wisata yang memiliki keterkaitan tema tertentu maupun

kedekatan geografis, didukung oleh fasilitas pariwisata dan fasilitas umum, dengan faktor pengikatnya adalah jalur transportasi darat, laut, dan udara, serta sistem informasi yang seluruh komponen tersebut saling terkait membentuk pengalaman berwisata.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (10)

Huruf a

Ornamen khas Kutai adalah ornamen atau ragam hias yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah dan atau peraturan lainnya di tingkat nasional.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pondok wisata adalah istilah bahasa Indonesia untuk *homestay*, yaitu usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal. Istilah lainnya adalah rumah wisata, yaitu usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Ayat (11)

Huruf a

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan tidak hanya bertujuan untuk mengejar nilai ekonomi akan tetapi juga bagaimana pariwisata dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya pelestarian lingkungan, peningkatan kualitas sosial masyarakat serta upaya konservasi budaya masyarakat. menciptakan pariwisata berkualitas adalah menciptakan daerah tujuan wisata yang bertandar nasional atau internasional, berkelanjutan, dan muaranya menciptakan kondisi wisatawan maupun masyarakat lokal merasa nyaman dan Bahagia.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Struktur perwilayahan pariwisata adalah kerangka perwilayahan pariwisata yang terdiri dari pusat-pusat pelayanan pariwisata yang berhierarki satu sama lain, yang memiliki fungsi sesuai dengan karakteristik daya tarik wisata yang dikembangkannya, dihubungkan oleh jaringan transportasi sebagai elemen pengikat.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Tema pengembangan produk merupakan jenis pariwisata yang akan menjadi fokus utama pengembangan kawasan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Fungsi strategis kawasan adalah fungsi penting yang diemban kawasan, dapat mencakup satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan, sesuai yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Sasaran pengembangan kawasan adalah kondisi yang akan dicapai suatu kawasan melalui pembangunan kepariwisataan yang dilakukan.

Huruf e

Jenis wisata unggulan adalah jenis kegiatan wisata yang menjadi unggulan karena kekhasan, keunikan, dan/atau memiliki nilai penting.

Huruf f

Jenis wisata pendukung adalah jenis kegiatan wisata lainnya di kawasan yang dapat mendukung pengembangan kawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ...

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026-2045

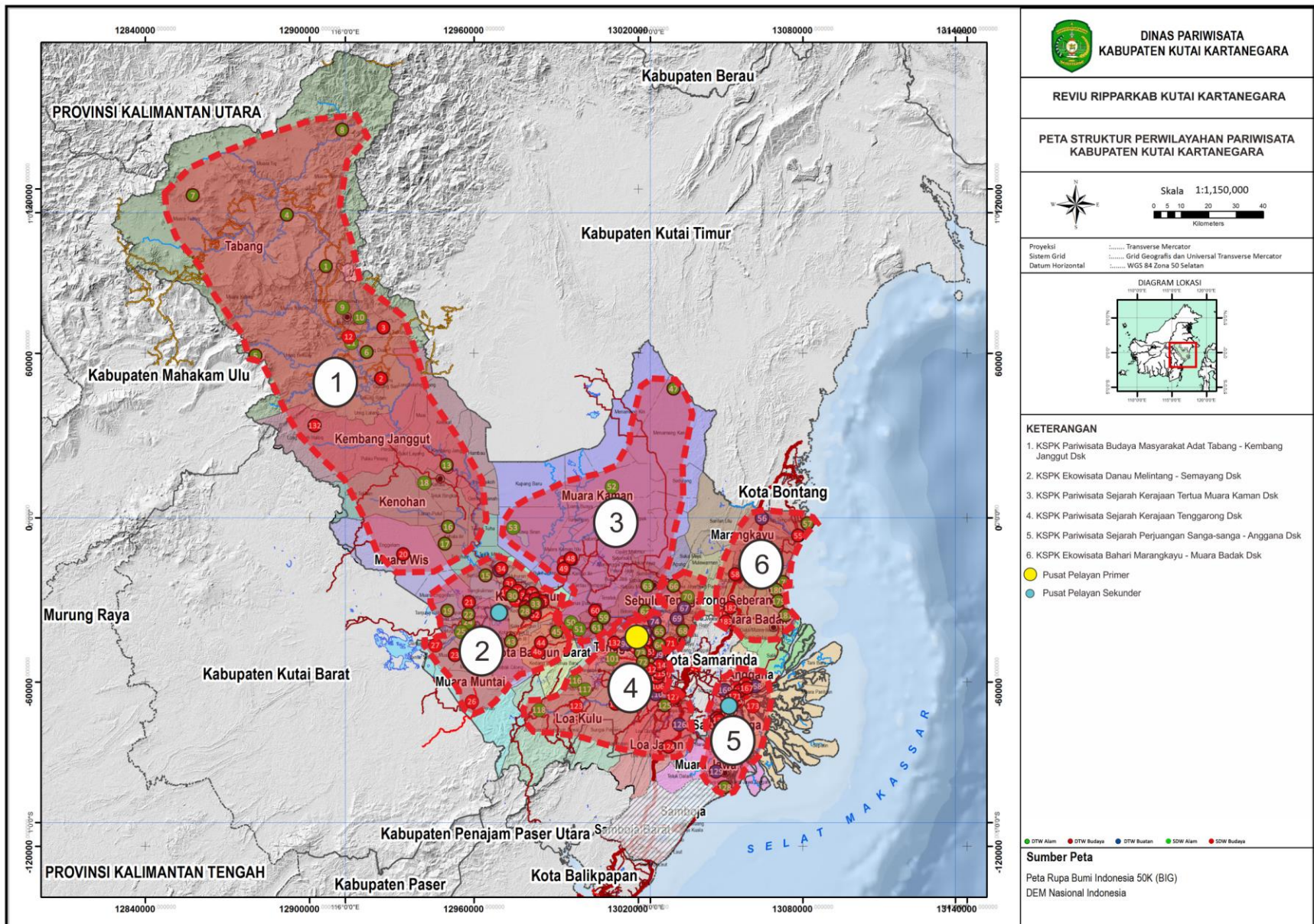
**INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

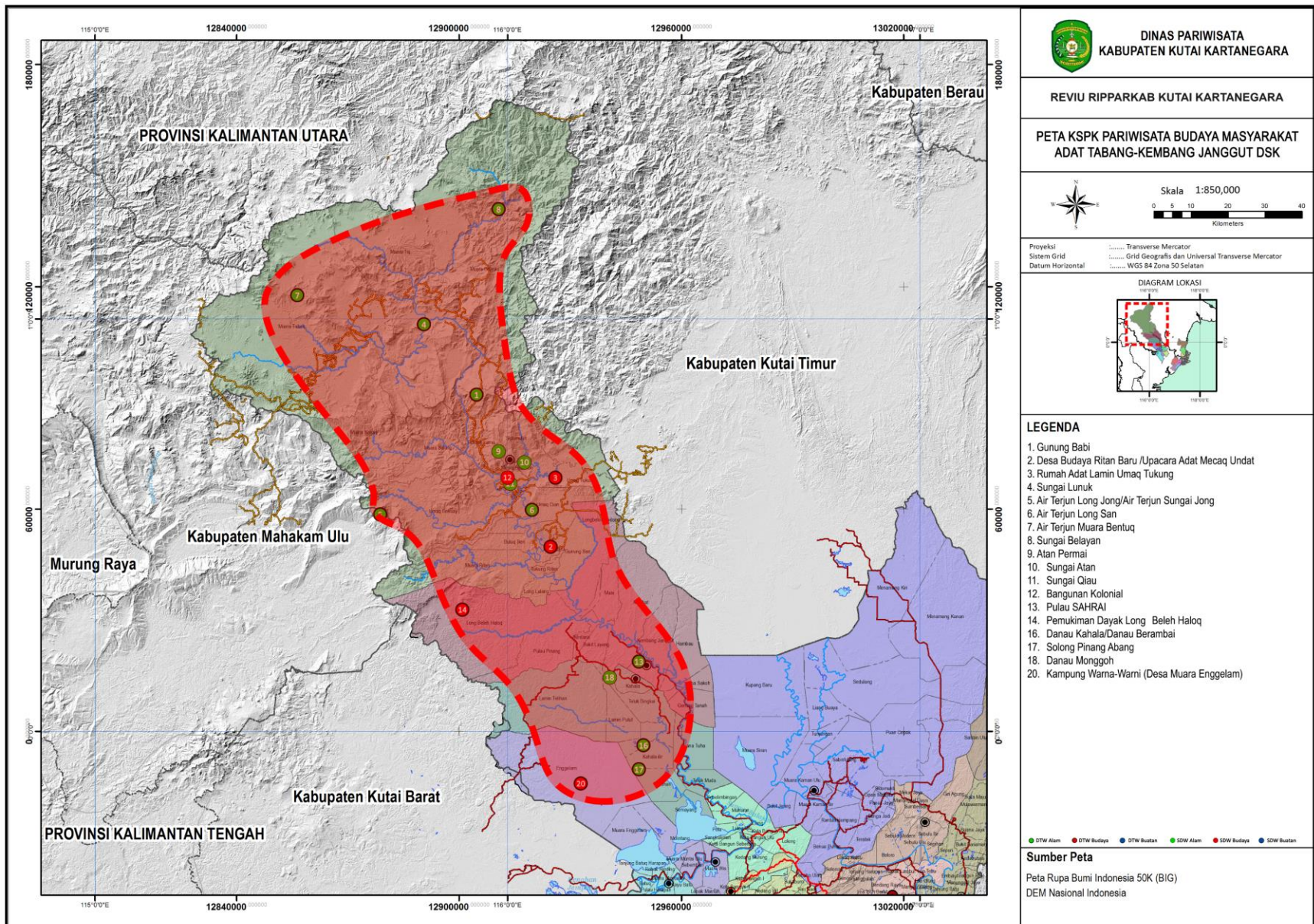
TAHUN	KONTRIBUSI PARIWISATA TERHADAP PDRB (%)	JUMLAH DAYA TARIK WISATA BERSTANDAR NASIONAL (unit)	JUMLAH DAYA TARIK WISATA BERSTANDAR INTERNASIONAL (unit)	JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN (orang)			LAMA TINGGAL (hari)		PENGELUARAN BERWISATA PER HARI (Rp)		JUMLAH TENAGA KERJA (orang)
				WISNUS	WISMAN	JUMLAH	WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN	
2026	8,65	-	-	950.000	1.250	951,250	4	5	Rp850.000	USD 160	3.280
2027	8,75	3	-	1.000.000	1.500	1,001,500	4	5	Rp1.000.000	USD 170	3.577
2028	8,90	4	-	1.100.000	2.000	1,102,000	4	5	Rp1.100.000	USD 180	4.081
2029	9,00	3	-	1.250.000	2.500	1,275,000	4	5	Rp1.250.000	USD 190	4.904
2030	10,00	3	1	1.500.000	5.000	1,505,000	4	6	Rp1.500.000	USD 250	6.020
2031	10,50	3	1	1.650.000	5.500	1,655,500	4	6	Rp1.750.000	USD 275	6.898
2032	10,75	3	1	1.800.000	7.500	1,875,000	4	6	Rp2.000.000	USD 300	8.152
2033	11,00	3	1	2.000.000	9.000	2,009,000	4	6	Rp2.250.000	USD 325	9.132
2034	11,15	4	1	2.150.000	10.000	2,160,000	4	6	Rp2.500.000	USD 350	10.286
2035	12,00	5	2	2.500.000	15.000	2,515,000	5	7	Rp3.000.000	USD 450	13.972
2036	12,15	5	2	2.750.000	17.500	2,767,500	5	7	Rp3.250.000	USD 475	16.279
2037	12,50	5	2	3.000.000	20.000	3,020,000	5	7	Rp3.500.000	USD 500	18.875
2038	12,75	5	2	3.250.000	22.500	3,272,500	5	7	Rp3.750.000	USD 550	21.817
2039	13,00	5	2	3.500.000	25.000	3,525,000	5	7	Rp3.800.000	USD 600	26.111
2040	13,25	5	2	3.750.000	27.500	3,777,500	5	7	Rp4.000.000	USD 750	30.220
2041	14,00	5	2	4.000.000	32.500	4,032,500	6	8	Rp4.500.000	USD 1.000	40.325
2042	14,25	5	2	4.500.000	35.000	4,535,000	6	8	Rp4.750.000	USD 1.100	53.353
2043	14,50	5	2	4.750.000	40.000	4,790,000	6	8	Rp5.000.000	USD 1.200	63.867
2044	14,75	5	2	5.000.000	45.000	5,045,000	6	8	Rp5.500.000	USD 1.350	77.615
2045	15,00	5	2	5.500.000	50.000	5,550,000	6	8	Rp6.000.000	USD 1.500	111.000

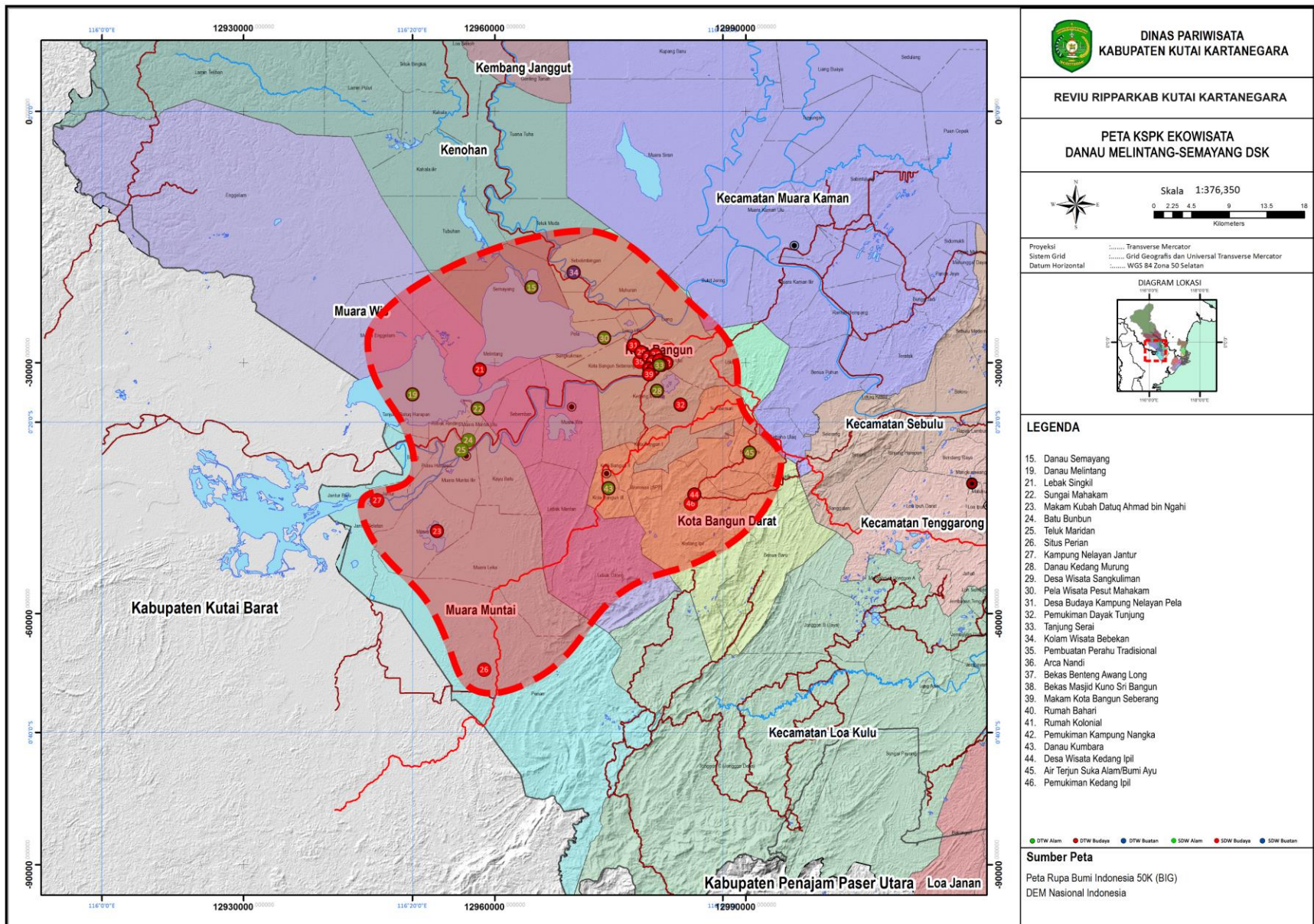
LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA NOMOR ...
TAHUN 2026
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN
2026-2045

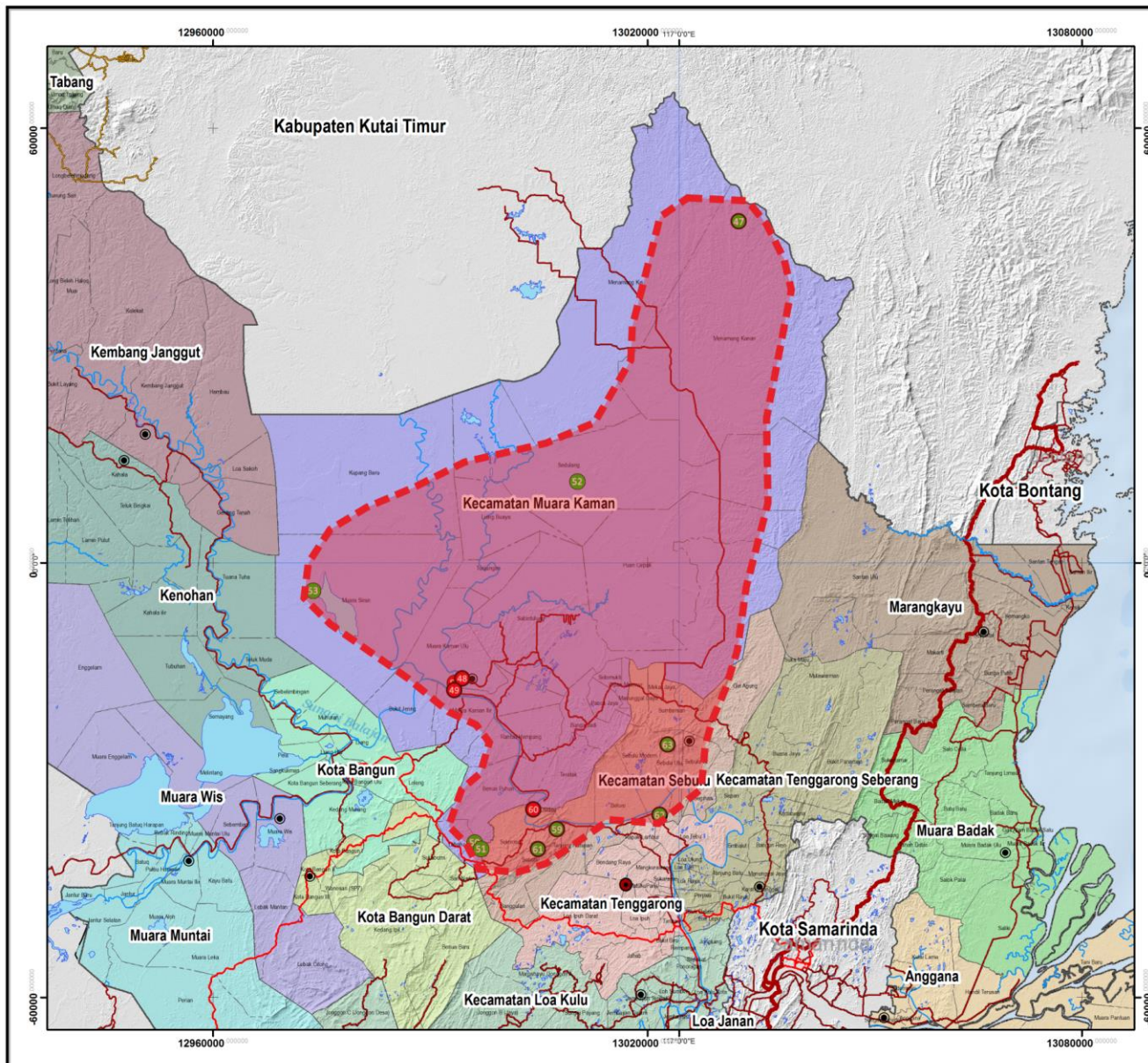
Perwilayahan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari:

1. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Budaya Masyarakat Adat Tabang-Kembang Janggut dan sekitarnya;
2. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Ekowisata Danau Melintang – Semayang dan sekitarnya;
3. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Pariwisata Sejarah Kerajaan Tertua Muara Kaman dan sekitarnya;
4. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Pariwisata Sejarah Kerajaan Tenggarong dan sekitarnya;
5. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Pariwisata Sejarah Perjuangan Sanga-Sanga – Anggana dan sekitarnya; dan
6. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Ekowisata Bahari Marangkayu – Muara Jawa dan sekitarnya.









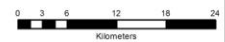
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

REVIU RIPPARKAB KUTAI KARTANEGARA

PETA KSPK PARIWISATA SEJARAH
KERAJAAN TERTUA MUARA KAMAN DSK

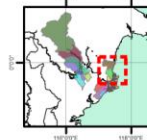


Skala 1:500,000



Proyeksi Transverse Mercator
Sistem Grid Grid Geografis dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal

DIAGRAM LOKASI



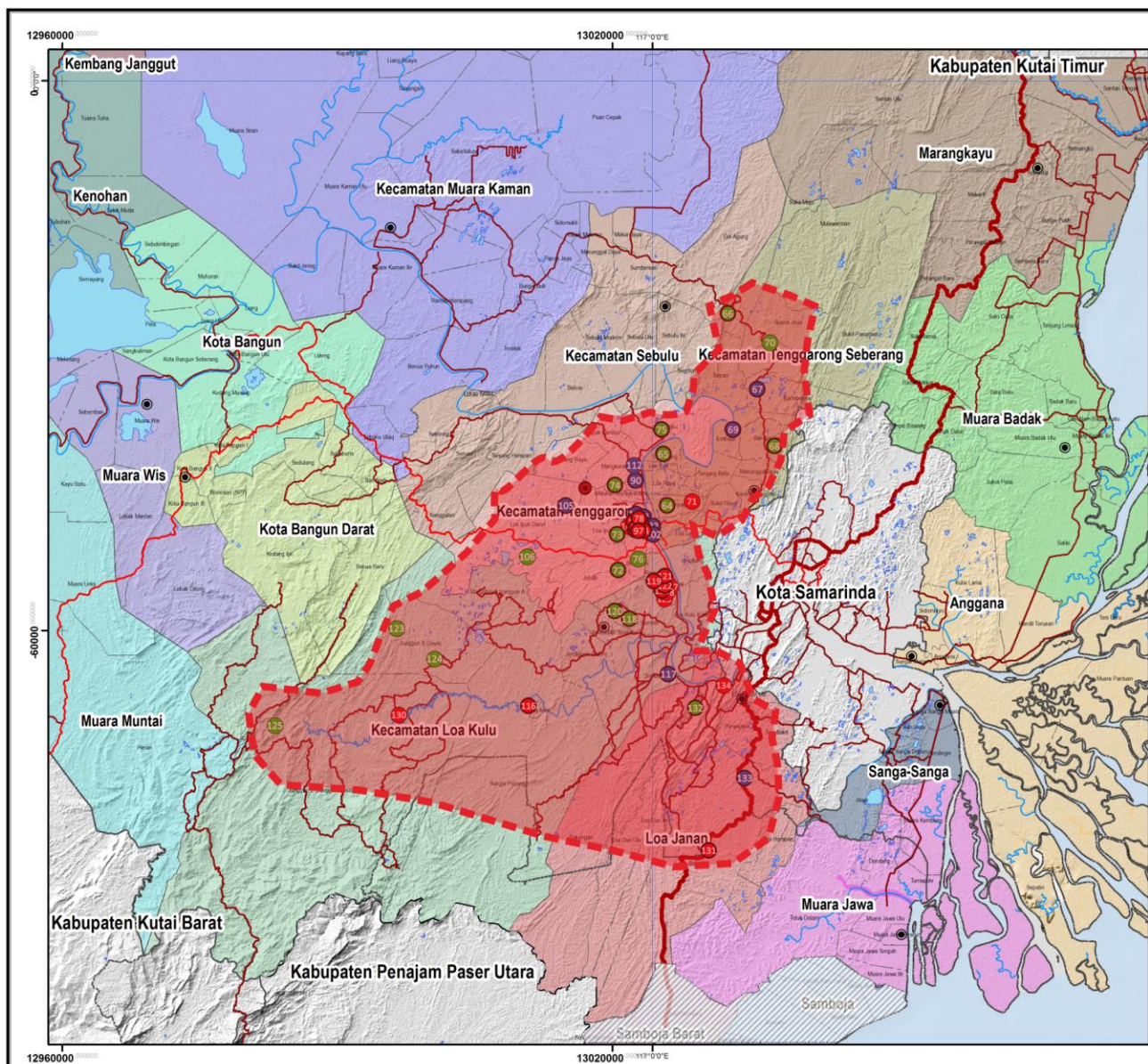
LEGENDA

47. Taman Nasional Kutai
48. Museum Situs Kerajaan Kutai Ing Martadipura
49. Monumen Muso Bin Salim
50. Air Terjun Lebah Ulaq
51. Goa Keraton
52. Cagar Alam Muara Kaman (Sungai Kedang Rantau)
53. Tahura Muara Siran/Goa Wisata Gambut
54. Candi Tanjung Serai
59. Goa Sanggulan
60. Desa Budaya Leka Kidau
61. Air Terjun Permai
62. Air Terjun Air Laspirin
63. Air Terjun Batu Mulla

DTW Alam DTW Budaya DTW Buanan SDW Alam SDW Budaya SDW Buanan

Sumber Peta

Peta Rupa Bumi Indonesia 50K (BIG)
DEM Nasional Indonesia



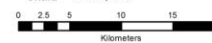
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

REVIU RIPPARKAB KUTAI KARTANEGARA

PETA KSPK PARIWISATA SEJARAH
KERAJAAN TENGGARONG DSK

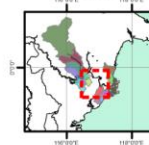


Skala 1:400,000



Proyeksi Transverse Mercator
Sistem Grid Grid Geografis dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal WGS 84 Zona 50 Selatan

DIAGRAM LOKASI

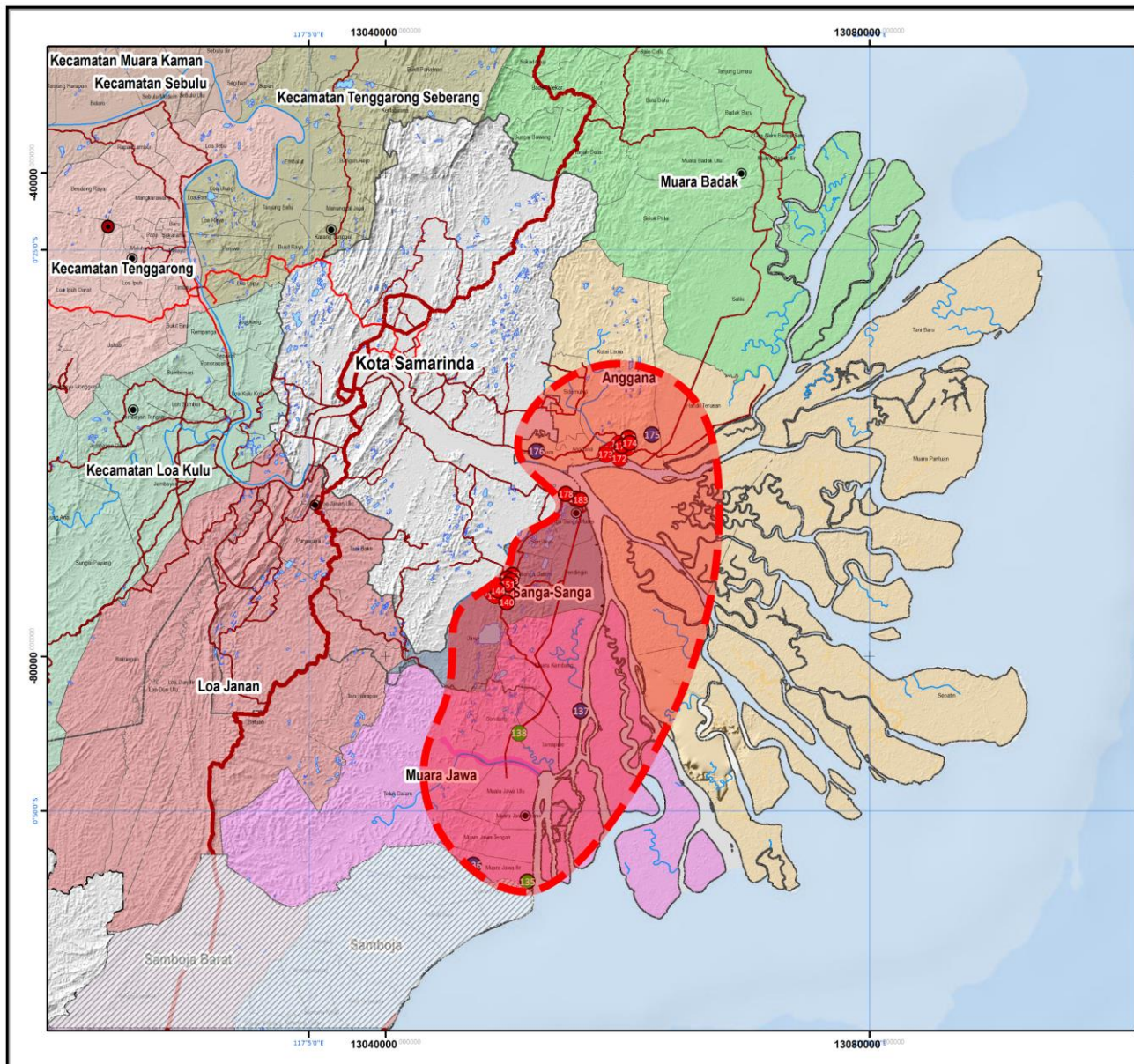


LEGENDA

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 64. Air Terjun Periwja | 100. Taman Pedestrian |
| 65. Kawasan Danau Eks Tambang | 101. Taman Kincir |
| 66. Desa Loa Uluang | 102. Taman Kota Raja Tenggarong |
| 67. Goa Batu Gelap | 103. Jam Bertong |
| 68. Family Waterpark Tenggarong | 104. Family Waterpark Tenggarong |
| 69. Bukit Mahoni | 105. Kembang Jangg |
| 70. Taman Budaya Desa Embalut | 106. Wisata Danau |
| 71. Taman Lebat | 107. Desa Budaya Leka Dema |
| 72. Gunung Bukit Biru | 108. Desa Budaya Bin Samar |
| 73. Agroforestry | 109. Kedang Lampong |
| 74. Waduk dan Hutan Kota Panji | 110. Rumah Belanda Panji |
| 75. Sukame | 111. Rumah Besar Kesultanan |
| 76. Taman Kurna Cempaka | 112. Kutai Kartanegara |
| 77. Komplek Makam Raja | 113. Tiang Istana Keraton Kesultanan Kukar |
| 78. Komplek Makam Pahlawan | 114. Sirkuit Bendang |
| 79. Awang Long Sencot | 115. Wisata Silat Jembayan |
| 80. Tiang Telephone | 116. Tugu Pemandirian Jepang |
| 81. Gedung Dharma Wanita | 117. Rumah Sakit Kolonial |
| 82. Jembatan Besi | 118. Desa Budaya Lung Anai |
| 83. Museum Muawaman | 119. Istana Bunga Jembayan |
| 84. Kedaton Kutai Kartanegara | 120. Agrowisata Mapantama |
| 85. Makam Diraja Kelambu Kuning | 121. Desa Wisata Sumber Sari |
| 86. Masjid Jam' Adji Amir Hasanoeedin | 122. Air Terjun Bukit Biru |
| 87. Makam Abu Thalib | 123. Situs Gedung Atap Lengking |
| 88. Makam Pangren Manglunggoro | 124. Peninggalan Rumah Belanda |
| 89. Museum Kayu Tuah Hinta | 125. Dinas GDM |
| 90. LADAYA (Ladang Budaya) | 126. Air Terjun Kaham Pesut |
| 91. Desa Budaya Pondok Labu | 127. Air Terjun Gunung Batu Lepah |
| 92. Pasar Seni Malay | 128. Air Terjun Kaham Haluan |
| 93. Teh Bawang Dayak Tea Wei | 129. Kantor Magazium |
| 94. Teh Serai | 130. Pasar Bahari |
| 95. Kembangan Khas Dayak | 131. Desa Budaya Suku Dayak Benuaq |
| 96. Festival EIFAF | 132. Desa Wisata Batuan Balla |
| 97. Event FKR | 133. Pembibitan Hortikultura |
| 98. Planetarium Jagat Raya | 134. Air Terjun Loa Duri |
| 99. Taman Wisata Pulau Kumala | 135. Taman Wisata Emastri |
| | 136. Garden & Resort Batuan |
| | 137. Situs Batu Ulin |

Sumber Peta

Peta Rupa Bumi Indonesia 50K (BIG)
DEM Nasional Indonesia



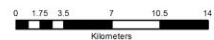
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

REVIU RIPPARKAB KUTAI KARTANEGARA

PETA KSPK PARIWISATA SEJARAH
PERJUANGAN SANGA-SANGA-ANGGANA DSK

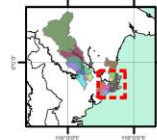


Skala 1:300,000



Proyeksi Transverse Mercator
Sistem Grid Grid Geografis dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal WGS 84 Zona 50 Selatan

DIAGRAM LOKASI



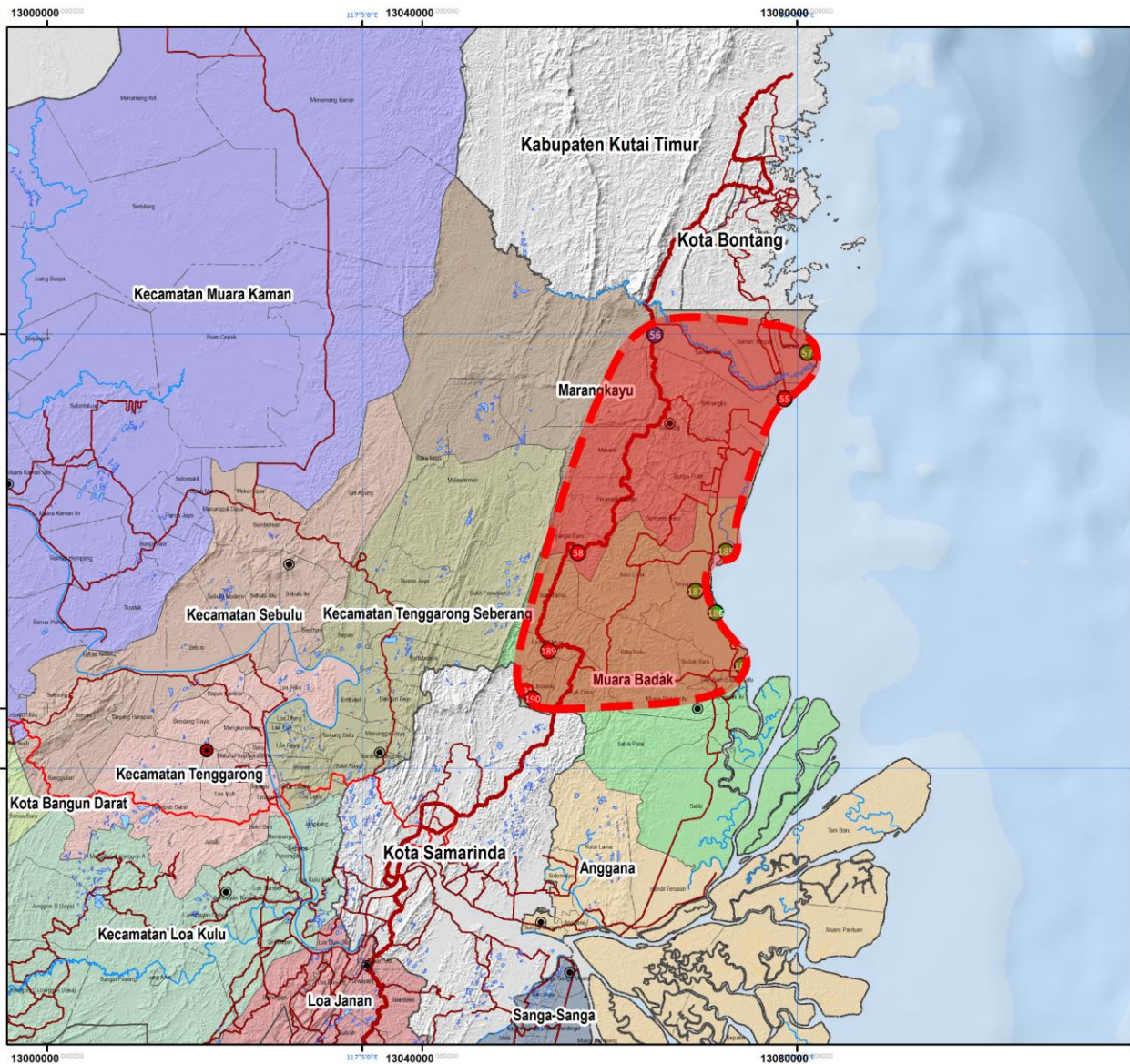
LEGENDA

- | | |
|--|--|
| 135. Wisata Mangrove | 159. Bangsal Hutan 53 |
| 136. Waterboom Handil Residence 77 | 160. Bangsal Hutan 56 |
| 137. Pemandiran Air Panas Mahkota Dondang | 161. Bangsal Hutan C132 |
| 138. Sumber Air Panas Dondang | 162. Bangsal Hutan C131 |
| 139. Cagar Budaya Penjara Sanga-Sanga | 163. Bangsal Hutan B11 |
| 140. Tugu Pembantaian | 164. Bangsal Distrik IV B21 |
| 141. Gedung Sandisa | 165. Bangsal Distrik IV C5 |
| 142. Monumen Minyak | 166. Rumah Belanda 49 Distrik IV |
| 143. Monumen Perjuangan Merah Putih | 167. Rumah Belanda C23 Distrik IV |
| 144. Taman Makam Pahlawan Wadah Batu | 168. Rumah Belanda C 24 Distrik IV |
| 145. Museum Perjuangan Merah Putih | 169. Bangsal Distrik VI 29 |
| 146. Klinik Pertamina/ Rumah Sakit Expan Bangunan Belanda 1898 | 170. Rumah Bahari |
| 147. Kuburan Tajau Gunung Selendang (Situs Gunung Selendang) | 171. Rumah Cina |
| 148. Goa Jepang | 172. Pembangkit Listrik dan Mesin Kolonial |
| 149. Makam Peta Lolongcong/ Syekh Sayyid Shalahuddin Al Basir | 173. Makam Sultan Aji Raja Mahkota dan Syekh Habib Tunggang Parangan |
| 150. Kantor Pos Pertama | 174. Makam Sultan Aji Dilanggar |
| 151. Situs Kubu Pertahanan Merah Putih (Tilik Pertemuan 1-9) | 175. Puncak Bukit Jahetan Layar |
| 152. Tajau | 176. Waterpark KPJ Playland Anggana |
| 153. Bendera Merah Putih | 177. Peninggalan Suling Belanda |
| 154. Senjata Api | 178. Peninggalan Gardu Belanda |
| 155. Bekas Asrama Tentara Belanda | 179. Tiang Pagar Masjid |
| 156. Kantor Pertamina | 180. Makam H. Lasuan Bonte |
| 157. Bangsal Hutan C17 51 | 181. Makam Aji Pangeran Mandarayu |
| 158. Bangsal Hutan C18 52 | 182. Rumah Belanda 1 |
| | 183. Pemukiman Kuno |
| | 184. Bangunan Kolonial |

● OTW Alam ● OTW Budaya ● OTW Buan ● SDW Alam ● SDW Budaya ● SDW Buan

Sumber Peta

Peta Rupa Bumi Indonesia 50K (BIG)
DEM Nasional Indonesia



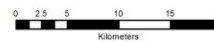
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

REVIU RIPPARKAB KUTAI KARTANEGARA

PETA KSPK EKOWISATA BAHARI
MARANGKAYU-MUARA BADAK DSK

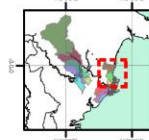


Skala 1:400,000



Proyeksi Transverse Mercator
Sistem Grid Grid Geografis dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal

DIAGRAM LOKASI



LEGENDA

- 55. Desa Wisata Kersik
- 56. Tugu Khatulistiwa/Equator
- 57. Pantai Sampayau
- 58. Kampung Kopi Luwak
- 185. Pantai Pelangi
- 186. Hutan Mangrove
- 187. Pantai Indah Sembera
- 188. Pantai Malabar
- 189. Desa Wisata Gubuk Semar
- 190. Desa Budaya Sungai Bawang
- 191. Pemakaman Kristen

DTW Alam DTW Budaya DTW Binaan SDW Alam SDW Budaya SDW Binaan

Sumber Peta

Peta Rupa Bumi Indonesia 50K (BIG)
DEM Nasional Indonesia

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA NOMOR ...
TAHUN 2026
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN
2026-2045

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi:

1. Pembangunan destinasi pariwisata
2. Pembangunan industri pariwisata
3. Pembangunan pemasaran pariwisata
4. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan

Tabel 1 Indikasi Program dan Kegiatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
1. Membangun Kawasan Danau Semayang dan Danau Melintang dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap ekosistem danau, daerah aliran sungai (DAS), dan budaya masyarakat pesisir danau dan sungai melalui pengembangan pariwisata berbasis konservasi	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Penyusunan, penetapan, dan sosialisasi rencana pengembangan Kawasan Ekowisata Danau Melintang-Semayang dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK).																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV - Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perencanaan pembangunan - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang tata ruang - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang lingkungan hidup - Pemerintah Kecamatan
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Rapat koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pengembangan Kawasan Ekowisata Danau Melintang-Semayang dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK).																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perencanaan pembangunan - Pemerintah Kecamatan - Pelaku usaha pariwisata/asosiasi usaha dan profesi pariwisata - Perguruan tinggi - Lembaga Masyarakat Pencinta Lingkungan Hidup
2. Membangun Kawasan Marang	Program peningkatan	Penyusunan, penetapan, dan																OPD Kabupaten Kutai	OPD Kalimantan Timur bidang Kelautan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
Kayu-Muara Badak dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) untuk meningkatkan perlindungan terhadap kawasan ekosistem laut dan pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara.	daya tarik destinasi pariwisata	sosialisasi rencana pengembangan Kawasan Ekowisata Bahari Marangkayu-Muara Badak dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK).																Kartanegara bidang kepariwisataan	– Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perencanaan pembangunan – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang tata ruang – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang lingkungan hidup - Pemerintah Kecamatan
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Rapat koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pengembangan Kawasan Ekowisata Bahari Marangkayu-Muara Badak dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK).																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perencanaan pembangunan – Pemerintah Kecamatan – Pelaku usaha pariwisata/ asosiasi usaha dan profesi pariwisata – Perguruan tinggi – Lembaga Masyarakat Pencinta Lingkungan Hidup
3. Membangun Kawasan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Muara Wis dan sekitarnya sebagai Kawasan	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Penyusunan, penetapan, dan sosialisasi rencana pengembangan Kawasan Budaya Masyarakat Adat																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perencanaan pembangunan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) untuk meningkatkan perlindungan terhadap budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan.		Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Muara Wis dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK).																	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang tata ruang – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kebudayaan – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pendidikan – Pemerintah Kecamatan
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Rapat koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pengembangan Kawasan Budaya Masyarakat Adat Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Muara Wis dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK).																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perencanaan pembangunan – Pemerintah Kecamatan – Pelaku usaha pariwisata/ asosiasi usaha dan profesi pariwisata – Perguruan tinggi – Lembaga Masyarakat Pemerhati budaya adat
	4. Membangun Kawasan Muara Kaman - Sebulu dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata	Penyusunan, penetapan, dan sosialisasi rencana pengembangan Kawasan Pariwisata Sejarah Kerajaan																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perencanaan pembangunan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
Kabupaten (KSPK) yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap warisan sejarah kerajaan tertua di Indonesia dan ekosistem hutan hujan tropis Kalimantan.		Tertua Muara Kaman – Sebulu dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK).																	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang tata ruang – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kebudayaan – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pendidikan – Pemerintah Kecamatan
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Rapat koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pengembangan Kawasan Kawasan Pariwisata Sejarah Kerajaan Tertua Muara Kaman – Sebulu dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK).																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perencanaan pembangunan – Pemerintah Kecamatan – Pelaku usaha pariwisata/asosiasi usaha dan profesi pariwisata – Perguruan tinggi – Lembaga Masyarakat Pemerhati budaya adat
5. Membangun Kawasan Tenggarong - Tenggarong Seberang dan sekitarnya sebagai	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Penyusunan, penetapan, dan sosialisasi rencana pengembangan Kawasan Sejarah Kerajaan																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Bidang Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur – Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) yang berfungsi sebagai etalase sejarah Kerajaan Kutai Kartanegara dan Indonesia.		Tenggarong dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK).																	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perencanaan pembangunan – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang tata ruang – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kebudayaan – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pendidikan – Pemerintah Kecamatan
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Rapat koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pengembangan Kawasan Kawasan Pariwisata Sejarah Kerajaan Tenggarong dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK).																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perencanaan pembangunan – Pemerintah Kecamatan – Pelaku usaha pariwisata/ asosiasi usaha dan profesi pariwisata – Perguruan tinggi – Lembaga Masyarakat Pemerhati sejarah
6. Membangun Kawasan Sanga-sanga, Anggana, Muara Jawa dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Penyusunan, penetapan, dan sosialisasi rencana pengembangan Kawasan Sejarah Perjuangan Sanga																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) – OPD Bidang Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
Pariwisata Kabupaten (KSPK) untuk meningkatkan perlindungan terhadap sejarah perjuangan kemerdekaan dan pertambangan awal di Kalimantan		sanga-Anggana-Muara Jawa dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK).																	– Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perencanaan pembangunan – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang tata ruang – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kebudayaan – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pendidikan – Pemerintah Kecamatan
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Rapat koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pengembangan Kawasan Kawasan Pariwisata Sejarah Perjuangan Sanga sanga-Anggana-Muara Jawa dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK).																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perencanaan pembangunan – Pemerintah Kecamatan – Pelaku usaha pariwisata/ asosiasi usaha dan profesi pariwisata – Perguruan tinggi – Lembaga Masyarakat Pemerhati sejarah

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
7. Membangun keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan KSPK dengan Kawasan Ibu Kota Negara (IKN), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Taman Nasional Kutai, Kawasan Danau Kaskade Mahakam, dan sekitarnya, serta Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP), dan kawasan lainnya	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Rapat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan dan pengelolaan KSPK dengan Ibu Kota Negara (IKN), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Taman Nasional Kutai, Kawasan Danau Kaskade Mahakam, dan sekitarnya dan sekitarnya, serta Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) dan sekitarnya.																OPD Kota Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang kepariwisataan Kementerian bidang kepariwisataan	- Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perencanaan pembangunan - OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang perencanaan pembangunan - Kementerian bidang perencanaan pembangunan nasional - Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN)
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Fasilitasi kolaborasi dan penandatanganan Nota Kesepahaman kemitraan pemerintah dan dunia usaha dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan dan pengelolaan terpadu KSPK dengan KSPN, Taman Nasional Kutai dan																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Provinsi Kalimantan Timur kepariwisataan - Kementerian bidang kepariwisataan - Asosiasi usaha pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		sekitarnya, Kawasan Danau Kaskade Mahakam dan sekitarnya, serta KSPP di Provinsi Kalimantan Timur																	
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program prioritas pembangunan dan pengelolaan terpadu KSPK dengan KSPN Taman Nasional Kutai dan sekitarnya, Kawasan Danau Kaskade Mahakam dan sekitarnya, serta KSPP di Provinsi Kalimantan Timur																OPD KotaKutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perencanaan pembangunan - OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang kepariwisataan - Kementerian bidang kepariwisataan - Asosiasi usaha pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara
8. Mengembangkan pusat pelayanan primer pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Kecamatan Tenggarong yang berfungsi sebagai pusat penyediaan	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan lintas sektor pada pusat pelayanan primer Tenggarong																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perencanaan pembangunan - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang tata ruang - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang penanaman modal

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1	2 0 3 2	2 0 3 3	2 0 3 4	2 0 3 5	2 0 3 6 - 2 0 4 0	2 0 4 1 - 2 0 4 5	INSTANSI PENANGGUNG- JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
fasilitas pariwisata dan fasilitas umum berstandar internasional, serta pusat penyebaran kegiatan wisata ke seluruh wilayah kabupaten																- Pelaku usaha pariwisata/ asosiasi usaha dan profesi pariwisata - Pemerintah Kecamatan
	Program pengembangan iklim penanaman modal	Penyusunan, penetapan, dan sosialisasi rencana investasi pengembangan Kecamatan Tenggarong dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan primer pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang penanaman modal	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perencanaan pembangunan - Pelaku usaha pariwisata/ asosiasi usaha dan profesi pariwisata - Pemerintah Kecamatan
	Program pengembangan iklim penanaman modal	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana investasi pusat pelayanan primer Tenggarong													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang penanaman modal	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perencanaan pembangunan - Pelaku usaha pariwisata/ asosiasi usaha dan profesi pariwisata - Pemerintah Kecamatan
9. Mengembangkan pusat pelayanan sekunder pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Kelurahan Sanga-sanga Dalam di Kecamatan Sanga-	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan lintas sektor pada pusat pelayanan													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang penanaman modal	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perencanaan pembangunan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
sanga dan Desa Kota Bangun Ulu di Kecamatan Kota Bangun yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan pariwisata di KSPK		sekunder di Kelurahan Sanga-sanga Dalam di Kecamatan Sanga-sanga dan Desa Kota Bangun Ulu di Kecamatan Kota Bangun																	- Pelaku usaha pariwisata/asosiasi usaha dan profesi pariwisata - Pemerintah Kecamatan
	Program pengembangan iklim penanaman modal	Penyusunan, penetapan, dan sosialisasi rencana investasi pengembangan pusat pelayanan sekunder Kelurahan Sanga-sanga Dalam di Kecamatan Sanga-sanga dan Desa Kota Bangun Ulu di Kecamatan Kota Bangun																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang penanaman modal	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perencanaan pembangunan - Pelaku usaha pariwisata/asosiasi usaha dan profesi pariwisata - Pemerintah Kecamatan
	Program pengembangan iklim penanaman modal	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana investasi pusat pelayanan sekunder Kelurahan Sanga-sanga Dalam di Kecamatan Sanga-sanga dan Desa Kota Bangun Ulu di																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang penanaman modal	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perencanaan pembangunan - Pelaku usaha pariwisata/asosiasi usaha dan profesi pariwisata - Pemerintah Kecamatan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		Kecamatan Kota Bangun																	
10. Meningkatkan aksesibilitas dari Kota Balikpapan, Kota Samarinda, IKN dan kabupaten/kota sekitarnya sebagai sumber pasar utama.	Program pengelolaan aksesibilitas	Rapat koordinasi dalam rangka peningkatan aksesibilitas menuju Kabupaten Kutai Kartanegara dari Kota Balikpapan, Kota Samarinda, IKN dan kabupaten/kota sekitarnya																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara Bidang Bina Marga dan Perhubungan	– Kementerian PUPR – Kemneterian Perhubungan – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang Bina Marga – OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang perhubungan – OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang kepariwisataan
	Program pengelolaan aksesibilitas	Rapat evaluasi program peningkatan aksesibilitas menuju Kabupaten Kutai Kartanegara dari dari Kota Balikpapan, Kota Samarinda, IKN dan kabupaten/kota sekitarnya																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara Bidang Bina Marga dan Perhubungan	– Kementerian PUPR – Kemneterian Perhubungan – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang Bina Marga – OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang perhubungan – OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang kepariwisataan
11. Mengembangkan angkutan wisata dari Bandara Sepinggan Balikpapan dan Aji	Program penyelenggara n lalu lintas dan angkutan jalan	Rapat koordinasi dalam rangka penyiapan penyediaan angkutan wisata																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perhubungan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda menuju Kutai Kartanegara		yang menghubungkan Bandara Sepinggan Balikpapan dan Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda menuju Kutai Kartanegara																	– Organisasi angkutan darat Kabupaten Kutai Kartanegara
	Program penyelenggaraa n lalu lintas dan angkutan jalan	Pengadaan, operasionalisasi, dan pemeliharaan angkutan wisata yang menghubungkan Bandara Sepinggan Balikpapan dan Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda menuju Kutai Kartanegara																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perhubungan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – Organisasi angkutan darat Kabupaten Kutai Kartanegara
	Program penyelenggaraa n lalu lintas dan angkutan jalan	Penyusunan, penetapan, dan sosialisasi sistem pengelolaan angkutan wisata yang menghubungkan Bandara Sepinggan Balikpapan dan Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perhubungan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – Organisasi angkutan darat Kabupaten Kutai Kartanegara – Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		menuju Kutai Kartanegara																	
	Program penyelenggaraa n lalu lintas dan angkutan jalan	Pelatihan dan pendampingan pelayanan prima dan pemanduan wisata bagi supir dan asisten angkutan wisata.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perhubungan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – Organisasi angkutan darat Kabupaten Kutai Kartanegara – Perguruan tinggi
12. Meningkatkan ketersediaan informasi pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara di ruas jalan tol bebas hambatan Balikpapan-Samarinda (Balsam), ruas jalan IKN-Tenggarong dan ruas jalan utama lainnya	Program pemasaran pariwisata	Rapat koordinasi ketersediaan informasi pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara di ruas jalan tol bebas hambatan Balikpapan-Samarinda (Balsam), ruas jalan IKN-Tenggarong dan ruas jalan utama lainnya																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perhubungan – Pengelola jalan bebas hambatan – Pengelola usaha pariwisata
	Program pemasaran pariwisata	Penyusunan materi serta pengadaan dan pemasangan media informasi pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara di ruas jalan tol bebas hambatan Balikpapan-																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perhubungan – Pengelola jalan bebas hambatan – Pengelola usaha pariwisata – Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		Samarinda (Balsam), ruas jalan IKN-Tenggarong dan ruas jalan utama lainnya																	
13. Meningkatkan kualitas pelayanan jalan, angkutan umum, dan papan petunjuk arah yang menghubungkan Bandara Sepinggang Balikpapan, Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda, pintu keluar tol Balikpapan-Samarinda, Jalan Menuju IKN, dan jalan utama menuju Samarinda dengan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, serta daya tarik wisata unggulan	Program penyelenggaraa n jalan	Rapat koordinasi dalam rangka identifikasi kebutuhan dan sinkronisasi program peningkatan kualitas pelayanan jalan yang menghubungkan Bandara Sepinggang Balikpapan, Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda, pintu keluar tol Balikpapan-Samarinda, Jalan Menuju IKN, dan jalan utama menuju Samarinda dengan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, serta daya tarik wisata unggulan																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pekerjaan umum	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perhubungan – Pengelola Bandar Udara Sepinggang Balikpapan dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda – Pengelola jalan bebas hambatan – Pengelola usaha pariwisata – Pemerintah Kecamatan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
Kabupaten Kutai Kartanegara		Kabupaten Kutai Kartanegara																	
	Program penyelenggaraa n lalu lintas dan angkutan jalan	Rapat koordinasi dalam rangka identifikasi kebutuhan dan sinkronisasi program peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum dan papan petunjuk arah yang menghubungkan Bandara Sepinggan Balikpapan, Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda, pintu keluar tol Balikpapan-Samarinda, Jalan Menuju IKN, dan jalan utama menuju Samarinda dengan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, serta daya tarik wisata unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perhubungan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – Pengelola Bandar Udara Sepinggan Balikpapan dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda – Pengelola jalan bebas hambatan – Pengelola usaha pariwisata – Pemerintah Kecamatan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program penyelenggaraa n jalan	Perbaikan dan/atau pelebaran jalan kota yang menghubungkan Bandara Sepingg an Balikpapan, Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda, pintu keluar tol Balikpapan-Samarinda, Jalan Menuju IKN, dan jalan utama menuju Samarinda dengan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, serta daya tarik wisata unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pekerjaan umum	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perhubungan – Pengelola Bandar Udara Sepingg an Balikpapan dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda – Pengelola jalan bebas hambatan – Pengelola usaha pariwisata – Pemerintah Kecamatan
	Program penyelenggaraa n lalu lintas dan angkutan jalan	Sosialisasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penambahan rute dan kualitas pelayanan angkutan umum																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perhubungan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – Pengelola Bandar Udara Sepingg an Balikpapan dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		yang menghubungkan Bandara Sepinggan Balikpapan, Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda, pintu keluar tol Balikpapan-Samarinda, Jalan Menuju IKN, dan jalan utama menuju Samarinda dengan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, serta daya tarik wisata unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara																	– Pengelola jalan bebas hambatan – Pengelola usaha pariwisata – Pemerintah Kecamatan
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pelatihan dan pendampingan pelayanan prima dan pemanduan wisata bagi supir dan asisten angkutan umum.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perhubungan – Pengelola Bandar Udara Sepinggan Balikpapan dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda – Pengelola jalan bebas hambatan – Pengelola usaha pariwisata – Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program penyelenggaraa n lalu lintas dan angkutan jalan	Pembuatan dan pemasangan papan petunjuk arah dari Bandara Sepinggan Balikpapan, Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda, pintu keluar tol Balikpapan-Samarinda, Jalan Menuju IKN, dan jalan utama menuju Samarinda dengan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, serta daya tarik wisata unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perhubungan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – Pengelola Bandar Udara Sepinggan Balikpapan dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda – Pengelola jalan bebas hambatan – Pemerintah Kecamatan
14. Mengembangkan angkutan wisata yang menghubungkan pusat pelayanan primer dengan pusat pelayanan sekunder dan seluruh daya tarik wisata di	Program penyelenggaraa n lalu lintas dan angkutan jalan	Rapat koordinasi dalam rangka identifikasi kebutuhan angkutan wisata dalam Kabupaten Kutai Kartanegara yang menghubungkan pusat pelayanan primer dan																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perhubungan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – Organisasi angkutan darat Kabupaten Kutai Kartanegara

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
Kabupaten Kutai Kartanegara.		sekunder pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, serta daya tarik wisata.																	
	Program penyelenggaraa n lalu lintas dan angkutan jalan	Pengadaan, operasionalisasi, dan pemeliharaan angkutan wisata dalam Kabupaten Kutai Kartanegara yang menghubungkan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, serta daya tarik wisata.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perhubungan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – Perusahaan penyedia angkutan wisata
	Program penyelenggaraa n lalu lintas dan angkutan jalan	Penyusunan, penetapan, dan sosialisasi sistem pengelolaan angkutan wisata dalam Kabupaten Kutai Kartanegara yang menghubungkan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Kabupaten Kutai																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perhubungan	– Bagian Hukum Setda Kabupaten Kutai Kartanegara – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – Perguruan tinggi yang memiliki keahlian bidang transportasi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		Kartanegara, serta daya tarik wisata.																	
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pelatihan dan pendampingan pelayanan prima dan pemanduan wisata bagi supir dan asisten angkutan wisata dalam kota.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perhubungan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan - Perguruan tinggi - Aosisasi pelaku angkutan wisata
15. Meningkatkan kualitas pelayanan jalan menuju pusat pelayanan pariwisata dan daya tarik wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara.	Program penyelenggaraa n jalan	Rapat koordinasi dalam rangka identifikasi kebutuhan jalan menuju pusat pelayanan pariwisata dan daya tarik wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pekerjaan umum	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan - Pemerintah Kecamatan
	Program penyelenggaraa n jalan	Pembangunan, perbaikan, pelebaran jalan kabupaten (termasuk jembatan) serta menuju pusat pelayanan pariwisata dan daya tarik wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pekerjaan umum	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan - Pemerintah Kecamatan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
16. Meningkatkan upaya penelitian dalam rangka menggali nilai penting keanekaragaman hayati, keragaman geologi, sejarah, dan budaya sebagai keunggulan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka meningkatkan daya saing produk pariwisata.	Program penelitian dan pengembangan daerah	Rapat koordinasi pengembangan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam pelaksanaan penelitian untuk menggali nilai penting keanekaragaman hayati, keragaman geologi, sejarah, dan budaya Kabupaten Kutai Kartanegara.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang penelitian dan pengembangan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang lingkungan hidup - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kebudayaan - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pendidikan - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan - Perguruan tinggi
	Program penelitian dan pengembangan daerah	Pelaksanaan dan sosialisasi hasil penelitian keanekaragaman hayati, keragaman geologi, sejarah, dan budaya Kabupaten Kutai Kartanegara.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang penelitian dan pengembangan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang lingkungan hidup - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kebudayaan - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pendidikan - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan - Perguruan tinggi
17. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap sumber daya alam dan budaya yang	Program pengelolaan keanekaragaman hayati	Penyusunan, penetapan, dan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang lingkungan hidup	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan - Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
menjadi keunggulan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.		tentang perlindungan terhadap sumber daya alam bernilai penting yang menjadi keunggulan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.																	
	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Penyusunan, penetapan, dan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati tentang perlindungan terhadap sumber daya budaya bernilai penting yang menjadi keunggulan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang lingkungan hidup	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan - Perguruan tinggi
	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Bupati tentang perlindungan terhadap sumber																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang lingkungan hidup - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kebudayaan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		daya alam dan budaya yang menjadi keunggulan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.																perlindungan masyarakat	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan - Perguruan tinggi
18. Mengembangkan daya tarik wisata unggulan berbasis danau, sungai, keragaman geologi, serta flora dan fauna khas Kalimantan menjadi daya tarik wisata berstandar nasional dan internasional.	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Penyusunan, penetapan, dan sosialisasi kriteria dan pedoman pengembangan daya tarik wisata unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai standar nasional dan internasional, termasuk kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	Perguruan tinggi
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pelatihan dan pendampingan penerapan pedoman pengembangan daya tarik wisata unggulan																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		Kabupaten Kutai Kartanegara.																	
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Fasilitasi kemitraan antara pengelola daya tarik wisata unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan dunia usaha untuk pemanfaatan dana tanggung jawab sosial (<i>Corporate Social Responsibility – CSR</i>).																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Pengelola daya tarik wisata - KADIN
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Fasilitasi kemitraan antara pengelola daya tarik wisata unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pengelola daya tarik wisata lain di sekitarnya.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	Pengelola daya tarik wisata
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pemantauan dan evaluasi pengembangan daya tarik wisata unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	Asosiasi usaha dan profesi pariwisata kab/kota

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
19. Mengembangkan desa dan kampung wisata bertema sejarah, budaya, kuliner, kriya dan konservasi untuk meningkatkan kualitas dan keragaman pengalaman berwisata.	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Sosialisasi dan pelatihan pengembangan desa dan kampung wisata bertema sejarah, budaya, kuliner, kriya dan konservasi kepada masyarakat, Pemerintah Kelurahan, dan Pemerintah Kecamatan.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perencanaan pembangunan - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pemberdayaan masyarakat - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kebudayaan - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Kelurahan - Pelaku usaha pariwisata/ asosiasi usaha dan profesi pariwisata
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pendampingan pengembangan dan pengelolaan produk pariwisata kampung wisata bertema sejarah, budaya, kuliner, kriya dan konservasi kepada masyarakat, Pemerintah Kelurahan, dan Pemerintah Kecamatan.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perencanaan pembangunan - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pemberdayaan masyarakat - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kebudayaan - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Kelurahan - Pelaku usaha pariwisata/ asosiasi usaha dan profesi pariwisata
20. Mengembangkan penelitian dalam rangka menggali nilai penting sejarah Kerajaan Kutai untuk	Program penelitian dan pengembangan daerah	Rapat koordinasi pengembangan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam pelaksanaan penelitian untuk																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang penelitian dan pengembangan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kebudayaan - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pendidikan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
meningkatkan nilai dan daya saing produk pariwisata		menggali nilai penting sejarah Kerajaan Kutai untuk meningkatkan nilai dan daya saing produk pariwisata																	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan - Kesultanan Kutai Kartanegara - Perguruan tinggi
	Program penelitian dan pengembangan daerah	Pelaksanaan dan sosialisasi hasil penelitian nilai penting sejarah Kerajaan Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang penelitian dan pengembangan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kebudayaan - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pendidikan - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan - Kesultanan Kutai Kartanegara - Perguruan tinggi - Kecamatan
21. Mengintegrasikan seluruh daya tarik wisata bertema sejarah Kerajaan Kutai sebagai satu produk pariwisata unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Rapat koordinasi pengembangan produk pariwisata berbasis sejarah Kerajaan Kutai dengan perguruan tinggi dan pelaku usaha pariwisata																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kebudayaan - Kesultanan Kutai Kartanegara - Perguruan tinggi - Pelaku usaha perjalanan wisata
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pelaksanaan dan sosialisasi hasil pengembangan produk pariwisata berbasis sejarah Kerajaan Kutai																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Kesultanan Kutai Kartanegara - Perguruan tinggi - Pelaku usaha perjalanan wisata

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
22. Mengembangkan jalur wisata bertema sejarah Kerajaan Kutai yang terintegrasi untuk meningkatkan pengalaman berwisata	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Workshop penyusunan dan identifikasi kebutuhan pengembangan jalur wisata sejarah kerajaan Kutai																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kebudayaan - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pendidikan - Kesultanan Kutai Kartanegara - Perguruan tinggi
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Rapat koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor program pembangunan jalur wisata sejarah Kerajaan Kutai																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kebudayaan - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pendidikan - Kesultanan Kutai Kartanegara - Perguruan tinggi
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Sosialisasi dan pelatihan jalur wisata sejarah Kerajaan Kutai kepada biro perjalanan wisata																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Kesultanan Kutai Kartanegara - Perguruan tinggi
23. Mengembangkan jalur wisata bertema sejarah, budaya, dan konservasi untuk meningkatkan keterkaitan daya tarik wisata sekaligus	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Workshop penyusunan dan identifikasi kebutuhan pengembangan jalur wisata bertema sejarah, budaya, dan konservasi																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kebudayaan - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pendidikan - Kesultanan Kutai Kartanegara - perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
menguatkan keunggulan pariwisata Kutai Kartanegara	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Rapat koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor program pembangunan jalur wisata																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kebudayaan - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pendidikan - Kesultanan Kutai Kartanegara - Perguruan tinggi
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Sosialisasi dan pelatihan jalur wisata kepada biro perjalanan wisata																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	Perguruan tinggi
24. Mengembangkan jalur wisata regional bertema ekowisata, geowisata, dan wisata petualangan dan wisata sejarah yang mengaitkan daya tarik wisata unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan daya tarik wisata di kabupaten/kota sekitar dan IKN	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Workshop penyusunan dan identifikasi kebutuhan pengembangan jalur wisata regional bertema ekowisata, geowisata, wisata petualangan, dan wisata sejarah																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	Perguruan tinggi
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Rapat koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor program pembangunan jalur wisata regional dengan Pemerintah Provinsi																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang pariwisata - Otorita IKN bidang pariwisata - OPD Kabupaten/kota sekitar bidnag pariwisata - perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		Kalimantan Timur, IKN, dan kabupaten/kota terkait.																	
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Sosialisasi dan pelatihan jalur wisata regional kepada biro perjalanan wisata																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	Perguruan tinggi
25. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengelola daya tarik wisata terhadap konsep pariwisata kreatif dan edukatif serta prinsip-prinsip kepariwisataan berkelanjutan dalam pengembangan produk pariwisata	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Sosialisasi pariwisata kreatif dan edukatif serta prinsip-prinsip kepariwisataan berkelanjutan dalam pengembangan produk pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	Perguruan tinggi
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Workshop identifikasi dan pengembangan potensi produk pariwisata kreatif dan edukatif pada daya tarik wisata Kabupaten Kutai Kartanegara.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	Perguruan tinggi
	Program peningkatan daya tarik	Pendampingan sertifikasi pariwisata berkelanjutan																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara	Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	destinasi pariwisata	untuk daya tarik wisata dan desa/kampung wisata Kabupaten Kutai Kartanegara.																bidang kepariwisataan	
26. Mengembangkan pembinaan dalam pengelolaan kegiatan wisata kreatif dan edukatif pada daya tarik wisata Kabupaten Kutai Kartanegara	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pelatihan dan pendampingan pengembangan kegiatan wisata kreatif dan edukatif pada daya tarik wisata dan desa/kampung wisata Kabupaten Kutai Kartanegara.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Balai Besar TNK - BBWS Kalimantan Timur - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kebudayaan - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pendidikan - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang lingkungan hidup - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pemberdayaan masyarakat desa - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perindustrian - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang UMKM - Pemerintah Kecamatan - Perguruan tinggi
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pengadaan fasilitas pendukung kegiatan wisata kreatif dan edukatif pada daya tarik wisata dan desa/kampung																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Balai Besar TNK - BBWS Kalimantan Timur - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kebudayaan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		wisata Kabupaten Kutai Kartanegara.																	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pendidikan - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang lingkungan hidup - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perindustrian - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pemberdayaan masyarakat desa - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang UMKM - Pemerintah Kecamatan - Perguruan tinggi
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Penyelenggaraan <i>famtrip</i> kegiatan wisata kreatif dan edukatif pada daya tarik wisata dan kampung wisata Kabupaten Kutai Kartanegara.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Pengelola daya tarik wisata - Pengusaha biro perjalanan wisata
27. Mengembangkan even nasional dan internasional sesuai dengan keunggulan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Rapat koordinasi persiapan dan penyelenggaraan even nasional dan internasional sesuai dengan keunggulan pariwisata																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Kementerian bidang kepariwisataan - OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang kepariwisataan - Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		Kabupaten Kutai Kartanegara,																	
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Penyelenggaraan even nasional dan internasional sesuai dengan keunggulan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Kementerian bidang kepariwisataan – OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang kepariwisataan – Penyelenggara usaha MICE
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan even nasional dan internasional.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Kementerian bidang kepariwisataan – OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang kepariwisataan – Perguruan tinggi
28. Mengembangkan wisata olahraga dan wisata petualangan yang edukatif, serta wisata pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran berskala nasional dan internasional untuk meningkatkan keragaman daya	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Kajian pengembangan wisata olahraga dan wisata petualangan yang edukatif, serta wisata pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran berskala nasional dan internasional Kabupaten Kutai Kartanegara																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Perguruan tinggi – KONI Kabupaten Kutai Kartanegara – KONI Kalimantan Timur – Asosiasi usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
tarik wisata Kabupaten Kutai Kartanegara	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Rapat koordinasi dalam rangka mengidentifikasi ketersediaan dan kebutuhan pengembangan fasilitas untuk kegiatan wisata wisata olahraga, wisata petualangan, pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran berskala nasional dan internasional di Kabupaten Kutai Kartanegara																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Perguruan tinggi – KONI Kabupaten Kutai Kartanegara – KONI Kalimantan Timur – Asosiasi usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran
	Program promosi penanaman modal	Penyelenggaraan forum bisnis untuk investasi penyediaan fasilitas/tempat penyelenggaraan, even olahraga, wisata petualangan, pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran berskala nasional dan internasional di																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Perguruan tinggi – KONI Kabupaten Kutai Kartanegara – KONI Kalimantan Timur – Asosiasi usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		Kabupaten Kutai Kartanegara																	
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Fasilitasi pengajuan proposal penyelenggaraan kegiatan olahraga, pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran berskala nasional dan internasional di Kabupaten Kutai Kartanegara.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Perguruan tinggi – KONI Kabupaten Kutai Kartanegara – KONI Kalimantan Timur – Asosiasi usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan olahraga, pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran berskala nasional dan internasional di Kabupaten Kutai Kartanegara.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Perguruan tinggi – KONI Kabupaten Kutai Kartanegara – KONI Kalimantan Timur – Asosiasi usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan dan dampak kegiatan kegiatan olahraga, pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Perguruan tinggi – KONI Kabupaten Kutai Kartanegara – KONI Kalimantan Timur – Asosiasi usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		pameran berskala nasional dan internasional di Kabupaten Kutai Kartanegara.																	
29. Mengembangkan interpretasi pariwisata untuk meningkatkan pengalaman berkualitas kepada wisatawan sesuai dengan keunggulan pariwisata, kekhasan daya tarik wisata, dan segmen pasar wisatawan	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Penyusunan dan sosialisasi panduan interpretasi pariwisata sesuai keunggulan/kekhasan/nilai penting daya tarik wisata, desa/kampung wisata, dan jalur wisata.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Asosiasi jasa pramuwisata – Perguruan tinggi
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pelatihan dan pendampingan penerapan panduan interpretasi keunggulan/kekhasan/nilai penting daya tarik wisata, desa/kampung wisata, dan jalur wisata bagi pemandu wisata.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Asosiasi jasa pramuwisata – Perguruan tinggi
30. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu,	Program pengembangan sistem dan pengelolaan	Penyusunan, sosialisasi, dan koordinasi rencana sistem pengelolaan sampah terpadu,																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – Pengelola daya tarik wisata

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
ramah lingkungan, dan berbasis masyarakat, khususnya di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan desa/kampung wisata.	persampahan regional	ramah lingkungan, dan berbasis masyarakat, khususnya di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan desa/kampung wisata.																pekerjaan umum	– Pengelola desa/kampung wisata – Perguruan tinggi
	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Pengadaan/pembangunan sistem pengelolaan sampah terpadu, ramah lingkungan, dan berbasis masyarakat, khususnya di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan desa/kampung wisata.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pekerjaan umum	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – Pengelola daya tarik wisata – Pengelola desa/kampung wisata – Perguruan tinggi
	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Pendampingan, pemantauan, dan evaluasi penerapan sistem pengelolaan sampah terpadu, ramah lingkungan, dan berbasis masyarakat,																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pekerjaan umum	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – Pengelola daya tarik wisata – Pengelola desa/kampung wisata – Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		khususnya di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan desa/kampung wisata.																	
31. Meningkatkan penyediaan dan kualitas air bersih agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, wisatawan, dan usaha pariwisata, khususnya di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan desa/kampung wisata	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Penyusunan, sosialisasi, dan koordinasi rencana penyediaan dan kualitas air minum agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, wisatawan, dan usaha pariwisata, khususnya di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan desa/kampung wisata.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pekerjaan umum	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – Pengelola daya tarik wisata – Pengelola desa/kampung wisata – Perguruan tinggi
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengadaan/ pembangunan jaringan dan sumber air minum agar dapat memenuhi kebutuhan																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pekerjaan umum	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – Pengelola daya tarik wisata – Pengelola desa/kampung wisata – Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		masyarakat, wisatawan, dan usaha pariwisata, khususnya di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan desa/kampung wisata																	
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan dan peningkatan kualitas air minum agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, wisatawan, dan usaha pariwisata, khususnya di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan desa/kampung wisata.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pekerjaan umum	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – Pengelola daya tarik wisata – Pengelola desa/kampung wisata – Perguruan tinggi
32. Meningkatkan penyediaan dan kapasitas energi	Program penelitian dan	Kajian penyediaan dan kapasitas energi listrik																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
listrik dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan di seluruh wilayah kota agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, wisatawan, dan usaha pariwisata	pengembangan daerah	dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan di seluruh wilayah kota agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, wisatawan, dan usaha pariwisata.																					bidang penelitian dan pengembangan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pekerjaan umum – OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang energi dan sumber daya mineral – Perguruan tinggi
	Program penelitian dan pengembangan daerah	Rapat koordinasi kerja sama dengan perguruan tinggi dalam rangka penyediaan dan peningkatan kapasitas energi listrik dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan.																					OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang penelitian dan pengembangan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pekerjaan umum – OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang energi dan sumber daya mineral – Perguruan tinggi
	Program penelitian dan pengembangan daerah	Sosialisasi dan rapat koordinasi penyediaan dan peningkatan kapasitas energi listrik dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan.																					OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang penelitian dan pengembangan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pekerjaan umum – OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang energi dan sumber daya mineral – Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program penelitian dan pengembangan daerah	Penyelenggaraan forum tanggung jawab sosial dengan dunia usaha dalam rangka penyediaan dan peningkatan kapasitas energi listrik dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan,																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang penelitian dan pengembangan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pekerjaan umum – OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang energi dan sumber daya mineral – Perguruan tinggi
33. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan limbah sesuai standar dan ramah lingkungan, khususnya di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan desa/kampung wisata	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Penyusunan, sosialisasi, dan koordinasi rencana peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan limbah sesuai standar dan ramah lingkungan, khususnya di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan desa/kampung wisata.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pekerjaan umum	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – Pengelola daya tarik wisata – Pengelola desa/kampung wisata – Perguruan tinggi
	Program pengelolaan dan pengembangan	Pengadaan/ pembangunan jaringan limbah sesuai standar dan ramah lingkungan,																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – Pengelola daya tarik wisata

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	sistem air limbah	khususnya di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan desa/kampung wisata.																pekerjaan umum	– Pengelola desa/kampung wisata – Perguruan tinggi
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Pemantauan dan evaluasi peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan limbah sesuai standar dan ramah lingkungan, khususnya di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan desa/kampung wisata.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pekerjaan umum	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – Pengelola daya tarik wisata – Pengelola desa/kampung wisata – Perguruan tinggi
34. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan jaringan telekomunikasi berbasis internet, khususnya di pusat pelayanan primer dan sekunder	Program aplikasi informatika	Rapat koordinasi dalam rangka peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan jaringan telekomunikasi berbasis internet, khususnya di pusat pelayanan primer																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang komunikasi dan informatika	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – Pengelola daya tarik wisata – Pengelola kampung wisata - Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan desa/kampung wisata		dan sekunder pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan desa/kampung wisata.																	
	Program aplikasi informatika	Penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama dengan penyedia layanan jaringan internet untuk pemasangan internet gratis di di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan desa/kampung wisata.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang komunikasi dan informatika	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – Pengelola daya tarik wisata – Pengelola kampung wisata – Perguruan tinggi
	Program aplikasi informatika	Pemasangan dan pemeliharaan jaringan komunikasi dan internet gratis di di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, daya tarik wisata unggulan, dan desa/kampung wisata.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang komunikasi dan informatika	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – Pengelola daya tarik wisata – Pengelola kampung wisata – Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1	2 0 3 2	2 0 3 3	2 0 3 4	2 0 3 5	2 0 3 6 - 2 0 4 0	2 0 4 1 - 2 0 4 5	INSTANSI PENANGGUNG- JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
35. Mengembangkan penggunaan ornamen khas Kutai di seluruh daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, fasilitas umum, prasarana umum	Program penelitian dan pengembangan daerah	Kajian ornamen daerah yang dapat merepresentasikan keragaman budaya, keunikan dan kebesaran sejarah Kabupaten Kutai kartanegara													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kebudayaan - Kesultanan Kutai Kartanegara - Perguruan tinggi
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Penyusunan dan sosialisasi peraturan yang mewajibkan penggunaan ornamen daerah Kutai kartanegara dalam setiap pembangunan fisik di Kabupaten Kutai Kartanegara													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kebudayaan - Kesultanan Kutai Kartanegara - Asosiasi usaha pariwisata - Perguruan tinggi
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Penerapan penggunaan ornamen daerah Kutai kartanegara dalam setiap pembangunan fisik di Kabupaten Kutai Kartanegara													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kebudayaan - Kesultanan Kutai Kartanegara - Asosiasi usaha pariwisata
36. Mengembangkan pusat informasi pariwisata di pusat pelayanan primer dan sekunder	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Penyusunan rencana tapak dan DED pusat informasi pariwisata Kabupaten Kutai													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pekerjaan umum - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang tata ruang

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara		Kartanegara di pusat pelayanan primer dan sekunder.																	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang komunikasi dan informatika – Perguruan tinggi
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pembangunan dan perbaikan pusat informasi pariwisata pusat informasi pariwisata di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pekerjaan umum – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang tata ruang – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang komunikasi dan informatika Perguruan tinggi
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pengadaan dan pemutakhiran sistem informasi pariwisata kota untuk pusat informasi pariwisata di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pekerjaan umum – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang tata ruang – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang komunikasi dan informatika Perguruan tinggi
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pengadaan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak di pusat informasi																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pekerjaan umum – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang tata ruang

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		pariwisata pada pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara																	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang komunikasi dan informatika Perguruan tinggi
37. Mengembangkan fasilitas hotel berstandar nasional dan internasional di pusat pelayanan primer dan sekunder Kabupaten Kutai Kartanegara, serta <i>homestay</i> /pondok wisata di kampung-desa/kampung wisata	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Penyelenggaraan forum bisnis dan investasi pariwisata dalam rangka meningkatkan ketersediaan fasilitas hotel berstandar nasional dan internasional di pusat pelayanan primer dan sekunder Kabupaten Kutai Kartanegara.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang penanaman modal
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pelatihan dan pendampingan penerapan standar nasional dan internasional pada fasilitas hotel, khususnya terkait bangunan gedung, keselamatan dan keamanan, fasilitas yang tersedia.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pekerjaan umum

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan pengembangan <i>homestay</i> /pondok wisata di kampung-kampung wisata.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	Perguruan tinggi
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pembuatan dan pemasangan materi interpretatif untuk <i>homestay</i> tematik																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	Perguruan tinggi
38. Mengembangkan fasilitas makan dan minum berstandar nasional dan internasional di pusat pelayanan primer dan sekunder Kabupaten Kutai Kartanegara, serta fasilitas makan dan minum berbasis kuliner lokal berstandar nasional di seluruh kecamatan	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Penyelenggaraan forum bisnis dan investasi pariwisata dalam rangka meningkatkan fasilitas makan dan minum berstandar nasional dan internasional di pusat pelayanan primer dan sekunder Kabupaten Kutai Kartanegara.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang penanaman modal
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pelatihan dan pendampingan penerapan standar nasional dan internasional pada fasilitas makan dan minum, khususnya terkait bangunan																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pekerjaan umum

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		gedung, keselamatan dan keamanan, fasilitas yang tersedia.																	
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan pengembangan fasilitas makan dan minum berbasis kuliner lokal berstandar nasional di seluruh kecamatan.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	Perguruan tinggi
39. Meningkatkan ketersediaan dan fasilitas informasi dan interpretasi di daya tarik wisata, jalur wisata tematik, dan desa/kampung wisata.	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Penyusunan materi, pembuatan dan pemasangan papan informasi dan peta wisata sebaran daya tarik wisata kota, jalur wisata, dan desa/kampung wisata Kabupaten Kutai Kartanegara																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Pengelola daya tarik wisata - Pengelola desa/kampung wisata - Perguruan tinggi - Kecamatan
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Penyusunan materi, pembuatan dan pemasangan papan interpretasi di daya tarik wisata, jalur wisata tematik, dan kampung-kampung wisata																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Pengelola daya tarik wisata - Pengelola desa/kampung wisata - Perguruan tinggi - Kecamatan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
40. Mengembangkan fasilitas dan pelayanan sanitasi, khususnya toilet umum berstandar internasional dan ramah lingkungan di daya tarik wisata dan desa/kampung wisata.	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penyediaan dan pengelolaan fasilitas dan pelayanan sanitasi, khususnya toilet umum berstandar internasional dan ramah lingkungan di daya tarik wisata dan desa/kampung wisata																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pekerjaan umum - Pengelola daya tarik wisata - Pengelola desa/kampung wisata - Perguruan tinggi
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pembangunan dan pemeliharaan toilet bersih sesuai standar nasional dan internasional																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pekerjaan umum	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan - Pengelola daya tarik wisata - Pengelola desa/kampung wisata
41. Meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan berstandar internasional untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi wisatawan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rapat koordinasi dalam rangka identifikasi kebutuhan peningkatan kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan berstandar internasional untuk memenuhi kebutuhan pelayanan																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang Kesehatan - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pekerjaan umum - Pengelola daya tarik wisata - Pengelola desa/kampung wisata

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		kesehatan bagi wisatawan																	
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyusunan konsep rancangan dan pembangunan model pos kesehatan berstandar nasional di daya tarik wisata																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pekerjaan umum - Perguruan tinggi
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Fasilitasi kerja sama pemberian pelayanan kesehatan dengan asuransi kesehatan nasional dan internasional bagi wisatawan																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang Kesehatan - Perusahaan penyedia jasa asuransi
42. Mengembangkan fasilitas dan pengelolaan parkir terpadu di pusat pelayanan primer dan sekunder, serta desa/kampung wisata	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Rapat koordinasi rencana pembangunan fasilitas parkir terpadu di pusat pelayanan primer dan sekunder, serta desa/kampung wisata																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pekerjaan umum
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Penyusunan DED, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas parkir terpadu di di pusat pelayanan primer																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pekerjaan umum - Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		dan sekunder, serta desa/kampung wisata																	
43. Meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan keuangan berbasis digital untuk memudahkan wisatawan dalam melakukan transaksi keuangan selama berwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Rapat koordinasi dengan pihak bank dan lembaga keuangan digital untuk meningkatkan kualitas penyediaan pelayanan keuangan bagi wisatawan																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Bank/Lembaga keuangan digital - Perguruan tinggi
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Fasilitasi kerja sama antara pengelola daya tarik wisata, desa/kampung wisata, dan fasilitas pariwisata untuk memberikan pelayanan pembayaran secara elektronik																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Bank/Lembaga keuangan digital - Pengelola daya tarik wisata - Pengelola desa/kampung wisata
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pelatihan, pendampingan pengelolaan pembayaran secara elektronik bagi pengelola daya tarik wisata, desa/kampung																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Bank/Lembaga keuangan digital - Pengelola daya tarik wisata - Pengelola desa/kampung wisata - Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		wisata, dan fasilitas pariwisata																	
44. Mengembangkan fasilitas dan pelayanan keamanan dan keselamatan berstandar nasional dan internasional di pusat pelayanan primer dan sekunder, daya tarik wisata, dan kampung wisata	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penerapan standar nasional dan internasional fasilitas dan pelayanan keamanan dan keselamatan bagi pengelola kampung wisata, daya tarik wisata, pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pemadam kebakaran, keamanan dan keselamatan - Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Pengelola daya tarik wisata - Pengelola desa/kampung wisata
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pembangunan/ pengadaan, perbaikan, dan pemeliharaan fasilitas, perlengkapan dan peralatan keamanan dan keselamatan di pusat pelayanan primer dan sekunder, daya tarik wisata, dan kampung wisata																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pekerjaan umum - Pengelola daya tarik wisata - Pengelola desa/kampung wisata - kecamatan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
45. Mengembangkan fasilitas mitigasi bencana, lengkap dengan sistem pengelolaannya pada pusat pelayanan primer dan sekunder, daya tarik wisata, desa/kampung wisata, dan fasilitas pariwisata	Program penanggulangan bencana Program Penanggulangan Kebakaran	Penyusunan dan penetapan prosedur pencegahan dan penanganan bencana alam dan kebakaran di pusat pelayanan primer dan sekunder, daya tarik wisata, desa/kampung wisata, dan fasilitas pariwisata																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pemadam kebakaran, keamanan dan keselamatan - Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Pengelola daya tarik wisata - Pengelola desa/kampung wisata
	Program penanggulangan bencana Program Penanggulangan Kebakaran	Sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan prosedur pencegahan dan penanganan bencana alam dan kebakaran bagi pengelola daya tarik wisata, desa/kampung wisata, dan fasilitas pariwisata																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pemadam kebakaran, keamanan dan keselamatan - Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Pengelola daya tarik wisata - Pengelola desa/kampung wisata
	Program penanggulangan bencana Program Penanggulangan Kebakaran	Pengadaan papan informasi pencegahan dan penanganan bencana kebakaran di pusat pelayanan primer dan sekunder, daya																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pemadam kebakaran, keamanan dan keselamatan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		tarik wisata, kampung wisata, dan fasilitas pariwisata																	
	Program penanggulangan bencana Program Penanggulangan Kebakaran	Pembangunan/ pengadaan, perbaikan, dan pemeliharaan jalur evakuasi dan fasilitas peringatan dini bencana di pusat pelayanan primer dan sekunder, daya tarik wisata, kampung wisata, dan fasilitas pariwisata																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pemadam kebakaran, keamanan dan keselamatan
46. Mengembangkan fasilitas bagi wisatawan berkebutuhan khusus berstandar nasional/ internasional di desa/kampung wisata, daya tarik wisata, dan fasilitas pariwisata	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Sosialisasi, pelatihan, pendampingan penyusunan SOP dan pengadaan fasilitas dan pelayanan wisatawan berkebutuhan khusus berstandar nasional/ internasional di desa/kampung wisata, daya tarik wisata, dan fasilitas pariwisata																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pemadam kebakaran, keamanan dan keselamatan - Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pembangunan fasilitas bagi kaum berkebutuhan khusus di daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas umum pendukung pariwisata yang merupakan aset Pemkab Kutai Kartanegara																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pekerjaan umum
47. Menerapkan standar halal pada produk dan pelayanan pariwisata di daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas umum	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penerapan standar halal pada produk dan pelayanan pariwisata di daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas umum																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang Kesehatan - MUI
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Fasilitasi sertifikasi halal bagi produk dan pelayanan pariwisata di daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas umum																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang Kesehatan - Lembaga sertifikasi halal
48. Mengembangkan pembinaan sadar wisata dan	Program pengembangan sumber daya	Penyelenggaraan sosialisasi dan kampanye sadar																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara	Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
pariwisata berkelanjutan yang berkesinambungan kepada masyarakat	pariwisata dan ekonomi kreatif	wisata dan pariwisata berkelanjutan																bidang kepariwisataan	
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Fasilitasi dan pendampingan masyarakat untuk menyelenggarakan program dan gerakan sadar wisata dan pariwisata berkelanjutan																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	Perguruan tinggi
49. Mengembangkan pembinaan dan pendampingan masyarakat untuk menggali potensi pariwisata berdaya saing yang dimiliki masyarakat	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pelatihan dan pendampingan masyarakat dalam rangka identifikasi dan penilaian keunggulan potensi pariwisata yang dimiliki																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	Perguruan tinggi
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pelatihan dan pendampingan masyarakat dalam rangka penyusunan rencana/program pembangunan kepariwisataan di daya tarik wisata, desa/kampung wisata yang dikelola masyarakat																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
50. Mengembangkan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pengelola dalam memberikan pelayanan pariwisata yang beretika dan berlandaskan budaya Kutai	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pelatihan dan pendampingan penerapan prinsip pariwisata yang beretika dan berlandaskan budaya Kutai pada pengelolaan produk dan pelayanan pariwisata berbasis masyarakat																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	Perguruan tinggi
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan produk dan pelayanan pariwisata beretika dan berlandaskan budaya Kutai oleh masyarakat																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	Perguruan tinggi
51. Mengembangkan pelatihan, pendampingan, dan pemagangan yang berkesinambungan bagi masyarakat pengelola untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pelatihan dan pendampingan pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif bagi masyarakat pengelola																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perindustrian dan perdagangan - Perguruan tinggi
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pelatihan dan pendampingan pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perindustrian dan perdagangan - Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		berbasis masyarakat kepada komunitas kreatif																	
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Fasilitasi kolaborasi program antara masyarakat pengelola dengan komunitas kreatif dalam pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perindustrian dan perdagangan - Perguruan tinggi
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Penyelenggaraan pemagangan pengelolaan dan pengembangan pariwisata bagi masyarakat dan komunitas kreatif																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perindustrian dan perdagangan - Perguruan tinggi
52. Mengembangkan mekanisme pembiayaan bagi program inovatif dan kreatif masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Rapat koordinaasi untuk merumuskan mekanisme pembiayaan program inovatif dan kreatif masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang keuangan daerah - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang penelitian dan pengembangan
	Program pengembangan sumber daya	Sosialisasi mekanisme pembiayaan program inovatif																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang keuangan daerah

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1	2 0 3 2	2 0 3 3	2 0 3 4	2 0 3 5	2 0 3 6 - 2 0 4 0	2 0 4 1 - 2 0 4 5	INSTANSI PENANGGUNG- JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	pariwisata dan ekonomi kreatif	dan kreatif masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat													bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang penelitian dan pengembangan
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pelaksanaan pembiayaan program inovatif dan kreatif masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang keuangan daerah – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang penelitian dan pengembangan
53. Mengembangkan pemberian penghargaan secara reguler kepada masyarakat yang telah melakukan inovasi dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Rapat koordinasi dalam rangka pemberian penghargaan secara reguler kepada masyarakat yang telah melakukan inovasi kepariwisataan berbasis masyarakat.													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	Perguruan tinggi
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Penyelenggaraan pemberian penghargaan kepada masyarakat yang telah melakukan inovasi dalam pengembangan dan													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat																	
54. Memperkuat koordinasi lintas sektor serta kerja sama dengan dunia usaha dan akademisi dalam pengembangan masyarakat sebagai agen perubahan dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Rapat koordinasi lintas sektor dalam merumuskan program pengembangan masyarakat sebagai agen perubahan dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan pembagian peran dalam pelaksanaannya.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pemberdayaan masyarakat – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pendidikan – Perguruan tinggi
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Rapat koordinasi dan penandatanganan kerja sama dengan dunia usaha dalam rangka pelatihan dan pendampingan masyarakat untuk menjadi agen perubahan dalam pembangunan kepariwisataan.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kerja sama – Asosiasi usaha pariwisata
	Program pengembangan sumber daya	Rapat koordinasi dengan akademisi untuk mengembangkan																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara	Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	pariwisata dan ekonomi kreatif	konsep dan mekanisme pelatihan, pendampingan, dan pemagangan masyarakat sebagai agen perubahan dalam pembangunan kepariwisataan.																bidang kepariwisataan	
55. Mengembangkan media informasi, komunikasi, dan pelayanan investasi pariwisata berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Pengumpulan data dan informasi terkait investasi pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang penanaman modal daerah	OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan
	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Pembuatan, sosialisasi, dan pemutakhiran situs web dan aplikasi sistem informasi dan pelayanan investasi pariwisata.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang penanaman modal daerah	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan - Perguruan tinggi
56. Mengembangkan promosi investasi terpadu untuk meningkatkan iklim dan daya saing pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara	Program pengembangan iklim penanaman modal	Melakukan promosi investasi terpadu dengan kabupaten/kota, IKN, Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang penanaman modal daerah	OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program pengembangan iklim penanaman modal	Mengembangkan even promosi investasi bersama secara regular dengan kabupaten/kota sekitar dan atau satu tema pengembangan destinasi, IKN dan Provinsi Kalimantan Timur																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang penanaman modal daerah	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan - OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang kepariwisataan
57. Memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengembangkan mekanisme pelayanan investasi pariwisata terpadu, efektif dan efisien bagi investor dalam mengembangkan usahanya di Kutai Kartanegara	Program pengembangan iklim penanaman modal	Rapat koordinasi untuk menyusun mekanisme operasional pelayanan investasi pariwisata terpadu yang efektif dan efisien berbasis elektronik																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang penanaman modal daerah	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perdagangan - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang informasi dan komunikasi
	Program pengembangan iklim penanaman modal	Uji coba pembagian peran dalam penerapan mekanisme operasional pelayanan investasi pariwisata terpadu yang efektif dan efisien berbasis elektronik																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang penanaman modal daerah	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perdagangan - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang informasi dan komunikasi
	Program pengembangan iklim	Pemantauan dan evaluasi mekanisme																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG-JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	penanaman modal	operasional pelayanan investasi pariwisata terpadu yang efektif dan efisien berbasis elektronik																bidang penanaman modal daerah	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perdagangan – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang informasi dan komunikasi – Perguruan tinggi
58. Mengembangkan pemberian penghargaan, untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan investor dalam menerapkan standar internasional dan nilai budaya masyarakat Kutai Kartanegara pada pengelolaan investasi yang dilakukan	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal.	Sosialisasi standar internasional dan nilai budaya masyarakat Kutai Kartanegara kepada para calon investor dan investor.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang penanaman modal daerah	OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan
	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal.	Penyelenggaraan pemberian penghargaan bagi investor pariwisata yang telah memenuhi standar internasional dan berkontribusi terhadap pelestarian nilai budaya masyarakat dan lingkungan Kutai Kartanegara																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang penanaman modal daerah	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan - Perguruan tinggi

Tabel 2 Indikasi Program dan Kegiatan Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
1. Membangun kesadaran industri pariwisata mengenai pentingnya membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah pariwisata, berwawasan lingkungan, dan menerapkan nilai-nilai budaya Kutai	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Fasilitasi pertemuan rutin antara industri pariwisata dengan usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan peluang kemitraan													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perindustrian dan UMKM
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Fasilitasi pertemuan industri pariwisata dengan pemangku kepentingan lingkungan dan budaya Kutai untuk meningkatkan pemahaman terkait lingkungan dan budaya Kutai													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang lingkungan - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang budaya

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1	2 0 3 2	2 0 3 3	2 0 3 4	2 0 3 5	2 0 3 6 - 2 0 4 0	2 0 4 1 - 2 0 4 5	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
2. Mengembangkan penghargaan terhadap industri pariwisata yang menerapkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah pariwisata, berwawasan lingkungan, dan menerapkan nilai-nilai budaya Kutai	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Penyusunan, penetapan, dan sosialisasi Peraturan Bupati tentang mekanisme pemberian penghargaan bagi usaha pariwisata yang telah menerapkan kemitraan dengan usaha kecil, menengah pariwisata, berwawasan lingkungan dan menerapkan nilai-nilai budaya Kutai													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perencanaan pembangunan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang lingkungan hidup – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kebudayaan – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pemberdayaan masyarakat – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang sosial – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perindustrian dan UMKM – Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1	2 0 3 2	2 0 3 3	2 0 3 4	2 0 3 5	2 0 3 6 - 2 0 4 0	2 0 4 1 - 2 0 4 5	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Penilaian dan pemberian penghargaan bagi industri pariwisata yang menerapkan kemitraan dengan usaha kecil, menengah pariwisata, berwawasan lingkungan dan menerapkan nilai-nilai budaya Kutai													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang lingkungan hidup – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kebudayaan – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pemberdayaan masyarakat – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang social – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perindustrian dan UMKM – Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1	2 0 3 2	2 0 3 3	2 0 3 4	2 0 3 5	2 0 3 6 - 2 0 4 0	2 0 4 1 - 2 0 4 5	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
3. Membangun mekanisme komunikasi antar industri pariwisata dengan usaha mikro, kecil dan menengah pariwisata untuk meningkatkan saling kesepahaman dalam membangun iklim kondusif usaha pariwisata di Kutai kartanegara	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Rapat koordinasi dalam rangka Menyusun mekanisme komunikasi antar industri pariwisata dengan usaha mikro, kecil dan menengah pariwisata untuk meningkatkan saling kesepahaman dalam membangun iklim kondusif usaha pariwisata di Kutai Kartanegara													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perindustrian dan UMKM – Asosiasi usaha pariwisata
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Penyelenggaraa n kegiatan pertemuan dan membangun media													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perindustrian dan UMKM – Asosiasi usaha pariwisata

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		komunikasi antar industri pariwisata dengan usaha mikro, kecil dan menengah pariwisata untuk meningkatkan saling kesepahaman dalam membangun iklim kondusif usaha pariwisata di Kutai Kartanegara .														
4. Membangun kesadaran kolektif pelaku usaha pariwisata terhadap pentingnya penerapan standar di bidang kepariwisataan, kebersihan,	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Sosialisasi standar nasional dan internasional di bidang kepariwisataan kepada para pelaku usaha pariwisata.													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Kementerian bidang kepariwisataan – Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan, baik standar nasional maupun standar internasional	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Sosialisasi standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan kepada para pelaku usaha pariwisata.													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kesehatan – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang lingkungan hidup – Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Kampanye penerapan standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan bagi usaha pariwisata.													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kesehatan – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang lingkungan hidup – Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2041	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
5. Mengembangkan pelatihan dan pendampingan bagi penerapan standar internasional pada usaha pariwisata di Kutai Kartanegara	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Rapat koordinasi dengan asosiasi usaha pariwisata dan perguruan tinggi kepariwisataan dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pendampingan penerapan standar internasional pada usaha pariwisata.													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pelatihan dan pendampingan penerapan standar internasional bagi usaha pariwisata													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pemantauan dan evaluasi penerapan standar internasional pada usaha pariwisata													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
6. Memfasilitasi sertifikasi usaha dan sertifikasi terkait lainnya pada usaha pariwisata di Kutai Kartanegara	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Fasilitasi sertifikasi usaha pariwisata													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pemantauan dan evaluasi penerapan standar internasional pada usaha pariwisata													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi
7. Membangun forum komunikasi dan kerjasama usaha pariwisata dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Rapat koordinasi dalam rangka penyiapan dan penyelenggaraan forum komunikasi antarusaha pariwisata dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Penyelenggaraa n forum komunikasi antarusaha pariwisata dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya														OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Penyelenggaraa n program bersama dalam rangka tanggung jawab industri pariwisata terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya														OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang lingkungan hidup – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kebudayaan – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pemberdayaan masyarakat – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang sosial – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang Perindustrian,Perdagangan dan UMKM – Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1	2 0 3 2	2 0 3 3	2 0 3 4	2 0 3 5	2 0 3 6 - 2 0 4 0	2 0 4 1 - 2 0 4 5	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
8. Mengembangkan regulasi untuk mendorong tanggung jawab industri pariwisata terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya, termasuk penerapan nilai budaya masyarakat Kutai Kartanegara	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Penyusunan, penetapan, dan sosialisasi Peraturan Bupati tentang mekanisme pelaksanaan tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya oleh usaha pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara.													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perindustrian	– Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang lingkungan hidup – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kebudayaan – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pemberdayaan masyarakat – Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program tanggung jawab usaha pariwisata terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya.													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perencanaan pembangunan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang lingkungan hidup – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kebudayaan – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1	2 0 3 2	2 0 3 3	2 0 3 4	2 0 3 5	2 0 3 6 - 2 0 4 0	2 0 4 1 - 2 0 4 5	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
9. Mengembangkan mekanisme penghargaan bagi usaha pariwisata yang kontribusi tinggi terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Penyusunan, penetapan, dan sosialisasi Peraturan Bupati tentang mekanisme pemberian penghargaan bagi usaha pariwisata yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya.													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perencanaan pembangunan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang lingkungan hidup – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kebudayaan – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pemberdayaan masyarakat – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang sosial – Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Penilaian dan pemberian penghargaan bagi industri pariwisata yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya.													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang lingkungan hidup – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kebudayaan – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang pemberdayaan masyarakat – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang social – Kraton Kesultanan Kutai Kartanegara – Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi
10. Memperkuat basis data dan informasi industri pariwisata Kutai Kartanegara yang kredibel untuk mendukung pembangunan kepariwisataan Kutai Kartanegara	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Survei dan inventarisasi data dan informasi industri pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang komunikasi dan informatika – Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1	2 0 3 2	2 0 3 3	2 0 3 4	2 0 3 5	2 0 3 6 - 2 0 4 0	2 0 4 1 - 2 0 4 5	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pembuatan dan pemutakhiran basis data dan informasi industri pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bentuk <i>dashboard</i> industri pariwisata.													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang komunikasi dan informatika	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi
11. Mengembangkan industri pariwisata yang kuat dengan melakukan pembinaan dan pendampingan	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Survei dan koordinasi kebutuhan pembinaan dan pendampingan dalam membangun ketahanan industri pariwisata													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perindustrian dan UMKM – Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pelatihan dan pendampingan untuk membangun ketahanan industri pariwisata													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perindustrian dan UMKM – Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2041	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pemberian insentif Pemerintah Daerah dalam rangka membangun ketahanan industri pariwisata													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perindustrian – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang UMKM – Asosiasi usaha pariwisata Perguruan tinggi
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Evaluasi tingkat ketahanan industri pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– ssOPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perindustrian – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang UMKM – Asosiasi usaha pariwisata Perguruan Tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1	2 0 3 2	2 0 3 3	2 0 3 4	2 0 3 5	2 0 3 6 - 2 0 4 0	2 0 4 1 - 2 0 4 5	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
12. Mengembangkan sistem informasi industri pariwisata berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai media komunikasi dan koordinasi dalam pembangunan industri pariwisata	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pembuatan dan pemutakhiran sistem sistem informasi industri pariwisata berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai media komunikasi dan koordinasi dalam pembangunan industri pariwisata													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang komunikasi dan informatika	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Evaluasi kinerja sistem informasi industri pariwisata berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai media komunikasi dan koordinasi dalam pembangunan industri pariwisata													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang komunikasi dan informatika	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1	2 0 3 2	2 0 3 3	2 0 3 4	2 0 3 5	2 0 3 6 - 2 0 4 0	2 0 4 1 - 2 0 4 5	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
13. Membangun koordinasi lintas sektor antara sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka meningkatkan kualitas usaha, produk, dan pemasaran industri mikro, kecil, dan menengah agar dapat memenuhi kebutuhan industri pariwisata dan wisatawan.	Program pengembangan UMKM	Sinkronisasi program dan pembagian peran dalam pengembangan UMKM yang mampu memenuhi kebutuhan industri pariwisata dan wisatawan.													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang UMKM	– OPD Prov. Kalimantan Timur bidang UMKM – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – Komunitas dan asosiasi IMKM – Perguruan tinggi
	Program pengembangan UMKM	Penyelenggaraa n forum komunikasi lintas sektor dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendukung pariwisata.													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang UMKM	– OPD Prov. Kalimantan Timur bidang UMKM – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – Komunitas dan asosiasi IMKM – Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program pengembangan UMKM	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan UMKM yang mampu memenuhi kebutuhan industri pariwisata dan wisatawan.														OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang UMKM	– OPD Prov. Kalimantan Timur bidang UMKM – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – Komunitas dan asosiasi IMKM – Perguruan tinggi
14. Meningkatkan pembinaan terhadap industri mikro, kecil, dan menengah dalam rangka memberikan nilai tambah terhadap produk dan usaha yang dijalankan.	Program pemberdayaan UMKM	Pelatihan dan pendampingan pengembangan produk dan pelayanan usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor ekonomi kreatif dan sektor potensial lainnya untuk memberikan nilai tambah terhadap produk dan usaha yang dijalankan.														OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang UMKM	– OPD Prov. Kalimantan Timur bidang UMKM – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – Komunitas dan asosiasi IMKM – Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1	2 0 3 2	2 0 3 3	2 0 3 4	2 0 3 5	2 0 3 6 - 2 0 4 0	2 0 4 1 - 2 0 4 5	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program pemberdayaan UMKM	Penyelenggaraa n lomba kreativitas dan inovasi produk dan usaha UMKM pendukung pariwisata													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang UMKM	– OPD Prov. Kalimantan Timur biang UMKM – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – Komunitas dan asosiasi IMKM – Perguruan tinggi
15. Mengembangkan dan melaksanakan model kemitraan berbasis pembinaan antara usaha pariwisata skala besar dan menengah dengan usaha mikro, kecil, dan menengah pada sektor ekonomi kreatif dan sektor lain yang potensial.	Program pemberdayaan UMKM	Rapat koordinasi dengan asosiasi usaha pariwisata dalam rangka pengembangan mekanisme kemitraan berbasis pembinaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah pada sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan sektor lain yang potensial.													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Prov. Kalimantan Timur bidang UMKM – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang UMKM – Asosiasi usaha pariwisata

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program pemberdayaan UMKM	Kajian model kemitraan berbasis pembinaan antara usaha pariwisata skala besar dan menengah dengan usaha mikro, kecil, dan menengah pada sektor ekonomi kreatif dan sektor lain yang potensial.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Prov. Kalimantan Timur bidang UMKM – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang UMKM – Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi
	Program pemberdayaan UMKM	Fasilitasi kemitraan berbasis pembinaan antara usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah pada sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan sektor lain yang potensial.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Prov. Kalimantan Timur bidang UMKM – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang UMKM – Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1	2 0 3 2	2 0 3 3	2 0 3 4	2 0 3 5	2 0 3 6 - 2 0 4 0	2 0 4 1 - 2 0 4 5	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program pemberdayaan UMKM	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kemitraan berbasis pembinaan antara usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah pada sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan sektor lain yang potensial.													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Prov. Kalimantan Timur bidang UMKM – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang UMKM – Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
16. Mengembangkan mekanisme pemberian penghargaan bagi usaha pariwisata skala besar dan menengah yang berhasil melakukan kemitraan berbasis pembinaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah.	Program pemberdayaan UMKM	Penyusunan, penetapan, dan sosialisasi Peraturan Bupati tentang mekanisme pemberian penghargaan bagi usaha pariwisata skala besar dan menengah terkait keberhasilan pembinaan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah.													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Prov. Kalimantan Timur bidang UMKM – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang UMKM – Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi
	Program pemberdayaan UMKM	Pemberian penghargaan kepada usaha pariwisata yang telah berhasil bermitra dan membina usaha mikro, kecil, dan menengah pada sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan sektor lain yang potensial.													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Prov. Kalimantan Timur bidang UMKM – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang UMKM – Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1	2 0 3 2	2 0 3 3	2 0 3 4	2 0 3 5	2 0 3 6 - 2 0 4 0	2 0 4 1 - 2 0 4 5	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
17. Mengembangkan forum dan media komunikasi antara industri pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dengan industri pariwisata nasional dan internasional secara berkesinambungan .	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Rapat koordinasi dalam rangka identifikasi kebutuhan pengembangan kemitraan industri pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dengan industri pariwisata nasional dan internasional.													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Kementerian bidang kepariwisataan – OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang kepariwisataan – OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang perindustrian – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perindustrian – Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Fasilitasi kerja sama/kemitraan industri pariwisata Daerah dengan industri pariwisata nasional.													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang kepariwisataan – OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang perindustrian – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perindustrian – Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1	2 0 3 2	2 0 3 3	2 0 3 4	2 0 3 5	2 0 3 6 - 2 0 4 0	2 0 4 1 - 2 0 4 5	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pemantauan dan evaluasi kinerja kemitraan antara industri pariwisata Darah dengan industri pariwisata nasional dan internasional.													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang kepariwisataan – OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang perindustrian – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perindustrian – Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi
18. Mendorong kemitraan antara industri pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dengan industri pariwisata nasional dan internasional melalui program fasilitasi dan pembinaan kemitraan.	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Rapat koordinasi dalam rangka identifikasi kebutuhan pengembangan kemitraan industri pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dengan industri pariwisata nasional dan internasional.													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Kementerian bidang kepariwisataan – OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang kepariwisataan – OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang perindustrian – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perindustrian – Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Fasilitasi kerja sama/kemitraan industri pariwisata Daerah dengan industri pariwisata nasional.														OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang kepariwisataan – OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang perindustrian – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perindustrian – Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pemantauan dan evaluasi kinerja kemitraan antara industri pariwisata Daerah dengan industri pariwisata nasional dan internasional.														OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang kepariwisataan – OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang perindustrian – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perindustrian – Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi

Tabel 3 Indikasi Program dan Kegiatan Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
1. Mengembangkan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai simpul pemasaran pariwisata sejarah kerajaan di Indonesia.	Program pemasaran pariwisata	Penelitian pasar wisatawan nusantara untuk segmen wisata sejarah dan budaya.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Asosiasi usaha dan profesi pariwisata - Perguruan tinggi
	Program pemasaran pariwisata	Penyelenggaraan pemasaran bersama dengan daerah yang memiliki sejarah kerajaan.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang kepariwisataan - Asosiasi usaha dan profesi pariwisata
2. Mengembangkan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai simpul pemasaran destinasi ekowisata berkelas dunia di Indonesia.	Program pemasaran pariwisata	Penelitian pasar wisatawan mancanegara dan nusantara untuk segmen ekowisata.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang kepariwisataan - Badan Promosi Pariwisata Daerah Prov. Kalimantan Timur - Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara - Asosiasi usaha dan profesi pariwisata
	Program pemasaran pariwisata	Penyelenggaraan pemasaran bersama dengan daerah yang memiliki daya tarik ekowisata ke																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang kepariwisataan - Badan Promosi Pariwisata Daerah

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		negara-negara Jepang, Amerika, Australia, serta negara-negara Eropa.																	Prov. Kalimantan Timur – Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara – Kedutaan besar negara Jepang, Amerika, Australia, serta negara-negara Eropa. – Asosiasi usaha dan profesi pariwisata
3. Mengembangkan kemitraan dengan destinasi pariwisata sejarah kerajaan dan ekowisata di seluruh dunia.	Program pemasaran pariwisata	Rapat koordinasi dalam rangka identifikasi kebutuhan pengembangan kemitraan dengan usaha perjalanan wisata di daerah dan atau negara sumber pasar wisatawan ekowisata																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara kepariwisataan	– OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang kepariwisataan – Badan Promosi Pariwisata Daerah Prov. Kalimantan Timur – Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara – Asosiasi usaha perjalanan wisata

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program pemasaran pariwisata	Inisiasi dan fasilitasi penandatanganan Mou antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan negara sumber pasar wisatawan																-OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan -Bagian Kerja Sama Pemkab	– OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang kepariwisataan – Badan Promosi Pariwisata Daerah Prov. Kalimantan Timur – Asosiasi usaha perjalanan wisata
	Program pemasaran pariwisata	Inisiasi dan fasilitasi penandatanganan Mou antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan negara sumber pasar wisatawan																-OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan -Bagian Kerja Sama Pemkab	– Kementerian bidang kepariwisataan – OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang kepariwisataan – BPPD Kabupaten Kutai Kartanegara
	Program pemasaran pariwisata	Evaluasi kinerja kerja sama dengan usaha perjalanan wisata di daerah dan atau negara sumber pasar wisatawan																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang kepariwisataan – Badan Promosi Pariwisata Daerah Prov. Kalimantan Timur – Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
																			- Asosiasi usaha perjalanan wisata
4. Membangun citra pemasaran pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengangkat sejarah Kerajaan dan ekowisata sebagai ciri utama	Program pemasaran pariwisata	diskusi terpumpun untuk menentukan konsep <i>branding</i> kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk wisatawan nusantara dan mancanegara																Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	- OPD Prov. Kalimantan Timur bidang kepariwisataan - Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Kalimantan Timur - Asosiasi usaha dan profesi pariwisata - Media massa dan elektronik nasional dan internasional - Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program pemasaran pariwisata	Penyelenggaraan sayembara <i>tagline</i> dan logo untuk <i>branding</i> pariwisata nusantara dan mancanegara Kabupaten Kutai Kartanegara.																Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang komunikasi dan informatika - Asosiasi usaha dan profesi pariwisata - Media massa dan elektronik nasional dan internasional - Perguruan tinggi
	Program pemasaran pariwisata	Rapat koordinasi dan penetapan <i>tagline</i> dan logo <i>branding</i> pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.																Badan Promosi Pariwisata Daerah Kutai Kartanegara	- Bagian Hukum Pemerintah Kutai Kartanegara - OPD Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan - OPD Kutai Kartanegara bidang komunikasi dan informatika - Asosiasi usaha dan profesi pariwisata - Media massa dan elektronik nasional dan internasional - Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program pemasaran pariwisata	Penyusunan dan penyebaran buku aturan penggunaan <i>tagline</i> dan logo <i>branding</i> pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.																Badan Promosi Pariwisata Daerah Kutai Kartanegara	- OPD Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan - OPD Kutai Kartanegara bidang komunikasi dan informatika - Asosiasi usaha dan profesi pariwisata - Media massa dan elektronik nasional dan internasional - Perguruan tinggi
	Program pemasaran pariwisata	Evaluasi <i>branding</i> pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.																OPD Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Badan Promosi Pariwisata Kutai Kartanegara - OPD Kutai Kartanegara bidang komunikasi dan informatika - Asosiasi usaha dan profesi pariwisata - Media massa dan elektronik nasional dan internasional - Perguruan tinggi
5. Mengembangkan mekanisme komunikasi dan koordinasi pemasaran pariwisata antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar, Pemerintah	Program pemasaran pariwisata	Rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, IKN, dan Pemerintah Pusat untuk membangun sinergi program pemasaran																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Kementerian bidang kepariwisataan - OPD Prov. Kalimantan Timur bidang kepariwisataan - Badan Promosi Pariwisata Indonesia - Badan Promosi Pariwisata Prov. Kalimantan Timur

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
Provinsi Kalimantan Timur, IKN dan Pemerintah Pusat untuk membangun sinergi program pemasaran pariwisata.		pariwisata kota, provinsi, dan nasional.																	- Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara - Asosiasi usaha perjalanan wisata
	Program pemasaran pariwisata	Penyelenggaraan forum komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, IKN, dan Pemerintah Pusat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemasaran pariwisata.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Kementerian bidang kepariwisataan - OPD Prov. Kalimantan Timur bidang kepariwisataan - Badan Promosi Pariwisata Indonesia - Badan Promosi Pariwisata Prov. Kalimantan Timur - Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara - Asosiasi usaha perjalanan wisata
	Program pemasaran pariwisata	Pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemasaran pariwisata antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Kementerian bidang kepariwisataan - OPD Prov. Kalimantan Timur bidang kepariwisataan - Badan Promosi Pariwisata Indonesia - Badan Promosi Pariwisata Prov. Kalimantan Timur

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		sekitar, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, IKN, dan Pemerintah Pusat dalam menarik kunjungan wisatawan.																	- Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara - Asosiasi usaha perjalanan wisata
6. Mengembangkan even promosi pariwisata untuk mengenalkan keunggulan internasional dan nasional Kutai Kartanegara kepada wisatawan nusantara dan mancanegara.	Program pemasaran pariwisata	Rapat koordinasi pengembangan konsep dan pelaksanaan even promosi untuk mengenalkan keunggulan internasional dan nasional Kutai Kartanegara kepada wisatawan nusantara dan mancanegara.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Badan Promosi Pariwisata Daerah Kutai Kartanegara - Asosiasi usaha dan profesi pariwisata - Komunitas Kreatif
	Program pemasaran pariwisata	Penyelenggaraan even promosi dengan dunia usaha dan komunitas kreatif berskala nasional dan/atau internasional.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan Badan Promosi Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur - Badan Promosi Pariwisata Daerah Kutai Kartanegara - Asosiasi usaha dan profesi pariwisata

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
																			- Komunitas Kreatif
	Program pemasaran pariwisata	Promosi pariwisata Kutai Kartanegara pada even promosi pariwisata di daerah sumber pasar wisatawan nusantara dan mancanegara.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang kepariwisataan - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang komunikasi dan informatika
	Program pemasaran pariwisata	Evaluasi dampak penyelenggaraan even promosi dengan dunia usaha dan komunitas kreatif berskala nasional dan/atau internasional terhadap peningkatan kunjungan wisatawan.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara - Asosiasi usaha dan profesi pariwisata - Komunitas Kreatif
7. Mengembangkan pasar wisatawan nusantara keluarga, pelajar/mahasiswa	Program pemasaran pariwisata	Penelitian pasar wisatawan nusantara untuk segmen keluarga,																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Asosiasi usaha dan profesi pariwisata - Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
sebagai pasar utama wisatawan nusantara		pelajar dan mahasiswa.																	
	Program pemasaran pariwisata	Penyelenggaraan pemasaran ke daerah sumber pasar utama wisatawan nusantara segmen pasar keluarga, pelajar dan mahasiswa.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang kepariwisataan - Asosiasi usaha dan profesi pariwisata
8. Mengembangkan pasar wisatawan mancanegara segmen minat khusus sejarah kerajaan dan budaya dari China, India, Asia Tenggara berdasarkan penelitian pasar yang berkesinambungan	Program pemasaran pariwisata	Penelitian pasar wisatawan mancanegara untuk segmen minat khusus sejarah kerajaan dan budaya dari China, India, Asia Tenggara																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Asosiasi usaha dan profesi pariwisata - Perguruan tinggi
	Program pemasaran pariwisata	Penyelenggaraan pemasaran ke negara sumber pasar utama wisatawan mancanegara segmen segmen minat khusus sejarah kerajaan dan budaya dari																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang kepariwisataan - Badan Promosi Pariwisata Prov.Kalimantan Timur

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		China, India, Asia Tenggara.																	– Badan Promosi pariwisata kabupaten Kutai Kartanegara – Asosiasi usaha dan profesi pariwisata
9. Mengembangkan pasar wisatawan mancanegara segmen minat khusus ekowisata sebagai pasar utama wisatawan mancanegara dari Asia Tenggara, Asia Timur, Amerika, Australia, serta negara-negara Eropa berdasarkan penelitian pasar yang berkesinambungan.	Program pemasaran pariwisata	Penelitian pasar wisatawan mancanegara untuk segmen minat khusus ekowisata sebagai pasar utama wisatawan mancanegara dari Asia Tenggara, Asia Timur, Amerika, Australia, serta negara-negara Eropa																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Asosiasi usaha dan profesi pariwisata – Perguruan tinggi
	Program pemasaran pariwisata	Penyelenggaraan pemasaran ke negara sumber pasar utama wisatawan mancanegara minat khusus ekowisata sebagai pasar utama wisatawan mancanegara dari Asia Tenggara, Asia																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang kepariwisataan – Badan Promosi Pariwisata Prov.Kalimantan Timur – Badan Promosi pariwisata kabupaten Kutai Kartanegara

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		Timur, Amerika, Australia, serta negara-negara Eropa.																	– Asosiasi usaha dan profesi pariwisata
10. Mengembangkan kemitraan pemasaran dengan daerah dan negara sumber pasar wisatawan	Program pemasaran pariwisata	Penandatanganan Mou antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan daerah dan negara sumber pasar wisatawan																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Badan Promosi Pariwisata Daerah Kutai Kartanegara – Asosiasi usaha dan profesi pariwisata
	Program pemasaran pariwisata	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan daerah dan negara sumber pasar wisatawan.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Badan Promosi Pariwisata Daerah Kutai kartanegara – Asosiasi usaha dan profesi pariwisata
11. Mengembangkan kemitraan dengan pengelola media dan aplikasi digital dalam melakukan promosi pariwisata Kutai Kartanegara.	Program pemasaran pariwisata	Penandatanganan Mou antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pengelola saluran pemasaran berbasis media offline dan aplikasi digital.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Badan Promosi Pariwisata Daerah Kutai Kartanegara – Asosiasi usaha dan profesi pariwisata
	Program pemasaran pariwisata	Pelaksanaan kerjasama pemasaran baik offline maupun digital																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Badan Promosi Pariwisata Daerah Kutai Kartanegara – Asosiasi usaha dan profesi pariwisata

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program pemasaran pariwisata	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan pengelola saluran pemasaran berbasis media offline dan aplikasi digital.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Badan Promosi Pariwisata Daerah Kutai kartanegara – Asosiasi usaha dan profesi pariwisata
12. Mengembangkan sistem informasi pariwisata berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mudah diakses untuk meningkatkan pelayanan kepada wisatawan.	Program aplikasi informatika	Pengadaan dan pemutakhiran sistem aplikasi berbasis teknologi informasi untuk wisatawan mendapatkan informasi dan memenuhi kebutuhan berwisata, seperti informasi terkini dan akurat tentang jumlah kunjungan, keluhan wisatawan dan penanganannya, serta apresiasi wisatawan terhadap produk pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang komunikasi dan informatika	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program aplikasi informatika	Pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk pengembangan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi untuk wisatawan mendapatkan informasi dan memenuhi kebutuhan berwisata																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang komunikasi dan informatika – Perguruan tinggi
	Program pemasaran pariwisata	Evaluasi pengoperasian sistem informasi pariwisata terpadu dan interaktif berbasis teknologi informasi dan komunikasi																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang komunikasi dan informatika	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – Perguruan tinggi
13. Mengembangkan pemasaran pariwisata Kutai kartanegara yang terpadu dan mengangkat nilai-nilai budaya khas Kutai Kartanegara.	Program pemasaran pariwisata	Rapat koordinasi dan persepakatan program pemasaran terintegrasi dengan dunia usaha, lembaga non pemerintah, dan komunitas																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara - Asosiasi usaha dan profesi pariwisata - Komunitas Kreatif

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program pemasaran pariwisata	Pembuatan media dan program pemasaran yang terintegrasi berbasis digital yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat bersama dengan dunia usaha, lembaga non pemerintah, dan komunitas kreatif																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara - Asosiasi usaha dan profesi pariwisata - Komunitas Kreatif
	Program pemasaran pariwisata	Penyelenggaraan forum komunikasi pemasaran dengan dunia usaha, lembaga non pemerintah, dan komunitas untuk membangun program promosi pariwisata yang efektif dan kreatif																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara - Asosiasi usaha dan profesi pariwisata - Komunitas Kreatif
	Program pemasaran pariwisata	Pemantauan dan evaluasi upaya pemasaran terintegrasi melalui Kerjasama dengan dunia usaha, lembaga non pemerintah dan komunitas																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara - Asosiasi usaha dan profesi pariwisata - Komunitas Kreatif

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
14. Mengembangkan jejaring pemasaran yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak untuk mempromosikan pariwisata Kutai Kartanegara di dalam maupun luar negeri	Program pemasaran pariwisata	Mengikuti berbagai forum pemasaran baik nasional maupun internasional untuk mempromosikan pariwisata Kutai Kartanegara													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara - Asosiasi usaha dan profesi pariwisata
	Program pemasaran pariwisata	Menyelenggarakan forum komunikasi pemasaran dengan dunia usaha, daerah lain, IKN, Pemerintah Pusat dan komunitas													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara - Asosiasi usaha dan profesi pariwisata
15. Mengembangkan basis data dan informasi kunjungan wisatawan ke Kutai Kartanegara berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mudah diakses oleh	Program pemasaran pariwisata	Penyusunan dan pemutakhiran basis data jumlah kunjungan dan profil wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara Kabupaten Kutai Kartanegara.													- BPS Kabupaten Kutai Kartanegara - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara - Asosiasi usaha pariwisata - Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
pelaku usaha dan masyarakat.	Program pemasaran pariwisata	Pelatihan dan pendampingan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kunjungan dan profil wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara kepada pengelola daya tarik wisata, kampung wisata, dan pengelola usaha pariwisata.																- BPS Kabupaten Kutai Kartanegara - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara - Asosiasi usaha pariwisata - Perguruan tinggi
	Program pemasaran pariwisata	Rapat koordinasi dan sinkronisasi basis data kunjungan wisnus dan wisman.																- BPS Kabupaten Kutai Kartanegara - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara - Asosiasi usaha pariwisata - Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
16. Mengembangkan sistem evaluasi pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi untuk mengomunikasikan dan mengevaluasi keberhasilan pemasaran pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Kutai Kartanegara dan para pelaku usaha pariwisata.	Program pemasaran pariwisata	Penyusunan dan penetapan mekanisme pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi untuk mengukur keberhasilan pemasaran pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan para pelaku usaha pariwisata.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara – Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi
	Program pemasaran pariwisata	Pembuatan, pemutakhiran, dan pemeliharaan sistem informasi untuk evaluasi pemasaran pariwisata																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara – Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi
	Program pemasaran pariwisata	Sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penggunaan sistem informasi untuk evaluasi pemasaran pariwisata																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara – Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	Program pemasaran pariwisata	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan dampak pengembangan sistem informasi evaluasi pemasaran pariwisata.													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara – Asosiasi usaha pariwisata – Perguruan tinggi

Tabel 4 Indikasi Program dan Kegiatan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
1. Mengembangkan sistem sertifikasi untuk kompetensi nasional dan internasional yang berkesinambungan bagi sumber daya manusia pariwisata.	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Penandatanganan MoU dengan lembaga sertifikasi nasional untuk sertifikasi bagi sumber daya manusia pada usaha pariwisata.														OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Lembaga sertifikasi kompetensi nasional
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Penyelenggaraan insentif untuk pelatihan dan pendampingan sertifikasi kompetensi di bidang kepariwisataan bagi sumber daya manusia pada usaha pariwisata.														OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang tenaga kerja - Asosiasi usaha dan profesi pariwisata - Lembaga sertifikasi kompetensi nasional
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Fasilitasi sertifikasi nasional dan internasional yang berkesinambungan bagi SDM usaha pariwisata.														OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang tenaga kerja - Asosiasi usaha dan profesi pariwisata - Lembaga sertifikasi kompetensi nasional

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
2. Mengembangkan mekanisme insentif untuk meningkatkan sertifikasi kompetensi berskala nasional dan internasional bagi sumber daya manusia pariwisata.	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Fasilitasi sertifikasi bagi SDM pariwisata perorangan dan pengelola desa wisata yang berprestasi													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang tenaga kerja – Asosiasi usaha dan profesi pariwisata - Lembaga sertifikasi kompetensi nasional
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Fasilitasi sertifikasi bagi SDM pariwisata di lingkungan pemerintahan yang berkomitmen pada pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang tenaga kerja – Asosiasi usaha dan profesi pariwisata - Lembaga sertifikasi kompetensi nasional
3. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah,	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Penandatanganan kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi dalam dan luar negeri untuk penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan bagi SDM pariwisata													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang kepariwisataan – Badan kepegawaian kabupaten Kutai kartanegara – Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
masyarakat dan usaha pariwisata	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pelaksanaan program pelatihan dan pendidikan bagi SDM pariwisata kabupaten Kutai Kartanegara																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Badan kepegawaian kabupaten Kutai kartanegara – Perguruan tinggi
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pemantauan dan evaluasi kerja sama dengan pendidikan tinggi dalam dan luar negeri dalam penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan bagi SDM pariwisata																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang kepariwisataan – Badan kepegawaian kabupaten Kutai kartanegara – Perguruan tinggi
4. Mengembangkan pembinaan dan pelatihan yang berkesinambungan di bidang perencanaan dan pengelolaan kepariwisataan berstandar internasional bagi sumber daya manusia di lingkungan pemerintah dan industri pariwisata.	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Penandatanganan MoU dengan perguruan tinggi untuk pelatihan perencanaan dan pengelolaan kepariwisataan berstandar internasional																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Asosiasi usaha dan profesi pariwisata - Perguruan tinggi - Lembaga sertifikasi kompetensi nasional
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Penyelenggaraan pelatihan dan pembinaan penyusunan perencanaan dan pengelolaan kepariwisataan bersatndar internasional bagi SDM pariwisata di																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Asosiasi usaha dan profesi pariwisata - Perguruan tinggi - Lembaga sertifikasi kompetensi nasional

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		lingkungan pemerintahan dan industri pariwisata																	
5. Meningkatkan kualitas berbasis kompetensi dan kinerja pada organisasi di lingkungan Pemerintah Kutai Kartanegara yang terkait dengan penyelenggaraan urusan kepariwisataan	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Diskusi peningkatan kapasitas dan kinerja organisasi berbasis kompetensi dan kinerja pada organisasi terkait kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang organisasi - Perguruan Tinggi
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pelatihan dan pendampingan peningkatan kapasitas dan kinerja organisasi berbasis kompetensi dan kinerja pada organisasi terkait kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang organisasi - Perguruan Tinggi
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pemantauan dan evaluasi peningkatan kapasitas dan kinerja organisasi berbasis kompetensi dan kinerja pada organisasi terkait kepariwisataan																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang organisasi - Perguruan Tinggi
6. Mendorong penguatan dan pengembangan organisasi usaha dan	Program pengembangan sumber daya	Fasilitasi pembentukan organisasi usaha dan																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara	- OPD Provinsi Kalimantan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
profesi pariwisata Kutai Kartanegara sebagai mitra utama dalam melakukan percepatan pembangunan kepariwisataan	pariwisata dan ekonomi kreatif	profesi pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara																bidang kepariwisataan	Timur bidang kepariwisataan - Asosiasi usaha dan profesi pariwisata Provinsi Kalimantan Timur
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Rapat koordinasi pengembangan organisasi usaha dan profesi pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai mitra utama dalam melakukan transformasi kepariwisataan																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Asosiasi usaha pariwisata - Asosiasi profesi pariwisata - Perguruan tinggi
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Penyusunan, penetapan, dan sosialisasi peta jalan tranformasi organisasi usaha dan profesi pariwisata.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Asosiasi usaha pariwisata - Asosiasi profesi pariwisata - Perguruan tinggi
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pelatihan pengembangan organisasi usaha dan profesi pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Asosiasi usaha dan profesi pariwisata
	Program pengembangan sumber daya	Pemantauan dan evaluasi penerapan peta jalan tranformasi																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara	- Asosiasi usaha pariwisata - Asosiasi profesi pariwisata

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	pariwisata dan ekonomi kreatif	organisasi usaha dan profesi pariwisata.																bidang kepariwisataan	- Perguruan tinggi
7. Mengembangkan program kolaboratif untuk percepatan pembangunan kepariwisataan Kutai Kartanegara yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Penyusunan, penetapan, dan sosialisasi peta jalan transformasi kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang organisasi - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perencanaan pembangunan - Asosiasi usaha dan profesi pariwisata - Perguruan tinggi
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pembentukan tim percepatan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang organisasi - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perencanaan pembangunan - Asosiasi usaha dan profesi pariwisata - Perguruan tinggi
	Program pengembangan	Dukungan pelaksanaan																OPD Kabupaten Kutai	- OPD Kabupaten Kutai

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
	sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	program percepatan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara																Kartanegara bidang kepariwisataan	Kartanegara bidang organisasi – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perencanaan pembangunan – Asosiasi usaha dan profesi pariwisata - Perguruan tinggi
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Evaluasi kinerja dan efektivitas pelaksanaan percepatan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang organisasi – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perencanaan pembangunan – Asosiasi usaha dan profesi pariwisata - Perguruan tinggi
8. Mengembangkan forum komunikasi dan koordinasi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media dalam	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Penyelenggaraan komunikasi dan koordinasi rutin antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat,																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Prov. Kalimantan Timur bidang kepariwisataan - OPD Kabupaten Kutai

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
rangka membangun keterpaduan program perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan.		akademisi, dan media untuk membangun keterpaduan program perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan.																	Kartanegara bidang perencanaan pembangunan - Asosiasi usaha dan profesi pariwisata Prov. Kalimantan Timur - Asosiasi usaha dan profesi pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara - Organisasi masyarakat terkait pariwisata
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Penyepakatan pembagian peran antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, organisasi masyarakat terkait pariwisata, serta organisasi usaha, media, dan profesi pariwisata dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Prov. Kalimantan Timur bidang kepariwisataan - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perencanaan pembangunan - Asosiasi usaha dan profesi pariwisata Prov. Kalimantan Timur

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara.																	- Asosiasi usaha dan profesi pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara - Organisasi masyarakat terkait pariwisata
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembagian peran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, organisasi masyarakat terkait pariwisata, serta organisasi usaha, media, dan profesi pariwisata dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Prov. Kalimantan Timur bidang kepariwisataan - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perencanaan pembangunan - Asosiasi usaha dan profesi pariwisata Prov. Kalimantan Timur - Asosiasi usaha dan profesi pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara - Organisasi masyarakat

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
																			terkait pariwisata
9. Mengembangkan mekanisme komunikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mengkomunikasikan pembangunan kepariwisataan daerah kepada masyarakat.	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengadaan, pembuatan, dan pemutakhiran aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana sosialisasi pembangunan kepariwisataan terpadu kepada masyarakat luas dan wisatawan.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang komunikasi dan informatika	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perencanaan pembangunan – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Evaluasi kinerja dan manfaat media komunikasi dan koordinasi aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana sosialisasi pembangunan kepariwisataan terpadu bagi masyarakat luas dan wisatawan.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang komunikasi dan informatika	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perencanaan pembangunan – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan
10. Mengembangkan basis data kepariwisataan terpadu dari desa sampai tingkat kabupaten yang lengkap, akurat, dan mutakhir berbasis teknologi informasi,	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pelatihan dan pendampingan penyusunan basis data kepariwisataan bagi pengelola daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, kampung wisata, Pemerintah																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– BPS Kabupaten Kutai Kartanegara – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang statistik

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
serta mudah diakses oleh masyarakat luas.		Kelurahan, dan Pemerintah Kecamatan.																	- Pemerintah Kecamatan - Perguruan tinggi
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pembuatan dan pemutakhiran basis data kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara berbasis teknologi informasi.																- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang komunikasi dan informatika	- BPS Kabupaten Kutai Kartanegara - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Kelurahan - Asosiasi usaha dan profesi pariwisata - Pengelola daya tarik wisata - Pengelola kampung wisata - Pengelola fasilitas pariwisata - Perguruan tinggi
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pelatihan dan pendampingan penggunaan sistem informasi data kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara bagi pengelola daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, kampung wisata, Pemerintah Kelurahan,																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang komunikasi dan informatika	- BPS Kabupaten Kutai Kartanegara - OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Kelurahan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		Pemerintah Kecamatan.																	– Asosiasi usaha dan profesi pariwisata – Perguruan tinggi
	Program penyelenggaraa n statistik sektoral	Pembuatan dan pemutakhiran buku elektronik Statistik Kepariwisataa n Kabupaten Kutai Kartanegara.																– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang statistic – BPS Kabupaten Kutai Kartanegara	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – Perguruan tinggi
11. Mengembangkan regulasi bagi penguatan tata kelola kepariwisataan dalam membangun sinergi program bersama antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media untuk mempercepat pembangunan kepariwisataan Kutai Kartanegara.	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Penyusunan, penetapan peraturan, dan sosialisasi tata kelola percepatan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perencanaan pembangunan – Asosiasi usaha dan profesi pariwisata – Perguruan Tinggi – Masyarakat – Media
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Sinkronisasi dan pembagian peran antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media dalam tata																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perencanaan pembangunan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		kelola percepatan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara.																	- Asosiasi usaha dan profesi pariwisata - Perguruan Tinggi - Masyarakat - Media
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tata kelola percepatan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang perencanaan pembangunan - Asosiasi usaha dan profesi pariwisata - Perguruan Tinggi - Masyarakat - Media
12. Mengembangkan mekanisme operasional bagi pengembangan dan pengelolaan produk pariwisata, pengelolaan pengunjung, lingkungan, dan dampak pariwisata sesuai dengan pedoman pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan.	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Sosialisasi Pedoman dan Sertifikasi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Perguruan tinggi
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Penyusunan dan penetapan mekanisme operasional bagi pengembangan dan pengelolaan produk pariwisata, pengelolaan pengunjung, lingkungan, dan dampak pariwisata																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	- Bagian Hukum Pemkab Kutai Kartanegara - Asosiasi usaha dan profesi pariwisata - Perguruan tinggi

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		sesuai dengan pedoman pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan.																	
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pelatihan dan pendampingan penerapan mekanisme operasional pengembangan dan pengelolaan produk pariwisata bagi pengelola daya tarik wisata, kampung wisata, dan fasilitas pariwisata.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Asosiasi usaha dan profesi pariwisata – Perguruan tinggi
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pelatihan dan pendampingan penyusunan rencana pengelolaan pengunjung, lingkungan, dan dampak pariwisata bagi pengelola daya tarik wisata, kampung wisata, dan fasilitas pariwisata.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Asosiasi usaha dan profesi pariwisata – Perguruan tinggi
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Fasilitasi sertifikasi destinasi pariwisata berkelanjutan.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Kementerian bidang kepariwisataan – OPD Provinsi Kalimantan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
																			Timur bidang kepariwisataan – Asosiasi usaha dan profesi pariwisata – Perguruan tinggi
13. Mengembangkan regulasi bagi pengelolaan krisis kepariwisataan dan peningkatan ketahanan pariwisata Kutai Kartanegara.	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Penyusunan, penetapan, dan sosialisasi Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang pengelolaan krisis kepariwisataan dan peningkatan ketahanan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bidang hukum – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang penanggulangan bencana – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kesehatan – Asosiasi usaha dan profesi pariwisata
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Penyusunan, penetapan, dan sosialisasi Peraturan Bupati tentang tim dan media pengelola krisis kepariwisataan dan ketahanan pariwisata																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bidang hukum – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		Kabupaten Kutai Kartanegara.														penanggulangan bencana – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kesehatan – Asosiasi usaha dan profesi pariwisata
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Penyediaan peralatan dan perlengkapan dalam mendukung pengelolaan krisis kepariwisataan dan peningkatan ketahanan pariwisata.													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang penanggulangan bencana – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kesehatan – Asosiasi usaha dan profesi pariwisata
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan krisis kepariwisataan dan peningkatan ketahanan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.													OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang penanggulangan bencana – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
																			bidang kesehatan – Asosiasi usaha dan profesi pariwisata
14. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi terpadu pengelolaan krisis kepariwisataan sebagai upaya memitigasi bencana alam, sosial, politik, dan bahaya kesehatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Rapat koordinasi dalam rangka pengembangan sistem informasi dan komunikasi terpadu pengelolaan krisis kepariwisataan berbasis teknologi informasi dan komunikasi																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang komunikasi dan informatika – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang penanggulangan bencana – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kesehatan – Asosiasi usaha dan profesi pariwisata
	Program aplikasi informatika	Pembuatan dan pemutakhiran sistem informasi dan komunikasi pengelolaan krisis kepariwisataan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang komunikasi dan informatika	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
																			penanggulangan bencana – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kesehatan – Asosiasi usaha dan profesi pariwisata
	Program aplikasi informatika	Pengadaan peralatan dan perlengkapan sistem informasi dan komunikasi terpadu pengelolaan krisis kepariwisataan berbasis teknologi informasi dan komunikasi																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang komunikasi dan informatika	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang penanggulangan bencana – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kesehatan – Asosiasi usaha dan profesi pariwisata
15. Mengembangkan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Rapat koordinasi dan komunikasi tentang pengelolaan krisis kepariwisataan dengan Pemerintah																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– Kementerian pariwisata – OPD Provinsi Kalimantan Timur bidang

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
Kalimantan Timur, IKN, dan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan krisis kepariwisataan.		Provinsi Kalimantan Timur, IKN, dan Pemerintah Pusat.																	penanggulangan bencana – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang penanggulangan bencana – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kesehatan
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pelatihan, pendampingan, dan simulasi pembagian peran dan koordinasi dalam pengelolaan krisis kepariwisataan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, IKN, dan Pemerintah Pusat																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang penanggulangan bencana – OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kesehatan – Asosiasi usaha dan profesi pariwisata
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Evaluasi pelaksanaan komunikasi dan koordinasi pengelolaan krisis kepariwisataan antara Pemerintah																OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang penanggulangan bencana

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, IKN, dan Pemerintah Pusat.															– OPD Kabupaten Kutai Kartanegara bidang kesehatan – Asosiasi usaha dan profesi pariwisata